SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah;

b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta menjadi tanggung jawab perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tentang Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 147);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/PD untuk mencapai sasaran.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

(1) Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2027, terdiri dari:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum kondisi Daerah;
   c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
   f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
   g. penutup.

(2) Sistematika RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2027 berfungsi sebagai:
    a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
    b. pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2027.
(2) Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD menggunakan RKPD Tahun 2027, untuk:
    a. menyusun rancangan akhir Renja PD; dan
    b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-SKPD.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
a. persiapan penyusunan RKPD;
b. penyusunan rancangan awal RKPD;
c. penyusunan rancangan RKPD;
d. pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. penetapan RKPD.

Pasal 6

Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja PD berkenaan dengan kesesuaian RKPD, Renstra PD serta tugas pokok dan fungsi PD.

Pasal 7

(1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:
    a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
(2) Ketentuan mengenai Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Prioritas pembangunan Daerah disusun berdasarkan tema pembangunan Tahun 2027 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
(2) Prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Rencana program prioritas pembangunan Daerah Tahun 2027, dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Setiap Kepala PD mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Bupati melalui Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengendalian kebijakan dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah dan program PD yang ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, program strategis provinsi dan nasional;
    b. pengendalian pelaksanaan dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2027; dan
    c. evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2027.
(3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2027.
(4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2027.
(5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2027.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ILANNUR FITRI, S.H., LLM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19800714 201001 2 019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 ini dapat terselesaikan.

Dalam skema perencanaan pembangunan daerah, RKPD merupakan suatu mata rantai yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dengan memuat skala prioritas dari rencana program beserta alokasi sumber pembiayaan yang relevan. Setiap sasaran pembangunan akan diperjuangkan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Upaya pembangunan yang dilaksanakan disusun menurut urgensi serta unggulan daerah dalam mencapai tujuan Kabupaten Belitung Timur secara menyeluruh.

Dengan tekad yang teguh dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, kami berharap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur yang telah disusun dengan penuh perhatian ini akan menjadi panduan yang efektif dalam mengarahkan upaya pembangunan daerah. Semoga melalui implementasi RKPD ini, Kabupaten Belitung Timur dapat meraih impian yang membanggakan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan dan kemajuan seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Diucapkan terima kasih atas partisipasi serta dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan **Belitung Timur Nyaman dan Berkemajuan**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GRAFIK ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 7
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 9
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **13**
2.1 KONDISI UMUM DAERAH 13
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 DAN REALISASI RPJMD 146
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 196
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **200**
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 200
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 212
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **234**
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 234
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 254
4.3 PENYELARASAN RKPD TAHUN 2025 DENGAN RPJPD TAHAP I TAHUN 2025-2029 481
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **485**
5.1 KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2026 485
5.2 RUMUSAN USULAN HASIL PENELAHAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 607
5.3 RUMUSAN USULAN HASIL ASPIRASI MASYARAKAT 734
5.4 URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RKPD 2026 783
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH **785**
6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 785
6.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 794
6.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 829
BAB VII PENUTUP **845**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Belitung Timur 13
Tabel 2. 2 Topografi Kabupaten Belitung Timur 15
Tabel 2. 3 Struktur Geologi Kabupaten Belitung Timur 16
Tabel 2. 4 Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 17
Tabel 2. 5 Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Matahari di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 20
Tabel 2. 6 Klasifikasi Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 20
Tabel 2. 7 Luasan Kawasan Budidaya di Kecamatan Kabupaten Belitung Timur 24
Tabel 2. 8 Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Belitung Timur 24
Tabel 2. 9 Luasan Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi 25
Tabel 2. 10 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25
Tabel 2. 11 Luasan Kawasan Bahaya Kebakaran Hutan Kabupaten Belitung Timur 27
Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 28
Tabel 2. 13 Jumlah Rumah Tangga / Kepala Keluarga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 28
Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 28
Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Semester II Tahun 2023 29
Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan Kabupaten Belitung Timur Semester II Tahun 2023 29
Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Agama Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 32
Tabel 2. 18 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 33
Tabel 2. 19 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022 34
Tabel 2. 20 PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2018-2023 34
Tabel 2. 21 PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2018-2023 35
Tabel 2. 22 Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018 – 2023 36
Tabel 2. 23 Nilai Indeks SLQ di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 37
Tabel 2. 24 Nilai Indeks LQ Dinamis (DLQ) di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 38
Tabel 2. 25 Klasifikasi Sektor Berdasarkan Nilai SLQ dan DLQ di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 39
Tabel 2. 26 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Belitung Timur 2019-2023 (Juta Rupiah) 40
Tabel 2. 27 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung Timur (Ribu Rupiah/orang/tahun) Tahun 2018 – 2023 41
Tabel 2. 28 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Belitung Timur, 2018-2023 41
Tabel 2. 29 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023 43
Tabel 2. 30 Capaian Dimensi Pembentuk IPM Kabupaten Belitung Timur 44
Tabel 2. 31 Capaian Komposit Pembangunan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003 47
Tabel 2. 32 Perkembangan Gedung Kesenian/Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya Berupa Panggung Hiburan Kabupaten Belitung Timur 51
Tabel 2. 33 Sanggar Kesenian Tradisional Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 52
Tabel 2. 34 Perkembangan Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Belitung Timur 54
Tabel 2. 35 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Belitung Timur 54
Tabel 2. 36 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 56
Tabel 2. 37 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan 56
Tabel 2. 38 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 57
Tabel 2. 39 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan 59
Tabel 2. 40 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 60
Tabel 2. 41 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 60
Tabel 2. 42 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 61
Tabel 2. 43 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 61
Tabel 2. 44 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 62
Tabel 2. 45 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Mayarakat 62
Tabel 2. 46 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 63
Tabel 2. 47 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial 63
Tabel 2. 48 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 64
Tabel 2. 49 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 65
Tabel 2. 50 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 65
Tabel 2. 51 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 66
Tabel 2. 52 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 66

Tabel 2. 53 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 67
Tabel 2. 54 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 67
Tabel 2. 55 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 68
Tabel 2. 56 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 69
Tabel 2. 57 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 69
Tabel 2. 58 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 70
Tabel 2. 59 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 70
Tabel 2. 60 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 71
Tabel 2. 61 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 71
Tabel 2. 62 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 72
Tabel 2. 63 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 72
Tabel 2. 64 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 73
Tabel 2. 65 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 73
Tabel 2. 66 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 74
Tabel 2. 67 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 74
Tabel 2. 68 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 75
Tabel 2. 69 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 75
Tabel 2. 70 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 76
Tabel 2. 71 Kinerja Daerah Fungsi Pendukung Pemerintahan Sekretariat Daerah 76
Tabel 2. 72 Kinerja Daerah Fungsi Pendukung Pemerintahan Sekretariat DPRD 77
Tabel 2. 73 Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan 77
Tabel 2. 74 Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Keuangan 78
Tabel 2. 75 Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 78
Tabel 2. 76 Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan 79
Tabel 2. 77 Kinerja Daerah Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah 79
Tabel 2. 78 Kinerja Pemerintahan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik 80
Tabel 2. 79 Kinerja Pemerintahan Unsur Kewilayahan Pada Kecamatan 80
Tabel 2. 80 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 82
Tabel 2. 81 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 84
Tabel 2. 82 Pencapaian Skor IDSD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung Tahun 2022 99
Tabel 2. 83 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 103
Tabel 2. 84 PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 104
Tabel 2. 85 PDRB Menurut Pengeluaran Kab.Belitung Timur Tahun 2023 107
Tabel 2. 86 Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan 107
Tabel 2. 87 Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Irigasi Kabupaten Belitung Timur 111
Tabel 2. 88 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang: Rencana Pola Ruang dengan Penutupan Lahan 114
Tabel 2. 89 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang: Rencana Pola Ruang dengan Penutupan Lahan 116
Tabel 2. 90 Persentase Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kabupaten Belitung Timur 119
Tabel 2. 91 Data Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Kabupaten Belitung Timur 121
Tabel 2. 92 Data Investor Baru Tahun 2022 123
Tabel 2. 93 Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Belitung Timur 124
Tabel 2. 94 Luas Area Tanaman dan Jumlah Produksi Perkebunan di Kabupaten Belitung Timur 124
Tabel 2. 95 Jumlah Populasi dan Produksi Ternak dan Unggas di Kabupaten Belitung Timur 125
Tabel 2. 96 Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Belitung Timur 125
Tabel 2. 97 Pariwisata Kabupaten Belitung Timur 126
Tabel 2. 98 Jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Resor di Kabupaten Belitung Timur 127
Tabel 2. 99 Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian di Kabupaten Belitung Timur 127
Tabel 2. 100 Jumlah Penerbitan Izin Kabupaten Belitung Timur 128
Tabel 2. 101 Rekap Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Belitung Timur 128
Tabel 2. 102 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 129
Tabel 2. 103 Bukan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 130
Tabel 2. 104 Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas menurut Jenis Kegiatan dan Kelamin di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 130
Tabel 2. 105 Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 131
Tabel 2. 106 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Belitung Timur 132
Tabel 2. 107 Pembagian TPB Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan 134
Tabel 2. 108 Pencapaian TPB Berdasarkan Pengelompokan Tujuan 136
Tabel 2. 109 Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan 137
Tabel 2. 110 Pencapaian Indikator TPB di Lembaga Pemerintah pada Kabupaten Belitung Timur 138
Tabel 2. 111 Pencapaian Indikator TPB di Kabupaten Belitung Timur pada Pilar Sosial 139

Tabel 2. 112 Pencapaian Indikator TPB di Kabupaten Belitung Timur pada Pilar Pembangunan Ekonomi 141
Tabel 2. 113 Pencapaian indikator TPB di Kabupaten Belitung Timur pada Pilar Pembangunan Lingkungan 142
Tabel 2. 114 Pencapaian Indikator TPB di Kabupaten Belitung Timur pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 144
Tabel 2. 115 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan dan Target Kinerja Output Program Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 148
Tabel 2. 116 Kode Capaian beserta Status Capaian Kinerja Tahunan dan Status Capaian Kinerja RPJMD 150
Tabel 2. 117 Capaian Target RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 151

Tabel 3. 1 Kondisi dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Belitung Timur 206
Tabel 3. 2 PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 209
Tabel 3. 3 Rincian Anggaran Pendapatan Daerah 214
Tabel 3. 4 Rincian Anggaran pada Komponen Pendapatan Asli Daerah 215
Tabel 3. 5 Realiasasi Pendapatan pada Komponen Pendapatan Asli Daerah 215
Tabel 3. 6 Rincian Anggaran Pendapatan Transfer 217
Tabel 3. 7 Anggaran Pendapatan Lain-Lain PD yang Sah 220
Tabel 3. 8 Anggaran Belanja Kabupaten Belitung Timur 220
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Belitung Timur 221
Tabel 3. 10 Anggaran Pembiayaan Kabupaten Belitung Timur 222
Tabel 3. 11 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Belitung Timur 222
Tabel 3. 12 Integrasi Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Belitung Timur 223
Tabel 3. 13 Pendapatan Asli Daerah 226
Tabel 3. 14 Proyeksi Pendapatan Transfer 227
Tabel 3. 15 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 228
Tabel 3. 16 Alokasi Pagu Belanja Wajib 230
Tabel 3. 17 Rincian Proyeksi Belanja Daerah 232
Tabel 3. 18 Proyeksi Pembiayaan Daerah 233

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 238
Tabel 4. 2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 241
Tabel 4. 3 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Sstrategis dan Prioritas Daerah 255
Tabel 4. 4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran Pembangunan Dearah (RPJMD) Tahun Rencana 257
Tabel 4. 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran, Indikator dan Target (RPJMD) Tahun Rencana 267
Tabel 4. 6 Intervensi Prioritas Pembangunan Nasional 285
Tabel 4. 7 Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 288
Tabel 4. 8 Interkoneksi Prioritas Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Prioritas Nasional 289
Tabel 4. 9 Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPD 2023–2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 299
Tabel 4. 10 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 301
Tabel 4. 11 Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 301
Tabel 4. 12 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 301
Tabel 4. 13 Interkoneksi Prioritas Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 303
Tabel 4. 14 Target Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 336
Tabel 4. 15 Fokus Daerah Tahun 2025 343
Tabel 4. 16 Inovasi Daerah 408
Tabel 4. 17 Integrasi Program Inovasi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur 417
Tabel 4. 18 Konsistensi Target Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD Tahun Pelaksanaan 456
Tabel 4. 19 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran, Indikator, dan Target RPJPD Tahun Pertama Tahap I 482

Tabel 5. 1 Kerangka Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 485
Tabel 5. 2 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 487
Tabel 5. 3 Dukungan Anggaran terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 547
Tabel 5. 4 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 548
Tabel 5. 5 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 583

Tabel 5. 6 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025 605
Tabel 5. 7 Rumusan Usulan Hasil Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 607
Tabel 5. 8 Rumusan Usulan Hasil Aspirasi Masyarakat-Musrenbang Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 734
Tabel 5. 9 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD 2025 Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 783

Tabel 6. 1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Belitung Timur 787
Tabel 6. 2 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Belitung Timur 795
Tabel 6. 3 Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 831

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Debit Run-off Belitung Timur Tahun 2019 19
Grafik 2. 2 Kondisi Klimatologi Kabupaten Belitung Timur 20
Grafik 2. 3 Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2023 40
Grafik 2. 4 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku Tahun 2019 – 2023 41
Grafik 2. 5 Angkatan Kerja dan Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023 42
Grafik 2. 6 Perbandingan Gini Rasio Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 - 2023 43
Grafik 2. 7 Perkembangan IPM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 – 2023 45
Grafik 2. 8 IPM Tahun 2023 per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 45
Grafik 2. 9 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 – 2023 46
Grafik 2. 10 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Belitung Timur 46
Grafik 2. 11 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Belitung Timur (Ribu Jiwa) 48
Grafik 2. 12 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 48
Grafik 2. 13 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur (Rupiah) 49
Grafik 2. 14 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur 50
Grafik 2. 15 Posisi Relatif Keparahan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur 51
Grafik 2. 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur 102
Grafik 2. 17 Laju Pertumbuhan PDRB Tertinggi Tahun 2023 105
Grafik 2. 18 Distribusi PDRB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 105
Grafik 2. 19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur 106
Grafik 2. 20 Nilai Tukar Petani Kabupaten Belitung Timur 108
Grafik 2. 21 NTP, It dan Ib Kabupaten Belitung Timur 109
Grafik 2. 22 Indeks Harga yang Diterima Petani (It) Kabupaten Belitung Timur 109
Grafik 2. 23 Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) Kabupaten Belitung Timur 110
Grafik 2. 24 Grafik Realisasi Investasi Tahun 2022 123
Grafik 2. 25 Pencapaian Indikator TPB di Lembaga Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 139
Grafik 2. 26 Distribusi Pencapaian TPB pada Pilar Sosial di Kabupaten Belitung Timur 140
Grafik 2. 27 Distribusi pencapaian TPB pada pilar ekonomi di Kabupaten Belitung Timur 141
Grafik 2. 28 Kontribusi Lembaga Pemerintah di Kabupaten Belitung Timur dalam Pencapaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan 143
Grafik 2. 29 Kontribusi Lembaga Pemerintah dalam Pencapaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 145
Grafik 2. 30 Jumlah Perangkat Daerah berdasarkan Predikat Kinerja Kabupaten Belitung Timur Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 146
Grafik 2. 31 Persentase Realisasi Anggaran, Kegiaran dan Capaian Rata-Rata Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023 147

Grafik 3. 1 Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur 214
Grafik 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur 215
Grafik 3. 3 Realisasi Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung Timur 216
Grafik 3. 4 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur 217
Grafik 3. 5 Realisasi DanaTransfer Pemerintah Pusat 218
Grafik 3. 6 Perbandingan Realisasi Dana Transfer Pusat 218
Grafik 3. 7 Anggaran Pendapatan Lain-Lain PD yang Sah 220
Grafik 3. 8 Realisasi Belanja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023 221

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Dokumen RKPD 2
Gambar 1. 2 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 8
Gambar 1. 3 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 8

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Belitung Timur 14
Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Belitung Timur 15
Gambar 2. 3 Kondisi Geologi Kabupaten Belitung Timur 16
Gambar 2. 4 Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur 22
Gambar 2. 5 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Belitung Timur 26
Gambar 2. 6 Skor IDSD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 99
Gambar 2. 7 Peta Ketidaksesuaian Lahan Dengan Pola Ruang 118

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan amanah Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyusunan RKPD ini juga diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan target visi yang akan dicapai dalam tempo 20 tahun, lalu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target visi yang akan dicapai dalam tempo waktu selama 5 (lima) tahun, selanjutnya dokumen RPJMD dituangkan kembali melalui skema pencapaian target tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 Pasal 2 ayat 1 disebutkan "*Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025*". Dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2027 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, penyusunan RKPD juga memperhatikan pelaksanaan pembangunan Kabupaten dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan

pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan/kewilayahan dalam perencanaan.

RKPD Tahun 2027 yang disusun memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program unggulan dan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian berkeadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan. RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan untuk memastikan agar tujuan pembangunan tahun berkenaan serta seluruh target pembangunan yang ditetapkan dapat dicapai.

Sesuai Visi pada RPJMD Kabupaten Belitung Timur di Tahun ke-2 dapat diterjemahkan dan dijabarkan dengan "**Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Produktif, Berakhlak, Berbudaya, dan Bahagia**". Dimana cara agar masyarakat dapat sejahtera adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia. Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Belitung Timur yang masih perlu ada peningkatan, memerlukan dukungan dari Pemerintah. Fokus pada periode ini adalah meningkatkan dan memeratakan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta budaya yang mencakup seluruh lapisan masyarakat seperti: masyarakat pra-sejahtera dan pekerja rentan dengan berlandaskan asas inklusivitas dan keadilan.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2027, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota memedomani arah kebijakan nasional/program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2027 memperhatikan tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut yang dijabarkan pada permasalahan daerah, maka perlu dilakukan pengelompokan dan penajaman permasalahan menurut bidang urusan pemerintahan guna menentukan permasalahan yang bersifat utama dan mendesak sebagai dasar dalam penetapan isu strategis daerah. Adapun permasalahan utama dan mendesak masih menjadi catatan di Tahun 2027. Berikut gambaran sekilas mengenai kondisi eksternal yang memengaruhi Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

1. Sistem layanan digital pemerintah daerah masih berjalan secara parsial, integrasi data antar-perangkat daerah yang terbatas, standar keamanan data yang belum seragam, serta kualitas dan pemerataan konektivitas digital yang belum optimal
2. Kompetensi ASN belum sepenuhnya mendukung kebutuhan tata kelola modern dan digital.
3. Pengawasan internal belum mampu secara optimal mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan.
4. Data pemerintah daerah belum sepenuhnya akurat, mutakhir, dan terpadu dalam satu sistem.
5. Belum Optimalnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Belum optimalnya integrasi layanan informasi dan layanan pengaduan publik, ditandai dengan belum tersedianya satu nomor layanan terpadu
8. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (Tahun 2025 = 9,03 Tahun)
9. Belum optimalnya capaian SPM urusan pendidikan (tahun 2024 = 83,48%)

10. Kualitas hasil belajar peserta didik belum optimal, dan belum meratanya pembinaan kompetensi siswa (Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi pada tahun 2024 = 30,60%)
11. Masih tingginya angka prevalensi stunting (tahun 2024 = 17,1%)
12. Belum optimalnya capaian SPM Urusan kesehatan (tahun 2024 = 90,71%)
13. Keterbatasan tenaga kesehatan dan distribusinya (Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 = 71%)
14. Angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur masih diatas rata-rata Provinsi Bangka Belitung (tahun 2025 = 6,69%)
15. Tingginya Garis Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur (Tahun 2025 = Rp. 925.729)
16. Belum optimalnya capaian SPM Urusan Sosial (tahun 2024 = 88,76%)
17. Belum optimalnya produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan berbasis digital
18. Belum optimalnya pengembangan dan daya saing sektor ekonomi kreatif berbasis digital.
19. Belum optimalnya konektivitas transportasi antar wilayah Kecamatan Kabupaten Belitung Timur
20. Keterbatasan ruang terbuka publik yang layak
21. Belum meratanya cakupan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur dasar permukiman
22. Masih adanya rumah tidak layak huni
23. Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan
24. Belum optimal upaya pengendalian kualitas lingkungan

Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2027 juga memperhatikan batas waktu lima (5) Tahun Pemerintah Daerah untuk mematuhi mandatori pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), dimana Pemerintah Daerah tidak menganggarkan belanja pegawai melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total APBD (diluar TPG/Tamsil) dan juga wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Ketentuan ini merupakan batasan yang sangat jelas bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengharuskan daerah melakukan efisiensi pada belanja pegawai dimaksud, dengan maksud agar anggaran belanja Pemerintah Daerah lebih banyak dialokasikan untuk masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sesuai ketentuan pasal 2 Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 pada Pasal 4 Ayat 2 "RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" terdiri atas:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. Prioritas pembangunan daerah;
3. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
4. Arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema, sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional, program prioritas, program hasil terbaik cepat, kegiatan prioritas utama, Proyek Strategis Nasional, dan program kerja prioritas nasional;
5. Program Strategis Nasional; dan
6. Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2027, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri 14 Tahun 2026 Penyusunan RKPD 2027 mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menerapkan beberapa pendekatan. Ditinjau dari orientasi prosesnya, penyusunan RKPD Tahun 2027 menggunakan pendekatan ***teknokratik, partisipatif,*** *atas-bawah (**top-down**) dan bawah-atas (**bottom-up**).* Masing-masing pendekatan memiliki tujuan berbeda sebagai berikut adalah:

1. Pendekatan Teknokratik, dengan pendekatan ini penyusunan RKPD 2027 dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah termasuk didalamnya melakukan

proses analisis sektoral dan spasial untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Pendekatan Partisipatif, dengan pendekatan ini penyusunan RKPD 2027 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis melalui forum konsultasi publik dan musrenbang. Musrenbang secara partisipatif mulai dilakukan dari tingkat desa/kelurahan yang selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai prosedur yang berlaku, forum partisipatif ini dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan hasilnya diformulasikan dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghimpun usulan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di
3. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan/desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga ke tingkat nasional. Penyusunan RKPD 2027 tidak dilakukan dengan pendekatan politis dikarenakan penyusunannya yang didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.

Selain itu dari orientasi substansinya penyusunan RKPD Tahun 2027 menggunakan pendekatan *Holistik-Tematik, Integratif* dan *Spasial*.

1. Pendekatan Holistik-Tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Penguatan pendekatan Holistik-Tematik ini dilakukan melalui penanganan secara menyeluruh, terfokus dan tuntas pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas.

2. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Penguatan pendekatan integratif dilakukan melalui keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional.
3. Penguatan pendekatan spasial dilakukan melalui perencanaan kegiatan prioritas yang berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Penyusunan RKPD 2027 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan dilakukan dengan pendekatan ***Money Follows Program*** melalui penganggaran berbasis kinerja. Penguatan implementasi Money Follows Program dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan penajaman integrasi sumber pendanaan dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Namun bila ditinjau lebih jauh berdasarkan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformarsi Birokrasi, saat ini pendekatan Money Follows Program tidaklah cukup.

Sesuai arahan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 maka proses penyusunan RKPD 2027 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusunan RKPD, Orientasi, Penyusunan agenda kerja dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD;

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2027 Penyusunan Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belitung Timur 2024-2029, RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045, Musrenbang desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik, Penyampaian SE KDH kepada Kepala Perangkat Daerah tentang penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan RKPD 2027 Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD bedasarkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang sudah diverifikasi, hasil telaah terhadap RKPD Provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional. Penyusunan Rancangan RKPD 2027 dilaksanakan pada awal bulan Maret 2026. Rancangan RKPD akan menjadi bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten;
4. Pelaksanaan Musrenbang
    a. Penyampaian Pokir DPRD Reses I pada Minggu Pertama Bulan Februari Tahun 2026 sedangkan Reses II disampaikan pada Tanggal 05 Mei 2026;
    b. Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 di tingkat Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan. Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 4–13 Februari 2026 pada 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Penetapan agenda pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan ini menimbang pelaksanaan musrenbang desa dan musrenbang RKPD di kabupaten, diatur sedemikian rupa sesuai dengan agenda penyusunan 2027;
    c. Penyampaian Surat Edaran (SE) Kepala Daerah (KDH) kepada Kepala Perangkat Daerah tentang penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah Nomor : 000.7.2.4/6/SE/BUPATI/2026 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 tanggal 10 Februari 2026;

d. Pelaksanaan Rakortekbang Provinsi dilaksanakan tanggal 16 – 26 Maret Tahun 2026.
e. Musrenbang RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 adalah Musrenbang RKPD di Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 30 bulan Maret 2026, melalui pembahasan desk untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program kegiatan pagu indikatif indikator dan target kinerja serta lokus kegiatan. Seluruh proses musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2027 dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dengan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan menteri dalam negeri Nomor 90 tahun 2019.
f. Dan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi pada tanggal 15 April 2026;

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
   a. Penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara (BA) Kespekatan Musrenbang tanggal 30 Maret Tahun 2026;
      - Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kabupaten. Rancangan Akhir RKPD dibahas bersama Sekretaris Daerah dan seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah sudah diakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dilaksanakan paling lambat bulan Mei 2026.
   b. Penyelesaian Ranhir RKPD pada akhir Mei 2026;
   c. Pelaksanaan fasilitasi rancangan Pergub dan Perbup/Perwali Perbup awal Juni 2026;
6. Penetapan RKPD Kabupaten 2027 Rancangan Akhir RKPD yang sudah dibahas bersama Sekretaris Daerah dan seluruh Perangkat Daerah menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

(PERKADA) tentang RKPD 2027, Rancangan PERKADA diajukan ke Gubernur untuk difasilitasi. Dan pembahasan Fasilitasi dilaksanakan tanggal 25 Juni 2026;

- Rancangan PERKADA yang sudah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi oleh Gubernur disampaikan kepada Bupati/wali kota untuk menetapkan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPD Provinsi Tahun 2027 ditetapkan atau minggu pertama bulan Juli Tahun 2026.
- Bupati/wali kota menyampaikan Perbup tentang RKPD kabupaten Tahun 2027 atau Perwali tentang RKPD kota Tahun 2027 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perbup/Perwali tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 ditetapkan.

Secara lengkap proses dan tahapan pelaksanaan penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2026 dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Dokumen RKPD

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomro 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014- 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan Taman Bumi (GEOPARK);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2027 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 Nomor 6 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 140);
29. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 Nomor 21).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang rasional, akuntabel, komprehensif, dan partisipatif sebagai panduan kerja bagi seluruh instansi/Perangkat Daerah.
2. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan Nasional dan Daerah, dan;

Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 adalah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berupa:

1. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Belitung Timur dan APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027;
2. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2027;
3. Sebagai pedoman bagi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta atau institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027.
4. Sebagai instrument evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi:

1. Latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RKPD Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RKPD.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing- masing Bab dalam RKPD Tahun 2027.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum daerah yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja daerah berupa IKU dan IKD Tahun 2025 (capaian tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian program, kegiatan, subkegiatan cukup dimuat dalam laporan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
3. Evaluasi capaian SPM tahun 2023-2025.
4. Rumusan permasalahan dan isu strategis Tahun 2027 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, evaluasi hasil RKPD Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
5. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD, yang selaras dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah.
6. Inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Penyajian data didasarkan pada e-walidata SIPD dan sumber data lainnya.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran keuangan daerah yang meliputi:

1. Arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran di daerah.
2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025.
3. Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan proyeksi dalam RPJMD Tahun 20252029, kinerja keuangan tahun 2023-2025, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis (proyeksi keuangan tidak harus sama dengan RPJMD Tahun 2025-2029).
4. Pendanaan non-APBD.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran RKPD (wajib sama dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029).

2. Penentuan target tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 (target IKU/IKD dapat melebihi/berkurang dari target RPJMD Tahun 2025-2029).
3. Tema dan fokus pembangunan yang didasarkan pada penahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tema dan fokus RKP Tahun 2027.
4. Prioritas Pembangunan Daerah adalah focus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
5. Prioritas Pembangunan Daerah mempertimbangkan ketercapaian target indikator tujuan dan sasaran (IKU/IKD), tema dan fokus pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.
6. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, tema RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.
7. Program prioritas RKPD Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan evaluasi efektivitas program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga sudah diselaraskan dengan RKP 2027, tema RKPD 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM, dan tematik lainnya sesuai konteks daerah.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.

BAB VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Belitung Timur merupakan salah 1 (satu) dari 7 (tujuh) Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 dengan ibukota Manggar dan merupakan satu kesatuan wilayah daratan dengan Kabupaten Belitung yang dipisahkan oleh wilayah daratan dan terletak di Pulau Belitung. Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah 17.967,93 km^2 yang terdiri dari luas darat 2.506,90km2 dan luas wilayah laut 15.461,03 km^2. Kabupaten Belitung Timur terbagi dalam 7 (tujuh) kecamatan dengan 39 (Tigapuluh Sembilan) desa. Selain itu kabupaten Belitung Timur berada pada posisi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kabupaten Belitung

Sebelah Timur : Selat Karimata

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Sebelah Utara : Laut Natuna

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Luas (km2)	Persentase
1	Manggar	229,00	9,13
2	Damar	236,90	9,45
3	Kelapa Kampit	498,50	19,89
4	Gantung	546,30	21,79
5	Simpang Renggiang	390,70	15,58
6	Simpang Pesak	362,20	14,45
7	Dendang	243,30	9,71
T O T A L		2.506,90	100

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034

Secara geografis, batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada gambar peta berikut ini:



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2026

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Belitung Timur terletak diantara $107^{O}45'108^{O}18'$ Bujur Timur dan $02^{0}30'-03^{0}15'$ Lintang Selatan. Posisi geografis Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut dengan luas mencapai 15.461,03 km^2.

2.1.1.3 Topografi

Berdasarkan Peta Topografi, keadaan alam Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-50 mdpl dengan luas 248.892,51 Ha, Ketinggian antara 50-200 mdpl seluas 9.557,08 Ha dan Ketinggian 200-500 mdpl seluas 913,76 ha.

Untuk lebih jelasnya kondisi topografi Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Topografi Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Ketinggian		
		< 50 m	50 - 200 m	200 - 500 m
1	Kelapa Kampit	51688,3 ha	1349,6 ha	66,5 ha
2	Damar	21618,9 ha	1332,1 ha	429,1 ha
3	Simpang Renggiang	23872,3 ha	543,3 ha	3,6 ha
4	Manggar	16397,9 ha	223,2 ha	2,5 ha
5	Gantung	59106,8 ha	1346,3 ha	1,6 ha

No	Kecamatan	Ketinggian		
		< 50 m	50 - 200 m	200 - 500 m
6	Simpang Pesak	23872,3 ha	543,3 ha	3,4 ha
7	Dendang	39661,1 ha	1939,5 ha	69,3 ha

Sumber: Peta Topografi Kabupaten Belitung Timur



Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

2.1.1.4 Geologi

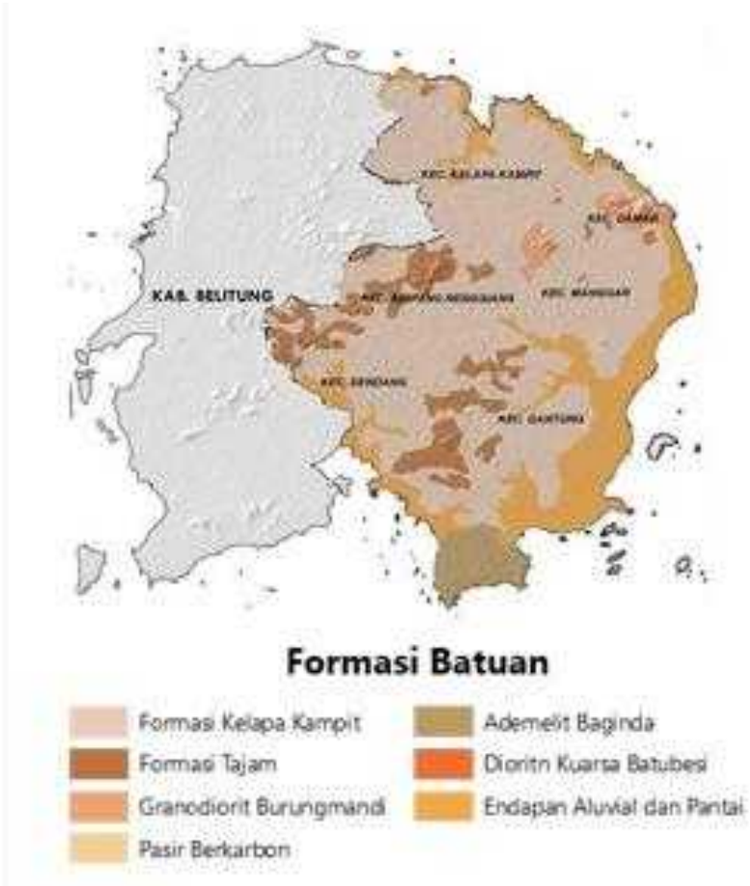
Geologi yang ada di Kabupaten Belitung Timur didominasi formasi Kelapa Kampit, formasi tajam dan Aluvial yang terdapat di hampir setiap kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan Adamelit Baginda hanya terdapat di Kecamatan Simpang Pesak dan Endapan Danau hanya terdapat di Kecamatan Kelapa Kampit. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Struktur Geologi Kabupaten Belitung Timur

No	Geologi	Kecamatan						
		Kelapa Kampit	Damar	Manggar	Gantung	Simpang Pesak	Dendang	Simpang Renggiang
1	Adamelit Baginda					7322,43		
2	Aluvial	3999,97	2222,98	3022,07	13.663,0	909,61	143,89	
3	Batuan Terobosan	6,44		20,22	0,76	12,97		

No	Geologi	Kecamatan						
		Kelapa Kampit	Damar	Manggar	Gantung	Simpang Pesak	Dendang	Simpang Renggiang
4	Diorit Kuarsa Batubesi		90,79	123,78				
5	Endapan Danau	6518,68						
6	Formasi Kelapa Kampit	38744,12	16335,25	13213,44	42336,52	11524,63	33214,63	30332,49
7	Formasi Tajam	2929,28	314,35		4449,51	4597,42	8310,91	10076,52
8	Granodiorit Burung Mandi	1337,35	3471,91	1072,71				95,82

Sumber: Peta Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM



Gambar 2. 3 Kondisi Geologi Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Peta Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM

2.1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Belitung Timur yang merupakan daerah kepulauan memiliki potensi air permukaan dan air tanah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air domestik, pertanian, industri maupun perikanan. Beberapa air permukaan yang ada diantaranya sungai, danau/kulong, embung, dan waduk/bendungan.

a. Sungai

Sungai yang ada di Kabupaten Belitung Timur merupakan sungai induk dan anak-anak sungai yang berpola pengeringan dendritik, rektangular, dan radial, berstadia sungai dewasa-tua (*old-mature river stadium*), sungai periodik/permanen dan sungai episodik/*intermittent*. Beberapa sungai besar yang ada di Kabupaten Belitung Timur diantaranya:

1. Sungai Buding di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit memiliki panjang sekitar 10,23 km dan kedalaman 4-5 meter;
2. Sungai Manggar di Kecamatan Manggar, memiliki panjang sekitar 14 km dan kedalaman 4-5 meter;
3. Sungai Lenggang membentang dari barat ke timur meliputi Kecamatan Simpang Renggiang, Gantung, Kelapa Kampit. Muara Sungai Lenggang terletak di Kecamatan Gantung. Sungai Lenggang memiliki panjang sekitar 35 km dan kedalaman antara 10 m - 40 m; dan
4. Sungai Pala di Kecamatan Dendang memiliki panjang sekitar 10,57 km dengan lebar 40 meter dan kedalaman sekitar 10 meter.

b. Danau/Kulong

Selain sungai, potensi air permukaan yang ada di Kabupaten Belitung Timur berupa danau/situ/kulong yang terbentuk dari aktivitas penambangan timah. Beberapa danau/situ/kulong tersebut diantaranya :

Tabel 2. 4 Danau Kulong di Kabupaten Belitung Timur

No	Nama Danau / Kulong	Lokasi
1	Danau Mempaya	Damar
2	Kulong Parit Kemang	Kelapa Kampit
3	Kulong Rakit	Damar
4	Kulong Kejemun	Kelapa Kampit
5	Kulong Kejemun 1	Kelapa Kampit
6	Kulong Kero	Manggar
7	Kulong Minyak	Manggar
8	Kulong Damar	Damar
9	Kulong Meranti	Gantung
10	Kulong Air Itam	Gantung
11	Kulong Teberong	Simpang Pesak
12	Kulong Alub	Simpang Pesak

Sumber : Dokumen RISPAM Kabupaten Belitung Timur

c. Embung

Sumber air permukaan lain yang terdapat di Kabupaten Belitung Timur adalah embung. Embung merupakan jenis perairan darat yang berbentuk cekungan seperti penampungan dengan ciri permukaan tanah yang lebih rendah dari daratan disekitarnya dengan area cukup luas sebagai penampung air. Beberapa embung yang ada di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Embung di Kabupaten Belitung Timur

No	Nama Embung	Lokasi
1	Embung Aik Kelik	Kec. Damar
2	Embung Balok	Kec. Dendang
3	Embung Dendang	Kec. Dendang
4	Embung Nyurok 2	Kec. Dendang
5	Embung Batu Penyu	Kec. Gantung

No	Nama Embung	Lokasi
6	Embung Lilangan	Kec. Gantung
7	Embung Limbongan	Kec. Gantung
8	Embung Cendil	Kec. Kelapa Kampit
9	Embung Batu Itam	Kec. Simpang Pesak
10	Embung Simpang Pesak	Kec. Simpang Pesak
11	Embung Lintang 1	Kec. Simpang Renggiang
12	Embung Lintang 2	Kec. Simpang Renggiang
13	Embung Simpang Rengginang	Kec. Simpang Renggiang
14	Embung Simpang Tiga	Kec. Simpang Renggiang

Sumber : Peta Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Belitung Timur

d. Bendungan

Bendungan yang di di Kabupaten Belitung Timur adalah Bendungan Pice yang berada di aliran Sungai Lenggang Kecamatan Gantung. Bendungan Pice mempunyai panjang 50 meter, memiliki 15 pintu air dengan lebar tiap pintu 2,5 meter serta tinggi pintu 10 meter. Volume tampungan bendung sekitar 77 juta m^3 dengan elevasi muka air tertinggi sekitar 5 meter. Sedangkan debit air yang dilepas ke hilir Sungai Lenggang sekitar 294 m^3 / detik.

Untuk Air Tanah yang ada di Kabupaten Belitung Timur berupa Cekungan Air Tanah (CAT) Manggar yang memiliki luas 203 km^2, meliputi wilayah Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar.

2.1.1.6 Klimatologi

Berdasarkan Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka Tahun 2025 Kabupaten Belitung Timur memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Berdasarkan data curah hujan, hari hujan, suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan tekanan udara. Secara umum curah hujan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 berfluktuasi cukup signifikan sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 592,5 mm dengan 23 hari hujan, disusul bulan April sebesar 512,0 mm dan November sebesar 399,1 mm. Sementara itu curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 43,0 mm dan Juli sebesar 67,9 mm, yang menunjukkan periode musim kemarau relatif kering pada pertengahan tahun. Jumlah hari hujan tertinggi tercatat pada bulan April (25 hari) dan Desember (24 hari), sedangkan hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juli (7 hari) dan Agustus (9 hari). Pola ini menunjukkan bahwa awal dan akhir tahun cenderung merupakan periode musim hujan, sedangkan pertengahan tahun merupakan periode musim kemarau.

Dari sisi suhu udara, rata-rata suhu bulanan relatif stabil, berkisar antara 26,2°C hingga 27,6°C. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei (27,6°C), sedangkan suhu terendah terjadi pada Januari dan Maret (26,2°C). Hal ini menunjukkan karakteristik iklim tropis dengan variasi suhu yang tidak terlalu ekstrem sepanjang tahun. Tingkat kelembaban udara juga tergolong tinggi sepanjang tahun, berada pada kisaran 82%–90%. Kelembaban tertinggi tercatat pada Januari dan Maret (90%), sedangkan terendah pada Agustus (82%). Kondisi ini sejalan dengan pola curah hujan yang tinggi di awal tahun dan menurun pada pertengahan tahun.

Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3–6 m/detik. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada Januari dan Februari (6 m/detik), sedangkan kecepatan terendah umumnya terjadi pada April hingga Juni dan September hingga November (3 m/detik). Sementara itu tekanan udara relatif stabil sepanjang tahun pada kisaran 1008,7–1010,7 mb, dengan tekanan tertinggi terjadi pada Maret (1010,7 mb).

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 memiliki pola iklim tropis dengan musim hujan dominan pada awal dan akhir tahun serta musim kemarau relatif singkat pada pertengahan tahun, dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara yang relatif stabil sepanjang tahun. Rincian terkait kondisi klimatologi di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6 Klasifikasi Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Suhu	Kelembaban	Kecepatan angin (m/sec)	Tekanan Udara (mb)
				Rata-Rata			
1	Januari	592,5	23	26,2	90	6	1009,4
2	Februari	275,8	19	26,7	85	6	1010,6
3	Maret	396,1	22	26,2	90	5	1010,7
4	April	512,0	25	26,8	84	3	1009,8
5	Mei	327,9	20	27,6	84	3	1008,7
6	Juni	360,1	20	27,1	84	3	1009,9
7	Juli	67,9	7	27,3	86	4	1010,4
8	Agustus	43,0	9	26,8	82	4	1010,5
9	September	248,5	11	27,1	84	3	1010,3
10	Oktober	179,1	16	26,9	85	3	1009,7
11	November	399,1	23	26,6	89	3	1009,1
12	Desember	335,8	24	26,7	87	4	1009,0

Sumber: Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kab. Belitung Timur, 2025

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

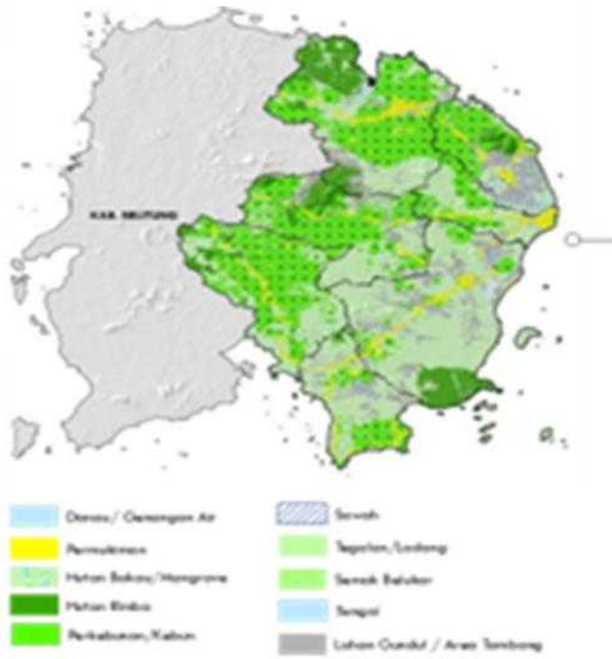
Penggunaan lahan di Kabupaten Belitung Timur terbagi menjadi beberapa jenis. Ditinjau dari kondisi tutupan lahannya penggunaan lahan di Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh perkebunan sawit dengan luas 58.500,19 Ha (22,61%) kebun campuran seluas 48.287,02 Ha (18,66%), area penambangan terbuka bukan sirtu 30.024,13 ha (11,60%) dan semak belukar 28.314,31 ha (10,94%) . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Penutup/Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur

No	Klasifikasi Penutup/Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Bangunan Industri, perdagangan dan perkantoran	114,69	0,04%
2	Bangunan Non-Permukiman Lain	72,88	0,03%
3	Bangunan Permukiman Desa	3217,94	1,24%
4	Bangunan Permukiman Kota	1320,35	0,51%
5	Danau/telaga alami	19,85	0,01%
6	Hamparan Batuan / Pasir Lain	174,24	0,07%
7	Hamparan Pasir Pantai non-Vulkanik	91,82	0,04%
8	Hutan Lahan Rendah Primer Kerapatan sedang	5,78	0,00%
9	Hutan Lahan Rendah sekunder Kerapatan rendah	269,16	0,10%
10	Hutan Lahan Rendah sekunder Kerapatan sedang	13145,35	5,08%
11	Hutan Lahan Rendah sekunder Kerapatan tinggi	2560,85	0,99%
12	Hutan Mangrove Primer Kerapatan rendah	52,05	0,02%
13	Hutan Mangrove Primer Kerapatan sedang	576,82	0,22%
14	Hutan Mangrove Primer Kerapatan Tinggi	6416,84	2,48%
15	Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan rendah	228,99	0,09%
16	Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan sedang	2379,12	0,92%
17	Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Tinggi	905,82	0,35%
18	Hutan Rakyat	3571,05	1,38%
19	Hutan Rawa/gambut Sekunder Kerapatan rendah	11463,74	4,43%
20	Hutan Rawa/gambut Sekunder Kerapatan sedang	7206,58	2,79%
21	Hutan Rawa/gambut Sekunder Kerapatan tinggi	18709,34	7,23%
22	Kebun campuran	48287,02	18,66%
23	Kolam air tawar lain	3473,14	1,34%
24	lahan terbuka lain	1353,11	0,52%
25	Liputan vegetasi alami/semi alami lain	642,45	0,25%
26	Pelabuhan	51,15	0,02%
27	Penambangan terbuka bukan sirtu	30024,13	11,60%
28	Penggalian Pasir tanah dan batu	945,24	0,37%
29	Perkebunan Karet	244,35	0,09%
30	Perkebunan Kelapa sawit	58500,19	22,61%
31	Rataan lumpur	132,87	0,05%
32	rawa pedalaman	1919,34	0,74%
33	Rawa Pedalaman (tidak dirinci)	2733,43	1,06%
34	Rawa pesisir bervegetasi	5459,85	2,11%
35	Rawa pesisir tidak bervegetasi	446,17	0,17%
36	Sawah dengan padi diselingi tanaman lain	2780,22	1,07%
37	Semak belukar	28314,31	10,94%
38	Sungai	805,85	0,31%

No	Klasifikasi Penutup/Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
39	Tambak ikan/udang	25,94	0,01%
40	(blank)	76,68	0,03%

Sumber: Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kab. Belitung Timur



Gambar 2. 4 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Belitung Timur dilakukan berdasarkan penataan ruang yang memiliki potensi yang penting untuk dikembangkan dengan beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu kawasan perdesaan yang terpadu;
2. Pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang;
3. Pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil di setiap kecamatan, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari, industri perikanan, serta mempermudah jangkauan pelayanan publik dan penguatan struktur ekonomi bidang kelautan dan perikanan;
4. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam aksesibilitas wilayah;
5. Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kawasan yang telah dan berpotensi untuk dikembangkan, antara lain:

1. Kawasan Perkotaan Manggar di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar;
2. Kawasan Perkotaan Gantung di Kecamatan Gantung;
3. Kawasan Industri Air Kelik di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar;
4. Kawasan Pariwisata Burung Mandi di Kecamatan Damar;
5. Kawasan Pariwisata Pantai Punai di Kecamatan Simpang Pesak;
6. Kawasan Pariwisata Pantai Kuale Tambak di Kecamatan Damar.
7. Kawasan Pelabuhan Dendang di Kecamatan Dendang;
8. Budidaya Tambak Udang di Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Gamtung dan Kecamatan Damar;
9. Geosite yang ada di Kabupaten Belitung Timur; dan
10. Kawasan Perdesaan Prioritas KAMPIT.

2.1.1.9 Kawasan Rawan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan bahwa bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan atau non alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam.

2.1.1.9.1 Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Adapun arahan kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Belitung Timur tersebar di pantai selatan dan timur, meliputi:

1. Kecamatan Kelapa Kampit (Desa Cendil, Air Kelik, Mayang, dan Desa Pembaharuan);
2. Kecamatan Dendang (Desa Batu Itam, Dendang, Simpang Pesak, dan Desa Tanjung Kelumpang);
3. Kecamatan Gantung (Desa Gantung, Jangkar Asam, Lilangan, dan Desa Selingsing);
4. Kecamatan Manggar (Desa Buku Limau, Kurnia Jaya, Lalang, Lalang Jaya, Mempaya, Mengkubang, Padang, Desa Sukamandi).

2.1.1.9.2 Kawasan Rawan Abrasi

Adapun arahan kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Belitung Timur tersebar di pantai selatan dan timur, meliputi:

1. Kecamatan Kelapa Kampit (Desa Cendil, Air Kelik, Mayang, dan Desa Pembaharuan);
2. Kecamatan Dendang (Desa Batu Itam, Dendang, Simpang Pesak, dan Desa Tanjung Kelumpang);
3. Kecamatan Gantung (Desa Gantung, Jangkar Asam, Lilangan, dan Desa Selingsing);
4. Kecamatan Manggar (Desa Buku Limau, Kurnia Jaya, Lalang, Lalang Jaya, Mempaya, Mengkubang, Padang, Desa Sukamandi).

Tabel 2. 8 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kabupaten/Kota di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Bangka	5.152	Sedang
2	Belitung	11.391	Sedang
3	Bangka Barat	5.937	Sedang
4	Bangka Tengah	3.918	Sedang
5	Bangka Selatan	8.303	Sedang
6	Belitung Timur	7.319	Sedang
7	Pangkal Pinang	225	Sedang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		42.245	Sedang

Sumber: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur



Gambar 2. 5 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

2.1.1.9.3 Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan bencana banjir merupakan salah satu masalah di Kabupaten Belitung Timur. Dari titik lokasi genangan dan banjir diketahui bahwa terdapat di 9 (sembilan) titik kawasan rawan banjir saat hujan turun meliputi: kawasan Desa Baru, Kurnia Jaya, Mekar Jaya, Buding, Mayang, Lenggang, Mempaya, Sukamandi, dan Pembaharuan. Beberapa faktor penyebab terjadinya genangan yang teridentifikasi adalah:

1. Faktor alamiah itu sendiri berupa tingginya gelombang pasang air laut dan ditambah besarnya debit air hujan yang turun sehingga mengakibatkan terjadinya genangan air;
2. Faktor pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase dan pembangunan fisik sehingga menyebabkan penyumbatan dan kerusakan saluran drainase; dan
3. Adanya pengembangan wilayah kota yang mengubah tata guna lahan, mengakibatkan bertambahnya debit air di saluran. Luapan/genangan

terjadi karena pertambahan debit tersebut tidak disertai dengan perencanaan ulang saluran drainase eksisting.

2.1.1.10 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 sampai dengan semester I (satu) berjumlah 133.053 jiwa dengan 47.248 Kepala Keluarga, terdiri dari penduduk laki-laki 68.367 jiwa dan perempuan 64.686 jiwa. Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 123.482 jiwa atau sebesar 92,81%, sedangkan jumlah penduduk dengan kepemilikan KTP elektronik sebanyak 97.004 jiwa atau sebesar 97,89%. Untuk data detail dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
Manggar	20.825	20.014	40.839	229	178,34
Gantung	16.214	15.034	31.248	546,3	57,20
Dendang	5.780	5.368	11.148	362,2	30,78
Kelapa Kampit	10.098	9.552	19.650	498,5	39,42
Damar	7.138	6.832	13.970	236,9	58,97
Simpang Renggiang	3.991	3.779	7.770	390,7	19,89
Simpang Pesak	4.533	4.285	8.818	243,3	36,24
Total	68579	64.864	133.443	2.506,90	53,23

Sumber: PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Semester II 2025

Tabel 2. 10 Jumlah Rumah Tangga/Kepala Keluarga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Kecamatan	Rumah Tangga/Kepala Keluarga		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Manggar	11,424	3,173	14,597
Gantung	8,91	2,026	10,936
Dendang	3,449	505	3,954
Kelapa Kampit	5,852	1,265	7,117
Damar	4,118	962	5,08
Simpang Renggiang	2,475	461	2,936
Simpang Pesak	2,562	531	3,093
Total	**38,79**	**2465,464**	**47,713**

Sumber: PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Semester II 2025

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
0 - 4	4.288	4.096	8.384
5 - 9	5.288	4.956	10.244

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
10 ; 14	5.960	5.542	11.502
15 - 19	5.520	5.156	10.676
20 - 24	5.613	5.383	10.996
25 - 29	5.288	4.839	10.127
30 - 34	4.904	4.568	9.472
35 - 39	4.890	4.632	9.522
40 - 44	5.622	5.204	10.826
45 - 49	5.785	5.191	10.976
50 - 54	4.620	4.054	8.674
55 - 59	3.614	3.185	6.799
60 - 64	2.643	2.548	5.191
65 - 69	1.981	2.192	4.173
70 - 74	1.331	1.523	2.854
75 +	1.232	1.795	3.027
Total	**68.579**	**64.864**	**133.443**

Sumber: PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Semester II 2025

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Pendidikan Terakhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
Tidak/ Belum Sekolah	16.787	15.618	32.405
Belum Tamat SD/Sederajat	10.512	9.619	20.131
Tamat SD/Sederajat	16.588	16.479	33.067
SLTP/Sederajat	9.156	8.279	17.435
SLTA/Sederajat	12.535	10.792	23.327
Diploma I/ II	231	490	721
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	715	1.012	1.727
Diploma IV/ Strata I	1.968	2.513	4.481
Strata II	85	60	145
Strata III	2	2	4
Total	**68.579**	**64.864**	**133.443**

Sumber : PDAK – Kementrian Dalam Negeri RI Semester II 2025

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	27	1	28
2	Anggota DPRD Provinsi 2	2	0	2
3	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	20	2	22
4	Apoteker	2	4	6

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Total
5	Arsitek	1	0	1
6	Belum/Tidak Bekerja	18.161	16.333	34.494
7	Biarawati	1	0	1
8	Bidan	0	53	53
9	Bupati	1	0	1
10	Buruh Harian Lepas	22.220	236	22.456
11	Buruh Nelayan/Perikanan	240	2	242
12	Buruh Peternakan	5	0	5
13	Buruh Tani/Perkebunan	403	80	483
14	Dokter	13	23	36
15	Dosen	4	4	8
16	Guru	122	335	457
17	Imam Masjid	9	0	9
18	Industri	16	8	24
19	Juru Masak	1	4	5
20	Karyawan BUMD	12	4	16
21	Karyawan BUMN	170	30	200
22	Karyawan Honorer	787	710	1497
23	Karyawan Swasta	3.648	1.268	4.916
25	Kepala Desa	24	1	25
26	Kepolisian RI	265	8	273
27	Konstruksi	36	0	36
28	Konsultan	4	0	4
29	Mekanik	55	0	55
30	Mengurus Rumah Tangga	2	34.180	34.182
31	Nelayan/Perikanan	3.192	6	3198
32	Notaris	0	1	1
34	Pedagang	313	121	434
35	Pegawai Negeri Sipil	1.107	1.479	2.586
36	Pekerjaan Lainnya	24	19	43
Kabupaten Belitung Timur		50.887	54.912	105.799

Sumber: PDAK – Kementrian Dalam Negeri RI Semester II 2025

Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Agama Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Islam	65.958	62.216	128.174	96,05
2	Katholik	231	208	439	0,33
3	Kristen	857	885	1.742	1,31
4	Hinndu	4	2	6	0,00
5	Budha	1.444	1.477	2.921	2,19
6	Khonghucu	85	76	161	0,12
7	Kepercayaan	0	0	0	0
	Total	**68.579**	**64.864**	**133.443**	**100**

Sumber: PDAK – Kementrian Dalam Negeri RI Semester II Tahun 2025

2.1.1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

A. PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp11.978,07 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp10.971,93 miliar, terjadi peningkatan nominal sebesar Rp1.006,14 miliar atau tumbuh sekitar 9,17 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi secara agregat di berbagai lapangan usaha sepanjang tahun 2025. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku ini mencerminkan bertambahnya nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi daerah, baik akibat peningkatan produksi maupun pengaruh kenaikan harga.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga konstan, pada tahun 2025 tercatat sebesar 6.207,8 miliar rupiah. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 6.474,78 miliar rupiah. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar 266,98 miliar rupiah atau mengalami kontraksi sebesar 4,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi PDRB Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2025 atas dasar harga berlaku:

Tabel 2. 15 PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2021-2025

Kategori PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.028,97	2.445,63	2.709,89	2.994,77	3.301,47
Pertambangan dan Penggalian	1.328,73	1.305,17	1.231,44	1.282,73	1.490,56
Industri Pengolahan	1.942,43	2.321,74	2.468,74	2.286,23	2,510,99
Pengadaan Listrik dan Gas	7,57	7,5	7,81	8,29	8,77
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,79	1,91	1,98	2,18	2,33
Konstruksi	694,99	728,14	815,7	855,01	855,08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	923,78	1.110,33	1.221,58	1.252,33	1.389,06
Transportasi dan Pergudangan	173,01	202,41	230,45	248,45	268,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	217,66	254,36	289,81	316,5	348,03

Kategori PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
Informasi dan Komunikasi	105,72	114,98	133,4	148,53	160,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	43,39	50,23	59,24	61,2	62,21
Real Estate	255,53	278,67	305,16	325,62	342,23
Jasa Perusahaan	25	28,44	32,33	34,89	37,86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	489,94	492,87	548,73	619,86	619,94
Jasa Pendidikan	232,84	243,9	270,11	306,44	329,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134,8	141,72	157,61	162,04	174,94
Jasa lainnya	49,56	55,24	60,82	68,25	75,66
PDRB	8.882,48	9.783,22	10.544,79	10.973,33	11.978,07

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, 2026

Selanjutnya, tabel di bawah ini menggambarkan perkembangan PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga konstan tahun 2021 – 2025.

Tabel 2. 16 PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2021-2025

Kategori PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.426,66	1.447,93	1.520,08	1.617,56	1.666,81
Pertambangan dan Penggalian	996,21	994,83	976,11	961,17	1.043,05
Industri Pengolahan	1.163,93	1.233,19	1.278,84	1.066,58	1.107,42
Pengadaan Listrik dan Gas	4,05	3,95	4,09	4,36	4,49
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,04	1,09	1,09	1,14	1,17
Konstruksi	415,43	416,06	457,27	474,37	469,14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	565,73	634,5	665,92	666,85	699,05
Transportasi dan Pergudangan	110,24	121,5	128,02	134,85	143,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	135,4	153,11	171,17	181,32	196,15
Informasi dan Komunikasi	92,15	99,09	113,09	124,4	135,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	26,04	27,76	31,78	32,51	32,41
Real Estate	166,39	176,18	186,13	194,68	202,94
Jasa Perusahaan	15,09	16,46	17,77	19,18	20,49
Administrasi Pemerintahan,	340,53	341,55	371,64	419,11	421,43

Kategori PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
Jasa Pendidikan	138,74	142,22	154,8	172,42	184,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,41	89,61	97,91	100,37	106,79
Jasa lainnya	29,76	32,07	34,2	36,91	40,20
Jumlah	**5.714,79**	**5.931,09**	**6.209,89**	**6.207,8**	**6.474,78**

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

B. Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan Tabel Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, struktur perekonomian Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 dan 2025 secara umum masih didominasi oleh beberapa lapangan usaha utama, dengan terdapat dinamika perubahan kontribusi antar sektor.

Pada tahun 2024, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 27,29 persen, kemudian meningkat menjadi 27,56 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan penguatan peran sektor primer sebagai penopang utama perekonomian daerah.

Lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami peningkatan kontribusi dari 20,83 persen pada tahun 2024 menjadi 20,96 persen pada tahun 2025, yang mencerminkan adanya perbaikan kinerja sektor pengolahan dalam struktur ekonomi daerah.

Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan dari 11,41 persen pada tahun 2024 menjadi 11,60 persen pada tahun 2025. Di sisi lain, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami kenaikan kontribusi dari 11,69 persen pada tahun 2024 menjadi 12,44 persen pada tahun 2025, menunjukkan meningkatnya peranan sektor ekstraktif dalam pembentukan PDRB.

Sebaliknya, beberapa sektor mengalami penurunan kontribusi, antara lain Konstruksi dari 7,79 persen menjadi 7,14 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dari 5,65 persen menjadi 5,18 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya perlambatan relatif pada sektor-sektor tersebut dibandingkan sektor lainnya.

Secara keseluruhan, perbandingan tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Belitung Timur masih bertumpu pada sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan, dengan adanya pergeseran kontribusi yang mencerminkan dinamika pertumbuhan antar lapangan usaha dalam periode tersebut.

Tabel 2. 17 Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2021 - 2025

Kategori PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,4	24,99	25,7	27,29	27,56
Pertambangan dan Penggalian	14,96	13,34	11,68	11,69	12,44
Industri Pengolahan	21,87	23,73	23,41	20,83	20,96

Kategori PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,07	0,08	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	7,82	7,44	7,74	7,79	7,14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,4	11,35	11,58	11,41	11,60
Transportasi dan Pergudangan	1,95	2,07	2,19	2,26	2,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,45	2,6	2,75	2,88	2,91
Informasi dan Komunikasi	1,19	1,18	1,27	1,35	1,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,49	0,51	0,56	0,56	0,52
Real Estate	2,88	2,85	2,89	2,97	2,86
Jasa Perusahaan	0,28	0,29	0,31	0,32	0,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,52	5,04	5,2	5,65	5,18
Jasa Pendidikan	2,62	2,49	2,56	2,79	2,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,52	1,45	1,49	1,48	1,46
Jasa lainnya	0,56	0,56	0,58	0,62	0,63
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

Tabel 2. 18 Perbandingan Distribusi PDRB Provinsi Bangka Belitung dan PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2021 – 2025

NO	LAPANGAN USAHA	2021		2022		2023		2024		2025	
		Kab	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	25,4	19,65	24,99	19,18	25,7	19,49	27,29	20,27	27,56	20,60
B	Pertambangan & penggalian	14,96	9,55	13,34	8,63	11,68	7,64	11,69	7,55	12,44	7,89
C	Industri pengolahan	21,87	20,86	23,73	21,84	23,41	21,15	20,83	20,6	20,96	21,14
D	Pengadaan listrik, gas	0,09	0,13	0,08	0,11	0,07	0,11	0,08	0,11	0,07	0,11
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Kontruksi	7,82	9,67	7,44	9,09	7,74	9,5	7,79	9,1	7,14	8,36
G	Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil & sepeda motor	10,4	14,76	11,35	15,74	11,58	15,69	11,41	15,36	11,60	15,65
H	Transportasi & pergudangan	1,95	3,6	2,07	4,4	2,19	4,83	2,26	4,85	2,24	4,73
I	Penyediaan akomodasi & makan minum	2,45	3	2,6	3,08	2,75	3,2	2,88	3,25	2,91	3,32
J	informasi & komunikasi	1,19	2,08	1,18	2,09	1,27	2,23	1,35	2,35	1,34	2,34
K	jasa keuangan dan asuransi	0,49	1,82	0,51	1,88	0,56	2,02	0,56	1,96	0,52	1,86
L	Real estat	2,88	3,5	2,85	3,42	2,89	3,39	2,97	3,39	2,86	3,28
M,N	Jasa perusahaan	0,28	0,27	0,29	0,28	0,31	0,3	0,32	0,3	0,32	0,30
O	Adminstrasi pemerintahan,	5,52	5,93	5,04	5,29	5,2	5,27	5,65	5,48	5,18	5,03

NO	LAPANGAN USAHA	2021		2022		2023		2024		2025	
		Kab	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov
	pertahanan & jaminan sosial wajib										
P	Jasa pendidikan	2,62	2,93	2,49	2,79	2,56	2,91	2,79	3,13	2,75	3,10
Q	Jasa kesehatan & kegiatan sosial	1,52	1,42	1,45	1,34	1,49	1,38	1,48	1,36	1,46	1,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,56	0,81	0,56	0,82	0,58	0,87	0,62	0,92	0,63	0,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung 2026, BPS Kab.Belitung Timur 2026

Berdasarkan Tabel 2.6, perbandingan distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020–2025 menunjukkan perbedaan struktur perekonomian antara Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Struktur ekonomi Kabupaten Belitung Timur lebih didominasi oleh sektor primer, khususnya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang pada tahun 2025 mencapai 27,56 persen, lebih tinggi dibandingkan kontribusi di tingkat provinsi sebesar 20,60 persen. Selain itu, sektor Pertambangan dan Penggalian di kabupaten juga memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan provinsi. Sebaliknya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kontribusi yang relatif lebih tinggi pada sektor sekunder dan tersier, seperti Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran. Pada tahun 2025, kontribusi industri pengolahan di provinsi tercatat 21,14 persen dan perdagangan sebesar 15,65 persen, lebih tinggi dibandingkan kabupaten.

Secara umum, perekonomian Kabupaten Belitung Timur masih bertumpu pada sektor primer, sedangkan struktur ekonomi provinsi lebih terdiversifikasi dengan peran sektor industri dan jasa yang lebih dominan.

2.1.1.2.1 PDRB Per Kapita

A. Perkembangan PDRB per Kapita menurut ADHB dan ADHK (juta rupiah) Tahun 2021 - 2025

PDRB Per kapita merupakan salah satu indikator sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan serta kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Belitung Timur selama periode 2020–2025 menunjukkan tren yang meningkat, baik menurut Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) .

PDRB per kapita ADHB mengalami kenaikan secara konsisten dari Rp61,85 juta pada tahun 2020 menjadi Rp89,14 juta pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya nilai output ekonomi nominal per penduduk dari tahun ke tahun.

Sementara itu, PDRB per kapita ADHK yang menggambarkan pertumbuhan riil juga menunjukkan kecenderungan meningkat, dari Rp43,15 juta pada tahun 2020 menjadi Rp48,19 juta pada tahun 2025. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp46,73 juta, pada tahun 2025 kembali meningkat.

Secara umum, perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi per penduduk di Kabupaten Belitung Timur selama periode 2020–2025, baik secara nominal maupun riil.

Tabel 2. 19 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Belitung Timur 2021 - 2025 (Ribu Rupiah)

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB Perk apita ADHB	69.334,26	75.426,14	80.322,30	82.608,71	89.141,78
PDRB Perkapita ADHK 2010	44.608,15	45.727,19	47.302,26	46.733,14	48.185,87

Sumber: Belitung Timur Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

2.1.1.2.2 Pengeluaran Riil Per Kapita

Pengeluaran riil per kapita pada dasarnya merupakan potret dari kemampuan finansial individu dalam menjangkau standar hidup tertentu melalui pola konsumsi sehari-hari. Dalam narasi ekonomi pengeluaran per kapita berfungsi sebagai jembatan untuk memahami sejauh mana distribusi sumber daya ekonomi telah menyentuh lapisan masyarakat paling dasar, karena bisa merekam jejak transaksi nyata untuk kebutuhan pokok maupun sekunder. Ketika angka pengeluaran ini meningkat secara konsisten, hal tersebut menandakan adanya pergeseran positif dalam struktur ekonomi masyarakat, di mana individu tidak hanya mampu memenuhi tuntutan dasar untuk bertahan hidup, tetapi juga mulai memiliki ruang finansial untuk meningkatkan kualitas hidup melalui investasi pada kenyamanan, kesehatan, dan pengembangan diri. Berikut disajikan pengeluaran dan rata-rata pengeluaran menurut komodintas per kapita di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2. 20 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung Timur (Ribu Rupiah/orang/tahun) Tahun 2021 – 2025

Kabupaten	2021	2022	2023	2024	2025
Belitung Timur	11.760	12.357	12.536	12.610	12.694

Sumber: Belitung Timur Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

Tabel 2. 21 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Belitung Timur, 2021 - 2025

Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
Makanan	897.337	998.166	958.718	1.002.601	949.352
Bukan Makanan	855.677	924.753	1.007.869	1.002.978	1.003.369
Total	1.753.013	1.922.919	1.966.587	2.005.579	1.952.721

Sumber: Belitung Timur Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Belitung Timur di tahun 2025 mengalami menurun dibandingkan tahun 2024. Pengeluaran per kapita sebulan di tahun 2025 sebesar Rp.1.952.721, lebih rendah dibandingkan konsumsi per kapita an tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp. 2.005.579. Menurunya pengeluaran per kapita tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 terjadi untuk jenis pengeluaran makanan.

Pada tahun 2024, komposisi pengeluaran per kapita sebulan terdiri dari 49,99 persen untuk makanan dan 50,01 persen untuk bukan makanan. Sementara itu, pada tahun 2025 proporsi pengeluaran untuk makanan menurun

menjadi 48,62 persen, sedangkan pengeluaran bukan makanan meningkat menjadi 51,38 persen.

Dengan demikian, dibandingkan tahun 2024, pada tahun 2025 terjadi penurunan persentase pengeluaran makanan dan peningkatan persentase pengeluaran bukan makanan.

Tabel 2. 22 Perbandingan Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, 2021 – 2025

Jenis Pengeluaran	2021		2022		2023		2024		2024	
	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.
Makanan	897.337	783.204	998.116	881.622	958.718	879.797	1.002.601	929.142	949.352	915.679
Bukan Makanan	885.677	748.970	924.753	772.658	1.007.869	847.753	1.002.978	863.932	1.003.369	849.854
Total	1.753.013	1.532.174	1.922.919	1.654.280	1.966.587	1.727.550	2.005.579	1.793.074	1.952.721	1.765.550

Sumber: Belitung Timur Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

2.1.1.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen)

Laju pertumbuhan menunjukan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu. Setelah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 0,03 persen, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur mengalami pertumbuhan sebesar 4,30 persen. 15 dari 17 kategori lapangan usaha tumbuh pofitif kecuali 2 sektor lainnya yang mengalami kontraksi yaitu kontruksi serta jasa keuangan dan asuransi.

Tabel 2. 23 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 - 2025

Kategori PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,36	1,49	4,98	6,41	3,04
Pertambangan dan Penggalian	3,81	-0,14	-1,88	-1,53	8,52
Industri Pengolahan	7,41	5,95	3,70	-16,60	3,83
Pengadaan Listrik dan Gas	12,30	-2,47	3,39	6,79	2,97
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,96	4,82	0,54	4,71	2,73
Konstruksi	3,54	0,15	9,90	3,74	-1,10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,20	12,15	4,95	0,14	4,83
Transportasi dan Pergudangan	5,42	10,21	5,37	5,33	6,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,04	13,08	11,80	5,93	8,18
Informasi dan Komunikasi	5,03	7,53	14,14	10,00	9,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,43	6,63	14,46	2,32	-0,30
Real Estate	3,84	5,88	5,65	4,59	4,24
Jasa Perusahaan	6,13	9,07	7,94	7,99	6,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,58	0,30	8,81	12,77	0,55
Jasa Pendidikan	2,97	2,50	8,85	11,39	6,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,52	2,52	9,25	2,52	6,39
Jasa lainnya	4,27	7,76	6,64	7,94	8,91
PDRB	**4,56**	**3,78**	**4,70**	**-0,03**	**4,30**

Sumber: Belitung Timur Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

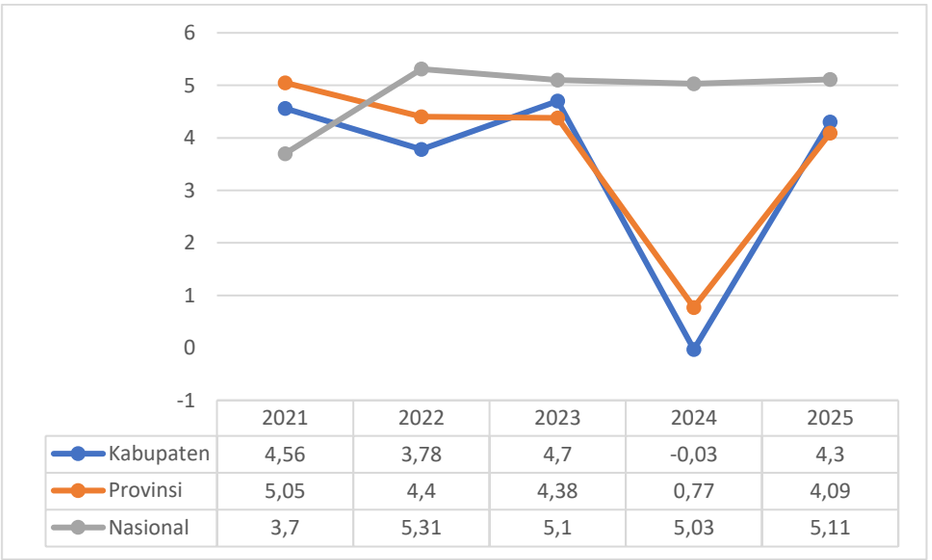
B. PERBANDINGAN PERTUMBUHAN RIIL PDB, PDRB PROVINSI BANGKA BELITUNG DAN PDRB Kabupaten Belitung Timur

Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (*c-to-c*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen.

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 tetap tumbuh positif di angka 4,09 persen Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,77 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 9,17 persen, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 9,05 persen serta lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 8,97 persen.

Sedangkan Kabupaten Belitung Timur. Setelah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 0,03 persen, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur mengalami pertumbuhan

sebesar 4,30 persen. 15 dari 17 kategori lapangan usaha tumbuh pofitif kecuali 2 sektor lainnya yang mengalami kontraksi yaitu kontruksi serta jasa keuangan dan asuransi.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten	4,56	3,78	4,7	-0,03	4,3
Provinsi	5,05	4,4	4,38	0,77	4,09
Nasional	3,7	5,31	5,1	5,03	5,11

Grafik 2. 1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 - 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2026

2.1.1.2.4 Analisis Location Quotient

Teknik *Analisis Location Quotient* ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap pekerja disetiap sektor industri di daerah adalah sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor, dan bahwa perekonomian bangsa yang bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup. Teknik LQ dibagi menjadi dua, yaitu LQ statis (*Static Location Quotient*) dan LQ dinamis (*Dynamic Location Quotient*).

1. Statis Location Quotient (SLQ)

SLQ digunakan mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau sektor yang sejenis dalam perekonomian nasional. Apabila hasil perhitungannya menunjukan LQ>1, berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan LQ<1, berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor).

Dengan memperhitungkan data yang tersedia, perhitungan analisis LQ didasarkan dengan membandingkan data Kabupaten Belitung Timur dengan data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai PDRB yang menjadi dasar perhitungan digunakan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Hasil perhitungan nilai LQ yang berupa indeks tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 24 Nilai Indeks SLQ di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Lapangan Usaha/Sektor	Indeks LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,45	basis
Pertambangan dan Penggalian	1,20	basis
Industri Pengolahan	1,04	basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0,70	non basis

Lapangan Usaha/Sektor	Indeks LQ	Keterangan
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,09	basis
Konstruksi	0,87	non basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,81	non basis
Transportasi dan Pergudangan	0,53	non basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	non basis
Informasi dan Komunikasi	0,36	non basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,28	non basis
Real Estate	0,80	non basis
Jasa Perusahaan	1,15	basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,91	non basis
Jasa Pendidikan	0,92	non basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	non basis
Jasa lainnya	0,70	non basis

Sumber: Bepperida Kabupaten Belitung Timur 2026 (data diolah)

Dari hasil perhitungan SLQ, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 di Kabupaten Belitung Timur sektor apa saja yang merupakan sektor basis maupun non basis. Terdapat 5 sektor basis, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air,pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang; sektor jasa perusahaan. Sektor – sektor tersebut memiliki nilai indeks LQ>1.

Hasil indeks tersebut menunjukan bahwa sektor-sektor tersebut menjadi sektor andalan dan memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur. Dan sektor-sektor tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya bahkan berpotensi ekspor.

Sektor yang merupakan bukan basis pada tahun 2025 adalah sektor pengadaan listrik dan gas, sektor kontruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor jasa lainnya. Dua Belas sektor bukan basis tersebut memiliki indeks LQ <1. Sektor-sektor tersebut dalam berproduksi belum mampu memenuhi kebutuhan dalam Kabupaten Belitung Timur bahkan mengimpor dari luar daerah. Sektor bukan basis ini perlu mendapat perhatian khusus. Dengan bermodalkan 5 sektor basis, diharapkan kesepuluh sektor bukan basis dapat dibantu untuk dikembangkan menjadi sektor basis baru.

2. Dynamic Location Quotient (DLQ)

Metode Dynamic Location Quotient (DLQ) atau LQ dinamis digunakan untuk mengakomodasi perubahan struktur ekonomi wilayah dalam kurun waktu tertentu. Metode ini mempunyai kesamaan dengan metode LQ statis,

hanya yang membedakan model LQ dinamis memasukkan laju pertumbuhan rata-rata terhadap masing–masing nilai tambah sektoral maupun PDRB untuk kurun waktu antara tahun 0 sampai tahun t.

Apabila nilai DLQ >1, maka potensi perkembangan sektor usaha di Kabupaten Belitung Timur lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kata lain masih dapat diharapkan menjadi sektor basis pada masa mendatang. Namun apabila nilai DLQ < 1, maka potensi perkembangan sektor usaha di Kabupaten Belitung Timur lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan, dengan kata lain tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa yang akan datang.

Tabel 2. 25 Nilai Indeks LQ Dinamis (DLQ) di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Lapangan Usaha/Sektor	Indeks LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,93	Non basis
Pertambangan dan Penggalian	1,19	Basis
Industri Pengolahan	0,87	Non basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0,68	Non basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,08	basis
Konstruksi	0,37	non basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,94	non basis
Transportasi dan Pergudangan	1,09	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,87	non basis
Informasi dan Komunikasi	0,97	non basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,37	non basis
Real Estate	1,05	basis
Jasa Perusahaan	0,93	Non basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,69	basis
Jasa Pendidikan	0,97	Non basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	basis
Jasa lainnya	0,95	non basis

Sumber: Bepperida Kabupaten Belitung Timur 2026 (data diolah)

Hasil analisis tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor yang memiliki nilai DLQ > 1, yang berarti sektor tersebut memiliki potensi perkembangan yang lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, sektor-sektor tersebut diperkirakan akan menjadi sektor basis di masa mendatang.

Sektor yang mengalami peningkatan kinerja sehingga berpotensi menjadi sektor basis di masa mendatang yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian (1,19), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (1,08), Transportasi dan Pergudangan (1,09), Real Estate (1,05), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,69), serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,09). Nilai DLQ yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor tersebut di Kabupaten Belitung Timur relatif lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat provinsi.

Sementara itu, sektor-sektor lainnya memiliki nilai DLQ kurang dari 1, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor tersebut relatif lebih lambat dibandingkan dengan tingkat provinsi sehingga belum dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa mendatang.

Berdasarkan nilai SLQ dan DLQ dapat ditentukan klasifikasi sektor usaha apakah tergolong sektor unggulan, sektor prospektif, sektor andalan, dan sektor tertinggal.

Tabel 2. 26 Klasifikasi Sektor Berdasarkan Nilai SLQ dan DLQ di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Kriteria	SLQ>1	SLQ<1
DLQ>1	Sektor Unggulan • Pertambangan dan Penggalian • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Sektor Andalan • Transportasi dan Pergudangan • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
DLQ<1	Sektor Prospektif • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Industri Pengolahan • Jasa Perusahaan	Sektor Tertinggal • Pengadaan Listrik dan Gas • Konstruksi • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Jasa Pendidikan • Jasa lainnya

Sumber: Bepperida Kabupaten Belitung Timur 2026 (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) terhadap lapangan usaha di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, diperoleh klasifikasi sektor ekonomi yang terbagi menjadi sektor unggulan, sektor andalan, sektor prospektif, dan sektor tertinggal. Klasifikasi ini menggambarkan posisi sektor ekonomi saat ini sekaligus potensi perkembangannya di masa mendatang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor unggulan, yaitu sektor yang memiliki nilai SLQ > 1 dan DLQ > 1, terdiri dari Pertambangan dan Penggalian serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut tidak hanya memiliki keunggulan komparatif saat ini, tetapi juga memiliki laju pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi sehingga berpotensi tetap menjadi penggerak utama perekonomian daerah di masa mendatang.

Selanjutnya, sektor andalan yang memiliki SLQ < 1 namun DLQ > 1 meliputi Transportasi dan Pergudangan, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor-sektor ini belum menjadi sektor basis saat ini, namun memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik sehingga dapat berkembang dan berpeluang

menjadi sektor basis pada masa mendatang apabila didukung dengan kebijakan pembangunan yang tepat.

Adapun sektor prospektif, yaitu sektor yang memiliki SLQ>1 tetapi DLQ<1, terdiri dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Jasa Perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut saat ini merupakan sektor basis di Kabupaten Belitung Timur, namun laju pertumbuhannya relatif lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi sehingga diperlukan upaya peningkatan daya saing dan produktivitas agar tetap mampu mempertahankan peranannya dalam perekonomian daerah.

Sementara itu, sektor yang termasuk dalam kategori sektor tertinggal, yaitu sektor yang memiliki SLQ<1 dan DLQ<1, antara lain Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan, serta Jasa lainnya. Sektor-sektor ini belum menunjukkan keunggulan komparatif maupun pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tingkat provinsi, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih relatif terbatas.

Secara umum, hasil analisis ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Belitung Timur masih didukung oleh sektor-sektor tertentu yang memiliki keunggulan komparatif dan potensi pertumbuhan, khususnya pada sektor pertambangan serta sektor pengelolaan air dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang mampu mempertahankan sektor unggulan sekaligus mendorong pengembangan sektor andalan dan prospektif guna memperkuat struktur perekonomian daerah secara berkelanjutan.

2.1.1.2.5 Laju Inflasi

A. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2021 - 2025

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi diantaranya meningkatnya konsumsi, daya tarik masyarakat terhadap barang, ketersediaan stok.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, perkembangan laju inflasi selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Pada tahun 2021 laju inflasi di kabupaten tercatat relatif tinggi pada angka 4,01 persen, 3,75 persen di Provinsi, dan 1,87 persen secara nasional. Memasuki tahun 2021, terjadi peningkatan inflasi yang cukup signifikan, khususnya di kabupaten menjadi 4,01 persen dan provinsi 3,75 persen, sementara nasional meningkat menjadi 1,87 persen. Puncak inflasi terjadi pada tahun 2022, di mana inflasi kabupaten mencapai 4,17 persen, provinsi 5,38 persen, dan nasional 5,51 persen. Kondisi ini mencerminkan tekanan harga yang tinggi secara luas, baik di tingkat daerah maupun nasional. Selanjutnya, pada tahun 2023 inflasi mulai mengalami penurunan dengan angka 3,80 persen di kabupaten, 2,65 persen di provinsi, dan 2,61 persen secara nasional. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana inflasi kembali melandai menjadi 1,38 persen di kabupaten, 0,75 persen di provinsi, dan 1,57 persen secara nasional. Pada tahun 2025, inflasi kembali mengalami sedikit peningkatan dengan angka 2,69 persen di kabupaten, 2,77 persen di provinsi, dan 2,92 persen secara nasional. Meskipun

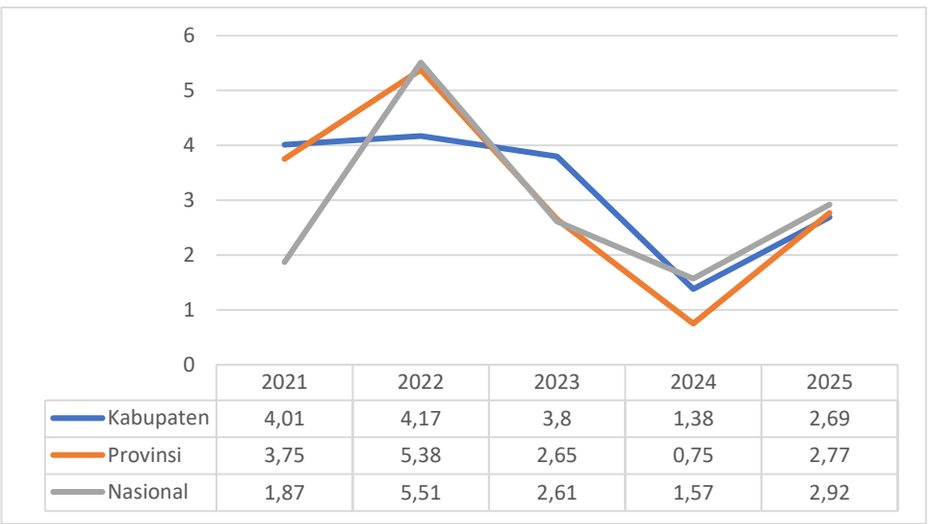
meningkat, tingkat inflasi tersebut masih berada dalam kisaran yang relatif terkendali.

Secara keseluruhan, perkembangan inflasi selama periode 2021 – 2025 menunjukkan pola kenaikan hingga tahun 2022, kemudian diikuti tren penurunan pada tahun 2023–2024, dan kembali meningkat moderat pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas harga di daerah relatif terjaga meskipun sempat mengalami tekanan inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2022.

Tabel 2. 27 Laju Inflasi Tahun 2021 - 2025

Tahun	Kabupaten	Provinsi	Nasional
2021	4,01	3,75	1,87
2022	4,17	5,38	5,51
2023	3,80	2,65	2,61
2024	1,38	0,75	1,57
2025	2,69	2,77	2,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026



Grafik 2. 2 Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik 2026, diolah

2.1.1.2.6 Rasio Gini (Indeks Ketimpangan)

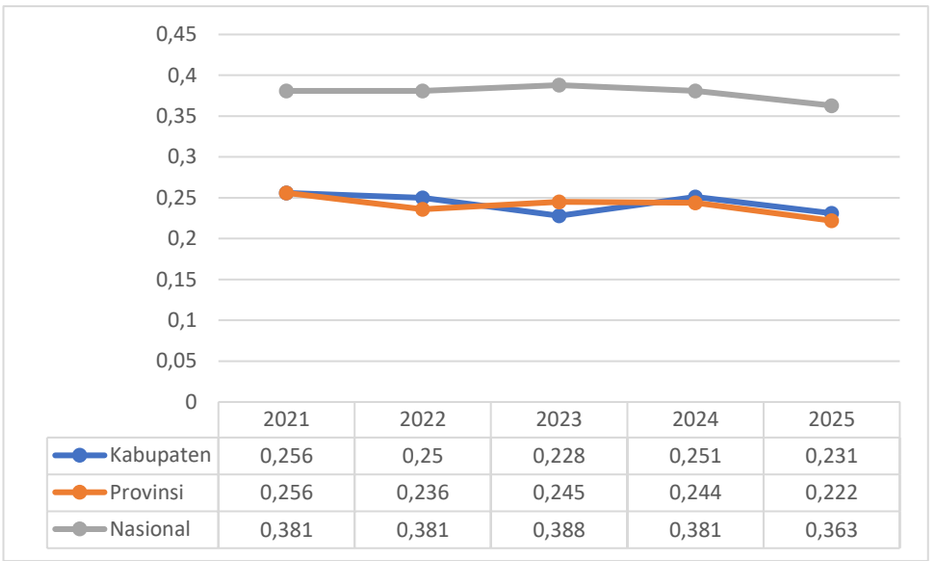
Rasio Gini Kabupaten dan Provinsi cenderung mengalami penurunan, yang mengindikasikan peningkatan pemerataan pendapatan di tingkat lokal. Gini rasio Nasional tetap relatif stabil, dengan sedikit kenaikan pada 2023 sebelum kembali turun di 2024. Meskipun terjadi fluktuasi, tren umum menunjukan adanya upaya pemerataan ekonomi, terutama di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Namun, peningkatan ketimpangan di beberapa tahun tertentu menunjukan bahwa masih ada tantangan dalam menciptakan distribusi pendapatan. Semakin tinggi nilai gini rasio (mendekati 1), semakin besar ketimpangan ekonomi, sementara semakin rendah nilai gini rasio (mendekati 0) semakin merata distribusi pendapatan.

Tabel 2. 28 Rasio Gini Tahun 2021 - 2025

Tahun	Kabupaten	Provinsi	Nasional
2021	0,256	0,256	0,381
2022	0,250	0,236	0,381
2023	0,228	0,245	0,388
2024	0,251	0,244	0,381
2025	0,231	0,222	0,363

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

Selanjutnya, tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan rasio gini Nasional, Provinsi dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2025.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten	0,256	0,25	0,228	0,251	0,231
Provinsi	0,256	0,236	0,245	0,244	0,222
Nasional	0,381	0,381	0,388	0,381	0,363

Grafik 2. 3 Perbandingan Rasio Gini Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

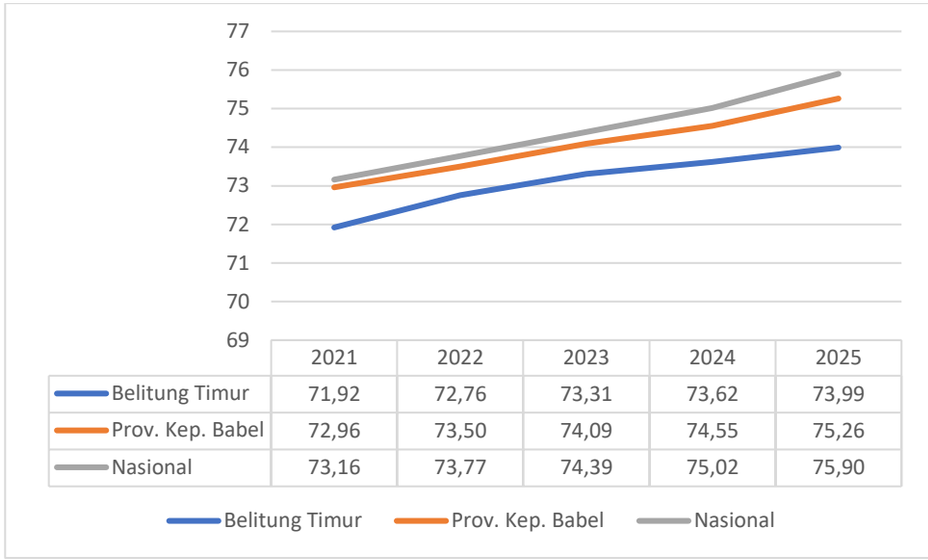
2.1.1.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian pembangunan manusia sekaligus menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Untuk mengetahui kinerja pembangunan manusia Kabupaten Belitung Timur secara komprehensif, capaian IPM dianalisis secara berkelanjutan dan dibandingkan dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta tingkat nasional. Analisis komparatif ini penting untuk melihat posisi dan daya saing daerah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan manusia pada periode perencanaan berikutnya.

Berikut disajikan perkembangan capaian IPM Kabupaten, provinsi dan nasional pada periode 5 (lima) tahun terakhir.



Grafik 2. 4 Perkembangan IPM Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Selama periode 2021–2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Nilai IPM meningkat dari 71,92 pada tahun 2021 menjadi 73,99 pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan sebesar 2,07 poin dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan pada kualitas pembangunan manusia, khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, capaian IPM Kabupaten Belitung Timur masih berada di bawah rata-rata provinsi sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2021, selisih IPM Belitung Timur dengan Provinsi Babel sebesar 1,04 poin, dan pada tahun 2025 selisih tersebut meningkat menjadi 1,27 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Belitung Timur mengalami kemajuan, laju peningkatannya masih perlu dipercepat agar dapat mengejar capaian pembangunan manusia tingkat provinsi.

Dibandingkan dengan capaian nasional, posisi IPM Kabupaten Belitung Timur juga relatif lebih rendah. Pada tahun 2021, IPM nasional tercatat sebesar 73,16, lebih tinggi 1,24 poin dibandingkan Belitung Timur. Pada tahun 2025, IPM nasional meningkat menjadi 75,90, sementara Belitung Timur berada pada angka 73,99, dengan selisih melebar menjadi 1,91 poin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Belitung Timur masih cukup besar jika disejajarkan dengan standar nasional.

Secara keseluruhan, capaian IPM Kabupaten Belitung Timur menunjukkan arah pembangunan yang positif dan progresif. Namun, kesenjangan capaian dengan tingkat provinsi dan nasional masih menjadi perhatian utama dan menuntut penguatan kebijakan pembangunan manusia yang lebih terfokus, terutama pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan daya beli masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis yang menggambarkan capaian pembangunan manusia secara komprehensif melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Perkembangan indikator komposit pembentuk IPM Kabupaten Belitung Timur

menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten, yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

1. **Dimensi Kesehatan**

   Nilai **Umur Harapan Hidup** Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan dari sekitar 73,17 tahun menjadi 74,12 tahun. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan pada kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan UHH mengindikasikan:

   - Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan
   - Perbaikan status gizi masyarakat
   - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat

   Capaian ini memperlihatkan bahwa pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Belitung Timur telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan IPM.

2. **Dimensi Pendidikan**

   Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari sekitar 8,47 tahun menjadi 9,03 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa secara aktual penduduk Kabupaten Belitung Timur semakin lama mengenyam pendidikan formal. Peningkatan RLS menunjukkan:

   - Menurunnya angka putus sekolah
   - Meningkatnya partisipasi pendidikan menengah
   - Dampak positif kebijakan pendidikan jangka panjang

   RLS menjadi indikator penting karena menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang telah masuk ke dunia kerja.

   Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari sekitar 11,63 tahun menjadi 11,78 tahun. Kenaikan ini menunjukkan adanya optimisme dan peluang yang semakin besar bagi anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

   Namun demikian, laju peningkatan HLS relatif lebih lambat dibandingkan RLS, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan atas.

3. **Dimensi Standar Hidup Layak**

   Pengeluaran riil per kapita disesuaikan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari sekitar 11.760 menjadi 12.694 (dalam satuan ribu rupiah/juta rupiah sesuai metodologi BPS).

   Peningkatan ini mencerminkan:

   - Meningkatnya daya beli masyarakat
   - Perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga
   - Dampak positif program penguatan ekonomi lokal dan perlindungan sosial

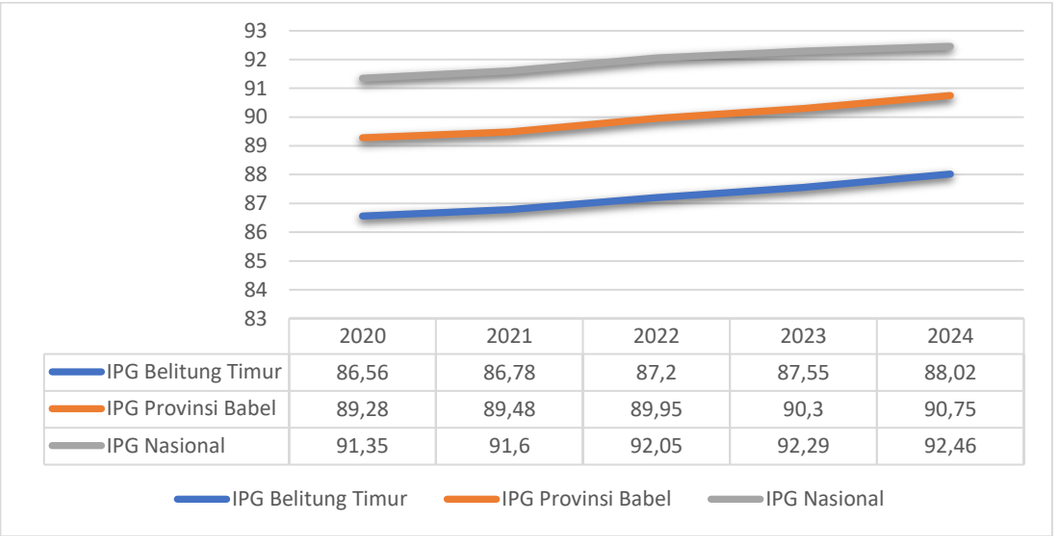
   Dimensi standar hidup layak menjadi salah satu pendorong utama kenaikan IPM Kabupaten Belitung Timur.

2.1.1.3.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator penting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kesetaraan kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan, terutama pada aspek

kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Perkembangan IPG menjadi cerminan sejauh mana kebijakan dan program pembangunan daerah telah memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh penduduk tanpa memandang jenis kelamin.

Untuk menilai posisi dan kinerja pembangunan gender Kabupaten Belitung Timur secara lebih objektif, capaian IPG dianalisis secara komparatif dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tingkat nasional. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan daerah sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan dan penetapan arah pembangunan gender pada periode perencanaan berikutnya. Berikut disajikan perkembangan capaian IPG Kabupaten Belitung Timur.



	2020	2021	2022	2023	2024
IPG Belitung Timur	86,56	86,78	87,2	87,55	88,02
IPG Provinsi Babel	89,28	89,48	89,95	90,3	90,75
IPG Nasional	91,35	91,6	92,05	92,29	92,46

Grafik 2. 5 Perkembangan capaian IPG Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selama periode tahun 2020–2024, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Belitung Timur menunjukkan perkembangan yang positif dan berkelanjutan. Nilai IPG meningkat dari 86,56 pada tahun 2020 menjadi 88,02 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas pembangunan gender, khususnya pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup perempuan di Kabupaten Belitung Timur.

Meskipun demikian, capaian IPG Kabupaten Belitung Timur masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan rata-rata nasional. Pada tahun 2024, IPG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 90,75, sedangkan IPG nasional telah mencapai 92,46. Selisih capaian antara Kabupaten Belitung Timur dengan provinsi masih sebesar 2,73 poin, sementara dengan capaian nasional mencapai 4,44 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan dan kualitas pembangunan gender di Kabupaten Belitung Timur masih memerlukan percepatan untuk dapat sejajar dengan capaian wilayah yang lebih tinggi.

Perkembangan IPG di Kabupaten Belitung Timur yang terus meningkat sejalan dengan tren positif di tingkat provinsi dan nasional. Namun, laju peningkatan di Kabupaten Belitung Timur relatif lebih lambat, sehingga kesenjangan capaian masih tetap bertahan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Belitung Timur belum sepenuhnya memperoleh akses

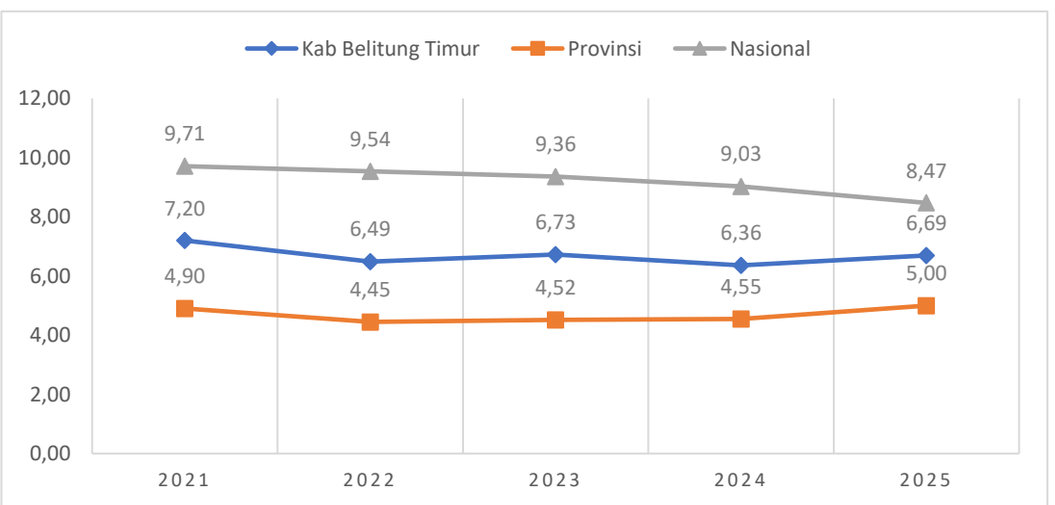
dan manfaat pembangunan yang setara, terutama dalam hal pendidikan lanjutan, kesempatan kerja formal, serta peningkatan daya beli dan kesejahteraan ekonomi.

Oleh karena itu, pada periode perencanaan berikutnya, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu memperkuat kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada percepatan peningkatan kualitas hidup perempuan, melalui penguatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat konvergensi capaian IPG Kabupaten Belitung Timur terhadap capaian provinsi dan nasional secara lebih berkelanjutan.

2.1.1.3.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang menjadi fokus utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi juga menunjukkan efektivitas kebijakan pembangunan sumber daya manusia, perlindungan sosial, dan pemerataan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, pemantauan kondisi kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Dalam rangka memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur, tabel berikut menyajikan data persentase penduduk miskin selama periode 2021–2025 serta perbandingannya dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional. Penyajian data ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah sekaligus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.



Grafik 2. 6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif namun

cenderung mengalami perbaikan. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 7,20 persen, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 6,49 persen. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 6,73 persen, kondisi tersebut kembali membaik pada tahun 2024 dengan penurunan kemiskinan hingga 6,36 persen. Pada tahun 2025, persentase kemiskinan kembali mengalami kenaikan terbatas menjadi 6,69 persen, namun secara umum masih berada pada level yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung Timur selama periode tersebut konsisten berada di atas rata-rata provinsi, namun jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2025 misalnya, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung Timur tercatat 6,69 persen, lebih tinggi dibandingkan provinsi yang sebesar 5,00 persen, namun lebih baik dibandingkan nasional yang masih berada pada 8,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur relatif cukup baik dalam konteks nasional, meskipun masih memerlukan penguatan intervensi pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta perlindungan sosial yang lebih terintegrasi untuk mengejar capaian provinsi.

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung Timur menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun fluktuasi yang masih terjadi mencerminkan adanya permasalahan struktural dan situasional yang mempengaruhi ketahanan ekonomi masyarakat. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kondisi kemiskinan antara lain masih terbatasnya kesempatan kerja produktif, khususnya di sektor non-pertambangan dan non-musiman, yang berdampak pada rendahnya stabilitas pendapatan rumah tangga. Selain itu, tingkat keterampilan dan kualitas sumber daya manusia yang belum merata turut membatasi akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan.

Permasalahan lainnya adalah masih tingginya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap sektor primer dan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga dan musim. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar, khususnya pendidikan berkualitas, kesehatan, perumahan layak, serta sanitasi dan air bersih di beberapa wilayah perdesaan juga berkontribusi terhadap kerentanan kemiskinan. Di sisi lain, efektivitas perlindungan sosial masih perlu diperkuat, baik dari aspek ketepatan sasaran, integrasi program, maupun keberlanjutan pendampingan ekonomi bagi keluarga miskin dan rentan.

Arah kebijakan pengentasan kemiskinan Kabupaten Belitung Timur ke depan difokuskan pada pendekatan terpadu yang mengombinasikan peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan kerentanan sosial. Kebijakan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor unggulan daerah, penguatan UMKM, peningkatan kewirausahaan lokal, serta diversifikasi ekonomi berbasis potensi wilayah seperti perikanan, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat intervensi perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan adaptif, melalui peningkatan

akurasi data kemiskinan, integrasi bantuan sosial lintas sektor, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Peningkatan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, terutama pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi, juga menjadi prioritas utama untuk memutus rantai kemiskinan jangka panjang. Seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif lintas perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat guna mewujudkan penurunan kemiskinan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Belitung Timur.

2.1.2 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.2.1.1 Pendidikan

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Pendidikan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Partisipasi Kasar PAUD	56,3	82.14	84,56	86.47	87
Angka Partisipasi Kasar SD	99,73	100.94	99,05	104.14	104,64
Angka Partisipasi Kasar SMP	92,09	88.02	90,47	91.76	95,5
Prosentase SD Berakreditasi A	13,33	14.42	11,43	11.43	11,43
Prosentase SMP Berakreditasi A	44	33.33	33,33	33.33	33,33
Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik	62,47	54.87	47,83	62.38	87,52
Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1	88,82	99.63	87,54	92.81	99

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan, 2026

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan wajib bidang pendidikan menunjukkan arah yang positif, terutama dalam hal peningkatan akses dan kualitas tenaga pendidik. akan tetapi, perlu adanya strategi yang lebih terarah untuk mendorong peningkatan mutu satuan pendidikan, khususnya dalam hal akreditasi sekolah. Indikator Angka Parisipasi Kasar (APK) pada jenjang PAUD, SD, SMP, cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. selain itu, persentase guru bersertifikat pendidik dan persentase guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal D IV/ S-1 juga mengalami peningkatan yang signifikan, ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas tenaga pendidik.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum menunjukan perkembangan, yaitu persentase SD berakreditasi A dan persentase SMP berakreditasi A yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan program reakreditasi yang saat ini lebih difokuskan pada sekolah yang belum pernah diakreditasi oleh BAN-SM Provinsi. sementara itu, sekolah yang telah memiliki status akreditasi mendapatkan penetapan ulang secara otomatis melalui Surat Keputusan (SK) tanpa proses penilaian ulang secara menyeluruh. hal ini menyebabkan terbatasnya peluang bagi sekolah untuk meningkatkan peringkat akreditasi menjadi A.

Adapun capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Belitung Timur pada bidang urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 30 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

Indikator SPM	2023	2024	2025		
			Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM (4)x80% + (5)x20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendidikan Anak Usian Dini	83,3	97,23	80	16,51	96,51
Pendidikan Dasar	95,08	96,11	76,27	19,43	95,70
Pendidikan Kesetaraan	77,66	57,09	48,04	18,39	66,43

Sumber: Web SPM Bangda, Dirjen Bangda Kemendagri, 2026

Rata-rata capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Tahun 2025 adalah 86,21 persen. berhasil mencapai kategori *Tuntas Madya* dengan indeks total sebesar 86,21 persen. Capaian ini didukung oleh tingginya angka pelayanan Anak Usia Dini yang menyentuh 96,51 persen dan Pendidikan Dasar sebesar 95,70 persen, meskipun Pendidikan Kesetaraan masih berada di angka 66,43 persen. Dalam proses pengisian capaian mutu, data yang digunakan merupakan data capaian tahun 2024 yang baru diterbitkan pada tahun 2025. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena jadwal rilis data resmi sering kali melewati batas akhir tenggat waktu pengisian capaian SPM untuk tahun berjalan.

Meskipun menunjukkan tren positif, terdapat sejumlah kendala signifikan yang menghambat optimalisasi penerapan SPM pada triwulan keempat. Dari sisi administratif, sinkronisasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi hambatan utama karena proses pemutakhiran data dari Dukcapil daerah ke pusat membutuhkan waktu hingga enam bulan, sehingga terjadi ketidakcocokan antara data lapangan dengan pusat data. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakakuratan perhitungan kebutuhan layanan serta munculnya kendala teknis pada aplikasi e-SPM, di mana *tagging* sub-kegiatan pendukung tidak terbaca secara maksimal. Akibatnya, anggaran yang terlapor dalam sistem tampak lebih kecil dibandingkan realisasi anggaran SPM yang sebenarnya di Dinas Pendidikan. Selain itu, faktor kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya pemahaman mendalam mengenai implementasi SPM dalam program kegiatan masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi di masa mendatang.

2.1.2.1.2 Kesehatan

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Kesehatan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2. 31 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	10	11,8	14,17	22,73	10,8
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	130	68,44	168,44	119,6	240
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (e-PPGBM)	3,84	4,50	5,00	4,88	6,55

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1,66	0,9	0,9	0,83	0,83
Persentase RS rujukan tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi Paripurna	100	100	100	100	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	81,52	85,26	68,79	83,99
Persentase Ibu hamil KEK mendapat Makanan Tambahan	NA	NA	NA	67,8	90
Persentase Ibu hamil menerima Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	NA	NA	NA	65,1	83,88
Persentase Ibu hamil menerima makanan bergizi seimbang	NA	NA	NA	NA	88,65
Persentase Ibu hamil memeriksakan kehamilannya 6 kali selama masa kehamilan	NA	NA	NA	74	83,99
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	91,22	80,69	90,04	78,73	90,45
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	94,57	84,57	94,15	77,19	89,31
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,89	92,45	98,15	92,07	85,12
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,89	99,96	98,74	96,24	100
Persentase anak baru lahir yang mendapatkan inisiasi menyusu dini	NA	NA	NA	66,22	76,16
Persentase anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif	NA	NA	NA	68,6	75,2
Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI);	NA	NA	NA	60,9	88,9
Persentase anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI)	NA	NA	NA	58,95	54,91
Persentase anak usia 0-23 bulan gizi buruk yang mendapatkan tatalaksana gizi buruk	NA	NA	NA	100	100
Persentase anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	NA	NA	NA	91,92	95,42
Persentase anak usia 0-23 bulan gizi kurang yang mendapat asupan gizi	NA	NA	NA	65	81,27

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi rutin lengkap	NA	NA	NA	73	87,7
Persentase anak usia 0-23 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc	NA	NA	NA	100	100
Persentase anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan obat cacing	NA	NA	NA	100	85
Persentase anak usia 24-59 bulan gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk	NA	NA	NA	65	100
Persentase anak usia 24-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembanganya	NA	NA	NA	100	100
Persentase anak usia 24-59 bulan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	NA	NA	NA	65	92,86
Persentase anak usia 24-59 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc	NA	NA	NA	100	100
Persentase temuan kasus pneumonia pada anak usia 24-59 bulan	NA	NA	NA	40	46,5
Persentase anak usia 24-59 bulan yang mendapatkan obat cacing	NA	NA	NA	100	73,3
Persentase Remaja Putri yang mengonsumsi TTD	NA	NA	NA	61,3	90,4
Persentase Remaja putri yang mendapatkan pemeriksaan anemia	NA	NA	NA	95,6	99,8
Persentase Calon Pengantin yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan pra nikah	NA	NA	NA	86,7	82,73
Persentase Calon Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	NA	NA	NA	74,58	82,73
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80,16	73	88,49	63,96	96,56
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	70,03	80,09	87,07	80,37	92,51
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80,08	85,3	78,37	94,93	85,97
Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,58	93,8	95,3	88,92	97,71
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	102,99	106,31
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	108,64	124,75	64,35	103,09	134

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	83,1	124	93,81	81,2	88
Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	NA	NA	NA	65	78,45
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) %	96,3	98,45	98,89	98,23	99,71
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	NA	NA	NA	22,46	90,99
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	NA	NA	NA	83	88
Persentase Penilaian Capaian Tatanan Kehidupan Sehat Mandiri	NA	NA	NA	71	78,45
Cakupan balita wasting yang ditangani	NA	NA	NA	NA	100
Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	NA	NA	NA	71	100
Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	NA	NA	NA	NA	50
Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri (Persen)	NA	NA	NA	NA	46,15
Angka kelangsungan hidup bayi	990	988,2	985,83	997,67	989,2
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	13,6	14,6	14,17	22,7	12,6
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	7,5	8,4	12,6	16,15	6,61
Rasio posyandu per satuan balita	1,25	1,89	1,81	1,81	1,81
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	23,5	22,7	23,25	23,25	23,25
Rasio Rumah Sakir per satuan penduduk	0,8	0,78	0,77	0,77	0,77
Rasio dokter (umum dan gigi) per satuan penduduk	49	64,54	51,92	52,98	52,98
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	65	64,54	58,89	55,25	55,25
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesahatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98	100,73	90,04	74,5	90,45
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	92	97,1	95,85	95	95
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1,48	0	0	0	0
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100	100	100

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	100	100	100	100	100
Penderita diare yang ditangani	100	100	100	100	100
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,66	0,9	0,9	0,83	0,83
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100	100	100	100	100
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100
Proporsi pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar	100	100	100	100	100
Persentase penggunaan obat rasional	92	95	92	85	89
Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat sesuai standar	55,3	58,81	58,54	73,35	73,35
Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	96,6	97	97,8	98,23	100
Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100
Persentase kelurahan/ desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	51,28	66,6	66,67	100	100
Persentase kelurahan/desa yang melaksanakan pembinaaan posyandu aktif	89,74	99,25	99,25	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan, 2026

Komitmen kuat dalam pembangunan kesehatan dengan keberhasilan mencapai target pada 68 indikator utama. Keberhasilan ini tercermin dari menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Neonatal yang diiringi dengan penguatan layanan dasar seperti persalinan oleh tenaga medis kompeten serta inisiasi menyusu dini. Sektor pencegahan stunting menjadi sorotan utama melalui pemantauan ketat pada ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan (KEK), suplemen MMS, dan pemeriksaan rutin enam kali selama kehamilan serta optimalisasi asupan gizi dan imunisasi lengkap bagi balita hingga usia 59 bulan. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita berdasarkan data e-PPGBM di Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 3,84 persen, kemudian meningkat menjadi 4,50 persen pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 5,00 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 4,61 persen, namun pada tahun 2025 prevalensi stunting kembali mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 6,55 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Belitung Timur masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pemenuhan gizi, pola asuh, sanitasi lingkungan,

maupun akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Kenaikan prevalensi pada tahun 2025 menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan edukasi gizi kepada masyarakat, optimalisasi pelayanan kesehatan dasar, serta peningkatan kualitas lingkungan sehat dan ketahanan pangan keluarga. Selain itu, aksesibilitas layanan kesehatan semakin merata berkat peningkatan rasio daya tampung rumah sakit, akreditasi paripurna fasilitas kesehatan, hingga perluasan cakupan JKN dan skrining kesehatan bagi usia produktif maupun lansia. Kesuksesan ini juga didukung oleh penguatan sumber daya manusia di Puskesmas, ketersediaan obat dan vaksin yang stabil, serta aktifnya gerakan masyarakat hidup sehat di tingkat desa.

Di sisi lain, terdapat 8 indikator yang masih memerlukan evaluasi mendalam karena belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Salah satu tantangan krusial adalah Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dan angka kelangsungan hidup bayi yang masih berada di bawah ekspektasi. Dari sisi intervensi gizi dan pencegahan penyakit menular pada anak, program pemberian obat cacing bagi rentang usia 0-59 bulan serta penemuan kasus pneumonia pada balita juga belum mencapai target yang optimal. Selain itu, aspek edukasi dan preventif di hulu masih mengalami kendala, terutama pada persalinan yang masih membutuhkan dukungan ASI eksklusif hingga 23 bulan, cakupan pemeriksaan kesehatan pra-nikah bagi calon pengantin, serta standarisasi pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi. Indikator-indikator ini menjadi catatan penting untuk dilakukan perbaikan strategi intervensi pada periode berikutnya.

Adapun capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Belitung Timur pada bidang urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 32 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

Indikator SPM	2023	2024	2025		
			Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM (4)x80% + (5)x20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,21	75,67	67,11	20	87,11
Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	92,03	82,98	72,33	20	92,32
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,32	82,39	71,45	20	91,45
Pelayanan kesehatan balita	93,37	93,65	69,20	20	89,20
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	97,32	100	77,32	20	97,32
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	89,7	96,62	77,29	20	97,29
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	89,57	85,11	66,10	20	86,10
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	80,2	95,95	68,78	20	88,78
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	94,61	91,14	76,50	20	96,50
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	91,43	100	80	20	100

Indikator SPM	2023	2024	2025		
			Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM (4)x80% + (5)x20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan orang terduga tuberkulosis	70,42	100	80	20	100
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	93,05	84,96	70,65	20	90,65

Sumber: Web SPM Bangda, Dirjen Bangda Kemendagri, 2026

Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan berhasil meraih kategori *Tuntas Utama* dengan total capaian sebesar 93,06 persen. Keberhasilan ini didorong oleh performa maksimal pada pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat serta orang terduga tuberculosis yang keduanya mencapai 100 persen, disusul oleh pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar 97,32% dan penderita diabetes melitus 96,50%. Meskipun demikian, beberapa indikator masih menunjukkan angka yang bervariasi, seperti pelayanan kesehatan usia lanjut sebesar 86,10 persen dan ibu hamil sebesar 87,11 persen. Secara umum, kendala utama dalam mencapai angka 100 persen adalah adanya selisih antara sasaran proyeksi yang ditetapkan di awal tahun dengan kondisi riil di lapangan, terutama pada penderita hipertensi dan diabetes yang sasarannya dihitung berdasarkan prevalensi Survei Kesehatan Indonesia 2023.

Dalam proses implementasinya, Dinas Kesehatan menghadapi berbagai tantangan sektoral, mulai dari masalah kesadaran masyarakat hingga kendala infrastruktur. Rendahnya kesadaran warga usia produktif dan usia lanjut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi hambatan yang kini dimitigasi melalui penyuluhan serta kegiatan cek kesehatan gratis. Pada sektor kesehatan ibu dan anak, capaian terhambat oleh adanya ibu hamil yang melewatkan pemeriksaan K1 pada trimester pertama, yang secara otomatis juga berdampak pada penurunan capaian skrining risiko HIV. Selain itu, ditemukan kendala teknis berupa kerusakan alat USG di beberapa puskesmas yang menghambat pemenuhan mutu pelayanan. Masalah sinkronisasi data juga terjadi pada kategori usia pendidikan dasar akibat perbedaan antara data siswa formal dengan anak tidak sekolah, serta fluktuasi sasaran ODGJ yang terus berubah setiap bulannya sehingga menyulitkan akurasi pelaporan.

2.1.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tabel 2. 33 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	62,78	63,907	65,5	69,045	67,91

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Penataan Ruang	NA	NA	NA	NA	74,23
Persentase penanganan drainase lingkungan dan perkotaan	20	33	43,05	60	60
Persentase penanganan jalan kabupaten	58,2	58,64	54,08	61,09	58,96
Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur	20	11	48,60	48,60	37,93
Persentase pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten	28,17	30,15	36,93	33,61	40,13
Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	14	28	28	28	28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2026

Capaian indikator pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan adanya peningkatan maupun stabilitas di beberapa aspek. Indeks Infrastruktur Wilayah pada periode 2021–2024 masih menggunakan metode pengukuran lama yang menggabungkan komponen akses pelayanan dasar, pekerjaan umum, serta perumahan dan permukiman, dengan tren capaian yang relatif meningkat. Pada tahun 2025 dilakukan perubahan metode pengukuran dengan penyesuaian komponen dan perbaikan kualitas data, sehingga nilai 67,91 ditetapkan sebagai baseline baru yang lebih akurat dan terukur. Indeks Penataan Ruang yang mulai digunakan tahun 2025 juga mencatat capaian awal cukup tinggi sebesar 74,23. Selain itu, persentase penanganan drainase lingkungan dan perkotaan meningkat signifikan dari 20% pada 2021 menjadi 60% pada 2024 dan stabil di 2025, serta persentase pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten menunjukkan tren positif hingga mencapai 40,13% pada 2025.

Sementara itu terdapat juga indikator yang mengalami penurunan atau fluktuasi. Indeks Infrastruktur Wilayah (atau Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (2) dengan metode lama) pada 2025 tercatat menurun sekitar 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun hal ini lebih mencerminkan hasil perbaikan kualitas data daripada penurunan substantif kondisi infrastruktur. Persentase penanganan jalan kabupaten menunjukkan ketidakstabilan, sempat turun dari 58,64% pada 2022 menjadi 54,08% pada 2023, kemudian naik pada 2024, namun kembali menurun menjadi 58,96% pada 2025. Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur juga menurun dari 48,60% pada 2023–2024 menjadi 37,93% pada 2025. Sementara itu, persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang stagnan di angka 28% sejak 2022 hingga 2025, menunjukkan belum adanya perkembangan signifikan dalam penyediaan dokumen tata ruang

Adapun capaian kinerja **Standar Pelayanan Minimal** (SPM) Kabupaten Belitung Timur pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 34 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator SPM	2023	2024	2025		
			Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM (4)x80% + (5)x20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	78	100	80	20	100
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	91,22	100	78,40	19,60	98,01

Sumber: Web SPM Bangda, Dirjen Bangda Kemendagri, 2026

Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan Pekerjaan Umum berhasil meraih kategori *Utama* dengan total indeks pencapaian yang sangat tinggi, yakni sebesar 99 persen. Keberhasilan ini ditopang oleh pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang telah mencapai target sempurna sebesar 100 persen. Sementara itu, untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, kinerjanya juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian sebesar 98,01 persen.

Meskipun mencatatkan angka pencapaian yang mendekati sempurna, terdapat beberapa kendala mendasar dalam proses penerapan SPM di sektor Pekerjaan Umum ini. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan sarana dan prasarana penunjang sehingga pemenuhan SPM belum dapat dioptimalkan secara menyeluruh. Selain masalah infrastruktur, tantangan lainnya muncul dari sisi manajerial, di mana rendahnya kualitas manajemen serta profesionalisme aparatur masih menjadi hambatan. Hal ini diperparah dengan belum validnya data dasar pelayanan, yang pada akhirnya menghambat efektivitas penyusunan rencana aksi dalam implementasi SPM Pekerjaan Umum ke depan.

2.1.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tabel 2. 35 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Perumahan dan Permukiman	42,25	53,32	65,37	66,21	75,11
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan rasarana, sarana,utilitas (PSU)	100	99,35	99,35	99,35	99,35
Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	95,57	87,19	90,20	92,04	92,04
Rasio rumah layak huni	48	52,29	40,31	58,20	60,30
Rasio permukiman layak huni	99,2	99,35	99,35	99,37	99,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2026

Indikator pada urusan ini secara umum menunjukkan capaian positif. Indeks Perumahan dan Permukiman meningkat konsisten dari 42,25 pada 2021 hingga mencapai 75,11 pada 2025. Rasio rumah layak huni juga mengalami peningkatan menjadi 60,30 pada 2025, sementara rasio

permukiman layak huni tetap stabil di atas 99%. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU juga relatif stabil di kisaran 99,35% hingga 99,37%, mencerminkan keberlanjutan kualitas layanan dasar permukiman.

Di sisi lain, terdapat indikator yang sempat mengalami penurunan. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar menurun dari 95,57% pada 2021 menjadi 87,19% pada 2022, meskipun kemudian membaik hingga 92,04% pada 2024–2025 (angka 2025 masih bersifat sementara). Rasio rumah layak huni juga sempat turun drastis pada 2023 menjadi 40,31 sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas hunian yang perlu terus diperbaiki.

Adapun capaian kinerja **Standar Pelayanan Minimal** (SPM) Kabupaten Belitung Timur pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 36 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator SPM	2023	2024	2025		
			Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM (4)x80% + (5)x20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	94,29	92,31	100	100	100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100	92,31	100	100	100

Sumber: Web SPM Bangda, Dirjen Bangda Kemendagri, 2026

Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Belitung Timur berhasil mencapai predikat *Tuntas Paripurna.* Indeks pencapaian ini tercatat sempurna dengan angka 100 persen, yang mencakup dua indikator utama pelayanan. Indikator tersebut meliputi penyediaan serta rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana skala kabupaten/kota, serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program Pemerintah Daerah, yang keduanya berhasil terpenuhi secara maksimal.

Keberhasilan meraih nilai mutlak sebesar 100 persen dengan kategori Tuntas Paripurna ini didorong oleh kondisi stabilitas daerah sepanjang tahun anggaran berjalan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejadian bencana dalam skala kabupaten yang melanda wilayah tersebut pada tahun 2025. Selain itu, tidak terdapat pula kegiatan relokasi rumah masyarakat dalam program Pemerintah Daerah, sehingga target sasaran dapat dikelola dengan optimal sesuai dengan rencana pelayanan minimal yang ditetapkan.

2.1.2.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Mayarakat

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Mayarakat,

mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2. 37 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase gangguan trantibum yang dapat di selesaikan	98,23	99,31	98,66	100	100
Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100	100	100	100	100
Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	90	90	90	100	100
Indeks Ketahanan Daerah	NA	NA	NA	0,48	0,48

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2026

Indikator yang menunjukkan kinerja baik adalah Persentase perda dan perkada yang ditegakkan serta Persentase cakupan perlindungan masyarakat. Indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat di selesaikan mengalami fluktuasi namun menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 dengan capaian 100%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 98,66%. Capaian indikator Persentase perda dan perkada yang ditegakkan dan Persentase cakupan perlindungan masyarakat sudah baik dengan capaian yang selalu mencapai 100% setiap tahunnya, indikator ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah laporan pengaduan Masyarakat terhadap jumlah pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti.

Capaian indikator Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran juga mengalami peningkatan ditahun 2024 dan 2025 dengan memenuhi target sebesar 100% dibandingkan tahun 2021, 2022, dan 2023 yang hanya sebesar 90%. Selanjutnya pada indikator Indeks Ketahanan Daerah, capaian tahun 2024 dan 2025 memperoleh nilai yang sama yaitu sebesar 0,48 dan sudah mencapai target yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah. Akan tetapi hasil ini belum sepenuhnya maksimal, maka dari itu target untuk tahun berikutnya menargetkan peningkatan dari realisasi tahun 2025.

Adapun capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Belitung Timur pada bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Mayarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 38 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Mayarakat

Indikator SPM	2023	2024	2025		
			Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM (4)x80% + (5)x20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota	92,22	93,99	80	10	90
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	95	85	80	10	90

Indikator SPM	2023	2024	2025		
			Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM (4)x80% + (5)x20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100	80	12,50	92,50
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	80	20	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	95	94,78	80	15,90	95,90

Sumber: Web SPM Bangda, Dirjen Bangda Kemendagri, 2026

Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) berhasil meraih indeks capaian sebesar 93,35 persen dengan kategori *Tuntas Utama.* Keberhasilan ini didukung oleh performa maksimal pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang mencapai 100 persen, serta pelayanan pemadam kebakaran (DAMKAR) yang menyentuh angka 95,90 persen. Sementara itu, indikator lainnya seperti pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan informasi rawan bencana masing-masing berada di angka 90 persen, diikuti oleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 92,50 persen.

Meskipun mencatatkan nilai yang cukup tinggi, pelaksanaan SPM Trantibumlinmas masih menghadapi hambatan serius pada aspek sarana dan prasarana akibat keterbatasan anggaran daerah. Kendala yang paling krusial terlihat pada unit pemadam kebakaran, di mana dari total empat unit kendaraan yang tersedia, hanya satu unit yang masih mampu beroperasi secara normal, sementara tiga unit lainnya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Selain persoalan alat utama, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi tantangan besar karena kompetensi yang belum mumpuni serta masih kurangnya pemahaman mendalam terkait teknis implementasi SPM dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.2.1.6 Sosial

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Sosial, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel 2. 39 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	100	100	100	100	100
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	58	100	100	100	100
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	100	100	98,45	100

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	NA	100	100	100	100
PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	NA	100	58	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2026

Indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan menunjukkan capaian sangat baik dan konsisten, yakni 100% selama periode 2021–2025. Hal ini mencerminkan keberhasilan Dinas Sosial dalam mengoptimalkan peran PSKS sebagai mitra dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, mulai dari kegiatan nyata penanganan kemiskinan dan masalah sosial, pendampingan kelompok rentan, penyuluhan, advokasi, hingga pemutakhiran data melalui aplikasi SIKS-DJ. Demikian pula indikator Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami peningkatan signifikan dari 58% pada tahun 2021 menjadi 100% sejak 2022 hingga 2025, dengan kategori sangat baik. Bantuan tersebut mencakup program nasional seperti PKH, BPNT/Sembako, PBI kesehatan, serta dukungan APBD berupa permakanan, sandang, dan alat bantu.

Tidak terdapat indikator yang menurun atau belum tercapai pada urusan sosial, karena seluruh indikator telah mencapai target maksimal 100% dan dipertahankan secara konsisten selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan keberhasilan penuh dalam pelaksanaan program sosial di Kabupaten Belitung Timur.

Adapun capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Belitung Timur pada bidang urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 40 Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

Indikator SPM	2023	2024	2025		
			Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM (4)x80% + (5)x20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	81,06	89,23	80	20	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	86	88,33	80	20	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	87,27	89,23	80	20	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	100	0	3,3	3,3
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	80	77,03	80	20	100

Indikator SPM	2023	2024	2025		
			Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM (4)x80% + (5)x20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
bencana bagi korban bencana kabupaten/kota					

Sumber: Web SPM Bangda, Dirjen Bangda Kemendagri, 2026

Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial di Kabupaten Belitung Timur berhasil masuk dalam kategori *Tuntas Madya* dengan indeks sebesar 80,67 persen. Keberhasilan ini ditandai dengan capaian sempurna 100 persen pada hampir seluruh indikator, yaitu rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana. Namun, nilai indikator rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis (tuna sosial) tercatat sangat rendah, yakni hanya 3,33 persen. Rendahnya angka ini disebabkan oleh kendala sistemik pada aplikasi Kemendagri, di mana meskipun secara faktual tidak ditemukan gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut berdasarkan Surat Keterangan resmi nomor 400.9.3/1/KET/DSP3A/2026, sistem tetap membaca perhitungan input nol sebagai capaian nol persen dan menutup menu unggah bukti dukung.

Selain kendala teknis aplikasi, pencapaian SPM Sosial juga menghadapi hambatan operasional dan administratif yang signifikan. Proses pengumpulan data dari desa-desa belum sepenuhnya menyeluruh dan masih dilakukan secara manual, sehingga validasi data baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi terbatas. Dari sisi manajerial, meskipun perencanaan telah disusun dengan baik, keterbatasan anggaran saat penentuan pagu menyebabkan tidak semua sub-kegiatan pendukung mutu pelayanan dapat diakomodasi. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia serta sarana prasarana pendukung yang belum memadai, seperti kendaraan operasional pelayanan dan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang standarnya belum sesuai ketentuan. Terkait masalah input data tuna sosial, pihak pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kemensos RI untuk melaporkan dampak peniadaan menu bukti dukung tersebut terhadap penurunan nilai capaian SPM Sosial daerah secara keseluruhan.

2.1.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.2.2.1 Tenaga Kerja

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Tenaga Kerja, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja sebagai berikut:

Tabel 2. 41 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,78	2,50	2,41	2,63	3,05
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (juta)	85,66	88,76	86,10	87,12	92,01

3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	34,28	34,43	33,54	2,05	2,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2026

Indikator yang menunjukkan tren positif pada tahun 2025 adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja. Indikator ini berhasil meningkat cukup signifikan menjadi 92,01 juta dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 87,12 juta, atau tumbuh sekitar 5,61%. Peningkatan ini mencerminkan penguatan kinerja ekonomi daerah serta meningkatnya nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja melalui efisiensi produksi dan perkembangan sektor produktif.

Di sisi lain, terdapat indikator yang menunjukkan penurunan kinerja atau tren negatif pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan menjadi 3,05% dari sebelumnya 2,63% pada tahun 2024. Peningkatan pengangguran ini dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan angkatan kerja yang belum seimbang dengan penciptaan lapangan kerja baru, di mana pengangguran terbanyak berasal dari lulusan SMA/sederajat. Selain itu, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak juga mengalami penurunan tipis menjadi 2,00% dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,05%. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh perubahan metode pendataan, penyesuaian kriteria penilaian, serta masih rendahnya kepatuhan perusahaan skala kecil dan menengah dalam memenuhi seluruh komponen tata kelola normatif.

2.1.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 2. 42 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	NA	NA	NA	0,31	0,24
Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapat Layanan Komprehensif Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	NA	NA	NA	100	100
Persentase Anak Korban Kekerasan yang di layani dan mendapatkan Pemenuhan Hak Perlindungan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	NA	NA	NA	100	100

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2026

Capaian kinerja pada urusan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak menunjukkan hasil yang relatif baik dan konsisten dari tahun ke tahun. Persentase pengelolaan sistem data gender dan anak yang tersedia tercapai sebesar 100 persen pada periode 2021–2024, yang menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan data terpilah sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender dan anak. Sementara itu indikator layanan perlindungan, capaian kinerja menunjukkan hasil optimal. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif serta persentase anak korban kekerasan yang dilayani dan memperoleh pemenuhan hak perlindungan masing-masing mencapai 100 persen pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sistem layanan perlindungan perempuan dan anak telah berjalan dengan baik, responsif, dan mampu menjangkau seluruh korban yang teridentifikasi.

Dari sisi penganggaran, persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD mulai terukur pada tahun 2024 sebesar 0,31 persen dan pada tahun 2025 sebesar 0,24 persen. Capaian ini menunjukkan adanya upaya integrasi perspektif gender dalam penganggaran daerah, meskipun masih diperlukan penguatan komitmen lintas perangkat daerah agar proporsi ARG dapat terus ditingkatkan secara bertahap.

2.1.2.2.3 Pangan

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Pangan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Pangan sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)	2.637	2.549	2.596	2.708	2.481
Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)	130,21	149,38	150,84	155,17	155,57
Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	30	40	40	40	40
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Angka)	82,30	82,70	85,4	85,3	85,5
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	95,24	97,42	86,43	91,86	90,04
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment) (Persen*)	NA	NA	NA	NA	10,32

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2026

Pada tahun 2025 ketersediaan protein per kapita menunjukkan tren positif dengan mencapai 155,57 gram/kapita/hari, yang melampaui target sebesar 197,98% berkat tingginya kontribusi sektor perikanan dan peternakan. Kualitas pola konsumsi masyarakat juga mengalami perbaikan yang ditandai dengan kenaikan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 85,5, didorong oleh peningkatan konsumsi pangan hewani, sayur, buah, dan kacang-kacangan. Selain itu, kesejahteraan akses pangan penduduk meningkat secara signifikan dengan menurunnya angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) dari 10,32% menjadi 9,37%. Hal ini didukung oleh stabilitas harga

pangan strategis seperti beras dan minyak goreng, serta rendahnya tingkat inflasi daerah yang berada di angka 2,69% hingga akhir tahun 2025.

Beberapa indikator pangan tercatat mengalami penurunan atau berjalan stagnan, di antaranya ketersediaan energi per kapita yang turun menjadi 2.481 kkal/kapita/hari dari tahun sebelumnya, meskipun angka tersebut masih memenuhi standar kecukupan 2.400 kkal. Indikator penguatan cadangan pangan juga bersifat stagnan di angka 40 ton karena tidak adanya penambahan pengadaan sejak tahun 2022, di mana pemerintah daerah lebih berfokus pada penyesuaian harga stok beras yang dititipkan di Bulog sesuai harga jual terbaru. Selain itu, capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan menurun sebesar 1,82% menjadi 90,04% akibat masih ditemukannya residu pestisida seperti *difenoconazole* dan *sipermethrin* serta bakteri *e-coli* pada hasil pengujian laboratorium. Target PPH juga belum tercapai sepenuhnya karena konsumsi umbi-umbian dan biji berminyak masih berada di bawah rekomendasi ideal.

2.1.2.2.4 Pertanahan

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Pertanahan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Pertanahan sebagai berikut:

Tabel 2. 44 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu	0	0	0	0	0
Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	0	0	0	0	62,44

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2026

Indikator Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat menunjukkan capaian yang cukup baik dan stabil. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 517 bidang tanah dari total 828 bidang tanah milik pemerintah daerah telah memiliki sertifikat resmi. Dengan demikian, persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat mencapai 64,43%. Pencapaian ini turut mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, karena aspek pertanahan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini berkontribusi terhadap capaian positif Indeks Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur pada tahun berjalan.

Sementara itu, indikator Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu belum menunjukkan capaian pada periode pelaporan ini. Hal tersebut disebabkan belum adanya kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga indikator ini belum dapat diukur maupun direalisasikan. Dengan kondisi tersebut, indikator ini masih berada pada posisi nol dan belum mengalami pergerakan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan program ke depan agar dapat mendukung target pembangunan yang lebih komprehensif.

2.1.2.2.5 Lingkungan Hidup

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Lingkungan Hidup, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 2. 45 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase ketersediaan data dan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup (Persen)	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Air (Nilai)	59,52	59,09	61,56	54,00	76,42
Indeks Kualitas Udara (Nilai)	95,15	94,50	95,23	92,33	83,29
Indeks Kualitas Lahan (Nilai)	43,18	43,18	43,89	45,95	63,05
Jumlah Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan yang dilakukan pengawasan Lingkungan Hidup yang diterbitkan Kabupaten (Usaha)	50	50	50	35	35
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (Persen)	100	100	100	0	100
Persentase Sampah Terkelola (Persen)	62,34	71,69	74,25	67,92	68,90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026

Secara umum kinerja menunjukkan dinamika yang beragam. Ketersediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup terjaga konsisten dengan capaian 100 persen setiap tahun. Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan mengalami fluktuasi namun menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun 2025, yang mencerminkan mulai efektifnya upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan.

Sebaliknya, Indeks Kualitas Udara cenderung menurun sejak tahun 2024, seiring meningkatnya aktivitas transportasi dan pembangunan yang berdampak pada kualitas udara. Sementara itu, jumlah perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan yang diawasi menurun sejak tahun 2024 akibat berkurangnya usaha aktif karena berakhirnya masa izin dan penghentian operasional beberapa kegiatan usaha. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada umumnya mencapai target, meskipun sempat nihil pada tahun 2024 dan kembali optimal pada tahun 2025. Adapun persentase sampah terkelola mengalami penurunan sejak tahun 2024 yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan timbulan sampah yang belum diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk keterbatasan armada pengangkut, sehingga menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan penguatan program lingkungan hidup pada RKPD Tahun 2027.

2.1.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	82,96	70,33	73,85	65,80	88,92
Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	87,45	87,45	N/A	92,67	102,91
Rasio pasangan non muslim berakta kawin	99,39	98,06	97,70	99,27	99,55
Rasio pasangan non muslim berakta cerai	76,18	78,70	83,52	85,33	101,17
Cakupan penerbitan akta kelahiran	0.91	0.92	0.92	0.93	0.829

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil, 2026

Capaian indikator urusan administrasi kependudukan menunjukkan adanya tren positif pada beberapa aspek layanan. Rasio pasangan non-muslim berakta kawin dan berakta cerai mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, bahkan mencapai lebih dari 100% pada 2025 untuk akta cerai, yang menandakan adanya perbaikan dalam pencatatan peristiwa penting. Demikian pula cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan lonjakan signifikan, dari 87,45% pada 2021–2022 menjadi 102,91% pada 2025. Hal ini mencerminkan keberhasilan program perluasan cakupan layanan administrasi kependudukan, termasuk adanya inovasi pelayanan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.

Cakupan penerbitan KTP sempat menurun drastis pada 2022–2024 sebelum kembali meningkat pada 2025, sehingga menggambarkan adanya tantangan konsistensi dalam pelayanan. Cakupan penerbitan akta kelahiran relatif stagnan di kisaran 0,91–0,93, bahkan menurun menjadi 0,829 pada 2025, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap layanan dasar ini. Catatan penting juga terdapat pada indikator persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Penurunan capaian pada indikator ini tidak semata mencerminkan lemahnya kinerja, melainkan dipengaruhi oleh perubahan metode pengukuran serta adanya persyaratan baru berupa kewajiban kepemilikan ISO 27001 dalam pemanfaatan data kependudukan, sehingga capaian perlu ditafsirkan dengan konteks regulasi yang lebih ketat.

2.1.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Desa yang Melakukan Penataan Desa	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase Desa yang Melakukan Kerja Sama Antardesa	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase peningkatan status desa mandiri	100	100	100	100	0
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif	NA	NA	NA	NA	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan KB, 2026

Capaian kinerja Indikator persentase desa yang melakukan penataan desa dan indikator persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa merupakan indikator yang baru digunakan di tahun 2026 sehingga data capaian kinerja pada tahun 2021 hingga tahun 2025 belum tersedia. Perbedaan signifikan antara target dan capaian indikator Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Tahun 2025 dan Tahun 2024 disebabkan oleh Rumusan Formulasi pengukuran untuk perhitungan Persentase peningkatan status desa mandiri masih menggunakan indikator status desa Berkembang, sedangkan sejak Tahun 2025 Kabupaten Belitung Timur sudah tidak memiliki desa dengan status berkembang sehingga bila diformulasikan sebagaimana rumusan di atas tidak dapat menghasilkan nilai yang diinginkan atau nilai peningkatan status Persentase peningkatan status desa mandiri yaitu 0. Di Tahun 2025 Kabupaten Belitung Timur melalui Data Indeks Desa mengalami peningkatan status yaitu desa dengan Status Desa Mandiri sebanyak 28 Desa dan desa dengan Status Maju sebanyak 11 Desa. Secara kinerja capaian terhadap peningkatan jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri sebesar 71,79% sebesar 39,21% bestatus Desa Maju. Terdapat perubahan sistem Pengukuran pada aplikasi idm.kemendesa.go.id dari semula Indeks Desa Membangun menjadi Indeks Desa, Dimana perubahan tersebut disertai dengan penambahan Dimensi Penilaian dari semula hanya terdapat 3 (tiga) dimensi yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) menjadi 6 (enam) dimensi yaitu dengan adanya penambahan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa, Dimensi Layanan Dasar dan Aksesibilitas. Penambahan Dimensi Penilaian tentunya menambah kriteria-kriteria tertentu sebagai capaian untuk menuju Desa dengan Status Desa Mandiri.

Indikator Kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif merupakan indikator kinerja yang baru digunakan pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur. Capaian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar LKD telah melaksanakan fungsi dan perannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. LKD yang aktif secara umum telah melaksanakan kegiatan secara rutin, memiliki struktur kepengurusan yang berjalan, serta terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa. Keaktifan tersebut tercermin dari keterlibatan dalam musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta dukungan terhadap program prioritas daerah.

2.1.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tabel 2. 48 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Kelahiran remaja umur 15 sd 19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	37	30,56	31,52	37,1	34,3
Angka Kelahiran Total (TFR)	2,20	1,74	1,99	2,07	2,07
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence rate/mCPR)	89,7	76,08	81,93	76,4	78,2
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,3	12,59	5,5	5,1	6,4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan KB, 2026

Beberapa indikator utama dalam urusan pengendalian penduduk di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren peningkatan atau kenaikan nilai angka yang memerlukan pengawasan ketat. Dinamika angka kelahiran remaja di Kabupaten Belitung Timur selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan yang belum stabil, dengan penurunan pada tahun 2022 namun kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024 namun menurun pada tahun 2025 hingga mencapai 34,3. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya risiko pernikahan dini dan kehamilan remaja yang memerlukan perhatian serius, terutama melalui penguatan edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan peran keluarga dan sekolah, serta perluasan akses layanan kesehatan ramah remaja secara berkelanjutan. Kondisi serupa terlihat pada Angka Kelahiran Total (TFR) yang merangkak naik dari 1,74 (tahun 2022) dan stabil di angka 2,07 pada tahun 2024 hingga 2025, menunjukkan tingkat fertilitas yang kembali berada pada kisaran angka penggantian penduduk. Selain itu, persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) diproyeksikan mulai membaik atau meningkat menjadi 78,2% pada tahun 2025 setelah sebelumnya sempat mengalami fluktuasi tajam.

Sementara itu, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan dinamika penurunan atau fluktuasi yang menjadi tantangan strategis bagi pemerintah daerah. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) tercatat mengalami penurunan cukup tajam menjadi 76,08% pada tahun 2022 dan kembali terkoreksi ke angka 76,4% pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya kendala dalam ketersediaan layanan serta kontinuitas logistik alat kontrasepsi. Di sisi lain, indikator *unmet need* (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) menunjukkan kondisi fluktuatif; meskipun sempat menurun signifikan hingga angka 5,1% pada tahun 2024, angka ini diproyeksikan mengalami kenaikan atau stagnasi kualitas menjadi 6,4% pada tahun 2025. Fenomena ini memberikan peringatan bahwa masih terdapat kelompok pasangan usia subur yang belum terlayani secara optimal, sehingga diperlukan penguatan strategi pelayanan KB yang lebih proaktif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur.

2.1.2.2.9 Perhubungan

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Perhubungan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2. 49 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (Nilai)	82,83	NA	NA	80,2	82
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Nilai)	41	49,5	48,2	58,1	71,2
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana transportasi (%)	NA	NA	NA	NA	48,35

Sumber: Dinas Perhubungan, 2026

Tahun 2025 Urusan Perhubungan menunjukkan performa positif pada beberapa indikator utama yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi berhasil meningkat dari nilai 80,2 pada tahun 2024 menjadi 82 pada tahun 2025. Peningkatan signifikan juga terlihat pada indikator Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota, yang melonjak dari angka 58,1 pada tahun 2024 menjadi 71,2 di tahun 2025. Selain itu, terdapat indikator baru yang tercatat pada tahun 2025, yaitu Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dengan capaian sebesar 48,35%.

Meskipun terdapat tren kenaikan pada tahun 2025, fluktuasi kinerja sempat terjadi pada periode sebelumnya, khususnya pada indikator Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota yang pernah mengalami penurunan dari 49,5 pada tahun 2022 menjadi 48,2 pada tahun 2023. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat juga tercatat belum berhasil melampaui capaian tertingginya pada tahun 2021 yang berada di angka 82,83, meskipun telah mengalami perbaikan dari tahun 2024. Tidak adanya data (NA) pada beberapa indikator di tahun-tahun tertentu juga menjadi catatan dalam pengukuran konsistensi capaian kinerja daerah secara menyeluruh.

2.1.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Komunikasi dan Informatika, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Infomatika sebagai berikut:

Tabel 2. 50 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan	3,125	6,25	21,21	24,24	30,30
Persentase digitalisasi layanan publik	3,125	6,25	18,18	24,24	30,30
Indeks SPBE	2,15	2,70	3,56	4,16	4,16
Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten	79,90%	84,23%	86,11%	82,35%	88,19

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah					
Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah	NA	NA	NA	NA	88,19
Indeks keterbukaan informasi publik	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2026

Dalam pencapaian kinerja indikator Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan persentase digitalisasi layanan publik tahun 2025, target yang telah ditetapkan sudah tercapai 151.52% dengan adanya pembangunan 3 (tiga) aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan 3 (tiga) aplikasi layanan publik baru, selain dari pengembangan aplikasi yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk capaian nilai Indeks SPBE tahun 2025 masih menggunakan Indeks SPBE tahun 2024. Hal ini dikarenakan Kabupaten Belitung Timur tidak masuk dalam pemantauan dan evaluasi SPBE pada tahun ini oleh Kementrian PAN-RB sebab nilai capaian yang sudah masuk kategori SANGAT BAIK. Namun tetap dilakukan persiapan untuk penilaian Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) pada tahun depan.

Pencapaian kinerja pada sasaran Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah Tahun 2025 telah terealisasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari hasil pengukuran survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Penilaian IKM terhadap pelayanan informasi publik ini mencakup layanan penyediaan data dan informasi publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Belitung Timur. Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara daring melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (belitungtimurkab.go.id) serta melalui tautan survei https://survei.beltim.go.id/view/SKM2207274439. Berdasarkan hasil survei tersebut, nilai IKM terhadap pelayanan informasi publik mencapai 88,19 persen dengan kategori mutu layanan Baik, yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap akses dan kualitas konten informasi publik yang disediakan.

Sementara pada pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik, masih tergantung pada hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak diikutsertakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

2.1.2.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

Tabel 2. 51 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Koperasi Aktif (%)	64,84	56,43	56,46	54,29	63,89

Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	5,41	26,63	17,00	8,15	0,87
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	32,03	44,30	51,80	71,05	46,96
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (%)	39,95	39,50	14,52	25,16	25,81

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2026

Indikator Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2025menunjukkan performa yang sangat baik dengan peningkatan signifikan mencapai 63,89% dari tahun sebelumnya yang hanya 54,29%. Keberhasilan ini didorong oleh penguatan kelembagaan, pembinaan intensif, serta kontribusi nyata dari penambahan 39 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang memperkuat ekonomi desa. Selain itu, indikator Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha juga mencatatkan tren positif selama dua tahun terakhir, yakni meningkat menjadi 25,16% pada tahun 2024 dan terus naik menjadi 25,81% pada tahun 2025. Kenaikan ini dipicu oleh pulihnya aktivitas ekonomi, intensifnya pelatihan kewirausahaan, fasilitasi perizinan, serta perluasan pasar melalui teknologi digital yang membantu pelaku usaha mikro naik kelas.

Sebaliknya, beberapa indikator mengalami penurunan kinerja pada periode tahun 2025, terutama pada Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang melambat drastis hingga menyentuh angka 0,87%. Penurunan tajam ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi kriteria modal usaha mikro dalam UU Cipta Kerja yang menggeser klasifikasi usaha, serta banyaknya pelaku usaha yang belum memperbarui perizinan. Kondisi serupa terjadi pada indikator Persentase Koperasi Berkualitas yang turun menjadi 46,96% pada tahun 2025 setelah sebelumnya sempat mencapai puncaknya di angka 71,05% pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh kehadiran banyak koperasi baru (KDMP) yang belum memenuhi kriteria kualitas, seperti pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang baru bisa dilakukan setelah satu tahun beroperasi.

2.1.2.2.12 Penanaman Modal

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Penanaman Modal, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal sebagai berikut:

Tabel 2. 52 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan realisasi investasi terhadap target rencana investasi (persen)	168	45	31	87	56,51
Nilai Realisasi investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) (Juta Rupiah)	472,466	1.373.501	616.140	1.068.107	1.073.894,75

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2026

Berdasarkan capaian kinerja daerah urusan penanaman modal Kabupaten Belitung Timur, beberapa indikator menunjukkan kinerja yang baik karena mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase Peningkatan Investasi mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2024, peningkatan tersebut didorong oleh

optimalnya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada pelaku usaha, meningkatnya kepatuhan penyampaian LKPM, serta adanya kegiatan replanting di sektor perkebunan yang berkontribusi besar terhadap realisasi investasi. Namun demikian, pada tahun 2025 indikator tersebut mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya realisasi investasi dibandingkan dengan rencana awal yang disampaikan oleh investor, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kooperatif sebagian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Sebaliknya, beberapa indikator menunjukkan kinerja kurang optimal karena mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Persentase Peningkatan Investasi dan Nilai Realisasi Investasi Tahunan Berskala Nasional mengalami penurunan pada tahun 2023 dan kembali menurun pada tahun 2025. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya frekuensi kegiatan replanting di sektor perkebunan, belum terealisasinya investasi oleh sebagian pelaku usaha berskala besar, serta masih terbatasnya realisasi investasi yang bersifat berkelanjutan. Selain itu, Cakupan Realisasi Investasi terhadap Target Rencana Investasi belum menunjukkan capaian yang stabil karena mengalami penurunan pada beberapa tahun, yang mengindikasikan perlunya penguatan upaya fasilitasi dan percepatan realisasi investasi.

2.1.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Kepemudaan dan Olahraga, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase organisasi pemuda yang aktif	63,64	100	100	100	100
Cakupan pelatih dan wasit yang bersertifikasi	83,84	83,84	83,9	88,94	88,94
Cakupan pembinaan atlet muda	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Prestasi olahraga	NA	NA	NA	72	72
Cakupan Pembinaan cabang olahraga	100	100	100	100	100
Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	NA	NA	NA	100	100
Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1,7	1,8	1,9	3,1	2,77
Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	NA	NA	NA	24,36	24,36
Persentase organisasi pramuka aktif	NA	NA	NA	100	100

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2026

Capaian kinerja pembangunan kepemudaan dan olahraga menunjukkan tren yang positif dan relatif stabil selama periode 2021–2025. Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan signifikan, dari 63,64

persen pada tahun 2021 menjadi 100 persen pada tahun 2022 dan mampu dipertahankan hingga tahun 2025. Hal ini mencerminkan meningkatnya peran serta dan keberfungsian organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah. Pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga, cakupan pelatih dan wasit yang bersertifikasi menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian pada tahun 2021–2023 berada pada kisaran 83 persen dan meningkat menjadi 88,94 persen pada tahun 2024 serta dapat dipertahankan pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pelaku olahraga. Cakupan pembinaan atlet muda dan pembinaan cabang olahraga secara konsisten mencapai 100 persen sepanjang periode 2021–2025. Konsistensi capaian ini menunjukkan keberlanjutan program pembinaan olahraga prestasi yang dilaksanakan secara merata dan terencana. Sejalan dengan hal tersebut, persentase peningkatan prestasi olahraga mulai terukur pada tahun 2024 dan 2025 dengan capaian sebesar 72 persen, yang menggambarkan hasil nyata dari proses pembinaan yang telah dilakukan.

Dari sisi dukungan infrastruktur, cakupan sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik mencapai 100 persen pada tahun 2024 dan 2025. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang memadai guna menunjang aktivitas pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. Pada bidang kepemudaan, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan peningkatan dari 1,7 persen pada tahun 2021 menjadi 3,1 persen pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi 2,77 persen. Sementara itu, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan mulai terdata pada tahun 2024 dan 2025 dengan capaian sebesar 24,36 persen, yang menunjukkan keterlibatan pemuda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mulai meningkat. Selain itu, persentase organisasi pramuka aktif mencapai 100 persen pada tahun 2024 dan 2025, yang menandakan keberlangsungan dan peran aktif gerakan pramuka dalam pembinaan karakter, kepemimpinan, dan kebangsaan bagi generasi muda. Secara keseluruhan, capaian kinerja bidang kepemudaan dan olahraga menunjukkan hasil yang baik, dengan fokus ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri, penguatan organisasi kepemudaan, serta peningkatan prestasi olahraga secara berkelanjutan.

2.1.2.2.14 Statistik

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Statistik, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Statistik sebagai berikut:

Tabel 2. 54 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	NA	1,76	2,76	2,76	2,76

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2026

Pada tahun 2025 dan sejak tahun 2021 telah ada Sistem Data dan Statistik Terintegrasi. Sistem ini bisa diakses melalui https://sdi.beltim.go.id/

Sistem ini juga telah diupayakan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), yaitu Standar Data, Data yang dihasilkan harus memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk metodologi dan definisi yang seragam, agar bisa digunakan secara konsisten oleh semua pihak. Bukti ketersediaan standa data ini bisa diakses melalui **https://sdi.beltim.go.id/sds**. Metadata, Setiap data harus disertai metadata (informasi tentang data) yang jelas, meliputi asal-usul, konteks, dan detail teknisnya, agar mudah dipahami dan dianalisis. Bukti ketersediaan metadata ini bisa diakses melalui **https://sdi.beltim.go.id/mskeg**. Interoperabilitas Data, Data harus bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi antar sistem, memungkinkan integrasi data yang efektif dari berbagai sektor. Bukti pemenuhan prinsip interoperabilitas ini bisa dilihat dari setiap dataset pada portal open data di https://data.beltim.go.id/dataset/ telah memiliki fitur API untuk berbagipakai data, selain itu data juga disajikan dalam format yang mudah diolah lebih lanjut misalnya XLSX, JSON, dan XML. Kode Referensi dan/atau Data Induk, Penggunaan kode referensi atau data induk yang seragam (misalnya NIK, kode wilayah) untuk memastikan keseragaman identitas data dari berbagai sumber. Bukti ketersediaan Kode Referensi dan/atau Data Induk pada Sistem Data dan Statistik terintegrasi ini bisa diakses melalui https://sdi.beltim.go.id/kodref

Selain pemenuhan prinsip SDI pada Sistem Data dan Statistik Terintegrasi, terdapat fitur lainnya yang memudahkan produsen data yaitu OPD dalam mengumpulkan, mengolah, dan mendiseminasikan data hasil survei yaitu melalui https://survei.beltim.go.id/ yang telah terintegrasi juga dengan https://sdi.beltim.go.id/. Publikasi statistik dasar dan statistik sektoral dalam bentuk aplikasi mobile android guna memudahkan pengguna data dalam mengkases data statistik juga disediakan melalui: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentudong.sdibeltim&hl=id. Sistem Statistik Sektoral Terintegrasi Kabupaten Belitung Timur juga telah terinregrasi dengan e-walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dari e-Walidata SIPD bisa diakses pada Sistem Statistik Sektoral Terintegrasi Kabupaten Belitung Timur melalui https://sdi.beltim.go.id/data-dssd. Capaian kinerja indikator (IPS) pada Tahun 2024-2025 ini menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan dibandingkan Tahun 2023. IPS pertama kali diukur secara resmi di seluruh Indonesia sejak Tahun 2023, di mana capaian IPS 2023 adalah 1,76 (dengan predikat Kurang), sedangkan pada Tahun 2024, nilai IPS Belitung Timur berada pada nilai 2,76 (dengan predikat Baik), di mana capaian 2024 ini menempatkan posisi Belitung Timur sebagai kabupaten dengan peringkat IPS tertinggi untuk kategori wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pencapaian kinerja sasaran Tahun 2025, target Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang ditetapkan dalam Renstra DiskominfoSP Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 adalah sebesar 2,6, dengan realisasi mencapai 2,76. Mengingat pengukuran IPS dilakukan setiap dua tahun sekali dan dimulai pada Tahun 2024, maka capaian Tahun 2025 mengacu pada hasil pengukuran Tahun 2024, yaitu sebesar 2,76 dengan kategori Baik. Dengan demikian, target kinerja telah tercapai (100%).

2.1.2.2.15 Persandian

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Persandian, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan

untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Persandian sebagai berikut:

Tabel 2. 55 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level II	Level II	Level II	Level III	Level II
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Level II	Level II	Level II	Level III	Level II

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2026

Pada urusan Persandian, alat evaluasi yang digunakan untuk menentukan nilai Indikator sasaran adalah Indeks KAMI (ISO 27001). Indeks Keamanan Informasi adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Capaian tahun 2025 untuk Kategori Tingkat Kematangan Keamanan Informasi yang diukur melalui Indeks Keamanan Informasi, serta Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah berada pada level II. Hal ini karena ada konversi instrumen pengukuran yang digunakan, yang semula menggunakan Instrumen Pengukuran Indeks KAMI 4.2 menjadi Indeks KAMI 5.0.

2.1.2.2.16 Kebudayaan

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Kebudayaan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 2. 56 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	1521	1521	1434	1434	1434
Jumlah Museum dan Galeri Maritim yang dikelola dengan baik	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2026

Upaya pelestarian kebudayaan daerah saat ini difokuskan pada penguatan kualitas pengelolaan fasilitas yang tersedia untuk memastikan fungsi edukasi dan pelestarian berjalan maksimal. Indikator jumlah museum dan galeri maritim yang dikelola dengan baik menunjukkan angka yang relatif stagnan atau tetap karena keterbatasan jumlah unit dan belum adanya penambahan fasilitas baru. Pemerintah daerah memilih untuk memprioritaskan peningkatan aspek kelembagaan, pemeliharaan koleksi, serta optimalisasi fungsi wisata pada sarana yang sudah ada daripada membangun unit baru yang memerlukan perencanaan matang dan anggaran besar. Fokus ini bertujuan agar museum dan galeri yang tersedia dapat memberikan manfaat

yang lebih optimal bagi masyarakat sebagai pusat informasi sejarah maritim daerah.

Di sisi lain, indikator jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan kuantitatif ini dipicu oleh proses verifikasi dan pemutakhiran data yang lebih selektif agar sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, serta adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, beberapa objek memerlukan kajian lanjutan atau penanganan lintas sektor sehingga belum dapat dikelola sepenuhnya pada tahun berjalan. Meskipun secara angka menurun, pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pelestarian melalui penguatan pendataan dan koordinasi dengan komunitas budaya guna menjaga keberlanjutan warisan sejarah daerah.

2.1.2.2.17 Perpustakaan

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Perpustakaan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	69,01	69,01	69,34	79,31	57,18
Indeks Pembagunan Literasi Masyarakat	23,01	23,02	17,44	84,09	21,3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2026

Capaian kinerja pada urusan perpustakaan menunjukkan keberhasilan yang signifikan pada periode tertentu, di mana indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat sempat mengalami lonjakan drastis dari angka 69,34 di tahun 2023 menjadi 79,31 pada tahun 2024. Serupa dengan hal tersebut, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) juga mencatatkan kenaikan luar biasa hingga mencapai angka 84,09 pada tahun 2024. Pertumbuhan angka yang tinggi ini mencerminkan keberhasilan program literasi pada periode tersebut sebelum adanya penyesuaian parameter penilaian secara nasional.

Namun, pada tahun 2025, kedua indikator dalam urusan perpustakaan ini mengalami penurunan nilai yang cukup tajam, di mana Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat turun menjadi 57,18 dan IPLM menjadi 21,3. Penurunan signifikan pada angka IPLM dari tahun 2021 hingga 2025 ini secara teknis disebabkan oleh adanya perubahan Rumus Perhitungan yang diberlakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Meskipun terjadi penurunan secara angka statistik, urusan ini tetap dinilai berkinerja baik karena realisasinya masih memenuhi target yang telah disusun dalam dokumen perencanaan.

2.1.2.2.18 Kearsipan

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Kearsipan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Kearsipan sebagai berikut:

Tabel 2. 58 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	76,08	76,08	76,07	75,96	81,95
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	96,66	96,66	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2026

Urusan kearsipan dengan indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah menunjukkan tren yang terus meningkat secara positif. Setelah cenderung stabil di angka 76,08 pada awal periode, capaian ini berhasil ditingkatkan secara signifikan menjadi 81,95 pada tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan semakin kuatnya tata kelola kearsipan daerah dalam mendukung pertanggungjawaban nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara itu, indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip menunjukkan capaian yang sangat stabil dan terjaga pada level optimal. Sejak tahun 2023 hingga 2025, capaian indikator ini berhasil dipertahankan pada angka sempurna yaitu 100. Stabilitas nilai maksimal ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara telah dilaksanakan dengan sangat konsisten dan memenuhi standar tertinggi yang ditetapkan.

2.1.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.2.3.1 Kelautan dan Perikanan

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Kelautan dan Perikanan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

Tabel 2. 59 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta Rupiah)	1.426.660	1.447.930	1.520.080	1.617.560	1.666.810
Produksi Perikanan (Persen)	90,20	94,13	99,82	100,39	94,60
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Persen)	NA	1,33	1,30	1,30	1,29
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Persen)	74	55	47	66	60

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumsi Ikan (Konsumsi Ikan)	134,29	112,44	111,97	112,36	104,12
Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	NA	NA	NA	111,28	106,29
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) (Indeks)	NA	NA	NA	93,84	97,14

Sumber: Dinas Perikanan, 2026

Beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dari tahun sebelumnya. Indikator PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan yang stabil. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai PDRB dari sebesar 1.617.560 juta rupiah pada tahun 2024 menjadi 1.666.810 juta rupiah pada tahun 2025**.** Kenaikan tersebut menggambarkan adanya perkembangan yang baik dalam aktivitas ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Selain itu, capaian ini menunjukkan bahwa sektor tersebut masih menjadi salah satu sektor unggulan yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur. Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) mengalami kenaikan sebesar 3,3 persen dari 93,84 persen pada tahun 2024 menjadi 97,14 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli pembudidaya perikanan, yang mencerminkan bahwa pertumbuhan indeks harga yang diterima pembudidaya lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayarkan. Meskipun masih berada di bawah angka 100, peningkatan NTPi ini mengindikasikan kondisi kesejahteraan pembudidaya perikanan di Kabupaten Belitung Timur yang semakin membaik serta efektivitas upaya pengendalian biaya produksi dan peningkatan pendapatan.

Namun tidak semua indikator menujukkan kinerja yang positif. Beberapa indikator justru mengalami penurunan, yang menjadi perhatian penting untuk diperbaiki kedepannya. Salah satunya adalah indikator Cakupan Bina Kelompok Nelayan, yang mengalami penurunan sebesar 6 persen dari 66 persen pada tahun 2024 menjadi 60 persen pada tahun 2025 hal ini dikarenakan terus bertambahnya jumlah kelompok nelayan baru sedangkan bantuan sarana untuk kelompok nelayan belum bisa diakomodir sepenuhnya karena bergantung pada ketersediaan anggaran di tahun berkenaan. Persentase Produksi Perikanan juga mengalami penurunan sebesar 5,79 persen dari 100,39 persen pada tahun 2024 menjadi 94,60 persen pada tahun 2025. Pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok nelayan telah dilakukan sebagai salah satu aspek dalam pemberdayaan nelayan, namun keterbatasan anggaran dalam program peningkatan produksi, kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas penangkapan, serta menurunnya produktivitas sebagian sarana dan prasarana perikanan juga mempengaruhi produksi perikanan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Belitung Timur menurun sebesar 4,99 persen dari 111,28 persen pada tahun 2024 menjadi 106,29 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan melemahnya daya beli nelayan. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kenaikan biaya produksi dan kebutuhan konsumsi nelayan lebih tinggi dibandingkan peningkatan pendapatan yang diterima.

Kondisi tersebut berpotensi menekan kesejahteraan nelayan dan memerlukan upaya pengendalian biaya produksi, stabilisasi harga hasil perikanan, serta peningkatan akses pasar dan pendapatan nelayan. Persentase Konsumsi ikan mengalami penurunan sebesar 8,24 persen dari 112,36 Persen pada tahun 2024 menjadi 104,12 Persen pada tahun 2025. Namun, Angka Konsumsi ikan mengalami peningkatan dari 68,54 Kg/Kapita/Tahun di tahun 2024 menjadi 69,76 Kg/Kapita/Tahun di tahun 2025. Stabilisasi pasokan, pengendalian harga, dan penguatan kampanye gemar makan ikan akan terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan konsumsi ikan di masyarakat.

2.1.2.3.2 Pariwisata

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Pariwisata, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Pariwisata sebagai berikut:

Tabel 2. 60 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan (persen)	-48,52	57,18	95,39	-44,37	22,27
Lama tinggal wisatawan ((*length of stay*) hari)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2026

Sektor pariwisata daerah menunjukkan dinamika pertumbuhan yang terlihat dari Indikator Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan yang mengalami kondisi fluktuatif, yakni terjadi kenaikan dan penurunan yang berbeda setiap tahunnya. Kondisi ini menandakan adanya potensi pertumbuhan pada tahun-tahun tertentu, namun sektor ini masih rentan terhadap faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan tren pariwisata, serta faktor internal seperti intensitas promosi yang tidak konsisten dan pelaksanaan event daerah. Meskipun jumlah kunjungan tidak stabil, adanya periode kenaikan menunjukkan bahwa daerah memiliki daya tarik yang mampu menjaring wisatawan, sehingga diperlukan strategi berkelanjutan dan diversifikasi produk wisata agar pertumbuhan tersebut menjadi lebih konsisten di masa mendatang.

Sementara untuk indikator Lama Tinggal Wisatawan (*Length of Stay*/LOS) berada dalam kondisi stagnan atau tetap setiap tahunnya, yang mencerminkan pola kunjungan yang cenderung singkat dan tidak berubah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya variasi atraksi wisata, kurangnya paket wisata terintegrasi, serta promosi yang belum menekankan pada pengalaman multi-hari. Kondisi stagnan ini memberikan dampak pada pendapatan pariwisata dan tingkat hunian akomodasi yang tidak maksimal karena perputaran ekonomi lokal tidak berkembang secara signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi melalui penambahan daya tarik baru, penyelenggaraan festival rutin, serta peningkatan kualitas fasilitas hiburan agar wisatawan tertarik untuk tinggal lebih lama.

2.1.2.3.3 Pertanian

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Pertanian, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Pertanian sebagai berikut:

Tabel 2. 61 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar) (Ton)	5.602,4	3.687,65	2.437,53	2.126,84	3.926,18
Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete) (Ton)	9.654,5	10,161,22	10.109,32	10.403,39	10.424,82
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar (Ton Per Hektar)	6,5	5,7	5,7	4,4	5,74
Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)	217	427	324	252	267
Produktivitas Hewan Ternak dan Sejenisnya (Ekor)	1.806	1.958	2.085	2.181	2.343

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2026

Produksi sektor pertanian secara keseluruhan mengalami kenaikan signifikan dari 2.126,84 ton pada tahun 2024 menjadi 3.926,18 ton pada tahun 2025. Peningkatan ini didorong oleh perluasan luas panen padi sawah dari 288,45 hektar menjadi 666,30 hektar, yang menghasilkan produksi sebesar 3.117,55 ton. Selain itu, produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya meningkat menjadi 5,74 ton per hektar, melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,70 ton per hektar. Sektor perkebunan juga mencatatkan kenaikan produksi sebesar 21,43 ton dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dipicu oleh komoditas kelapa sawit dan kelapa. Pada aspek kelembagaan dan peternakan, cakupan bina kelompok tani meningkat menjadi 267 kelompok (105,95% dari target) , sementara populasi hewan ternak sapi tumbuh dari 2.181 ekor menjadi 2.343 ekor berkat perbaikan manajemen pemeliharaan dan program inseminasi buatan.

Meskipun sektor utama tumbuh, terdapat penurunan produksi pada sejumlah komoditas perkebunan seperti lada, karet, kopi, aren, kemiri, dan jambu mete. Penurunan ini disebabkan oleh adanya konversi lahan perkebunan karet rakyat menjadi perkebunan kelapa sawit, baik mandiri maupun plasma. Di sisi lain, meskipun produktivitas padi sawah meningkat, produktivitas untuk komoditas padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar cenderung stagnan atau tetap dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, tantangan kelembagaan masih terlihat dari adanya 104 kelompok tani atau sekitar 23,48% dari total kelompok yang terdata di SIMLUHTAN dalam kondisi tidak aktif atau kurang aktif.

2.1.2.3.4 Perdagangan

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Perdagangan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 2. 62 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB Sektor Perdagangan (Milyar Rupiah)	565,73	634,50	665,92	666,85	699,05

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2026

Berdasarkan data kinerja daerah, PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten sejak tahun 2021 hingga mencapai nilai tertinggi sebesar 699,05 Milyar Rupiah pada tahun 2025. Peningkatan yang berkelanjutan ini mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan yang terus memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian daerah di masa pemulihan ekonomi. Kondisi tersebut didorong oleh geliat aktivitas perdagangan dan jasa yang terus meningkat, yang tidak hanya memperluas lapangan kerja tetapi juga menjadi sektor alternatif utama bagi masyarakat saat aktivitas sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan. Pertumbuhan yang stabil pada PDRB sektor perdagangan ini membuktikan bahwa Kabupaten Belitung Timur berhasil menjaga resiliensi ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor-sektor produktif di luar sektor ekstraktif hingga tahun 2025.

2.1.2.3.5 Perindustrian

Pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Perindustrian, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Perindustrian sebagai berikut:

Tabel 2. 63 Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Sektor Pangan dan Kerajinan (Rupiah)	236.073.515	266.008.176	2.672.217.120	1.874.351.260	1.900.834.000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2026

Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Sektor Pangan dan Kerajinan di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan, terutama pada periode 2021 hingga 2023. Capaian nilai produksi yang bermula dari 236.073.515 Rupiah pada tahun 2021 melonjak drastis menjadi 2.672.217.120 Rupiah pada tahun 2023. Kenaikan tajam ini mengindikasikan adanya akselerasi yang kuat dalam aktivitas pengolahan pangan dan kerajinan lokal, yang didukung oleh meningkatnya produktivitas serta perluasan jangkauan pasar bagi produk-produk IKM di daerah tersebut.

Memasuki tahun 2024 dan 2025, nilai produksi IKM sektor ini cenderung bergerak stabil meskipun sempat mengalami penyesuaian dari puncaknya di tahun 2023. Pada tahun 2024, nilai produksi tercatat sebesar

1.874.351.260 Rupiah dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 1.900.834.000 Rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor IKM pangan dan kerajinan telah mencapai titik keseimbangan baru yang berkelanjutan, sekaligus membuktikan peran strategis sektor industri kecil dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat Belitung Timur hingga akhir periode 2025.

2.1.2.4 Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.2.4.1 Sekretariat Daerah

Fungsi pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 64 Kinerja Daerah Fungsi Pendukung Pemerintahan Sekretariat Daerah

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi	Tinggi	Sedang: 3,1724	Sedang: 3,14	Sedang: 3,14
Indeks Kualitas Kebijakan	NA	NA	Kurang : 42,08	Kurang : 48,39	Sangat Baik: 83,17
Indeks tata kelola pengadaan	Cukup: 58,27	Cukup: 67,2	Baik: 78,88	Baik: 84,97	Baik: 88,49
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	Baik : 79,65	Baik : 83,17	Baik : 85,65
Indeks kematangan perangkat daerah	Tinggi : 38	Sedang : 37	Sedang : 37	Tinggi: 37,76	Tinggi: 37,76

Sumber: Sekretariat Daerah, 2026

Fungsi pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah menunjukkan tren yang sangat positif pada mayoritas indikator utamanya. Indeks Kualitas Kebijakan mencatatkan lonjakan paling signifikan dari predikat "Kurang" (48,39) pada tahun 2024 menjadi predikat "Sangat Baik" dengan nilai 83,17 pada tahun 2025, yang mencerminkan transformasi dalam tata kelola perumusan hingga evaluasi kebijakan. Sejalan dengan itu, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) secara konsisten meningkat setiap tahunnya hingga mencapai angka 88,49 pada tahun 2025 dengan predikat "Baik", serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus merangkak naik hingga mencapai nilai 85,65. Selain itu, Indeks Kematangan Perangkat Daerah juga menunjukkan stabilitas dan peningkatan pada aspek manajemen risiko serta inovasi layanan, di mana pada tahun 2024 dan 2025 tetap bertahan pada kriteria "Tinggi" dengan skor 37,76.

Di sisi lain, terdapat indikator yang menunjukkan penurunan skor secara administratif maupun statistik, yakni pada Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Indikator ini mengalami penurunan status dari kriteria "Tinggi" pada tahun 2021-2022 menjadi kriteria "Sedang" dengan skor 3,1724 di tahun 2023 dan kembali terkoreksi menjadi 3,14 pada tahun 2024 dan 2025. Penurunan ini tidak merefleksikan kemunduran kinerja secara substansial, melainkan disebabkan oleh adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait LPPD dan EPPD yang merubah standar penetapan status kinerja serta perbedaan pengukuran skor dibandingkan peraturan lama. Tahun 2025 nilai yang dicantumkan masih

menggunakan angka tahun 2024 dikarenakan masih menunggu hasil penetapan resmi dari Kemendagri.

2.1.2.4.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Fungsi pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

Tabel 2. 65 Kinerja Daerah Fungsi Pendukung Pemerintahan Sekretariat DPRD

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	95,81	96,58	93,32	92,23	98,62

Sumber: Sekretariat DPRD, 2026

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan pada periode pelaporan terbaru. Setelah sempat mengalami dinamika di tahun-tahun sebelumnya, indikator ini berhasil mencapai titik tertinggi pada tahun 2025 dengan angka 98,62. Lompatan capaian dari angka 92,23 di tahun 2024 menuju 98,62 di tahun 2025 mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan akselerasi perbaikan tata kelola administrasi, penguatan fungsi fasilitasi terhadap tugas legislatif, serta optimalisasi pelayanan internal yang jauh lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya.

Indikator ini sempat menunjukkan kondisi yang menurun atau fluktuatif antara tahun 2022 hingga 2024. Dari puncaknya di tahun 2022 sebesar 96,58, angka tersebut terus terkoreksi menjadi 93,32 di tahun 2023 dan menyentuh angka terendah di 92,23 pada tahun 2024. Penurunan bertahap selama tiga tahun tersebut mengindikasikan adanya kendala operasional atau hambatan dalam mempertahankan stabilitas kinerja organisasi pada masa transisi tersebut. Namun, pemulihan tajam yang terjadi di tahun 2025 membuktikan bahwa langkah-langkah evaluatif yang diambil pemerintah daerah telah berhasil mengatasi stagnasi dan mengembalikan performa sekretariat ke jalur pertumbuhan yang positif.

2.1.2.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.2.5.1 Perencanaan

Fungsi penunjang dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Perencanaan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Perencanaan sebagai berikut:

Tabel 2. 66 Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP DAERAH	NA	22,95	22,99	22,24	22,32
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP DAERAH	NA	19,88	19,95	19,91	20,95
Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Performa yang sangat impresif dengan tingkat keberhasilan konstan sebesar 100% untuk indikator Persentase Kesesuaian Program RKPD ke dalam APBD. Capaian sempurna ini mengindikasikan adanya sinkronisasi yang sangat kuat dan konsisten antara perencanaan pembangunan daerah dengan implementasi penganggarannya. Selain itu, Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Daerah dengan nilai 22,32 dan Pengukuran Kinerja SAKIP Daerah yang menunjukkan tren positif dengan kenaikan angka yang mencerminkan adanya upaya peningkatan efektivitas dalam sistem pelaporan kinerja daerah pada tahun 2025 dengan nilai 20,95.

Di sisi lain, terdapat indikator yang mengalami penurunan atau kondisi yang kurang stabil pada periode pelaporan terbaru. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Daerah tercatat mengalami penurunan. Penurunan serupa juga terjadi pada Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Daerah yang terkoreksi dari 19,95 menjadi 19,91 pada tahun 2024. Kondisi fluktuatif yang cenderung menurun ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja, sehingga diperlukan evaluasi mendalam agar kualitas tata kelola perencanaan daerah tidak terus melandai di tahun-tahun mendatang.

2.1.2.5.2 Keuangan

Fungsi penunjang dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Keuangan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 2. 67 Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu sesuai regulasi	100	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100	100	100	100	100
Persentase realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan retribusi daerah terhadap target yang ditetapkan	13	13	13	14	15

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2026

Capaian kinerja pada urusan keuangan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, khususnya pada efektivitas pemungutan sumber daya lokal. Indikator persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi daerah terhadap target yang ditetapkan berhasil mencatatkan kenaikan bertahap, di mana setelah stabil di angka 13% pada periode 2021-2023, capaian tersebut meningkat menjadi 14% pada tahun 2024 dan mencapai level tertinggi sebesar 15% pada tahun 2025. Peningkatan ini merefleksikan adanya upaya optimalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan penguatan kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

Di sisi lain, tata kelola administrasi dan aset daerah menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat stabil dengan mempertahankan capaian maksimal setiap tahunnya. Indikator persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu sesuai regulasi serta persentase kesesuaian Barang Milik

Daerah (BMD) dengan nilai aset di neraca berhasil terjaga secara sempurna pada angka 100% sepanjang periode 2021 hingga 2025. Stabilitas pada angka maksimal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan serta ketertiban dalam manajemen aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2. 68 Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Sistem Merit	102	102,5	252	252	252
Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	NA	NA	NA	28,50	31,13

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2026

Indeks Sistem Merit Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan signifikan, dengan capaian 252 pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam penerapan sistem merit, terutama dalam transparansi rekrutmen, promosi berbasis kompetensi, dan pengelolaan ASN yang lebih profesional. Hal ini berampak positif dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas dalam pengelolaan SDM aparatur. Tantangan ke depan yaitu mempertahankan dan meningkatkan indeks dengan optimalisasi sistem digital kepegawaian serta peningkatan kualitas SDM ASN Kabupaten Belitung Timur.

Begitu juga dengan Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi Kabupaten Belitung Timur telah mencapai angka 31,13 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam pengembangan kompetensi ASN, termasuk pelatihan teknis, sertifikasi, serta peningkatan manajerial dan fungsional. Hal ini berampak positif ASN menjadi lebih profesional, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Tantangan ke depan yaitu memastikan keberlanjutan program peningkatan kompetensi ASN agar capaian ini tetap terjaga dan semakin meningkat.

2.1.2.5.4 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penunjang dalam aspek pelayanan umum, khususnya pada urusan Penelitian dan Pengembangan, mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Kinerja Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

Tabel 2. 69 Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Inovasi Daerah	6	25	34	38	57
Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	NA	NA	NA	NA	45

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah					

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Capaian indikator jumlah inovasi daerah di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan progresif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dimulai dengan hanya 6 inovasi pada tahun 2021, angka tersebut melonjak tajam menjadi 25 inovasi pada 2022, dan terus tumbuh konsisten hingg a mencapai puncaknya sebanyak 57 inovasi pada tahun 2025. Peningkatan drastis ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menumbuhkan ekosistem kreatif dan solutif di lingkungan birokrasi maupun masyarakat, guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan daya saing daerah di berbagai sektor unggulan.

Sementara itu, pada indikator persentase kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan, data menunjukkan status *Not Available* (NA) dari tahun 2021 hingga 2024, yang mengindikasikan bahwa pengukuran formal atau integrasi hasil kajian ke dalam dokumen kebijakan baru mulai terdokumentasi secara sistematis pada tahun 2025 dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator yang baru tercantum dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029. Pada tahun transisi tersebut, tercatat capaian sebesar 45%, yang menandakan bahwa hampir separuh dari kebijakan pembangunan daerah kini telah didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan yang akuntabel. Hal ini menunjukkan pergeseran positif dalam tata kelola pemerintahan Belitung Timur yang semakin mengedepankan data dan kajian ilmiah sebagai landasan utama pengambilan keputusan strategis.

2.1.2.6 Fungsi Pengawasan

2.1.2.6.1 Inspektorat Daerah

Fungsi pengawasan mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja pada Inspekorat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 70 Kinerja Daerah Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Hasil Evaluasi SAKIP Minimal Kategori "BB"	NA	NA	NA	67	84,84
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	NA	NA	NA	Level 2 (2,917)	Level 2 (2,495)
Perangkat Daerah ZI (Zona Integritas) yang diusulkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	NA	NA	NA	NA	NA
Peringkat Capaian Target Rencana Aksi Program pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) Tingkat Provinsi	NA	NA	NA	3	3

Sumber: Inspektorat Daerah, 2026

Capaian kinerja fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada aspek kapabilitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Indikator Kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berhasil naik kelas dari Level 2 menjadi Level 3 sejak tahun 2024, yang mencerminkan penguatan kualitas pengawasan internal pemerintah. Peningkatan tajam juga terlihat pada persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP dengan kategori minimal "BB", di mana angkanya melonjak dari 67% pada tahun 2024 menjadi 84,84% pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya transformasi positif dalam efektivitas penggunaan anggaran dan penguatan sistem akuntabilitas di seluruh instansi pemerintah daerah.

Di sisi lain, terdapat indikator yang menunjukkan stabilitas serta penurunan performa secara teknis. Peringkat Capaian Target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (MCSP KPK) tingkat provinsi tercatat stabil di posisi peringkat 3 selama periode 2024 hingga 2025. Namun, indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI) mengalami penurunan dari Level 2 dengan skor 2,917 di tahun 2024 menjadi skor 2,495 pada tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh implementasi manajemen risiko yang belum optimal, sehingga memerlukan upaya peningkatan penerapan manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah di masa mendatang. Adapun untuk indikator Zona Integritas (ZI) menuju WBK belum memiliki data capaian karena baru akan diimplementasikan pada tahun 2026.

2.1.2.7 Fungsi Lainnya

2.1.2.7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Kinerja Pemerintahan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pembinaan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	NA	100	100	100	100
Persentase Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di daerah	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase pengembangan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Penyakit Masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama serta aliran kepercayaan di daerah	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase peningkatan kewaspadaan serta cegah tangkal konflik sosial di daerah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2026

Capaian Indikator Persentase Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik sudah sangat baik dan konsisten mencapai target 100% dari tahun 2022 sampai dengan

2025. Sedangkan indikator yang lain merupakan **indikator yang baru** yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sesuai dengan Renstra Kesbangpol Tahun 2025-2029, seperti indikator Persentase Pembinaan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, indikator Persentase Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di daerah, indikator Persentase pengembangan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Penyakit Masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama serta aliran kepercayaan di daerah, dan indikator Persentase peningkatan kewaspadaan serta cegah tangkal konflik sosial di daerah.

2.1.2.7.2 Kewilayahan (Kecamatan)

Dalam fungsi kewilayahan mencakup beberapa indikator penting pada Kecamatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 72 Kinerja Pemerintahan Unsur Kewilayahan Pada Kecamatan

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Kecamatan Manggar - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,33	88,30	86,5	91,44	93,65
- Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi - Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
Kecamatan Kelapa Kampit - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi - Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	78,43 100 100	83,46 100 100	87,48 100 100	87,62 100 100	88 100 100
Kecamatan Gantung - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi - Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	88,80 100 100	88,35 100 100	88,33 100 100	87,51 100 100	87,56 100 100
Kecamatan Dendang - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	89,31 100 100	89,38 100 100	90,05 100 100	90,26 100 100	90,37 100 100
Kecamatan Damar - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi - Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	NA 100 100	90,88 100 100	88,15 100 100	88,42 100 100	84,52 100 100
Kecamatan Simpang Renggiang - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,58	85,58	83,64	85,38	91,67

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
- Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	100	100	100	100	100
- Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100
Kecamatan Simpang Pesak					
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,84	82,73	90,13	92,87	92,39
- Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	100	100	100	100	100
- Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan, 2026

Kinerja pemerintahan unsur kewilayahan pada kecamatan secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik dengan mayoritas kecamatan mempertahankan angka 100% dari tahun 2021 hingga 2025. Konsistensi ini mencerminkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib administrasi serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.

Selanjutnya pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat juga setiap kecamatan sudah menunjukkan capaian yang baik dengan meningkat setiap tahunnya bahkan sudah ada yang mencapai diatas 90% pada tahun 2025 seperti di kecamatan Manggar sebesar 93,65%, Kecamatan Dendang 90,37%, Kecamatan Simpang Renggiang 91,67 dan Kecamatan Simpang Pesak sebesar 92,39. Walaupun masih ada kecamatan yang masih tertahan di capaian dibawah 90% pada tahun 2025 seperti di kecamatan Kelapa Kampit sebesar 88%, Kecamatan Gantung 87,56%, dan Kecamatan Damar 84,52. Berdasarkan capaian tersebut menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat sudah puas terhadap layanan yang diberikan kecamatan.

2.1.2.7.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) pada hakikatnya merupakan upaya terencana untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik dengan baik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, Evaluator Nasional secara berkala menilai pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, penilaian kini dibagi menjadi dua pilar utama, yaitu RB General yang berfokus pada penyelesaian masalah hulu birokrasi, serta RB Tematik yang dirancang untuk mengurai akar permasalahan (*debottlenecking*) pada agenda prioritas pembangunan nasional di sektor hilir. Perkembangan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 733 Kinerja Pemerintahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Birokrasi	55,27	58,20	76,44	82,58	81,99

Sumber: LHE SAKIP KemenpanRB, 2026

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut mulai tahun 2021 hingga tahun 2024. Berdasarkan data Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan oleh KemenpanRB, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 berhasil memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,99 sedikit mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar 0,59, namun masih dalam predikat kategori "A-". Jika dibedah per komponen, pencapaian indeks ini dibentuk oleh nilai RB General sebesar 72,83 dari bobot maksimal 100, serta nilai RB Tematik sebesar 9,16 dari bobot maksimal 20. Melalui perolehan nilai akumulatif tersebut, Kabupaten Belitung Timur secara umum dinilai telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah, meskipun masih terdapat beberapa ruang perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti.

Meskipun mampu mempertahankan predikat "A-", capaian indeks tahun ini menunjukkan adanya sedikit penurunan dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai sebesar 82,58. Penurunan tipis ini menjadi sinyal penting bagi jajaran pemerintah daerah bahwa terdapat beberapa aspek indikator yang kualitas pelaksanaannya mengalami stagnasi atau penurunan performa. Diharapkan performa indeks pada masa mendatang dapat didorong naik menuju target ideal (>100-120) dengan mempelajari catatan strategis dan rekomendasi yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan mendasar pada formulasi variable perhitungan nilai RB dari hasil evaluasi tahun 2022 sd 2024 dengan tahun 2025 oleh Kemenpan RB yaitu tentang penilaian Reformasi Birokrasi ditetapkan menjadi 2 (dua) penilaian yaitu penilaian Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik.

Menilik lebih dalam pada komponen RB General, capaian kualitas perencanaan dinilai belum sepenuhnya ideal karena adanya kelemahan pada strategi pelaksanaan rencana aksi. Berdasarkan hasil penilaian bahwa target pada beberapa Kegiatan Utama belum disusun berdasarkan *baseline* tahun sebelumnya maupun target nasional yang diamanatkan dalam Kepmenpanrb Nomor 182 Tahun 2024, seperti pada indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja, Indeks SPBE, dan tindak lanjut pengaduan. Selain itu, program penganggaran pada Rencana Aksi dinilai berpotensi tidak efisien dan kurang relevan dengan sasaran utama, salah satu contohnya terlihat pada visualisasi target output pembangunan Zona Integritas (ZI) yang hanya menetapkan target minimalis sebesar 1 unit kerja.

Aspek krusial lain dalam RB General yang memerlukan perhatian serius adalah indikator Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan tata kelola digital. Kabupaten Belitung Timur dinilai belum optimal dalam merumuskan indikator kinerja berbasis *outcome* serta belum mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko secara efektif, di mana pengelolaan risiko korupsi dan pengendalian internal yang berjalan saat ini masih sebatas pemenuhan dokumen formal. Lebih lanjut, daerah ini juga mendapatkan skor nol pada indikator pembangunan ZI serta implementasi arsitektur SPBE. Evaluator menegaskan bahwa kegagalan nilai SPBE disebabkan karena instansi belum melakukan penginputan dokumen arsitektur ke dalam aplikasi SIA SPBE V2, meskipun pemerintah daerah

sempat menyanggah dengan argumen telah memiliki SK Bupati terkait dokumen perencanaan tersebut.

Selain masalah tata kelola risiko, kelemahan pada RB General juga terdeteksi pada saluran komunikasi publik dan pengelolaan data sektoral. Pada indikator pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, jumlah aduan yang masuk dinilai terlalu sedikit, waktu respon awal masih lambat melebihi 3 hari kerja, dan belum ada umpan balik berupa penilaian (*rating*) dari masyarakat. Sementara itu, pada Indeks Pembangunan Statistik, implementasi keterbandingan data belum mencapai predikat baik karena tidak ditemukannya keselarasan data antar-tabel dengan sumber luar, serta daerah belum menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) dan belum memanfaatkan teknologi *Big Data* dalam menunjang kebijakan publik.

Beralih pada komponen RB Tematik, evaluasi menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara aspek perencanaan strategi dengan capaian indikator dampak di lapangan. Pada satu sisi, daerah mencatatkan hasil yang sangat baik pada indikator dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta Pengentasan Kemiskinan. Namun di sisi lain, program Pengendalian Inflasi mendapatkan rapor merah dengan skor nol karena kinerja penanganan daerah dikategorikan "Belum Ideal" oleh Kementerian Dalam Negeri. Masalah mendasar pada seluruh tema termasuk ketahanan pangan, realisasi investasi, penanganan stunting, kesehatan, dan pendidikan adalah dokumen rencana aksi yang diajukan dinilai belum logis, belum memuat unsur digitalisasi yang kuat, serta minim kolaborasi nyata dengan pihak eksternal atau unsur *pentahelix*.

Sebagai rekomendasi akhir, LHE KemenpanRB mendesak Kepala Bappeda bersama seluruh Kepala OPD di Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan perbaikan perencanaan kinerja secara menyeluruh dengan menerapkan prinsip *cascading* yang berorientasi pada hasil nyata (*outcome*) dan memenuhi kriteria SMART. Manajemen risiko harus diperkuat dengan membangun budaya risiko, mengalokasikan anggaran yang memadai, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menerapkan kebijakan anti-penyuapan (ISO-37001) demi mencegah gratifikasi dan penyalahgunaan fasilitas kantor. Dengan komitmen tinggi untuk membenahi seluruh catatan evaluator ini, diharapkan tata kelola birokrasi Kabupaten Belitung Timur dapat kembali meningkat dan memberikan dampak pelayanan yang nyata bagi masyarakat luas.

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang merepresentasikan suatu tingkat produktivitas Daerah. Dalam prosesnya, pengukuran IDSD menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kementerian/lembaga (K/L) yang bertindak sebagai produsen data guna menjaga objektifitas pengukuran. Kerangka pengukuran IDSD 2025 terdiri dari empat komponen dasar, yaitu komponen lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar serta ekosistem inovasi. Dimana, keempat komponen dasar tersebut tetap dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Penyusunan IDSD 2025 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu tahap pemantapan kerangka konseptual, penajaman indikator, pengumpulan data, pengolahan data, kontrol kualitas, penghitungan skor akhir dengan agregasi serta kontrol kualitas data akhir (uji statistik). Pada IDSD 2025 ini, pengukuran dilakukan terhadap 38 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia, namun hanya 484 kabupaten/kota yang dapat dinilai karena sisanya kelengkapan datanya kurang. Jumlah indikator yang digunakan untuk mengukur nilai IDSD 2025 ini, menggunakan sebanyak 63 indikator untuk provinsi dan 50 indikator untuk kabupaten/kota.

Pengukuran setiap pilar daya saing menggunakan indikator pembentuk daya saing, dimana indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokkan konseptual dan bukan sebagai pertimbangan dalam penghitungan indeks. Empat komponen dasar yang bertindak sebagai kerangka pengukuran IDSD 2025 dapat dideskripsikan sebagai berikut. Komponen lingkungan pendukung, terdiri dari empat pilar yaitu pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK serta pilar stabilitas ekonomi makro. Komponen sumber daya manusia terdiri dari pilar kesehatan dan keterampilan. Komponen pasar terdiri dari pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan dan pilar ukuran pasar. Sedangkan komponen ekosistem inovasi, terdiri dari pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Dimana masing-masing pilar tersebut memiliki indikator pembentuk.

Metode perhitungan IDSD 2025 menggunakan data yang distandarisasi menggunakan rumus min-max sehingga didapatkan skor 0-5 pada seluruh indikator. Skor pilar daya saing merupakan agregasi skor indikator pembentuknya yang dihitung menggunakan rata-rata aritmatik. Masing-masing pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. Penilaian akhir IDSD dihitung dengan mengagregasikan skor pilar daya saing dengan menggunakan metode yang sama. Skor di level indikator, pilar dan indeks tidak dapat dihitung apabila terdapat data yang tidak tersedia.

Skor IDSD Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 3.35. Skor tersebut menurun sebesar 7% jika dibandingkan dengan capaian IDSD Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 yang bernilai 3.60. Pada tahun 2025, skor IDSD Kab. Belitung Timur menduduki peringkat terakhir jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Prov. Kep. Bangka Belitung. Skor ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan skor IDSD yang dicapai oleh Kab. Belitung Timur, setelah sebelumnya berada pada posisi ke lima (5). Capaian skor IDSD Provinsi Kep. Bangka Belitung beserta seluruh kabupaten/kota di bawahnya dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 1 berikut ini.



Gambar 2. 6 Skor IDSD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Tabel 2. 74 Capaian Skor IDSD Nasional, Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka

Uraian	Komponen												Skor IDSD
	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	
Nasional	4,30	3,37	3,68	4,02	3,79	3,67	2,55	2,96	2,90	4,38	2,79	3,54	3,50
Prov. Kep. Bangka Belitung	4,19	3,24	4,54	3,66	3,87	3,59	2,03	3,62	2,40	4,03	2,46	2,98	3,38
Belitung	4,79	3,08	4,86	3,22	3,90	4,16	3,66	3,50	2,85	3,98	3,09	1,96	3,59
Bangka Barat	4,61	3,53	4,79	3,39	3,80	4,08	2,23	4,15	1,88	4,16	3,00	1,57	3,43
Bangka Tengah	4,83	3,28	4,76	2,77	3,95	4,00	4,56	3,94	1,52	3,92	3,18	2,17	3,57
Bangka Selatan	4,74	3,34	4,73	3,86	3,69	3,93	2,45	3,96	1,40	3,93	3,13	1,74	3,41
Belitung Timur	**4,81**	**2,95**	**4,73**	**3,24**	**3,99**	**4,38**	**2,72**	**3,60**	**1,25**	**3,89**	**3,05**	**1,55**	**3,35**
Pangkal Pinang	4,38	2,85	5,00	3,12	4,10	4,06	5,00	4,68	3,77	4,13	3,07	3,52	3,97
Bangka	4,78	3,43	4,87	3,17	3,90	3,99	3,29	4,01	2,85	4,17	3,37	3,14	3,75

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Pada pilar 1 Institusi, memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang mempengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal. Keberadaan institusi yang kuat dapat memfasilitasi transaksi ekonomi yang efisien serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif sehingga mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Capaian skor IDSD pilar 1 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 4.81. Skor tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan skor IDSD pilar 1 Nasional yaitu, 4.30 & skor IDSD Provinsi Kep. Bangka Belitung, yaitu 4.19. Dan jika dibandingan dengan 7 kabupaten/kota lain berada pada peringkat kedua. Pada pilar 1 jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam berikut.

Tabel 2. 75 Daftar Indikator Pilar Institusi Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Kejahatan terorganisir	Mabes Polri, KPK
2	Tingkat pembunuhan	Mabes Polri
3	Transparansi anggaran	BPK
4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	KemenPAN-RB
5	Kinerja instansi pemerintah	KemenPAN-RB
6	Pelaksanaan reformasi birokrasi	KemenPAN-RB

No.	Indikator 2025	Sumber Data
7	Upaya pencegahan korupsi	KPK
8	Hak atas kepemilikan	Mabes Polri
9	Kualitas administrasi pertanahan	Kementerian ATR/BPN
10	Tingkat pengelolaan lingkungan	KLHK

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Pilar 2 Infrastruktur, mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien dan produktif. Capaian skor IDSD pilar 2 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 2.95. Skor tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian pilar 2 tingkat Nasional, yaitu 3.37 dan Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu, 3.24. Skor capaian IDSD Pilar 2 Kab. Belitung Timur menduduki peringkat keenam dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung. Pada pilar 2 jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam tabel. berikut.

Tabel 2. 76 Daftar Indikator Pilar Infrastruktur Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Pemenuhan standar pelayanan minimal aksesibilitas jalan	Kementerian PUPR
2	Kualitas infrastruktur jalan	Kementerian PUPR
3	Layanan infrastruktur kereta api	Kementerian Perhubungan
4	Layanan infrastruktur bandara	Kementerian Perhubungan
5	Layanan infrastruktur pelabuhan	Kementerian Perhubungan
6	Rasio elektrifikasi	Kementerian ESDM
7	Akses air minum layak	BPS
8	Tingkat kehilangan air	Kementerian PUPR

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Pilar 3 Adopsi TIK, mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah. Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif. Capaian skor IDSD pilar 3 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 4.73. Skor tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pilar 3 tingkat Nasional, yaitu 3.68 dan Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu, 4.54. Skor capaian IDSD Pilar 3 jika dibandingan dengan 7 kabupaten/kota lain berada pada peringkat keenam. Pada pilar 3 jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam tabel. berikut.

Tabel 2. 77 Daftar Indikator Pilar Adopsi TIK Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Pengguna telepon seluler	BPS
2	Jangkauan jaringan 4G	Kementerian Komdigi
3	Pengguna internet	BPS

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

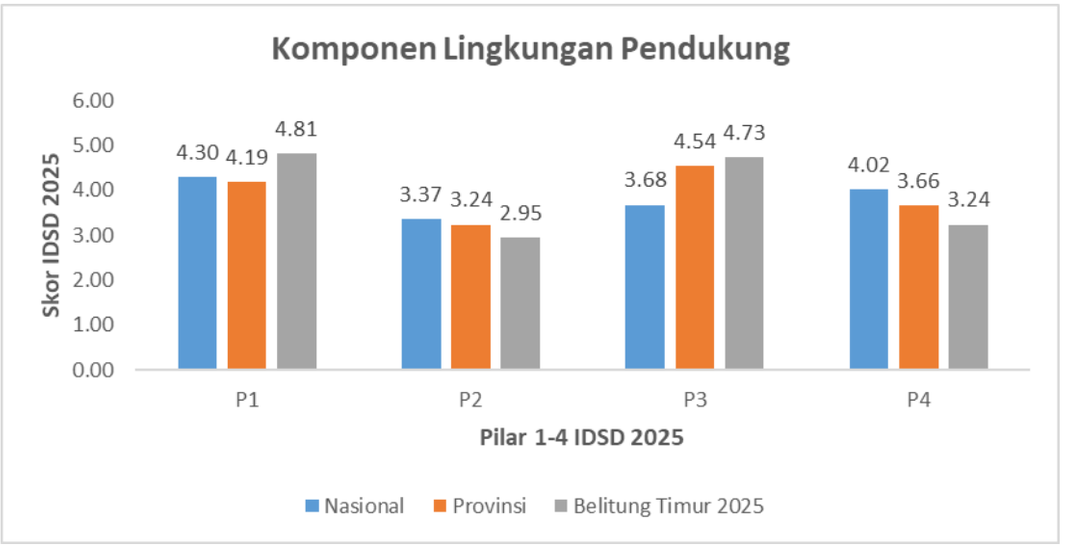
Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro, digunakan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan daerah mengelola ekonomi dari ancaman guncangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ekonomi makro yang stabil dapat meningkatkan kepercayaan investor baik lokal maupun mancanegara untuk berinvestasi di suatu daerah. Capaian skor IDSD pilar 4 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 3.24. Skor tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian pilar 4 tingkat Nasional, yaitu 4.02 dan Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu, 3.66. Skor tersebut jika dibandingan dengan 7 kabupaten/kota lain berada pada peringkat ketiga. Pada pilar 4 jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 78 Daftar Indikator Pilar Stabilitas Ekonomi Makro Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Pertumbuhan deflator PDRB	BPS
2	Kapasitas fiskal daerah	Kementerian Keuangan
3	Stabilitas pertumbuhan ekonomi	BPS
4	Indeks Ketahanan Pangan	Badan Pangan Nasional
5	Nilai investasi	BPS

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Perbandingan skor pilar 1 sampai dengan pilar 4 pada Kab. Belitung Timur terhadap skor Nasional, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan skor Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 dalam komponen lingkungan pendukung dapat disajikan dalam gambar 2 berikut.



Grafik 2. 7 Perbandingan Skor Pilar 1 sampai Pilar 4 pada Komponen Lingkungan Pendukung

Sumber : Buku IDSD BRIN 2024

Komponen kedua yang mempengaruhi penilaian IDSD suatu Daerah adalah komponen sumber daya manusia. Komponen tersebut terdiri dari pilar kesehatan dan keterampilan. Pilar 5 adalah pilar kesehatan, dimana pilar ini merefleksikan kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan umur harapan hidup. Suatu daerah yang memiliki penduduk yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dan kreatif. Capaian skor IDSD pilar 5 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 3.99. Skor capaian IDSD Pilar 5 Kab. Belitung Timur menduduki peringkat kedua dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Pada pilar 5 jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 79 Daftar Indikator Pilar Kesehatan Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Umur harapan hidup	BPS

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

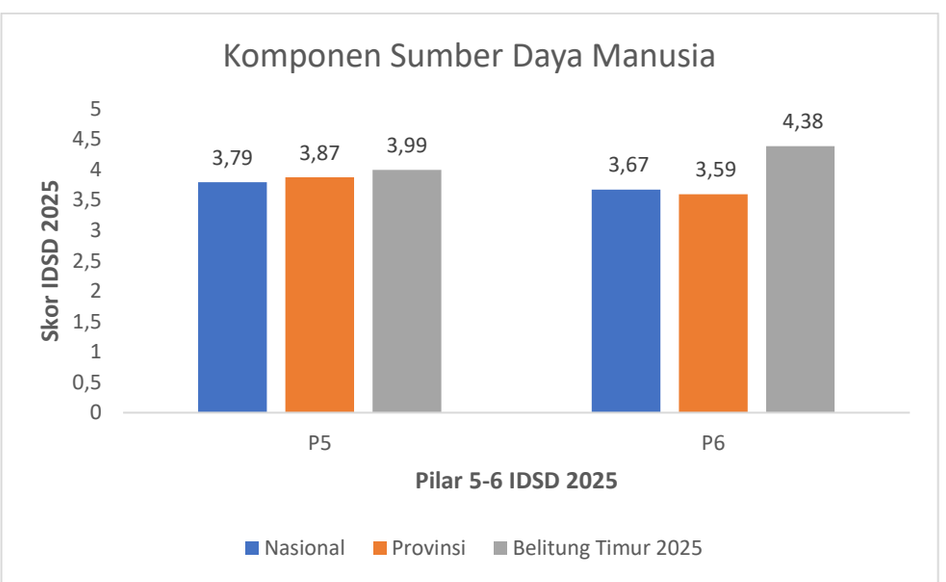
Pilar 6 adalah pilar keterampilan, pilar ini mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di suatu wilayah. Keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi sektor bisnis. Capaian skor IDSD pilar 6 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 4.38. Skor capaian IDSD Pilar 6 Kab. Belitung Timur merupakan skor tertinggi dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung. Pada pilar 6 jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 80 Daftar Indikator Pilar Keterampilan Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Rata-rata tahun sekolah	BPS
2	Keterampilan lulusan	BPS
3	Kemudahan menemukan pekerja terampil	BPS
4	Angka harapan sekolah	BPS
5	Berfikir kritis dalam mengajar	Kemendikdasmen
6	Rasio murid-guru sekolah dasar	Kemendikdasmen

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Perbandingan skor pilar 5 dan pilar 6 pada Kab. Belitung Timur terhadap skor Nasional, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan skor Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 dalam komponen sumber daya manusia dapat disajikan dalam gambar 3 berikut.



Grafik 2. 8 Perbandingan Skor Pilar 5 dan Pilar 6 pada Komponen Sumber Daya Manusia

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Selanjutnya, komponen ketiga yang mempengaruhi penilaian IDSD suatu Daerah adalah komponen pasar. Komponen tersebut terdiri dari pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan dan pilar ukuran pasar. Pilar 7 adalah pasar produk. Pilar 7 menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif. Keterbukaan pasar produk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor bisnis di suatu daerah. Capaian skor IDSD pilar 7 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 2.72. Skor capaian IDSD Pilar 7 Kab. Belitung Timur menduduki peringkat kelima jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung. Pada pilar 7 jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam tabel.

Tabel 2. 81 Daftar Indikator Pilar Pasar Produk Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Persaingan sektor jasa	BPS

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Pilar 8 adalah pasar tenaga kerja. Kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif memberi kemudahan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kapabilitasnya dan masuk ke pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja yang aktif merupakan kunci untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Capaian skor IDSD pilar 8 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 3.60. Skor tersebut menempatkan Kab. Belitung Timur pada urutan ke enam di antara kabupaten/kota di Prov. Kep. Bangka Belitung. Pada pilar 8 jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 82 Daftar Indikator Pilar Pasar Tenaga Kerja Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Kebijakan pasar tenaga kerja aktif	BPS
2	Upah pekerja	BPS
3	Kesetaraan upah perempuan dan laki-laki	BPS

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Pilar 9 adalah sistem keuangan. Sistem keuangan terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik (Gunadi et al., 2013).Capaian skor IDSD pilar 9 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 1.25. Skor tersebut menempatkan Kab. Belitung Timur pada urutan terakhir di antara kabupaten/kota di Prov. Kep. Bangka Belitung. Jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan pada pilar 9 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 83 Daftar Indikator Pilar Sumber Keuangan Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Kredit swasta terhadap PDRB ADHB	OJK dan BPS
2	Nilai akad Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kementerian Keuangan
3	Premi asuransi jiwa dan non-jiwa	OJK

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

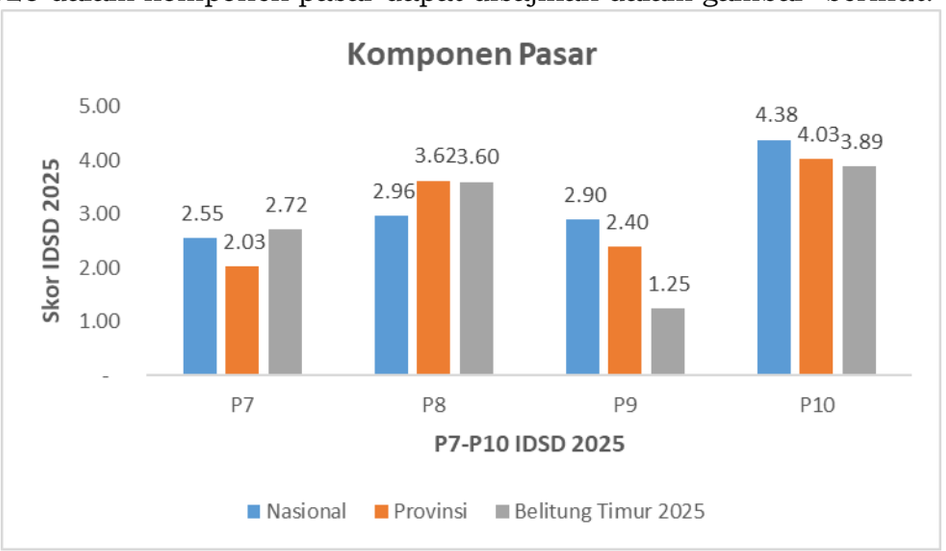
Pilar 10 adalah ukuran pasar. Ukuran pasar mempengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan pelaku bisnis untuk mengeksploitasi skala ekonomi. Ukuran pasar berpeluang meningkatkan produktivitas bisnis dengan mengeksploitasi skala ekonomi. Capaian skor IDSD pilar 10 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 3.89. Skor tersebut menempatkan Kab. Belitung Timur pada urutan terendah di antara kabupaten/kota di Prov. Kep. Bangka Belitung. Jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan pada pilar 10 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 84 Daftar Indikator Pilar Ukuran Pasar Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010	BPS

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Perbandingan skor pilar 7 sampai dengan pilar 10 pada Kab. Belitung Timur terhadap skor Nasional, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan skor Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 dalam komponen pasar dapat disajikan dalam gambar berikut.



Grafik 2. 9 Perbandingan Skor Pilar 7 sampai dengan Pilar 10 pada Komponen Pasar

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Pilar 11 adalah dinamisme bisnis. Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar di suatu wilayah. Daerah yang mampu menciptakan dinamisme bisnis yang positif akan menjadikan daerah tersebut kompetitif dan produktif. Capaian skor IDSD pilar 11 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 3.05. Skor tersebut menempatkan Kab. Belitung Timur pada urutan keenam di antara kabupaten/kota di Prov. Kep. Bangka Belitung. Jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan pada pilar 11 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 85 Daftar Indikator Pilar Dinamisme Bisnis Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Kementerian Investasidan Hilirisasi/ BKPM
2	Kinerja Pelayanan Publik	Kementerian Investasidan Hilirisasi/ BKPM

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

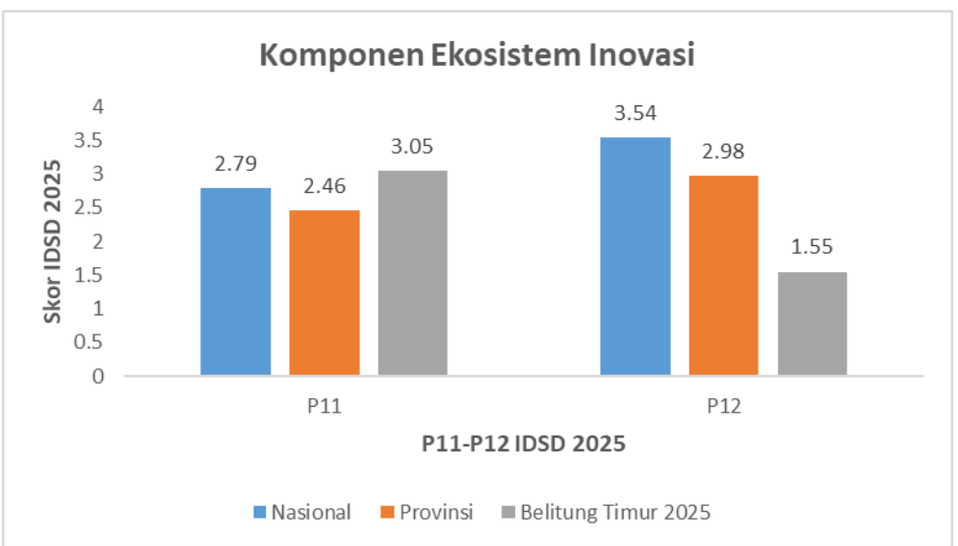
Pilar 12 adalah kapabilitas inovasi. Pilar ini menggambarkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah, serta menggambarkan sejauh mana suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi dan sudut pandang yang berbeda serta kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Capaian skor IDSD pilar 12 Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 1.55. Skor tersebut menempatkan Kab. Belitung Timur pada urutan terendah di antara kabupaten/kota di Prov. Kep. Bangka Belitung. Jenis indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan pada pilar 12 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 86 Daftar Indikator Pilar Kapabilitas Inovasi Tahun 2025 untuk level Kabupaten

No.	Indikator 2025	Sumber Data
1	Keanekaragaman tenaga kerja	BPS
2	Pengembangan klaster	Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Dewan Nasional KEK
3	Publikasi Ilmiah	Kemdiktisaintek
4	Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI)	Kemendiktisaintek, Kementerian Hukum, Kementerian Pertanian
5	Belanja riset	Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Perindustrian; Kemendiktisaintek
6	Indeks keunggulan lembaga riset	Kemendiktisaintek
7	Aplikasi merk dagang	Kemendiktisaintek; Kementerian Hukum

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Perbandingan skor pilar 11 dan pilar 12 pada Kab. Belitung Timur terhadap skor Nasional, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan skor Kab. Belitung Timur pada tahun 2025 dalam komponen ekosistem inovasi dapat disajikan dalam gambar 5 berikut.



Grafik 2. 10 Perbandingan Skor Pilar 11 dan Pilar 12 pada Komponen Ekosistem Inovasi

Sumber : Buku IDSD BRIN 2025

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa pilar perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, terutama pemangku jabatan. Pada pilar 2, yaitu infrastruktur Kab. Belitung Timur berada pada peringkat ke enam jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Prov. Kep. Babel. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pilar infrastruktur di Kabupaten Belitung Timur adalah dengan:

1. Melakukan percepatan Pembangunan dan perbaikan jalan penghubung antar kecamatan dan sentra ekonomi;
2. Meningkatkan akses internet terutama di wilayah desa;
3. Melakukan penguatan infrastruktur logistik (pelabuhan kecil dan gudang distribusi);
4. Menyediakan akses air bersih dan listrik yang stabil untuk mendukung industri lokal.

Pilar lain yang perlu ditingkatkan adalah pilar ke-7, yaitu pilar pasar produk. Pilar ini menempatkan Kabupaten Belitung Timur pada urutan ke lima jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Prov. Kep. Bangka Belitung. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong daya saing produk local agar lebih kompetitif. Adapun langkah konkret yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah Belitung Timur Adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi sertifikasi produk pasar, seperti sertifikat halal, BPOM dan SNI;
2. Melakukan digitalisasi UMKM, bisa dengan memasarkannya melalui *marketplace*, atau pelatihan penggunaan atau pemanfaatan *e-commerce* sebagai *platform* jual beli secara *online*;
3. Penguatan branding produk unggulan daerah, misalnya produk olahan perikanan, pariwisata dan olahan lokal yang khas dari Daerah;
4. Membuka akses pasar melalui kerja sama antar daerah dan ekspor.

Selanjutnya pilar yang perlu mendapat perhatian adalah pilar ke-8, yaitu pilar pasar tenaga kerja. Pilar ini menempatkan Belitung Timur berada pada urutan ke enam jika dibandingkan dengan seluruh Kota dan Kabupaten se-Provinsi Kep. Bangka Belitung. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan fleksibilitas tenaga kerja. Langkah-langkah aplikatif yang dapat dilakukan adalah :

1. *Link and match* antara pelatihan dengan kebutuhan industri (perkebunan sawit, pertambangan, pariwisata dan perikanan);
2. Program pelatihan vokasi berbasis kompetensi (sertifikasi BNSP);
3. Penyediaan *job matching* platform lokal; dan
4. Insentif atau *reward* bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal.

Pilar selanjutnya adalah pilar ke sembilan, yaitu pilar sistem keuangan. Pilar ini pada tahun 2025 menempatkan Kabupaten Belitung Timur berada pada urutan terakhir jika dibandingkan dengan seluruh Kota dan Kabupaten se Provinsi Kep. Bangka Belitung. Skor pilar ini adalah 1.25. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran sumber-sumber pembiayaan berjalan kurang optimal, fasilitasi arus transaksi berjalan tidak efisien, dan instrument perlindungan terhadap berbagai bentuk risiko keuangan tidak berjalan dengan baik. Sehingga diperlukan perluasan akses pembiayaan dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Langkah-langkah aplikatif yang dapat dilakukan adalah :

1. Mendorong kemitraan dengan bank, fintech dan lembaga keuangan resmi lainnya untuk pembiayaan UMKM;
2. Menggalakkan program literasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha;

3. Penguatan koperasi dan lembaga keuangan mikro; dan
4. Subsidi bunga atau penjamin kredit bagi UMKM potensial.

Pilar ke sepuluh (10), yaitu pilar ukuran pasar juga menempatkan Kabupaten Belitung Timur pada urutan terakhir jika dibandingkan dengan seluruh Kota dan Kabupaten se Provinsi Kep. Bangka Belitung. Pada tahun 2025, skor IDSD untuk pilar ini adalah 3.89. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa terdapat penurunan produktivitas pasar akibat rendahnya kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan efisiensi skala produksi dan jangkauan pasar yang kurang luas, sehingga menurunkan nilai tambah dalam kegiatan perekonomian. Langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut di antaranya adalah :

1. Mengembangkan sektor pariwisata untuk menarik wisatawan dari luar daerah;
2. Menyelenggarakan *event-event* ekonomi dan festival lokal untuk meningkatkan konsumsi dan menarik kedatangan wisatawan dari luar daerah;
3. Melakukan kerjasama perdagangan antar daerah, melalui mekanisme *business to business* dan *business to government*; dan
4. Mendorong investasi masuk melalui investor dari luar daerah

Pilar terakhir yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah adalah pilar ke dua belas (12), yaitu pilar kapabilitas inovasi. Skor pilar ke-12 pada tahun 2025 adalah 1.55. Skor tersebut menempatkan Kabupaten Belitung Timur pada urutan terakhir jika dibandingkan dengan seluruh Kota dan Kabupaten se Provinsi Kep. Bangka Belitung. Rendahnya skor tersebut mengindikasikan bahwa kuantitas dan kualitas riset dan inovasi di Belitung Timur masih sangat rendah. Fasilitasi riset dan inovasi melalui akumulasi dan diversifikasi pengetahuan juga masih kurang. Sehingga ide-ide inovatif dan model bisnis baru yang relevan masih belum tercapai. Sehingga Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat mendorong ekosistem riset dan inovasi daerah melalui langkah-langkah berikut ini :

1. Melakukan kolaborasi dengan lembaga riset atau perguruan tinggi;
2. Mengadakan inkubator bisnis untuk perusahaan pemula (*startup*) dan UMKM inovatif;
3. Menyelenggarakan kompetisi riset dan inovasi daerah baik inovasi pelayanan produk maupun inovasi produk; dan
4. Mendorong pendampingan dan pendaftaran produk-produk berpotensi memiliki nilai kekayaan intelektual daerah.

2.1.3.2 Inovasi Daerah

Inovasi bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Penguatan aspek inovasi dalam perencanaan mengarahkan pengembangan inovasi di berbagai bidang dalam berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur dan nasional. Inovasi Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan Inovasi adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyasar untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah didorong untuk melakukan inovasi yang dapat menjawab perkembangan jaman yang cukup dinamis. Kabupaten Belitung Timur telah melahirkan inovasi-inovasi yang berhasil

guna dalam segala sektor, secara khusus inovasi yang mendorong percepatan pencapaian PHTC presiden yang sudah di tetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Program PHTC ini berfokus pada beberapa sektor utama, termasuk kesehatan (seperti Cek Kesehatan Gratis dan pengendalian TBC), pendidikan (seperti digitalisasi sekolah dan revitalisasi sekolah), serta program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan ekonomi. Pemetaan ini menjadi fondasi Rencana Aksi yang lebih operasional.

1. Pilar 1: Kesehatan dan Gizi : Intervensi Hulu-Hilir Penanganan Stunting dan Peningkatan Kualitas Hidup
2. Pilar 2: Pendidikan dan Digitalisasi : Membangun SDM Unggul di Era Digital
3. Pilar 3: Ketahanan Pangan : Menuju Kemandirian Pangan Lokal
4. Pilar 4: Ekonomi dan Tata Kelola Digital : Birokrasi Efisien, Ekonomi Inklusif

Sesuai ruang lingkup yang telah ditentukan sebelumnya, maka beberapa perangkat daerah yang terkait langsung dengan 4 (empat) pilar utama PHTC adalah:

1. Dinas Kesehatan
   Berbagai inovasi yang diinisiasi oleh Puskesmas di bawah binaan Dinas Kesehatan merupakan bagian dari intervensi kesehatan spesifik dan terintegrasi. Di antaranya adalah MERPATI MESTI (Menurunkan Prevalensi Status Gizi) dan MENTANAK (Menu Sehat Anak-Anak), yang berfokus pada pemantauan dan perbaikan gizi anak. Sementara itu, inovasi TURING ASIX (Kartu Monitoring ASI Eksklusif) dan KERITAK (Kelas Ibu Hamil Mitra KUA) berperan penting dalam memastikan intervensi kesehatan krusial selama masa kehamilan dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2. Dinas Pendidikan
   Pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum, khususnya di bidang pendidikan, telah melahirkan berbagai inovasi daerah sebagai bentuk intervensi strategis untuk penguatan literasi digital dan karakter. Salah satu inovasi unggulan adalah KETAM LEGIT (Kewarganegaraan dan Pertahanan dalam Literasi Digital), yang mencerminkan kedalaman visi pendidikan daerah.
   Inovasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dalam penggunaan teknologi (digital skill), tetapi juga menanamkan kearifan dalam pemanfaatannya (digital wisdom), terutama dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di ruang siber.
   Selain itu, terdapat pula intervensi inovasi pedagogis di ruang kelas, seperti Aplikasi Asesmen Diagnostik Kemampuan Awal Siswa Berbasis Excel, Pemanfaatan Gawai untuk Pembelajaran, SEMANGAT (Senang Belajar Numerasi dengan Benda Konkret), dan LAIS (Literasi dan Aritmetika untuk Inovasi Siswa). Inovasi-inovasi berbasis akar rumput (grassroot) ini memberdayakan guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih personal, adaptif, dan berpusat pada peserta didik, sesuai dengan semangat kurikulum modern.

3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
   Penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung akses informasi dan meningkatkan minat baca masyarakat. Selama tiga tahun terakhir, jumlah perpustakaan relatif stabil, namun jumlah pengunjung meningkat signifikan hingga 57% pada tahun 2023. Sementara itu, perpustakaan desa mencatat peningkatan kunjungan hingga 63% pada periode 2019–2020. Meskipun demikian, tingkat kegemaran membaca masyarakat masih menunjukkan fluktuasi, yang

menandakan perlunya upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya literasi di semua lapisan masyarakat. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur menginisiasi inovasi CEMPEDIK (Cerdas Melalui Perpustakaan Digital) sebagai bentuk intervensi dalam Demokratisasi Akses Pengetahuan. Inovasi ini mentransformasi perpustakaan konvensional menjadi pusat sumber belajar digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sejalan dengan arah pengembangan perpustakaan digital nasional, seperti i-Belitung dan berbagai platform serupa lainnya.

4. Dinas Pertanian dan Pangan
   Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan urusan pangan mencakup kegiatan evaluasi ketersediaan pangan pokok, peningkatan cadangan pangan, penilaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur menginisiasi Program Payung Peningkatan Produksi: BEBASUN (Beltim Betanam Surplus Pangan). Program ini berperan sebagai program induk yang mengorkestrasi berbagai upaya untuk mencapai swasembada pangan lokal, sekaligus menjadi kerangka bagi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Inisiatif ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pencetakan sawah baru dan peningkatan produktivitas pertanian di tingkat daerah.
   Selain itu, pada aspek diversifikasi dan ketahanan pangan tingkat rumah tangga, dikembangkan berbagai inovasi seperti DAUN KETAPANG (Budidaya untuk Ketahanan Pangan), GEMPAR (Gerakan Menanam Pangan di Pekarangan), dan KELAKAR (Ketahanan Pangan Masyarakat Renggiang). Inovasi-inovasi ini merupakan strategi cerdas untuk memperkuat ketahanan pangan dari unit terkecil, yaitu keluarga. Secara khusus, Program GEMPAR terbukti efektif dalam menekan inflasi dan kemiskinan, karena mendorong keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dari pekarangan sendiri.

5. Dinas Perikanan
   Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya, menumbuhkan konsumsi ikan masyarakat, serta mengembangkan pengolahan hasil perikanan. Sebagai bentuk Intervensi Gizi Langsung berbasis potensi lokal, Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur menginisiasi sejumlah inovasi, antara lain PILUS BELTIM (Produk Olahan Ikan Landaikan Isu Stunting) dan GANGAN IKAN (Gerakan Aksi Penanganan Stunting melalui Gemar Ikan). Sebagai daerah kepulauan dengan sumber daya ikan yang melimpah, inovasi-inovasi ini menjadi contoh pemanfaatan potensi lokal untuk mendukung ketahanan gizi masyarakat. Kedua inovasi tersebut berfokus pada penyediaan asupan protein hewani berkualitas tinggi yang mudah diakses dan diolah, serta secara langsung mendukung program nasional Gemarikan dalam upaya pencegahan stunting di tingkat daerah.

6. Dinas Lingkungan Hidup
   Pelaksanaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran. Kondisi lingkungan hidup daerah diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu persentase penanganan sampah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Dalam rangka pemanfaatan lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Belitung Timur menginisiasi Solusi Inovatif untuk Lahan Kritis. Keunikan Belitung Timur sebagai daerah pascatambang dijawab dengan dua inovasi unggulan, yakni META KODOK (Media Tanam Eks Tambang Kompos Blok Eceng Gondok) dan KULIMBANG (Kupi Liberika Manfaatkan Bekas Tambang). Kedua inovasi tersebut tidak hanya menawarkan solusi pertanian, tetapi juga menjadi solusi ekologis yang berkelanjutan. Inovasi-inovasi ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mengubah tantangan lahan kritis menjadi peluang produktif, sekaligus menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.

7. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   Pelaksanaan urusan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk memperkuat peran kelembagaan koperasi sebagai pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengembangkan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing. Sebagai bentuk intervensi pemberdayaan ekosistem ekonomi lokal, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berfokus pada penguatan kapasitas UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Berbagai inovasi telah diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, di antaranya: 1) PONDOK UMKM, sebagai pusat layanan terpadu untuk pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan; 2) PANGUT BELTIM WA Chatbot (Pelayanan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan UMKM), yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses data, informasi, dan layanan konsultasi; dan 3) PAK SATAM (Lapak Sahabat Petani Milenial), yang menyediakan wadah promosi dan pemasaran produk lokal, khususnya hasil pertanian dan olahan masyarakat. Ketiga inovasi tersebut membentuk ekosistem digital dan kolaboratif yang memperkuat rantai nilai wirausaha lokal, mulai dari peningkatan kapasitas, penyediaan informasi, hingga fasilitasi pemasaran produk. Selain itu, inisiatif ini juga mendukung transformasi ekonomi digital daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pemberdayaan UMKM berbasis teknologi.

8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
   Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus memfasilitasi pengembangan berbagai sistem informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital di berbagai sektor, seperti keuangan daerah, pendapatan, kepegawaian, kearsipan, serta penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Beberapa inovasi unggulan dengan berkolaborasi dengan perangkat daerah teknis, yang telah dikembangkan antara lain: 1) TRAWANG BELTIM (Transparan Wilayah Anggaran Belitung Timur) sebagai garda depan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan partisipatif. Inovasi ini diperkuat oleh SIPESPA.COM (Sistem Peningkatan Pengelolaan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan) dan SIRESAM (Sistem Retribusi Sampah Belitung Timur), yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas fiskal serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 2) OPEN DATA BELTIM, SILAGAK (Sistem Layanan Digital Kepegawaian), dan BATU PULAS (Bantuan Pendampingan Pemberkasan Srikandi) menjadi pilar penting dalam penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Khususnya, OPEN DATA BELTIM berperan dalam mendukung prinsip Satu Data Indonesia dengan menyediakan data yang valid, mutakhir, dan mudah diakses, guna menunjang proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based planning). Ke depan, penguatan kapasitas digital aparatur, perluasan infrastruktur TIK hingga ke desa, serta integrasi antar-

sistem informasi lintas perangkat daerah menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital di Kabupaten Belitung Timur.

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sebuah tools yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Nilai indeks yang didapat akan dibagi menjadi 4 (empat) predikat diantaranya Sangat Inovatif, Inovatif, Kurang Inovatif, dan tidak dapat dinilai.

Tabel 2. 87 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Inovasi/Submit IGA	6	13	18	26	35
2	Skor IID	34,98	54,57	53,68	55,48	58,29
3	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
4	Peringkat Nasional	224	95	82	117	117
5	Peringkat Provinsi	7	4	4	4	3

Sumber : Bapperida Kab. Belitung Timur, Tahun 2026

Secara keseluruhan, pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2025 telah meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah (IID) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 ini, Kabupaten Belitung Timur berhasil mencapai skor 58,21 dengan predikat Inovatif. Berikut adalah daftar inovasi yang berkontribusi pada IID tahun 2025 serta perannya dalam keselarasan pembangunan daerah:

Tabel 2. 88 Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

NO	INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PD PELAKSANA	BENTUK INOVASI
1	Sistem Informasi Layanan Digital Kepegawaian (SILAGAK)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi	Perencanaan, Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Inovasi Pelayanan Publik
2	Sistem Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terpadu (SEPAT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pemerintahan Umum dan Konkuren	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Inovasi Pelayanan Publik
3	Hukum Belitung Timur QR-Code (HUMBLE-QR)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pemerintahan Umum dan Konkuren	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Inovasi Pelayanan Publik
4	SIMPOR PLUS (Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif Plus)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pemerintahan Umum dan Konkuren	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah	Inovasi Pelayanan Publik
5	Peningkatan Media Penyampaian dan Penyimpanan Data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK) Daerah Berbasis Google Drive	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pemerintahan Umum dan Konkuren	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah	Inovasi Pelayanan Publik

NO	INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PD PELAKSANA	BENTUK INOVASI
6	Klinik Konseling Litbang Terpadu (KLIK BANGDU)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi	Perencanaan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbangda	Inovasi Pelayanan Publik
7	PERAMU GOES TO MASYARAKAT	Memperkuat kemandirian pangan lokal	Pertanian, Pemberdayaan, Pemerintahan Desa	Desa Air Madu	Inovasi Pelayanan Publik
8	KEKAR DESA BARU (Kampong Ekonomi Kreatif Desa Baru)		Pertanian, Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan KUKM	Desa Baru	Inovasi Pelayanan Publik
9	BIOGAS	Memperkuat kemandirian pangan lokal	Pertanian, Pemberdayaan masyarakat dan desa	Desa Lintang	Inovasi Pelayanan Publik
10	JAMET'S (Jamu Jambu Mente Sukamandi)	Memperkuat kemandirian pangan lokal	Pertanian, Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan KUKM	Desa Sukamandi	Inovasi Pelayanan Publik
11	SIKOK (Sistem Informasi Kesehatan Kampong Kite)	Peningkatan kualitas hidup	Kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik
12	Aplikasi Calon Pengantin Elektronik (SIE CANTIK)	Intervensi Hulu-Hilir Penanganan Stunting dan Peningkatan Kualitas Hidup	Kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik
13	Mencari Data Pendukung Pembangunan Belitung Timur (MENTUDONG BELTIM)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi	Pemerintahan Umum dan Konkuren	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Inovasi Pelayanan Publik
14	SISTER BELTIM (Sistem Survei Statistik Sektoral)	memperkuat birokrasi efisien	Pemerintahan Umum dan Konkuren	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Inovasi Pelayanan Publik
15	Reservasi Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan	memperkuat birokrasi efisien	Pemerintahan Umum dan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Inovasi Pelayanan Publik
16	Manajemen Data Pengguna Aset Dinas Pendidikan (MENTANDIK)	memperkuat birokrasi efisien	Pemerintahan Umum dan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Inovasi Pelayanan Publik
17	GO BRIGHT	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi	Perhubungan, pemeberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Perhubungan	Inovasi Pelayanan Publik
18	The Outstanding Millenials For Aquaculture Innovation/Pembudidaya Ikan Milenial (TOMAN)	Memperkuat kemandirian pangan lokal	Pertanian, Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan KUKM	Dinas Perikanan	Inovasi Pelayanan Publik

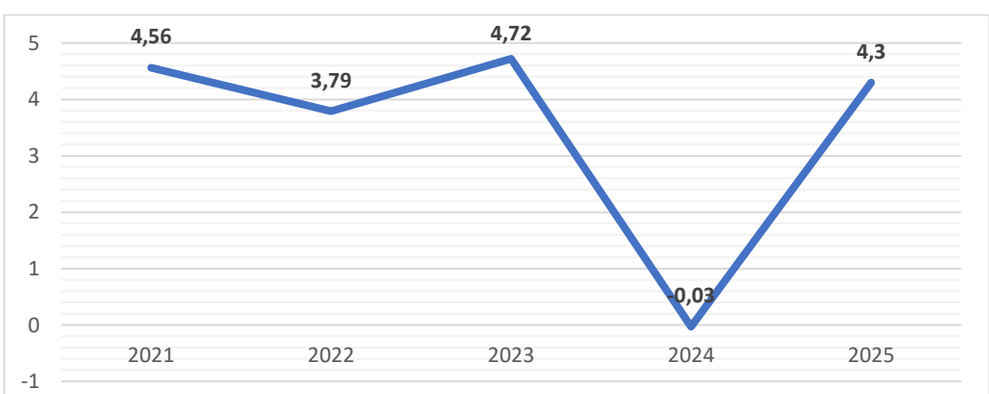
NO	INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PD PELAKSANA	BENTUK INOVASI
19	Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG)	Memperkuat kemandirian pangan lokal	Pertanian, Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan KUKM	Dinas Perikanan	Inovasi Pelayanan Publik
20	LARSITA (Layanan Arsip Kita)	memperkuat birokrasi efisien	Pemerintahan Umum dan Konkuren	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Inovasi Pelayanan Publik
21	ARJUNA (Layanan Restorasi Arsip dan Bencana)	memperkuat birokrasi efisien	Pemerintahan Umum dan Konkuren	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Inovasi Pelayanan Publik
22	BATU PULAS (Bantuan Pendampingan Pemberkasan Srikandi)	memperkuat birokrasi efisien	Pemerintahan Umum dan Konkuren	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Inovasi Pelayanan Publik
23	Pertanian Goes To School	Memperkuat kemandirian pangan lokal	Pertanian, Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan KUKM	Dinas Pertanian dan Pangan	Inovasi Pelayanan Publik
24	BEBASUN (Beltim Betanam Surplus Pangan)	Memperkuat kemandirian pangan lokal	Pertanian, Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan KUKM	Dinas Pertanian dan Pangan	Inovasi Pelayanan Publik
25	Digitalisasi Kartu Rekording Ternak	Memperkuat kemandirian pangan lokal	Pertanian, Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan KUKM	Dinas Pertanian dan Pangan	Inovasi Pelayanan Publik
26	BERASAM (Betanam Bawang Merah di Tanah Asam)	Memperkuat kemandirian pangan lokal	Pertanian, Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan KUKM	Dinas Pertanian dan Pangan	Inovasi Pelayanan Publik
27	Kupi Liberika Manfaatkan Bekas Tambang (KULIMBANG)	Memperkuat kemandirian pangan lokal	Pertanian, Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan KUKM	Dinas Pertanian dan Pangan	Inovasi Pelayanan Publik
28	Portal Informasi Terpadu Perumahan Rakyat (PINTU RUMAH RAKYAT)	memperkuat birokrasi efisien	PUPR dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas PUPR, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Inovasi Pelayanan Publik
29	Sinergi Penggerak Swadaya Masyarakat Berbasis Sekolah (SI PSM BEBASE)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi	Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemeberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inovasi Pelayanan Publik

NO	INOVASI	INTISARI INOVASI	SINERGITAS	PD PELAKSANA	BENTUK INOVASI
30	Sinergi Penggerak Swadaya Masyarakat Berbasis Masyarakat (SI PSM BERKAT)	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi	Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemeberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inovasi Pelayanan Publik
31	Layanan Elektronik Pengaduan Terintegrasi (LEPAT)	memperkuat birokrasi efisien	Pemerintahan Umum dan Konkuren	Satpol PP	Inovasi Pelayanan Publik
32	Waktu dan Ruang Kita Beropini (WARKOP)	Peningkatan Kualitas Hidup	Kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dan desa	UPT. Puskesmas Kelapa Kampit	Inovasi Pelayanan Publik
33	Jemput Bola Sputum Keliling (JETSKI)	Peningkatan Kualitas Hidup	Kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dan desa	UPT. Puskesmas Manggar	Inovasi Pelayanan Publik
34	Jemput Bola Kampong Terintegrasi Pelayanan UKBM dan UKP (JEBONG TUNU)	Peningkatan Kualitas Hidup	Kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dan desa	UPT. Puskesmas Manggar	Inovasi Pelayanan Publik
35	Tanya Obat Online Dengan Apoteker (TABLET)	Peningkatan Kualitas Hidup	Kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dan desa	UPT. Puskesmas Simpang Renggiang	Inovasi Pelayanan Publik

Sumber : Bapperida Kab. Belitung Timur, Tahun 2026

2.1.3.3 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan pembangunan berkelanjutan. Tingkat daya saing daerah (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep kabupaten/kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan kesejahteraan di suatu daerah pada periode tertentu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh suatu daerah (Rindang & M.Firdaus, 2009).



Grafik 2. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama. PDRB menurut Lapangan Usaha adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut Lapangan Usaha menggunakan pendekatan produksi yang merupakan salah satu dari tiga metode perhitungan pendapatan nasional. Melalui pendekatan ini, pendapatan daerah dihitung berdasarkan nilai seluruh produksi setiap sektor suatu negara (industri, agraris, ekstraktif, jasa, niaga) di dalam suatu periode tertentu.

Tabel 2. 89 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Kategori pada PDRB menurut Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)		Distribusi PDRB (persen)	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.301,47	1.666,81	27,56	3,04
Pertambangan dan Penggalian	1.490,56	1.043,05	12,44	8,52
Industri Pengolahan	2.510,99	1.107,42	20,96	3,83
Pengadaan Listrik dan Gas	8,77	4,49	0,07	2,97
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,33	1,17	0,02	2,73
Konstruksi	855,08	469,14	7,14	-1,10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.389,06	699,05	11,60	4,83
Transportasi dan Pergudangan	268,36	143,47	2,24	6,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	348,03	196,15	2,91	8,18
Informasi dan Komunikasi	160,80	135,68	1,34	9,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	62,21	32,41	0,52	-0,30
Real Estate	342,23	202,94	2,86	4,24
Jasa Perusahaan	37,86	20,49	0,32	6,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	619,94	421,43	5,18	0,55
Jasa Pendidikan	329,79	184,09	2,75	6,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174,94	106,79	1,46	6,39
Jasa lainnya	75,66	40,20	0,63	8,91
PDRB	11.978,07	6.474,78	100,00	4,30

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026

PDRB menurut Pengeluaran adalah keseluruhan output (barang dan jasa) yang dihasilkan dalam suatu perekonomian untuk dipergunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat. Berdasarkan pendekatan ini maka PDRB dihitung dari jumlah belanja/pengeluaran untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dalam

perekonomian tersebut. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan.

Tabel 2. 90 PDRB Menurut Pengeluaran Kab.Belitung Timur Tahun 2025

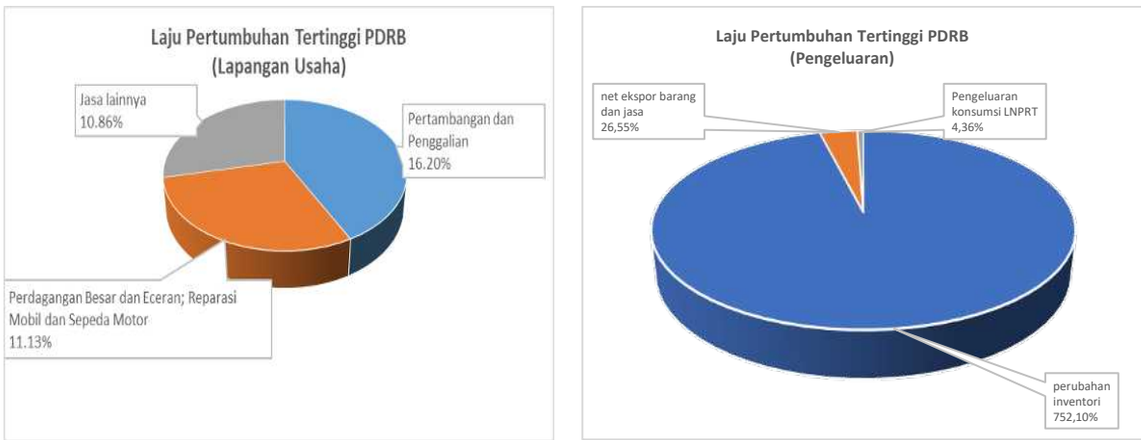
Kategori pada PDRB menurut Pengeluaran	PDRB menurut Pengeluaran (RP Milyar)		Distribusi PDRB (%)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.191,62	3.283,47	51,69	3,10
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	92,41	46,22	0,77	4,34
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.303,09	660,69	10,88	-5,92
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3.253,84	1.513,99	27,16	-0,39
Perubahan Inventori	47,84	10,89	0,40	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.089,26	959,53	9,09	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.978,26	6.474,78	100,00	4,30

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026

Fokus kemampuan ekonomi daerah terdiri atas variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, dan produktivitas total daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,3 persen. Perekonomian Belitung Timur tahun 2025 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 11,98 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai 6,47 triliun rupiah. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,20 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Perubahan Inventori sebesar 752,10 persen. Laju Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan sistem neraca regional yang dirilis oleh BPS Belitung Timur Pebruari tahun 2026 dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami fluktuatif di tahun 2020 terjadi penurunan drastis ke angka minus 0,63 Persen dikarenakan pandemi Covid 19 yang terjadi diseluruh dunia berimbas kepada Kabupaten Belitung Timur. Pasca pandemi Covid 19, laju pertumbuhan ekonomi Belitung Timur tahun 2025 berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 4,30 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh meningkatnya PDRB menurut Pengeluaran pada komponen Perubahan inventori dan net ekspor barang dan jasa. Perubahan inventori meningkat sebesar 752,10%, dari -1,67miliar rupiah pada 2024 menjadi 10,89 miliar pada 2025. Selain itu, pada komponen net ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 26,55%, dari 758,22 miliar rupiah pada 2024 menjadi 959,53 miliar rupiah pada 2025.

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga

sebaliknya. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.



Grafik 2. 12 Laju Pertumbuhan Tertinggi Tahun 2025

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026

Pertumbuhan tertinggi PDRB 2025 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur yaitu sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 16,20 persen, di ikuti sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,13 persen kemudian pada sektor Jasa lainnya sebesar 10,86 persen. Untuk pertumbuhan tertinggi PDRB menurut Pengeluaran berasal dari komponen 1) Perubahan inventori 752,10 persen, 2) net ekspor barang dan jasa sebesar 26,55 persen dan 3) pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 4,36 persen.

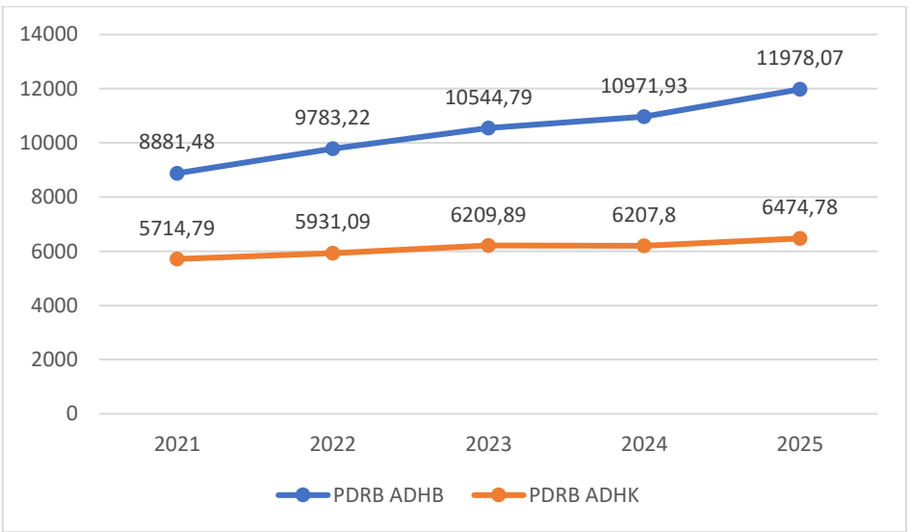


Grafik 2. 13 Distribusi PDRB Tahun 2025

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026

Untuk kontribusi utama PDRB menurut Lapangan Usaha didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 27,56 persen, Sektor Industri Pengolahan 20,96 persen, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian 12,44 persen. PDRB menurut Pengeluaran didominasi dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga 51,69 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 27,16 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah 10,88 persen.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.*(PDRB Belitung Timur menurut lapangan usaha 2021-2025).*



Grafik 2. 14 Laju Pertumbuhan PDRB Kab.Belitung Timur

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026

Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 mengalami peningkatan 4.30 triliun rupiah menjadi sebesar Rp 6,474 triliun lebih tinggi dari tahun 2024 yaitu sebesar 6,207 triliun. Sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 juga mengalami kenaikan Rp. 1,007 triliun menjadi sebesar Rp 11,978 triliun lebih tinggi dari kenaikan tahun 2024 yaitu sebesar Rp.0,43 triliun.

2.1.3.3.1 Pengeluaran Per Kapita

Tabel 2. 91 PDRB Menurut Pengeluaran Kab.Belitung Timur Tahun 2025

Kelompok Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita se Bulan (Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kelompok Makanan	897.337	998.166	958.718	1.002.601	949.352
Kelompok Bukan Makanan	855.677	924.753	1.007.869	1.002.978	1.003.369
Jumlah	1.753.014	1.922.919	1.966.587	2.005.579	1.952.721

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026

Berdasarkan kelompok makan dan bukan makanan untuk pengeluaran dalam 6 (enam) tahun terakhir dalam sebulannya terjadi fluktatif tetapi tidak terlalu besar. Pada tahun 2025 besarnya konsumsi masyarakat pada makanan dan bukan makanan berimbang. Dimana proporsi konsumsi kelompok bukan makanan menjadi lebih besar yaitu 51,38 persen dibandingkan proporsi konsumsi makanan sebesar 48,62 persen.

Tabel 2. 92 Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan

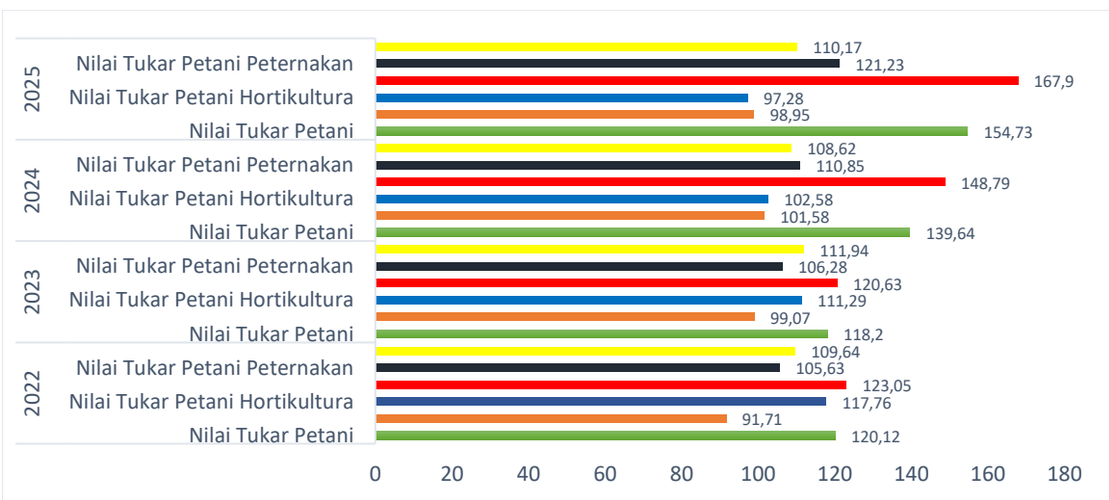
Komoditas Makanan	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Padi-padian	4,82	4,52	4,83	5,33	5,17
Umbi-umbian	0,46	0,38	0,34	0,27	0,38
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	7,09	7,54	6,24	6,28	6,75
Daging	2,39	3,39	2,47	2,68	3,08
Telur dan susu	3,13	3,04	2,65	2,99	3,25
Sayur-sayuran	4,70	4,44	3,91	4,15	4,38
Kacang-kacangan	0,63	0,55	0,60	0,65	0,64
Buah-buahan	1,85	2,34	1,86	2,84	2,17
Minyak dan kelapa	1,06	1,31	1,14	1,03	1,19
Bahan minuman	1,50	1,28	1,23	1,21	1,45
Bumbu-bumbuan	1,30	1,21	0,97	1,10	1,09
Konsumsi lainnya	1,34	1,11	1,13	1,06	1,02
Makanan dan minuman jadi	12,46	12,37	12,95	11,50	10,86
Rokok	8,46	8,43	8,43	8,90	7,19

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026

Pengeluaran masyarakat di Kabupaten Belitung Timur pada kelompok makanan banyak dihabiskan untuk makanan dan minuman jadi, ikan/udang/cumi/kerang dan padi-padian dikarenakan untuk dikonsumsi setiap hari sehingga untuk kebutuhan sekunder dan tersier tidak menjadi prioritas.

2.1.3.3.2 Nilai Tukar Petani

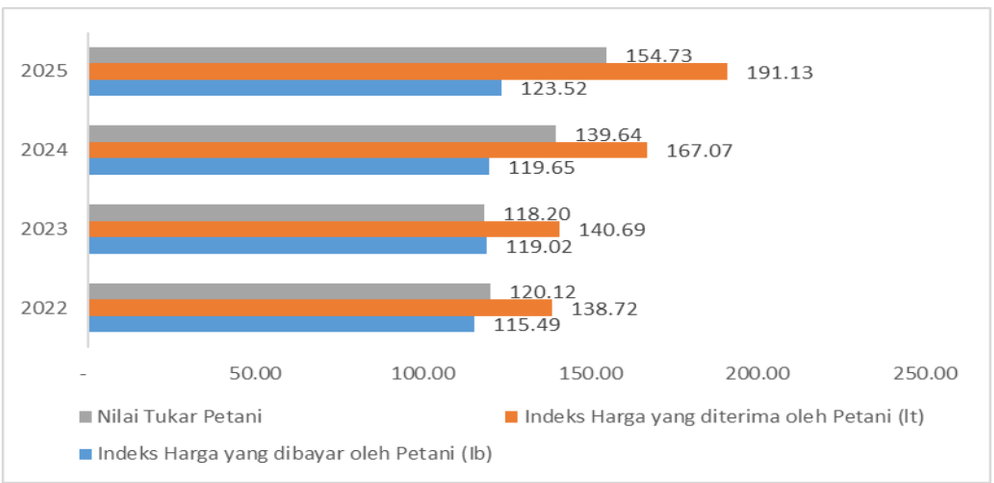
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP merupakan agregasi dari lima subsektor yang terdiri dari Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP), Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH), Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR), Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) dan Nilai Tukar Nelayan dan Pembudaya Ikan (NTNP).



Grafik 2. 15 Nilai Tukar Petani pada tahun 2022-2025

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026

NTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Oktober 2025 sebesar 154,73 atau naik 10,81 persen dibanding NTP Oktober 2024 (*YoY*) yang sebesar 118,20 persen. Sub sektor yang mengalami kenaikan tertinggi dengan nilai 12,84 persen adalah Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPPR) yang semula 148,79 persen di tahun 2024 menjadi 167,90 persen di tahun 2025. Sedangkan untuk sub sektor yang lain mengalami penurunan. Penurunan terkecil terjadi pada Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebesar 1.43 persen. Disusul dengan sub sektor Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dengan nilai penurunan sebesar 2.66 persen. Sub sektor lainnya yang mengalami penurunan Adalah sub sektor Nilai Tukar Petani Hortikultura sebesar 5.45 persen, dimana awalnya 102,58 persen pada 2024 dan menjadi 97,28 persen pada 2025. Selanjutnya disusul oleh Nilai Tukar Petani Peternakan menurun sebesar 9.36 persen, yang awalnya 121,23 persen pada 2024 menjadi 110,85 persen pada tahun 2025, penurunan ini adalah persentase penurunan terbesar jika dibandingkan dengan sub sektor yang lain.



Grafik 2. 16 NTP, It dan Ib pada tahun 2022-2025

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026

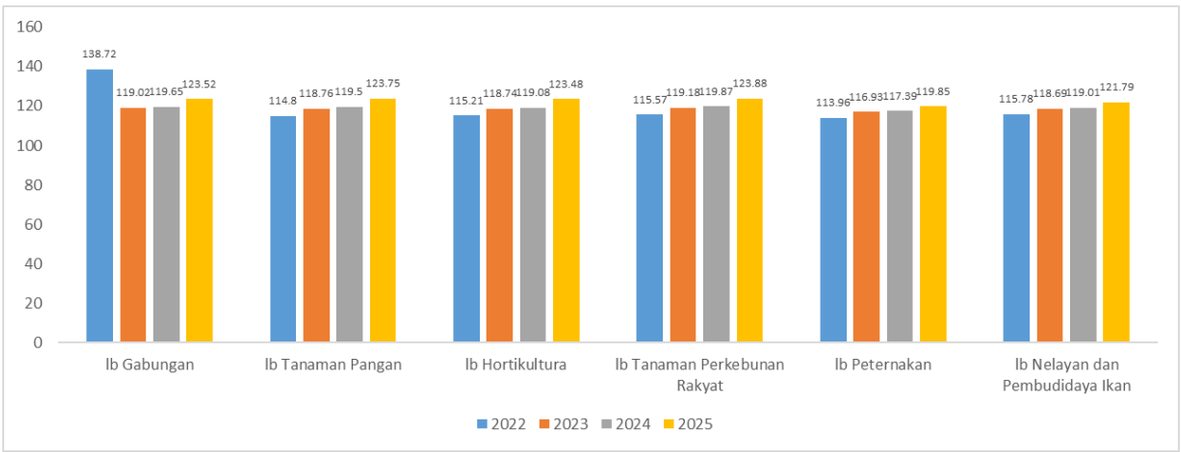
Kenaikan NTP Oktober 2025 (YoY) sebesar 10,81 persen terjadi karena Indeks Harga yang di terima oleh Petani (It) naik sebesar 14,40 persen dari 167,07 persen di tahun 2024 menjadi 191,13 persen di tahun 2025. Sedangkan Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) mengalami kenaikan 3,23 persen yang semula 119,65 persen di tahun 2024 menjadi 123,52 persen di tahun 2025. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) merupakan indikator yang menunjukan fluktuasi harga beragam komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Melalui Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.



Grafik 2. 17 Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada Tahun 2022-2025

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026

Pada tahun 2025 subsektor pertanian tanaman hortikultura memperoleh peningkatan penghasilan tertinggi sebesar 17,10 persen dari 102,58 persen di tahun 2024 menjadi 120,12 persen di tahun 2025. Jika pada tahun 2024 sub sektor tanaman Perkebunan rakyat memiliki persentase peningkatan terbesar nilai indeks harga yang diterima petani, maka pada tahun 2025 justru sektor inilah yang mengalami penurunan persentase It jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, jika dilihat dari nilainya maka subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat memperoleh penghasilan paling tinggi dibandingkan dengan 5 subsektor lainnya. Secara konsisten, dari tahun 2022 hingga 2025 subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami peningkatan. Kondisi ini mungkin terjadi karena terdapat peningkatan harga jual komoditas kelapa sawit, yang merupakan salah satu tanaman perkebunan rakyat dengan luasan terbesar di Prov. Kep. Bangka Belitung jika dibandingkan dengan komoditas tanaman perkebunan rakyat yang lain, dimana pada tahun 2023 luasan perkebunan rakyat untuk komoditas kelapa sawit mencapai 93.832,3 ha. Pada tahun 2025 ini, terlihat bahwa semua sub sektor yang ada mengalami pertumbuhan positif. Namun angka pertumbuhan terkecil berada pada sektor tanaman pangan, yaitu hanya 0,86 persen. Dua subsektor yang mampu mempertahankan pertumbuhan yang positif sepanjang Oktober 2022 hingga 2025 adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat, tanaman pangan dan subsektor peternakan, hal ini dikarenakan kondisi pasar yang stabil dan bertumbuh.



Grafik 2. 18 Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) pada tahun 2022-2025

Sumber: *BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2026*

Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) konsisten mengalami kenaikan pada tiap subsektornya sehingga dengan demikian petani harus menghadapi kenaikan biaya hidup dan biaya produksinya pada tiap tahunnya. Nilai Ib gabungan pada Oktober 2023 mengalami penurunan sebesar -14,70 persen dari Oktober 2022. Sedangkan pada tahun 2025, nilai Ib gabungan naik sebesar 3,23 persen jika dibandingkan dengan nilai Ib tahun 2024. Tingkat inflasi barang konsumsi rumah tangga yang dikonsumsi oleh petani, kenaikan biaya energi dan transportasi, peningkatan harga pupuk, alsintan, pestisida dan benih serta kenaikan upah tenaga kerja maupun masalah logistik merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib). Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) Tanaman Hortikultura mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,69 persen dari 119,08 persen di tahun 2024 menjadi 123,88 persen di tahun 2025. Sedangkan Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) Peternakan merupakan subsektor dengan pertumbuhan terendah sebesar 2,10 persen di tahun 2025 dari semula 117,39 persen di tahun 2024 menjadi 119,85 persen di 2025.

2.1.3.4 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.3.4.1 Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Irigasi

Kondisi daya saing daerah dari sisi fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Fasilitas infrastruktur wilayah menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubunganya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah diberbagai sektor di daerah dan antar-wilayah semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing.

Kabupaten Belitung Timur sebagai Kabupaten pemekaran terus menggenjot pembangunan fisik diantaranya pembangunan perkantoran terpadu, jalan, jembatan dan irigasi yang sangat dibutuhkan untuk menggerakan perekonomian di masyarakat dan semakin dekat dan berkualitasnya pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 93 Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Irigasi Kabupaten Belitung Timur 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Panjang Jalan	km	480,88	752,40	753,40	754,40	755,40
Panjang Jalan Kondisi Baik	km	343,2	553,66	494,34	493,8	517,58
Panjang Jalan Kondisi Sedang	km	39,97	45,47	95,95	104,85	77,2
Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	km	79,68	79,63	78,45	79,57	79,05
Panjang Jalan Aspal	km	406,14	419,00	626,7	625,71	632,69
Panjang Jalan Kerikil	km	57,34	44,09	61,64	73,65	77,28
Panjang Jalan Tanah	km	17,40	18,00	63,92	53,05	42,43
Jumlah Jembatan	unit	67	57	67	67	67
Jumlah Jembatan	unit	67	57	67	67	67
Jumlah Jembatan Kondisi Baik	unit	66	50	65	65	65
Panjang Irigasi	m					
Panjang Irigasi Primer	m	19.180,70	19.180,70	13.252,39	13.252,39	13.252,39
Panjang Irigasi Skunder	m	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
Luas Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah yang dibangun	ha	37	412	-	-	-
Panjang Sungan Kewenangan Daerah yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya	km	2,00	0,55	3,7	4,78	4,78

Sumber : Dinas PUPRPPerkim, Tahun 2026

Berdasarkan survey Bersama P2JN Provinsi Babel dengan Dinas PUPR Kabupaten Belitung Timur data jalan dan jembatan per November 2025 Panjang ruas jalan sesuai SK Jalan total 752,40 km dengan jumlah ruas jalan 204 ruas jalan. Kondisi jalan yang baik 517,58 km atau 68,79% yang sedang 77,20 km atau 10,26% sedangkan rusak ringan 18,13 km atau 2,41% serta rusak berat 139,49 km atau 18,54%.

Untuk Panjang Jembatan (meter) 666,30 meter dengan jumlah jembatan sebanyak 67 buah kondisi baik ada 6 buah (8,95%) kondisi sedang sebanyak 59 buah (88,06%) kondisi rusak ringan ada 1 buah (1,49%) kondisi rusak berat ada 1 buah (1,49%) dan jembatan runtuh tidak ada atau 0%. Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya pada tahun 2025 masih sama dengan tahun 2023

2.1.3.4.2 Kesesuaian Tata Ruang dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Belitung Timur

Kondisi aktual pemanfaatan ruang dalam laporan Peninjauan Kembali (PK) ke 1 RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014–2034 Tahun 2019 dilakukan untuk melihat dan membandingkan kondisi aktual pemanfaatan ruang di Kabupaten Belitung Timur sejak penetapan Perda RTRW Kabupaten Belitung Timur sampai dengan saat dilaksanakannya proses peninjauan kembali RTRW tersebut (Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No.6 Tahun 2017 tentang Tata Cara PK RTRW) . Kondisi aktual pemanfaatan ruang minimal meliputi data dan informasi sejak RTRW di tetapkan seperti data program dan penganggaran sektor terkait dalam rangka perwujudan tata ruang, peta – peta kondisi aktual pemanfaatan ruang dilapangan, data data yang menggambarkan kondisi aktual meliputi neraca penatagunaan tanah, hasil pemantauan dan evaluasi tata ruang, serta pelaporan oleh masyarakat.

Kesesuaian realisasi program lima tahunan dengan yang tercantum dalam indikasi program RTRW Kabupaten Belitung Timur berdampak pada perubahan dan pergeseran program dan anggaran ditahap tahap berikutnya. Pemetaan keseuaian antara rencana struktur dan pola ruang dengan kondisi aktual pemanfaatan ruang.

Hasil tumpang tindih peta memperlihatkan bahwa, peta rencana pola ruang Kabupaten Belitung Timur mempunyai nilai kesesuaian pemfaatan ruang dengan penutupan lahan sekitar 77,44% dari luas wilayah kabupaten, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan penutupan lahan sekitar 0,03% dari luas wilayah kabupaten, rencana pola ruang belum berwujud sekitar 19,18% dari luas wilayah kabupaten, dan pola ruang keliru sekitar 3,35% dari luas wilayah Kabupaten.

Untuk penggunaan lahan masih berlangsungnya revisi RTRW tahun 2021 ini ada kemungkinan berubah maka perlunya diolah kembali data perubahan penggunaannya sambil menunggu finalisasi perubahan revisinya. Secara jelas, hasil tumpang tindih peta diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 94 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang: Rencana Pola Ruang dengan Penutupan Lahan Saat Ini

No	Keseusaian Pola Ruang dengan Kawasan Hutan	TUTUPAN LAHAN (Ha)								
		Hutan Bakau/ Mangrove	Hutan Rimba	Kuburan/ Makam	Permukiman	Sawah	Tegakan/ Ladang	Perkebunan/ Kebun	Semak belukar	Tanah Kosong/ Gundul
1	**Hutan Lindung**	**1.012,56**	**11.143,16**	**-**	**10,70**	**-**	**195,72**	**7.038,99**	**18.561,66**	**5.466,34**
	Sesuai	1.012,56	11.143,16				195,72	7.038,99	18.561,66	5.466,34
	Pola ruang keliru				10,70					
2	**Perlindungan setempat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,39**	**76,57**	**-**
	Sesuai							15,39	76,57	
3	**Kawasan Lindung Lainnya**	**293,87**	**327,78**	**-**	**2,63**	**-**	**-**	**28,68**	**3.186,99**	**1,43**
	Sesuai	293,87	327,78					28,68	3.186,99	1,43
	Pola ruang keliru				2,63					
4	**Kawasan Strategis Linkungan Hidup**	**-**	**353,74**	**-**	**-**	**-**	**11,28**	**610,55**	**128,81**	**10,47**
	Pola ruang keliru		353,74				11,28	610,55	128,81	10,47
5	**Hutan Produksi**	**312,01**	**6.460,05**	**-**	**-**	**-**	**1.547,45**	**11.341,22**	**31.814,54**	**4.606,83**
	Sesuai	312,01	6.460,05				1.547,45	11.341,22	31.814,54	4.606,83
	Pola ruang keliru									
6	**Tanaman Pangan**	**-**	**-**	**-**	**16,67**	**514,48**	**32,70**	**691,44**	**998,64**	**665,46**
	Belum terwujud					389,11	6,69	448,21	543,33	232,91
	Pola ruang keliru				16,67	125,37	26,01	243,23	455,31	432,55
7	**Hortikultura**	**54,79**	**2.424,98**	**-**	**156,65**	**-**	**1.630,91**	**16.563,38**	**25.272,02**	**3.480,62**
	Sesuai						1.630,91		25.272,02	3.480,62
	Tidak sesuai									
	Belum terwujud		2.424,98					16.563,38		
	Pola ruang keliru	54,79			156,65					
8	**Perkebunan**	**-**	**540,34**	**-**	**89,61**	**-**	**111,92**	**39.983,54**	**3.196,27**	**250,25**

No	Keseusaian Pola Ruang dengan Kawasan Hutan	TUTUPAN LAHAN (Ha)								
		Hutan Bakau/ Mangrove	Hutan Rimba	Kuburan/ Makam	Permukiman	Sawah	Tegakan/ Ladang	Perkebunan/ Kebun	Semak belukar	Tanah Kosong/ Gundul
	Sesuai							39.983,54		
	Pola ruang keliru		540,34		89,61		111,92		3.196,27	250,25
9	**Perikanan Laut**	**-**	**36,54**	**-**	**-**	**-**	**2,12**	**43,40**	**10,74**	**15,62**
	Belum terwujud		36,54				2,12	43,40	10,74	15,62
10	**Perikanan Darat**	**34,99**	**28,47**	**-**	**5,92**	**-**	**12,94**	**204,83**	**990,48**	**877,99**
	Pola ruang keliru	34,99	28,47		5,92		12,94	204,83	990,48	877,99
11	**Pertambangan**	**69,77**	**1.507,94**	**-**	**41,05**	**-**	**404,41**	**5.970,44**	**14.547,98**	**10.457,48**
	Sesuai	57,80	1.216,71				307,56	3.389,51	9.881,09	8.100,73
	Belum terwujud		291,23				96,85	2.580,93	4.666,89	2.356,75
	Pola ruang keliru	11,97			41,05					
12	**Industri**	**-**	**-**	**-**	**3,06**	**-**	**6,36**	**1.290,45**	**92,34**	**126,09**
	Sesuai				3,06					
	Belum terwujud						6,36	1.290,45	92,34	126,09
	Pola ruang keliru									
13	**Pariwisata**	**-**	**-**	**-**	**9,87**	**-**	**11,76**	**153,98**	**145,17**	**97,91**
	Belum terwujud				9,87		11,76	153,98	145,17	97,91
	Pola ruang keliru									
14	**Permukiman**	**-**	**39,59**	**4,68**	**2.138,15**	**-**	**1.984,75**	**2.880,77**	**5.414,34**	**2.095,03**
	Sesuai			4,68	2.138,15					
	Tidak sesuai									
	Belum terwujud		39,59				1.984,75	2.880,77	5.414,34	2.095,03
	Pola ruang keliru									
15	**Hankam**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113,55**	**136,84**	**56,37**
	Belum terwujud							113,55	136,84	56,37
16	**Hankam**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,27**
	Pola ruang keliru									16,27
	Jumlah (Ha)	**1.777,99**	**22.862,59**	**4,68**	**2.474,31**	**514,48**	**5.952,32**	**86.930,61**	**104.573,39**	**28.224,16**
	persentase	0,70	9,03	0,00	0,98	0,20	2,35	34,32	41,28	11,14
	Sesuai	1.676,24	19.147,70	4,68	2.141,21	-	3.681,64	61.797,33	88.792,87	21.655,95

Sumber : Laporan Akhir 2019 Hasil Pengkajian RTRW Kab.Belitung Timur 2014 -2034

Tabel 2. 95 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang: Rencana Pola Ruang dengan Penutupan Lahan Saat Ini (lanjutan)

No	Keseusaian Pola Ruang dengan Kawasan Hutan	TUTUPAN LAHAN (Ha)							Persen
		Tambak	Rawa	Empang	Danau/ Situ	Waduk	Sungai	Jumlah	
1	**Hutan Lindung**	**-**	**36,60**	**-**	**-**	**77,52**	**203,86**	**43.747,11**	**16,91**
	Sesuai		36,60			77,52	203,86	43.736,41	16,90
	Pola ruang keliru							10,70	0,00
2	**Perlindungan setempat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,84**	**94,80**	**0,04**
	Sesuai						2,84	94,80	0,04
3	**Kawasan Lindung Lainnya**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,88**	**-**	**3.870,26**	**1,50**
	Sesuai					28,88		3.867,63	1,49
	Pola ruang keliru							2,63	0,00
4	**Kawasan Strategis Linkungan Hidup**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.114,85**	**0,43**
	Pola ruang keliru							1.114,85	0,43
5	**Hutan Produksi**	**24,81**	**32,90**	**2,09**	**-**	**337,89**	**33,92**	**56.513,71**	**21,84**
	Sesuai		32,90	2,09		337,89	33,92	56.488,90	21,83
	Pola ruang keliru	24,81						24,81	0,01
6	**Tanaman Pangan**	**-**	**67,33**	**2,53**	**-**	**47,77**	**11,79**	**3.048,81**	**1,18**
	Belum terwujud							1.620,25	0,63
	Pola ruang keliru		67,33	2,53		47,77	11,79	1.428,56	0,55
7	**Hortikultura**	**-**	**160,53**	**-**	**-**	**259,58**	**32,20**	**50.035,66**	**19,34**
	Sesuai							30.383,55	11,74
	Tidak sesuai						32,20	32,20	0,01
	Belum terwujud							18.988,36	7,34
	Pola ruang keliru		160,53			259,58		631,55	0,24
8	**Perkebunan**	**-**	**2,44**	**13,05**	**-**	**79,54**	**16,56**	**44.283,52**	**17,12**
	Sesuai					79,54		40.063,08	15,48
	Belum terwujud							3.986,86	1,54
	Pola ruang keliru		2,44	13,05			16,56	233,58	0,09
9	**Perikanan Laut**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**108,42**	**0,04**
	Belum terwujud							108,42	0,04
10	**Perikanan Darat**	**-**	**1.925,71**	**-**	**-**	**528,13**	**512,08**	**5.121,54**	**1,98**
	Pola ruang keliru		1.925,71			528,13	512,08	5.121,54	1,98
11	**Pertambangan**	**-**	**77,06**	**-**	**9,00**	**626,55**	**20,50**	**33.732,18**	**13,04**
	Sesuai		49,04			485,98		23.488,42	9,08
	Belum terwujud		28,02			140,57		10.161,24	3,93
	Pola ruang keliru				9,00		20,50	82,52	0,03
12	**Industri**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,98**	**5,51**	**1.531,79**	**0,59**
	Sesuai					7,98		11,04	0,00
	Belum terwujud							1.515,24	0,59
	Pola ruang keliru						5,51	5,51	0,00
13	**Pariwisata**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,15**	**420,84**	**0,16**
	Belum terwujud							418,69	0,16
	Pola ruang keliru						2,15	2,15	0,00
14	**Permukiman**	**-**	**57,88**	**-**	**-**	**120,71**	**43,75**	**14.779,65**	**5,71**
	Sesuai					89,34		2.232,17	0,86
	Tidak sesuai						43,75	43,75	0,02
	Belum terwujud							12.414,48	4,80

No	Keseusaian Pola Ruang dengan Kawasan Hutan	TUTUPAN LAHAN (Ha)							Persen
		Tambak	Rawa	Empang	Danau/ Situ	Waduk	Sungai	Jumlah	
	Pola ruang keliru		57,88			31,37		89,25	0,03
15	**Hankam**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,49**	**-**	**309,25**	**0,12**
	Belum terwujud					2,49		309,25	0,12
16	**Hankam**	**-**	**-**	**-**	**10,89**	**-**	**-**	**27,16**	**0,01**
	Pola ruang keliru				10,89			27,16	0,01
	Jumlah (Ha)	**24,81**	**2.360,47**	**17,67**	**19,89**	**2.117,04**	**885,18**	**258.739,55**	**100,00**
	persentase	0,02	2,26	0,02	0,02	2,02	0,85	247,42	0,10
	Sesuai	-	118,54	2,09	-	1.107,13	240,62	200.366,00	77,44

Sumber : Laporan Akhir 2019 Hasil Pengkajian RTR Kab.Belitung Timur 2014 -2034.



Gambar 2. 7 Peta Ketidaksesuaian Lahan Dengan Pola Ruang

Sumber : Laporan Akhir 2019 Hasil Pengkajian RTRW Kab.Belitung Timur 2014 -2034

2.1.3.4.3 Sarana dan Prasarana Air Bersih

Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Air bersih menjadi salah satu penentu dalam meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Keperluan terhadap akses air bersih dan air minum masyarakat tersebut dipenuhi baik dari yang disediakan oleh PDAM maupun yang didapat dari sumur bor dan sumur gali milik masyarakat. Data terhadap akses air bersih dan air minum di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 96 Persentase Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Akses Air Bersih Masyarakat	92,29	92,29	94.44	97.13	NA
Akses Air Minum Masyarakat	7,23	79,78	83.89	85.52	NA

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur, 2026

Kondisi akses air bersih masyarakat pada tahun 2025 belum tersedia karena masih proses pengukuran. Berdasarkan data tahun 2024 meningkat sebesar 2.69 persen dari tahun 2023. Untuk air minum masyarakat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada tahun 2024 sebesar 85,52 persen, angka ini naik sebesar 1.94% dari tahun 2023.

2.1.3.5 Fokus Iklim Investasi

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), upah minimum, dan nilai tukar. Namun faktor-faktor non-ekonomi lainnya juga sangat berpengaruh, seperti perizinan usaha, kestabilan politik, penegakkan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi buruh, komitmen pemerintahan, komitmen perbankan, perpajakan, dan infrastruktur. Laporan Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yang dihasilkan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang indikator-indikator iklim investasi berdasarkan persepsi pelaku usaha di kabupaten dan kota dari 15 provinsi Indonesia menyimpulkan bahwa ada sembilan indikator iklim investasi yang mempengaruhi investasi di Indonesia, yaitu akses lahan usaha dan kepastian usaha, perizinan usaha, interaksi antara pemda dan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas Kepala Daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan biaya transaksi lain, kebijakan infrastruktur daerah, keamanan dan penyelesaian konflik, dan kualitas peraturan daerah.

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pegertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Bagi pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk menarik para investor guna menanamkan modalnya di daerah, sehingga akan terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Iklim Investasi di Kabupaten Belitung Timur selama ini sangat didukung dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah, jumlah demonstrasi yang hampir tidak ada dan pelayanan perizinan yang cepat dengan menggunakan sistem OSS (one single sistem) dari BKPM RI. Jumlah data izin terbit pada tahun 2025 di Kabupaten Belitung Timur berjumlah 1.914 perizinan dengan jumlah izin berusaha (melalui OSS) sebanyak 1.622 izin dan izin non berusaha (selain OSS) sebanyak 4292 izin. Terjadinya penurunan jumlah izn terbit di Kabupaten Belitung Timur yakni dari tahun 2024 sebanyak 2.718 izin menjadi 1.622 izin.

Pada tahun 2025 realisasi investasi/penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur mencapai Rp. 1.083.924.641.556 sedangkan pada tahun 2024, realisasi investasi/penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur mencapai Rp1.068.106.791.799. Terjadinya peningkatan nilai investasi tahunan beskala nasional yang tidak terlallu besar pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 sebesar Rp 15.817.849.757,-.

Penyebab realisasi nilai investasi daerah meningkat dikarenakan adanya kenaikan yang signifikan dari sektor perindustrian dan sektor ketenagakerjaan. Nilai investasi tahun 2025 yang mengalami kenaikan oleh sektor peternakan, sektor Perindustrian, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan sektor ketenagakerjaan. Sedangkan untuk realisasi investasi yang mengalami penurunan adalah sektor tanaman pangan dan perkebunan, sektor Kesehatan, obat dan makanan, sektor perdagangan, sektor kelautan dan perikanan, sektor lingkungan hidup dan perikanan, sektor energi dan sumber daya mineral.pertambangan, sektor transportasi, gudang da telekomunikasi, sektor pariwisata (hotel dan restoran), dan jasa lainnya. Pada tahun 2025 adanya tumbuh sektor baru yaitu sektor kesenian,

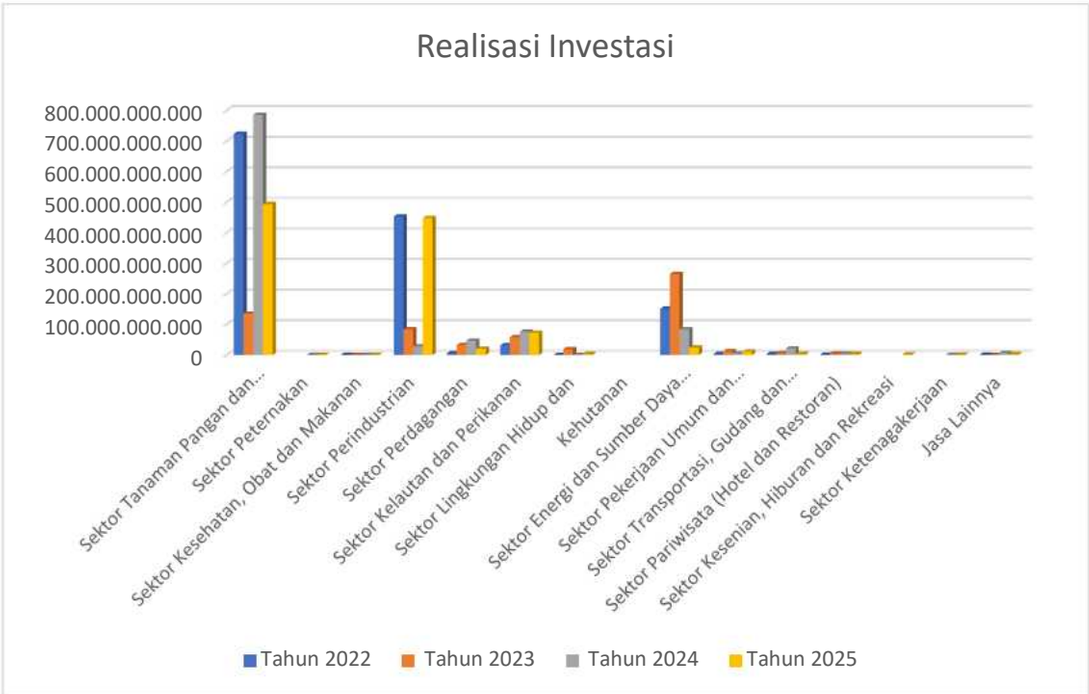
hiburan dan rekreasi dengan realisasi investasi sebesar Rp. 1.483.092.250,-. Untuk lebih lengkapnya dapat kita dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 97 Data Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Kabupaten Belitung Timur

	Realisasi Investasi			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan	723.514.440.604	135.163.074.844	785.394.118.751	493.899.928.266
Sektor Peternakan	-	-	53.494.227	263.373.760
Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	30.000.000	0	104.500.000	31.888.100
Sektor Perindustrian	452.835.989.733	84.033.205.620	28.096.940.869	447.647.026.672
Sektor Perdagangan	6.049.305.825	32.292.342.457	46.988.779.123	20.182.327.070
Sektor Kelautan dan Perikanan	31.825.753.040	58.012.090.476	75.834.629.842	72.819.304.270
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	19.082.170.000	10,235.502.000	3.211.965.600
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pertambangan	151.201.759.778	264.857.872.218	83.955.457.530	24.304.992.885
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.143.700.000	11.618.495.982	5.195.801.500	10.640.269.217
Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	3.547.813.000	6.181.810.000	21.055.819.500	3.384.923.466
Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran)	712.000.000	4.898.500.000	4.399.590.582	3.061.050.000
Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	1.483.092.250
Sektor Ketenagakerjaan	-	-	300.000.000	575.000.000
Jasa Lainnya	490.000.000	0	6.492.157.875	2.419.500.000
Jumlah	1.373.350.761.980	616.139.561.597	1.068.106.791.799	1.083.924.641.556

Sumber: Dinas PMPTSP Kab.Belitung Timur 2026

Berikut grafik realisasi investasi berdasarkan sektor Kabupaten Belitung Timur pada 4 tahun terakhir.



Grafik 2. 19 Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022-2025

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Belitung Timur 2026



Grafik 2. 20 Jumlah Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Belitung Timur

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Belitung Timur 2026

Berdasarkan grafik perkembangan realisasi investasi selama 4 tahun terakhir, nilai realisasi investasi masih didominasi oleh 3 sektor, yaitu salah satunya sektor perkebunan yang berasal dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, kemudian diikuti sector industry/sector tersier, ini sebagian besar merupakan rangkaian bidang usaha dari sector perkebunan dimana realisasi investasi ini berupa sector industry yang bergerak dibidang pengolahan buah kelapa sawit ditambah industry logam serta sector pertambangan yang ditahun 2025 ini menempati posisi teratas sebagai penyumbang realisasi investasi Kabupaten Belitung Timur.

2.1.3.5.1 Analisis Peningkatan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara berkelanjutan melakukan pembinaan, fasilitasi, serta promosi investasi guna meningkatkan minat investor baru untuk menanamkan modal di daerah. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, diperlukan penyusunan laporan jumlah investor baru yang menanamkan modal di daerah sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pada periode berikutnya. Target indikator pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 55 investor. Realisasi indikator Investor baru yang berinvestasi tahun 2025 sebesar 21 investor dengan capaian kinerja sebesar -61,81 % persen. Rendahnya minat investor baru yang berinvestasi tahun 2025 dibanding tahun 2024 disebabkan oleh bebeberapa faktor diantaranya:

1. Permasalahan regulasi dan birokrasi yang masih menjadi kendala bagi calon investor.
2. Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi.
3. Kurangnya kegiatan promosi investasi baik secara langsung maupun melalui media informasi dan elektronik.
4. Permasalahan pertanahan dan tata ruang wilayah.
5. Faktor sosial, keamanan, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi minat investasi

Tabel 2. 98 Data Investor Baru Tahun 2024-2025

SEKTOR	Jumlah Pelaku Usaha		Rencana Nilai Investasi	
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
Pertambangan/Sektor Primer	31	10	434.235.040.280	19.300.000.000
Perkebunan/Sektor Primer	4	4	309.485.112.808	8.100.000.000
Perikanan/Sektor Primer	3	1	20.300.000.000	10.000.000.000
Perdagangan/Sektor Tersier	7	4	58.159.270.430	5.000.000.000
Hotel, Restoran dan Jasa Lainnya/Sektor Tersier	3	1	3.412.480.000	1.100.000.000
Konstruksi/Sektor Tersier	3	-	4.140.000.000	-
Industri/Sektor Sekunder	1	1	133.000.000.000	1.100.000.000
Kesehatan	2	-	5.647.619.367	-
Pendidikan	0	-	0	-
Perhubungan	1	-	1.050.000.000	-
JUMLAH	55	21	969.429.522.885	44.600.000.000

Sumber : DPMPTSP Tahun 2026, Data Perizinan diolah (Pelaku usaha >= 1M)

Sebagai upaya peningkatan capaian indikator pada tahun berikutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan promosi tentang potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Belitung Timur, baik secara langsung ataupun melalui media informasi.
2. Segera merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.
3. Mensosialisasikan kebijakan daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi bersama perangkat daerah terkait.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan urusan Penanaman Modal.

2.1.3.5.2 Holtikultura

Luas panen untuk tanaman sayuran adalah luas tanaman yang dipanen sekaligus/habis/dibongkar dan luas tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/belum habis. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 99 Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Belitung Timur

Jenis Tanaman	Tahun					
	2023		2024		2025	
	Ha	Kuintal	Ha	Kuintal	Ha	Kuintal
Bawang Daun	17	950	13,33	337,95	5,65	203,85
Bawang Merah	6	91	12,20	205,94	8,52	152,30
Bayam	21	892	17,03	458,90	14,18	279,89
Buncis	4	37	1,75	16	1,61	28,70
Cabai Rawit	41	999	30,05	1.229,10	25,65	992,20
Kacang Panjang	19	659	10,50	271,42	8,24	223,58
Kangkung	27	1.185	24,99	907,40	22,61	544,90
Ketimun	23	1.144	13,05	588,40	7,61	371,01
Petsai/Sawi	25	816	14,25	433,20	12,55	357,38
Semangka	4	345	5,92	632,60	5,39	389,17
Terung	20	915	12,45	468,70	7,67	177,70
Tomat	8	212	1,77	46,15	2,65	55,30
Cabai Keriting	26	1.112	17,55	643,75	16,15	650,60

Sumber :(BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

2.1.3.5.3 Perkebunan

Kelapa Sawit merupakan komoditas perkebunan dengan nilai produksi terbesar di Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2025 dengan jumlah produksi sebesar 8.455 ton dengan luas area tanaman sebesar 6.205,90 hektar. Untuk tanaman kelapa, kopi, dan lada tidak terlalu berpengaruh luas area tanaman dan jumlah produksinya dari tahun 2023 ke tahun 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 100 Luas Area Tanaman dan Jumlah Produksi Perkebunan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023-2025

Uraian	Tahun					
	2023		2024		2025	
	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton
Kelapa Sawit	23.749	768.816	5.998,40	807.749	6.205,90	8.455
Kelapa	204	169	206	152	220	149,78
Karet	3.161	976	3800	1.117	3.044	804
Kopi	63	2	71	2,76	80	2,60
Lada	3.479	1.060	3.428	1.187	3.340,04	1.004

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

Untuk perkebunan rakyat masih didominasi dengan perkebunan kelapa sawit tetapi tidak dengan perkebunan karet yang mengalami sedikit penurunan. Perkebunan kelapa sawit mengalami kenaikan untuk luas area tanaman dan jumlah produksinya dari tahun 2024 ke tahun 2025. Sedangkan untuk lada mengalami penurunan untuk luas area tanaman dan jumlah produksinya tahun 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 101 Luas Area Tanaman dan Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Belitung Timur

Uraian	Tahun					
	2023		2024		2025	
	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton
Karet	3.161	973	3.134	911	3.044	804
Kelapa	204	169	206	151	219	152
Kelapa Sawit	5.863	7.760	5.998	8.165	6.205	8.456
Kopi	63	2	71	3	79	3
Jambu Mente	10	-	49	-	48	-
Lada	3.479	1.060	3.428	1.187	3.340	1.007

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

2.1.3.5.4 Peternakan

Terjadi peningkatan populasi hewan ternak jenis sapi potong pada tahun 2025 di Kabupaten Belitung Timur yakni sejumlah 2.181 ekor pada tahun 2024 menjadi 2.263 ekor di tahun 2025. Untuk jumlah populasi dan produksi ternak kambing juga mengalami kenaikan pada tahun 2025. Untuk ayam kampung mengalami peningkatan untuk jumlah populasi dan produksi ternak sedangkan untuk ayam petelur mengalami penurunan jumlah populasi namun jumlah produksinya meningkat di tahun 2024. Sedangkan untuk ayam pedaging mengalami kenaikan untuk jumlah populasi dan jumlah produksinya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 102 Jumlah Populasi dan Produksi Ternak dan Unggas di Kabupaten Belitung Timur

Uraian	Tahun					
	2023		2024		2025	
	Ekor	Kg	Ekor	Kg	Ekor	Kg
Sapi Perah	-	-	-	-	-	-
Sapi Potong	2.085	126.410	2.181	76.650	2.263	110.262
Kerbau	110	1.189	10	136	10	136
Kuda	3	-	3	-	3	-
Kambing	232	5.468	320	5.073	474	5.605
Babi	266	2.546	306	196	445	3.917
Ayam Kampung	164.278	98.712	138.697	-	185.528	14.571
Ayam Petelur	29.084	833	3.243	33.601	34.200	2.269
Ayam Pedaging	80.822	1.168.992	96.375	1.910.009	89.250	2.208.750
Itik/Itik Manila	9.638	160	3.491	118	7.013	379

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

2.1.3.5.5 Perikanan

Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 dan 2024 cenderung sama dengan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 berjumlah 41.037 ton dan pada tahun 2024 berjumlah 41.243 ton. Namun untuk nilai produksi perikan tangkap mengalami penurunan pada tahun 2024. Sedangkan untuk jumlah produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sedikit namun untuk nilai produksi perikanan budidaya justru menurun. Pada tahun 2025 polanya juga hampir sama, stabil untuk jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap, namun untuk jumlah dan nilai produksi perikanan budidaya mengalami penurunan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 103 Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Belitung Timur

Uraian	Satuan	Tahun		
		2023	2024	2025
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	41.037	41.243	41.861,55

Uraian	Satuan	Tahun		
		2023	2024	2025
Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Ribu (Rupiah)	1.484.868.345	1.304.092.508	1.327.365.021
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.136	2.628	1.435,03
Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Ribu (Rupiah)	151.814.246	145.838.386	66.648.682,08

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

2.1.3.5.6 Pariwisata

Pada Tahun 2025, terdapat 24 Hotel/Akomodasi Non Bintang untuk mendukung kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, tercatat 13.604 kunjungan tamu domestic diseluruh fasilitas akomodasi di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini mengalami peningkatan kunjungan tamu domestic dari tahun 2024. Pada tahun 2024 tercatat 8.288 kunjungan tamu domestik di seluruh fasilitas akomodasi di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2. 104 Jumlah Kunjungan Tamu Hotel Bintang dan Non Bintang Menurut bulan di Kabupaten Belitung Timur

Bulan	Asing		Domestik	
	2024	2025	2024	2025
Januari	-	-	783	937
Februari	-	-	770	793
Maret	-	-	781	837
April	-	-	538	1076
Mei	-	-	701	1243
Juni	-	-	679	1375
Juli	-	-	772	1170
Agustus	-	-	662	802
September	-	-	590	1156
Oktober	-	-	526	1458
November	-	-	714	1425
Desember	-	-	772	1332
Belitung Timur	-	-	8.288	13.604

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur 2026

Adapun untuk jumlah kunjungan wisatawan domestik mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2022 ke 2023, namun untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan domestik kembali mengalami penurunan begipula dengan jumlah objek wisata budaya dan jumlah objek wisata alam. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan untuk jumlah kunjungan wisatawan domestik sebesar 81.217 orang dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sebanyak 133 orang dari yang sebelumnya 27 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 105 Pariwisata Kabupaten Belitung Timur

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Objek Wisata Budaya	Objek	17	17	17	17	7
Jumlah Objek Wisata Bahari	Objek	23	27	30	30	30
Jumlah Objek Wisata Cagar Alam	Objek	7	8	10	10	10
Jumlah Objek Wisata Alam	Objek	46	53	53	17	17
Jumlah Objek Wisata Sejarah	Objek	3	7	7	4	4

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Objek Wisata Religi	Objek	8	7	7	7	7
Jumlah Objek Wisata Kuliner	Objek	0	1	1	1	1
Jumlah Objek Wisata Buatan	Objek	10	17	11	15	16
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang	36.802	58.112	114.432	63.672	81.217
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	480	115	65	27	133
Jumlah Geosite	Objek	7	10	10	10	10

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2026

2.1.3.5.7 Kriminalitas

Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Belitung Timur pada khususnya. Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan iklim berinvestasi yang baik salah satunya adalah minimnya jumlah kriminalitas yang terjadi suatu wilayah. Angka kriminalitas mempengaruhi investor yang akan masuk ke suatu wilayah. Semakin rendah kriminalitas, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanamkan investasi di daerah tersebut. Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.

Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur selama 5 (lima) tahun terakhir pada tahun 2022 ada 79 kasus kriminal, pada tahun 2023 menurun dengan jumlah 62 kasus, sedangkan pada tahun 2024 menurun dengan jumlah kejahatan 61 kasus. Pada tahun 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di unit kerja Kepolisian Resor Belitung Timur sebesar 154 kejahatan. Adapun untuk Kepolisian Sektor Kelapa Kampit tahun 2025 tidak terdapatnya jumlah tindak pidana. Data lengkap tentang angka kriminalitas di Kabupaten Belitung Timur disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 106 Jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Resor

Unit Kerja	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kepolisian Resor Belitung Timur	67	79	62	61	154
Kepolisian Sektor Manggar	12	5	0	10	12
Kepolisian Sektor Gantung	19	10	14	15	16
Kepolisian Sektor Dendang	1	9	2	1	2
Kepolisian Sektor Kelapa Kampit	5	3	3	9	-

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2026

Jumlah tingkat penyelesaian tindak pidana pada tahun 2021-2025 di wilayah hukum polres Belitung Timur mengalami penurunan di tiap tahunnya, begitupula dengan tiap-tiap kecamatan yang ada di Belitung Timur mengalami penurunan pada tahun 2025. Untuk persentase penyelesaian terhadap tindak pidana menurut kepolisian di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2021-2025 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 107 Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian

Unit Kerja	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kepolisian Resor Belitung Timur	97,01	97,46	117,7	108,1	45,20
Kepolisian Sektor Manggar	75	40	0,00	0,00	100
Kepolisian Sektor Gantung	73,68	130	85,7	60,00	18
Kepolisian Sektor Dendang	100	33,33	0,00	0,00	100
Kepolisian Sektor Kelapa Kampit	60	0	0,00	11,11	-

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2026

2.1.3.5.8 Kemudahan Perizinan

Pelayanan perizinan di Kabupaten Belitung Timur saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan pelayanan melalui Online Single Submission (OSS). Investor baru merupakan investor/penanam modal/pelaku usaha yang telah disetujui izin usahanya dan berencana menanamkan modal usahanya dengan dengan nilai izin investasi/modal usaha minimal 1 (Satu) milyar rupiah. Setiap pelaku usaha pada saat mendaftarkan izin usahanya melalui sistem Online Single Submission (OSS) maupun versi Risk Based Approach (RBA) untuk mengisi rencana investasinya. Berikut jumlah penerbitan izin di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 108 Jumlah Penerbitan Izin

Jenis Perizinan	2021	2022	2023	2024	2025
Izin Berusaha (melalui OSS)	1.890	1.491	2.791	2.309	1.622
Izin non Berusaha (selain OSS)	717	531	640	409	292
Jumlah	**2.607**	**2.022**	**3.431**	**2.718**	**1.914**

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur 2026

Jumlah penerbitan izin pada tahun 2021 - 2025 mengalami naik turun. Pada tahun 2021 jumlah perizinan dan non perizinan melalui OSS mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan degan tahun 2020 yaitu berjumlah 2.607 Tahun 2022 jumlah perizinan dan non perizinan mengalami penurunan, sedangkan untuk tahun 2023 jumlah perizinan dan non perizinan mengalami peningkatan sebanyak 3.431 izin. Pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan jumlah 2.718 izin terbit, dan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1.914 izin terbit.

2.1.3.6 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.3.6.1 Kualitas Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Manusia merupakan subjek dan objek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, professional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan daerah. Disamping itu tingkat pendidikan yang ditempuh mempengaruhi cara fikir dan aktivitas suatu masyarakat dalam sebuah wilayah.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur sebanyak 133.443 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar

105,73 jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk 2024, jumlah penduduk Kebupaten Belitung Timur meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 1,19 persen. Jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas pada Tahun 2025 berjumlah 103.771 jiwa dengan komposisi 73.177 jiwa merupakan angkatan kerja dan 30.534 jiwa bukan angkatan kerja, tingkat pengganggguran terbuka (TPT) pada tahun 2025 sebesar 3,05 persen mengalami peningkatan dari kondisi pada tahun 2024 dengan TPT sebesar 2,63 persen. (Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026).

Tabel 2. 109 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
I. Angkatan Kerja	47.214	25.361	72.575
1. Bekerja	45.934	24.429	70.363
2. Pengangguran Terbuka	1.280	932	2.212
II. Bukan Angkatan Kerja	7.066	25.395	32.461
1. Sekolah	2.322	3.290	5.612
2. Mengurus Rumah Tangga	3.465	20.897	24.361
3. Lainnya	1.279	1.208	2.487
Jumlah	**54.280**	**50.756**	**105.036**

Sumber : BPS Belitung Timur Tahun 2026

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan kualitas tenaga kerja disuatu daerah. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja. Perkembangan jumlah penduduk menurut jenis kegiatan dan pendidikan yang merupakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Belitung Timur serta jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan yang dirilis melalui Belitung Timur Dalam Angka oleh BPS Belitung Timur Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 2. 110 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kabupaten Belitung Timur, 2025

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
0	27.929	456	28.385	98,39	13.561	41.946	67,67
1	12.669	140	12.809	98,91	9.820	22.629	56,60
2	23.214	1.145	24.359	95,30	7.989	32.248	75,30
3	6.551	471	7.022	93,29	1.091	8.113	86,55
Jumlah Total	**70.363**	**2.212**	**72.575**	**96,95**	**32.461**	**107.036**	**69,10**

0. ≤ Sekolah Dasar (SD)
1. Sekolah Menengah Pertama
2. Sekolah Menengah Atas
3. Perguruan Tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026

Jumlah angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2022 untuk penduduk yang bekerja berjumlah 66.821 orang dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan berjumlah 70.386 orang. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan berjumlah 71.254 orang. Pada tahun 2025 mengalami

penurunan berjumlah 70.363 orang. Untuk penduduk yang pengangguran pada tahun 2022 berjumlah 1.715 orang dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2023 yang berjumlah 1.735 orang dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan lagi berjumlah 1.923 orang. Tahun 2025 mengalami kenaikan lagi berjumlah 2.212 orang.

Jumlah penduduk menurut status pekerjaan utama yang menjadi buruh/karyawan/pegawai masih tertinggi jumlahnya sebesar 29.950 orang. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sejumlah 33.600 orang. Sedangkan untuk berusaha sendiri berjumlah 24.022 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 111 Penduduk Berumur 15 tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	17.685	6.337	24.022
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	3.336	1.384	4.720
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.775	1.431	4.206
Buruh/Karyawan?pegawai	19.648	10.302	29.950
Pekerja bebas	1.090	563	1.653
Pekerja keluarga/tak dibayar	1.400	4.412	5.812
Jumlah	45.934	24.429	70.363

Sumber : BPS Belitung Timur Tahun 2026

Jumlah penduduk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Hasil Proyeksi Interim 2020-2026, pada tahun 2026 Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar pada Kabupaten Bangka dengan jumlah penduduk 350,01 ribu jiwa. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Belitung Timur yaitu 135,88 ribu jiwa.

Jika dilihat dari sisi tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi pada tahun 2025 terda[at di Bangka Selatan, yaitu 71,80 persen, sedangkan TPAK terendah terdapat pada Pangkalpinang yaitu 67,10 persen. Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berada di Pangkaplpinang yaitu sebesar 5,73 persen sedangkan TPT terendah di Belitung Timur sebesar 3,05 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 112 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Persen) Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Bangka	62,68	68,81	67,46	67,92	67,93
Belitung	66,28	62,25	68,09	68,18	69,18
Bangka Barat	65,98	70,23	70,22	70,36	71,28
Bangka Tengah	66,24	66,47	70,09	70,22	70,26
Bangka Selatan	68,96	66,71	66,93	69,17	71,8
Belitung Timur	69,23	67,36	70,48	70,56	69,1
Pangkalpinang	65,16	65,78	66,55	66,99	67,1
Kepulauan Bangka Belitung	65,88	67,38	68,34	68,87	69,38

Sumber : BPS Prov Babel dalam BPS Belitung Timur 2026

Tabel 2. 113 Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Persen)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Bangka	5,97	5,39	5,03	4,91	4,75
Belitung	3,51	4,3	4,14	3,88	3,64
Bangka Barat	3,83	4,86	4,77	4,88	4,49
Bangka Tengah	4,95	3,99	3,88	4,23	4,21
Bangka Selatan	5,29	5,09	4,84	4,94	4,48
Belitung Timur	3,78	2,5	2,41	2,63	3,05
Pangkalpinang	6,81	5,9	5,76	5,98	5,73
Kepulauan Bangka Belitung	5,03	4,77	4,56	4,63	4,45

Sumber : BPS Prov Babel dalam BPS Belitung Timur 2026

2.1.3.6.2 Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

A. Rumusan

Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ini menghitung jumlah penduduk non produktif dan membaginya dengan jumlah penduduk produktif. Dari hasil perhitungan ini, didapatkan berapa jumlah penduduk non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Indikator yang kerap disebut sebagai rasio ketergantungan ini berguna untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atau tidak. Jika suatu daerah memiliki angka ketergantungan yang tinggi, maka potensi pertumbuhan ekonominya tidak akan terlalu tinggi. Sedangkan, jika rasio ketergantungan suatu wilayah tergolong rendah, maka potensi pertumbuhannya besar karena banyak terdapat masyarakat usia produktif. Adapun rumus dari menghitung total rasio ketergantungan adalah seperti dibawah ini

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia } 0-14 \text{ dan Usia } > 64 \text{ Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia } 15-64} \times 100$$

B. Implementasi

Misalnya rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dibawah ini terdapat tabel rasio ketergantungan di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2. 114 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Belitung Timur

NO	Uraian	Tahun					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun	28.863	28.852	31.159	29.781	30.130	Jiwa
2.	Jumlah Penduduk usia >64 Tahun	8.409	8.973	8.976	9.639	10.054	Jiwa
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1)&(2)	37.272	37.825	40.135	39.420	40.184	Jiwa
4.	Jumlah Penduduk Usia Produktif 15-64 Tahun	91.292	92.638	81.837	92.701	93.259	Jiwa
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	40,83	40,83	49,04	43	43	persen

Sumber: BPS Belitung Timur, 2026

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan rasio ketergantungan yaitu 40,87 artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tahun 2023 rasio ketergantungan Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan menjadi 49,04 persen yang artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Untuk tahun 2024 mengalami penurunan yang artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan untuk tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 yakni 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.1.4 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG'S)

2.1.4.1 Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lembaga Pemerintah

Rekapitulasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kelembagaan pemerintah daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 115 Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan Perangkat Daerah

No.	OPD	Tercapai	Belum Tercapai		N/A	TKD	Jumlah
		SS	SB	TTT			
1	BAPPELITBANGDA	1	1	1	1	0	4
2	BPBD	6	2	1	4	0	13
3	BPKPD	3	1	2	0	0	6
4	BPS	12	2	5	6	0	25
5	DINDIK	9	5	0	0	0	14
6	DINKESPPKB	29	14	2	6	1	52
7	DINSOSPMD	16	5	1	4	0	26
8	DISBUDPAR	2	0	0	0	2	4
9	DISDUKCAPIL	4	0	0	1	0	5
10	DISHUB	0	1	0	0	3	4
11	DISKAN	0	1	0	0	0	1
12	DISKOMINFO	2	1	2	5	1	11
13	DISNAKERKOPUKM	1	2	0	2	0	5
14	DISPERKIM	0	1	0	0	0	1
15	DISTANGAN	2	1	0	1	0	4
16	DLH	3	3	1	2	1	10
17	DPMPTSPP	1	0	1	1	0	3
18	DPUPR	2	5	4	2	2	15
19	ESDM	0	0	0	0	2	2
20	INSPEKTORAT	1	0	0	0	0	1
21	KESBANGPOL	1	0	1	0	0	2
22	SATPOL PP	4	0	0	1	0	5
23	SETDA (Bagian Barjas)	1	0	0	0	0	1
24	SETDA (Bagian Ekbang)	0	0	2	0	0	2
25	SETDA (Bagian Hukum)	0	0	0	0	1	1
26	SETDA (Bagian Organisasi)	1	2	0	0	0	3
27	SETWAN	0	1	0	0	0	1
Jumlah		**101**	**48**	**23**	**36**	**13**	**221**

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023

2.1.4.2 Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Pembangunan Sosial

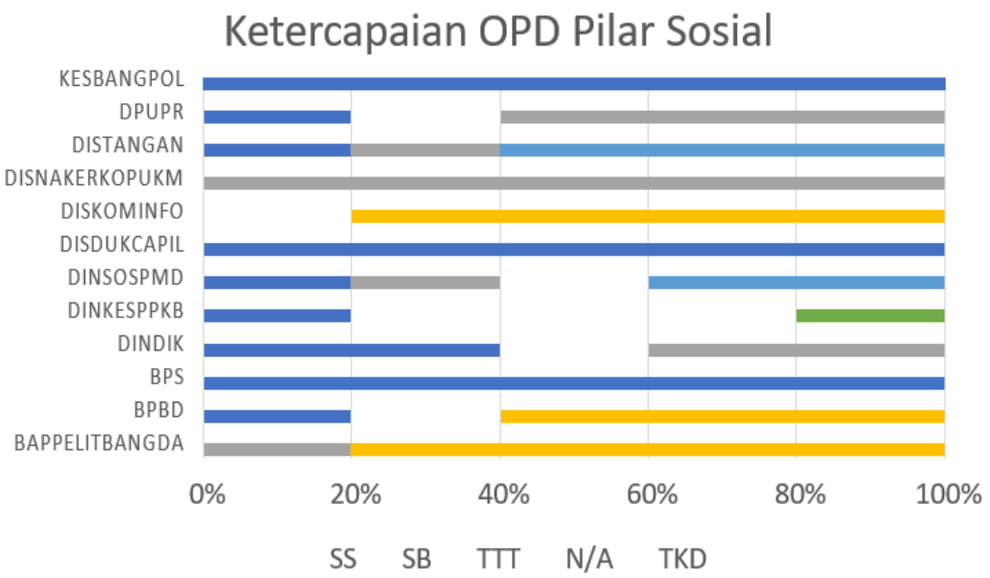
Pilar pembangunan sosial menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 97 indikator. Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pilar sosial Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kelembagaan pemerintah daerah pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 116 Rekapitulasi Pencapaian TPB pada OPD Pilar Pembangunan Sosial

No.	OPD	Tercapai	Belum Tercapai		N/A	TKD	Jumlah
		SS	SB	TTT			
1	BAPPELITBANGDA	0	1	1	0	0	2
2	BPBD	5	0	1	0	0	6
3	BPS	2	0	0	0	0	2
4	DINDIK	9	5	0	0	0	14
5	DINKESPPKB	27	12	2	5	1	47
6	DINSOSPMD	7	5	0	3	0	15
7	DISDUKCAPIL	1	0	0	0	0	1
8	DISKOMINFO	1	0	1	0	0	2
9	DISNAKERKOPUK	0	1	0	0	0	1
10	DISTANGAN	2	1	0	1	0	4
11	DPUPR	1	1	0	0	0	2
12	KESBANGPOL	1	0	0	0	0	1
Jumlah		**56**	**26**	**5**	**9**	**1**	**97**

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023

Informasi lebih lanjut mengenai tabel di atas disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 2. 21 Grafik Capaian TPB Pilar Sosial tiap Perangkat Daerah

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023

Tabel 2. 117 Pencapaian TPB OPD Pilar Sosial Kabupaten Belitung Timur

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin	6,60%	6,73%	7,22%	6,49%	Menurun menjadi 7-8%	SS	DINSOSPMD
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang	96,17%	95,96%	98,45%	98,04%	Meningkat menjadi 95%	SS	DINKESPPKB
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	7,27%	7,00%	7,00%	7,00%	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	SB	DISNAKERKOPUKM
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya	N/A	6,73%	7,22%	6,49%	Meningkat menjadi 17,12%	SB	DINSOSPMD
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program	2.369	2.369	2.369	2.369	Menurun menjadi 2,8 juta	SS	DINSOSPMD
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan	84,02%	98,60%	91,12%	81,14%	Meningkat menjadi 70%	SS	DINKESPPKB
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi	57,70%	91,64%	92,29%	100%	Meningkat menjadi 63%.	SS	DINKESPPKB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang	82,45%	82,19%	76,41%	76,08%	Meningkat menjadi 65%	SS	DINKESPPKB
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	77,11%	78%	78,23%	79,78%	Meningkat menjadi 100%	SB	DPUPR
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi	89,35%	94,41%	98,33%	100%	Meningkat menjadi 100%	SS	DPUPR
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	98,43%	88,94%	88,85%	92,44%	Meningkat menjadi 94,78%	SB	DINDIK
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	64,63%	82,70%	82,98%	82,59%	Meningkat menjadi 82,2%	SS	DINDIK
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan	98,71%	98,86%	99,21%	99,57%	Meningkat menjadi 77,4%.	SS	DISDUKCAPIL
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik	100%	100%	100%	100%	Meningkat menjadi 100%	SS	BPS
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak	0	0	97 orang	29 orang	Menurun	SS	BPBD

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	0	0	0	7 kecamatan	Meningkat menjadi 39 daerah	SS	BPBD
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Meningkat menjadi 151 ribu	SS	DINSOSPMD
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	100	100	100	100	Meningkat menjadi 81,5 ribu	SS	DINSOSPMD
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	0	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	Meningkat menjadi 450	SS	BPBD
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang	165	165	165	158,52	Menurun menjadi 118,6	SS	BPBD
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung	Rp.3.963.000.000	0	0	130.750.000	Menurun	TTT	BPBD
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat	1	1	1	1	ada	SS	BPBD
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program	15,67%	15,11%	28,19%	20,71%	Meningkat	SB	BAPPELITBANGDA
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total	13,62%	13,48%	21,43%	17,70%	Meningkat	TTT	BAPPELITBANGDA

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of	7,47	9,71	10,27	9,66	Menurun	SS	DISTANGAN
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	7,25%	11%	4,48%	6%	Menurun menjadi 17%	SS	DINKESPPKB
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman	54,50%	54%	53%	52%	Menurun	SS	DISTANGAN
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400	N/A	N/A	N/A	N/A	Menurun menjadi 8,5 %	N/A	DISTANGAN, DINKESPP
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima	8,02	5,34	3,84	4,5	Menurun	SB	DINKESPPKB
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua	7,11%	7,11%	7,11%	7,05%	Menurun menjadi 28%	SS	DINKESPPKB
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,	3%	1,72%	1,62%	2,35%	Menurun	SB	DINKESPPKB
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	N/A	8,85	7,43	4,49	Menurun menjadi 28%	SS	DINKESPPKB
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI	52,30%	60,41	45,62	61,23	Meningkat menjadi 50%	SS	DINKESPPKB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai: dan tingkat konsumsi ikan	Skor PPH: 84,6 Konsumsi ikan: 36,7	Skor PPH: 84,6 Konsumsi ikan: 36,7	Skor PPH: 82,3 Konsumsi ikan: 43	Skor PPH: 82,7 Konsumsi ikan: 42,2	Meningkat menjadi: Skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tah	SB	DISTANGAN
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian	54,50	54,70	54,80	54,90	Meningkat	SS	BPS
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	86,6	189,84	197,34	167,79	Menurun menjadi 306	SS	DINKESPPKB
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga	97,57%	98,74%	91,21%	81,14%	Meningkat menjadi 95%	SB	DINKESPPKB
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas	97,57%	98,60%	91,12%	81,14%	Meningkat menjadi 85 %	SB	DINKESPPKB
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	13,56	14,24	13,32	13,42	Menurun	TTT	DINKESPPKB
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	6,53	9,02	9,87	8,95	Menurun	TTT	DINKESPPKB
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	11,55	11,39	12,33	11,19	Menurun menjadi 24	SB	DINKESPPKB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar	100%	100	100	100	Meningkat menjadi 95%	SS	DINKESPPKB
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	Menurun menjadi <0,5%	SS	DINKESPPKB
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB)	148,41	122,61	96,94	112,74	Menurun menjadi 245	SS	DINKESPPKB
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0	0	0	0	Menurun	SS	DINKESPPKB
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	Meningkat menjadi 300	TKD	DINKESPPKB
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS	DINKESPPKB
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0	27	26	17	Menurun	SS	DINKESPPKB
3.3.5.(a)	Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat menjadi 34 provinsi	N/A	DINKESPPKB
3.3.5.(b)	Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian	1	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	Meningkat menjadi 35.	SS	DINKESPPKB
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18	N/A	23,67%	25,31%	23,01%	Menurun menjadi 5,4%	SB	DINKESPPKB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	32%	29,51%	29,51%	29,51%	Menurun menjadi 24,3%	SB	DINKESPPKB
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18	0	N/A	N/A	N/A	Menurun	N/A	DINKESPPKB
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	N/A	N/A	N/A	0,0015	Menurun menjadi angka 0,02%	SS	KESBANGPOL
3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	Meningkat menjadi 280	SS	DINKESPPKB
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan	0	82,19	76,41	76,08	Meningkat menjadi 66%	SB	DINKESPPKB
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49	80%	82,19	76,41	76,08	Meningkat menjadi 65%	SS	DINKESPPKB
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	11,39%	12,70%	12,88%	14,97%	Meningkat menjadi 23,5%	SB	DINKESPPKB
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility	40,00	39,83	39,82	30,56	Menurun menjadi 38	SS	DINKESPPKB
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,09	2,22	2,12	1,74	Menurun menjadi 2,28	SS	DINKESPPKB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	17,55%	17,55%	17,55%	17,55%	Menurun menjadi 9,91%	SB	DINKESPPKB
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per	961,72	120523	124920	126101	Meningkat	SS	DINKESPPKB
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	96,17%	95,96%	98,45%	98,04%	Meningkat menjadi minimal 95%	SS	DINKESPPKB
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	0	Menurun	SS	DINKESPPKB
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15	N/A	N/A	N/A	N/A	Menurun	N/A	DINKESPPKB
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS	DINKESPPKB
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Jumlah		596	626	660	Meningkat	SS	DINKESPPKB
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15	N/A	N/A	N/A	N/A	Menurun	N/A	DINKESPPKB
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di	100%	100%	100%	100%	Meningkat	SS	DINKESPPKB
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Jumlah		596	626	660	Meningkat	SB	DINKESPPKB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum	98	97	96	98	Meningkat	SS	DINDIK
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	98,1%	99,06%	99,06%	99,06%	Meningkat menjadi 84,2%	SS	DINDIK
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal	89,12%	100	100	95,83	Meningkat menjadi 81%	SS	DINDIK
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	98,71%	101,78	99,73	100,94	Meningkat menjadi 114,09%	SB	DINDIK
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	97,16%	90,9	92,09	88,02	Meningkat menjadi 106,94%	SB	DINDIK
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8,15 tahun	8,22 tahun	8,47 tahun	8,67 tahun	Meningkat menjadi 8,8 tahun	SB	DINDIK
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia	87,74%	55,42%	56,30%	82,14%	Meningkat menjadi 77,2%	SS	DINDIK
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan	55%	55%	55%	60%	Meningkat	SS	DISKOMINFO

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di	0,9	0,9953	0,997	0,9973	Meningkat	SS	DINDIK
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur	98,17%	99,63%	98,60%	98,93%	Meningkat menjadi 96,1%	SS	DINDIK
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59	99%	99,89%	99,96%	100%	Meningkat	SS	DINDIK

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	95%	96%	98,82%	98.83%	Meningkat	SS	DINDIK
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	57,64%	68,80%	62,47%	54,87%	Meningkat	SB	DINDIK
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	1 kebijakan	2 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	bertambah sebanyak 16	SB	DINSOSPMD

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (Jumlah yang Mengalami Kekerasan)		Fisik = tidak ada Seksual = 5 Orang	Fisik = tidak ada Seksual = 4 Orang	Fisik = 5 Orang Seksual = 5 Orang	Menurun	SB	DINSOSPMD
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. (jumlah kekerasan perempuan)		9 orang	6 orang	5 orang	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	SS	DINSOSPMD
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (Jumlah yang Mengalami Kekerasan)		5 Orang	4	5	Menurun	SB	DINSOSPMD

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100%	100%	100%	100%	Meningkat menjadi 70%	SS	DINSOSPMD
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur	N/A	N/A	N/A	N/A	Menurun	N/A	DINSOSPMD
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat menjadi 21 tahun	N/A	DINSOSPMD
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		39,83	39,82	30,56	Menurun menjadi 38 tahun	SS	DINKESPPKB
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. (Jumlah Parlemen	8	8	8	8	Meningkat	SB	DINSOSPMD
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	27,35%	27,35%	27,35%	27,50%	Meningkat	SS	DINSOSPMD

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	PD
		2019	2020	2021	2022			
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	DINSOSPMD
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	17,55%	17,55%	17,55%	17,55%	Menurun menjadi 9,9%	SB	DINKESPPKB
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat menjadi 85%	N/A	DINKESPPKB
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	66,35%	66,35%	66,35%	66,35%	Meningkat	TTT	DISKOMINFO

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023

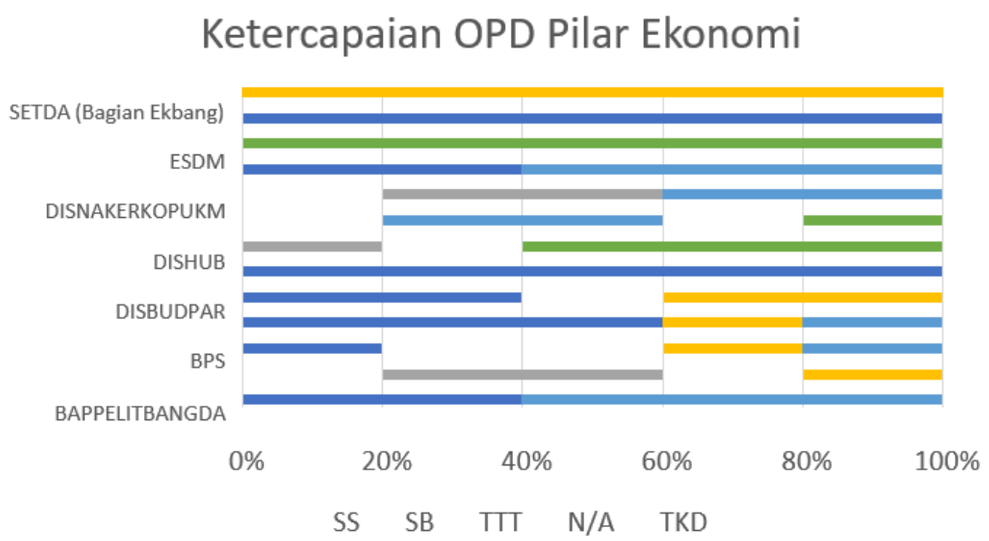
2.1.4.3 Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjtan Pada Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 55 indikator. Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pilar ekonomi Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kelembagaan pemerintah daerah pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 118 Rekapitulasi Pencapaian TPB pada Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Ekonomi

No.	OPD	Tercapai	Belum Tercapai		N/A	TKD	Jumlah
		SS	SB	TTT			
1	BAPPELITBANGDA	1	0	0	1	0	2
2	BPKPD	1	1	1	0	0	3
3	BPS	10	2	5	5	0	22
4	DINSOSPMD	5	0	1	1	0	7
5	DISBUDPAR	2	0	1	0	0	3
6	DISDUKCAPIL	1	0	0	0	0	1
7	DISHUB	0	1	0	0	3	4
8	DISKOMINFO	1	0	1	5	1	8
9	DISNAKERKOPUKM	1	1	0	2	0	4
10	DPMPTSPP	1	0	0	1	0	2
11	ESDM	0	0	0	0	2	2
12	SATPOL PP	1	0	0	0	0	1
13	SETDA (Bagian Ekbang)	0	0	2	0	0	2
Jumlah		**24**	**5**	**11**	**15**	**6**	**61**

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023



Grafik 2. 22 Grafik Capaian TPB Pilar Ekonomi tiap Perangkat Daerah

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023

Tabel 2. 119 Pencapaian TPB Perangkat Daerah Pilar Ekonomi Kabupaten Belitung Timur

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	10-16%	TKD	ESDM
7.3.1*	Intensitas energi primer.	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional	TKD	ESDM
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita (persen)	1,35	1,18942443	11,7075458	8,565639022	Meningkat	SB	BPS
8.1.1.(a)	PDRB per kapita (Ribu Rupiah)	61122	61.849	69.090	75.008	Meningkat menjadilebih dari Rp 50 juta	SS	BPS
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB ril per orang bekerja per tahun	9,55%	1,32%	5,92%	3,63%	Meningkat	TTT	BPS
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	BPS
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	55,29%	55,29%	55,29%	55,50%	Diatas 51 %	SS	BPS

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
8.3.1 (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	60,06%	40,20%	27,75%	24,73%	Meningkat	TTT	BPS
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	N/A	N/A	N/A	N/A	25%	N/A	DISNAKERKOPUKM
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	N/A	N/A	N/A	N/A	25%	N/A	BPS
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	1,71%	3,93%	3,78%	2,50%	Menurun	SS	BPS
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	1,70%	0,61%	2,11%	0,47%	Menurun	TTT	BPS
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	22,87%	24,57%	25,16%	26,24%	Menurun	SS	BPS
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,49%	2,49%	2,45%	2,60%	Meningkat menjadi 8%	TTT	BPS

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.(jiwa)	13569 Wisatawan	4665 Wisatawan	480 Wisatawan	115 Wisatawan	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	TTT	DISBUDPAR
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	265917 Wisatawan	67755 Wisatawan	36802 Wisatawan	58112 Wisatawan	Meningkat	SS	DISBUDPAR
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp.796.806.000	Rp.796.806.001	Rp.796.806.002	Rp.796.806.003	Meningkat	SS	DISBUDPAR
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	N/A	N/A	114 Orang	130 Orang	Meningkat	SS	DISNAKERKOPUKM
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	BPS
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	N/A	N/A	N/A	N/A	Menurun (mendekat)	N/A	BPS

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
8.10.1.(b)	Proporsi kreditUMKM terhadap total kredit.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	DISNAKERKOPUKM
9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	1000 Km (skala nasional)	TKD	DISHUB
9.1.1 (c)	Panjang jalur kereta api	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	Bertambah 3.258 km	TKD	DISHUB
9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan	1	1	1	1	Meningkat	SB	DISHUB
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	24 Pelabuhan (skala nasional)	TKD	DISHUB
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita	19,81%	20,26%	21,87%	23,73%	Meningkat	SS	BPS
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	2,67%	-0,64	7,41	5,96	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	SB	BPS
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	18,15%	9,55%	7,78%	8,3	Meningkat	TTT	BPS
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	57,59%	57,59%	57,59%	57,59%	Meningkat	SS	DPMPTSPP

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	DPMPTSPP
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB. (Besaran Anggaran)	Rp1.293.988.229	Rp1.293.988.229	Rp1.293.988.229	Rp1.293.988.229	Meningkat	SS	BAPPELITBANGDA
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	DISKOMINFO
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai / memiliki telepon gengam	66,35%	66,35%	66,35%	66,35%	Meningkat	TTT	DISKOMINFO
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	DISKOMINFO
10.1.1*	Koefisien Gini	N/A	0,252	0,243	0,25	Menurun menjadi 0,36	SS	BPS
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	6,60%	6,73%	7,22%	6,49%	8%	SS	DINSOSPMD

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	254	254	254	254	80 Kabupaten (skala nasional)	SS	DINSOSPMD
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	75	0	0	0	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	SS	DINSOSPMD
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	1 desa	7 desa	8 desa	8 desa	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	SS	DINSOSPMD
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	Meningkat	TTT	DINSOSPMD
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	11%	6,52%	7,20%	6,49%	Menurun menjadi 14%	SS	DINSOSPMD
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	N/A	N/A	N/A	N/A	Menurun	N/A	DINSOSPMD
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	BPS

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ADA	ADA	ADA	ADA	ada	SS	SATPOL PP
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	7,27%	7,00%	7,00%	7,00%	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	SB	DISNAKERKOPUKM
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	1,30%	1,30%	1,32%	1,34%	Meningkat	SS	BPKPD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	0,78%	0,72%	0,83%	0,65%	Di atas 12%	SB	BPKPD
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	0,0868	0,0871	0,084	0,0655	Meningkat	TTT	BPKPD

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	DISKOMINFO
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	DISKOMINFO
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	DISKOMINFO
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	100%	TKD	DISKOMINFO
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	ada	TTT	SETDA (Bagian Ekbang)

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	ada	TTT	SETDA (Bagian Ekbang)
17.18.1.(a)	Persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik	100,00%	93,58	95,83	98,78	Meningkat	SS	BPS
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	77,78%	87,10%	92,86%	100%	Meningkat	SS	BPS
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRuSa)	4 Metadata	6 Metadata	9 Metadata	26 Metadata	Meningkat	SS	BPS

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	BAPPELITBANGDA
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	SS	DISDUKCAPIL
17.19.2.(C)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	2027	2027	2027	9430	Meningkat	SS	DISKOMINFO
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	90,57%	82,80%	86,67%	100%	Meningkat	SS	BPS

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023

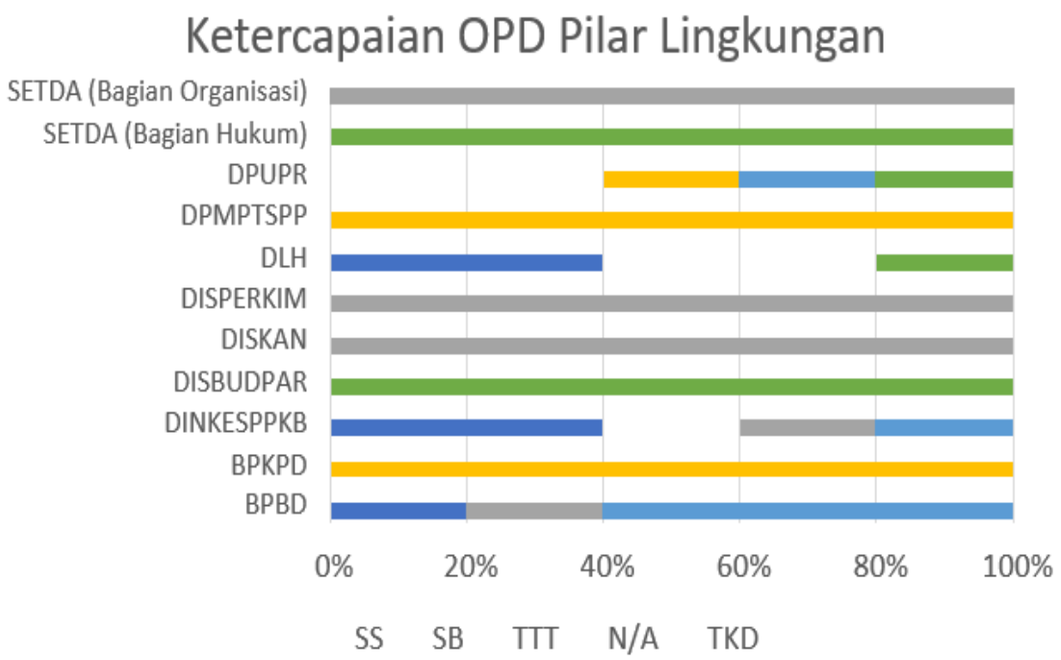
2.1.4.4 Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 49 indikator. Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pilar lingkungan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kelembagaan pemerintah daerah pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 120 Rekapitulasi Pencapaian TPB pada Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Lingkungan

No.	OPD	Tercapai	Belum Tercapai		N/A	TKD	Jumlah
		SS	SB	TTT			
1	BPBD	1	2	0	4	0	7
2	BPKPD	0	0	1	0	0	1
3	DINKESPPKB	2	2	0	1	0	5
4	DISBUDPAR	0	0	0	0	1	1
5	DISKAN	0	1	0	0	0	1
6	DISPERKIM	0	1	0	0	0	1
7	DLH	3	3	1	2	1	10
8	DPMPTSPP	0	0	1	0	0	1
9	DPUPR	1	4	4	2	2	13
10	SETDA (Bagian Hukum)	0	0	0	0	1	1
11	SETDA (Bagian Organisasi)	0	1	0	0	0	1
Jumlah		**7**	**14**	**7**	**9**	**5**	**42**

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023



Grafik 2. 23 Grafik Capaian TPB Pilar Lingkungan tiap Perangkat Daerah

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023

Tabel 2. 121 Pencapaian TPB OPD Pilar Lingkungan Kabupaten Belitung Timur

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	77,11%	78%	78,23%	79,78%	Meningkat menjadi 100%	SB	DINKESPPKB
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau- pulau.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	N/A	DPUPR
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	77,11%	78%	78,23%	79,78%	Meningkat menjadi 100%	SB	DPUPR
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	DINKESPPKB
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	89,35%	95,95%	99,18%	97,06%	Meningkat menjadi 100%	SB	DINKESPPKB
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	39	39	39	39	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	SS	DINKESPPKB
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	20	24	34	39	Meningkat	SS	DINKESPPKB

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
6.2.1.(e)	Jumlah wilayah yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	SB	DPUPR
6.2.1.(F)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Meningkat	TTT	DPUPR
6.3.1.(a)	Jumlah wilayah yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	1	1	1	1	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	SB	DPUPR
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Meningkat	TTT	DPUPR
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	DLH
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	54,50	50,83	50,00	67,50	Meningkat	SS	DLH
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	N/A	N/A	N/A	N/A	ada	N/A	DPUPR
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	ada	TTT	DPUPR

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).							
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	2 WS	2 WS	2 WS	2 WS	8 WS	SB	DPUPR
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	4 WS	4 WS	4 WS	4 WS	10 WS (skala nasional)	SB	DISKAN
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	ada	TTT	DPUPR
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	50%	49,50%	52,29%	38%	3,7 juta rumah tangga	SB	DISPERKIM
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)	TKD	DPUPR
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	5 metropolitan (skalanasional)	TKD	DPUPR
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada	TTT	BPKPD
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan					ada	TKD	DISBUDPAR

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
	metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan			
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	Menurun	N/A	BPBD
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	N/A	N/A	N/A	N/A	Menurun menjadi 30%	N/A	BPBD
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	ada	SB	BPBD
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	N/A	N/A	N/A	N/A	Menurun	N/A	BPBD
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	60,14%	65,04%	63,67%	71,69%	Meningkat menjadi 80%	SB	DLH
11.6.1.(b)	Jumlah kecamatan yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	Meningkat/ada	TKD	DLH
11.7.1.(a)	Jumlah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	46,83%	47,83%	48,83%	49,83%	Meningkat/ada	SS	DPUPR
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	ada	SB	BPBD

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	N/A	906, 96 ton	4344,12 ton	4213,018 ton	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	SB	DLH
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	N/A	N/A	68,02 ton/tahun	80,10 ton/tahun	20 ton per hari (skala nasional)	SS	DLH
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Meningkat	TTT	DPMPTSPP
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat	N/A	DLH
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	N/A	32 Fasilitas Publik	32 Fasilitas Publik	32 Fasilitas Publik	Meningkat	SB	SETDA (Bagian Organisasi)
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	SS	BPBD
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	Menurun	N/A	BPBD
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	56,76%	61%	57,19%	57,30%	Meningkat	SS	DLH

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.(luas lahan kritis yang direhabilitasi)	9,4 Ha	10 Ha	13 Ha	16,5 Ha	5,5 juta ha (skala nasional)	TTT	DLH
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	bukan kewenangan	ada	TKD	SETDA (Bagian Hukum)
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkat	SB	DLH

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023

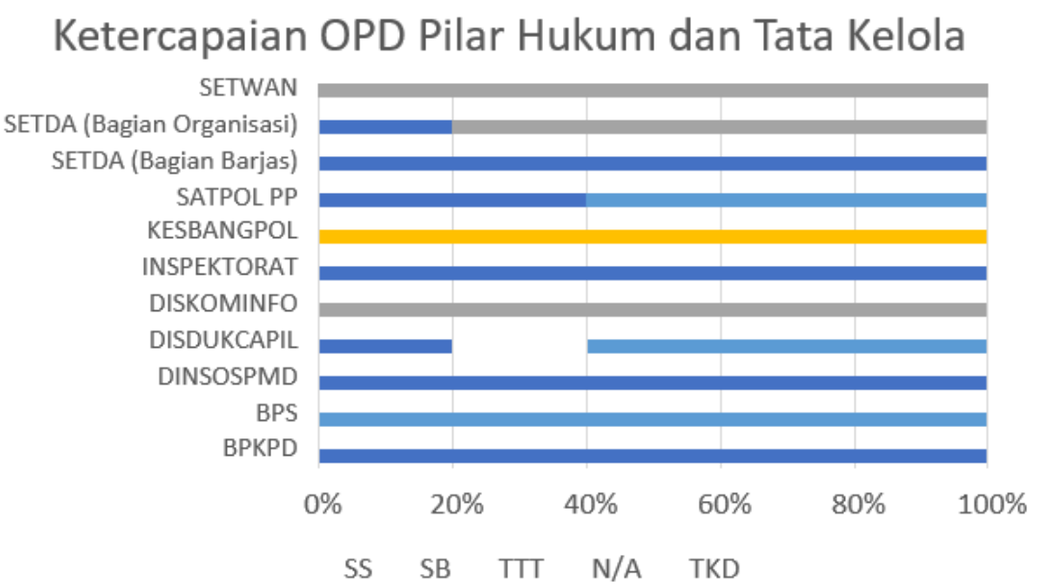
2.1.4.5 Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar pembangunan hukum dan tata kelola menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 21 indikator. Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kelembagaan pemerintah daerah pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 122 Rekapitulasi Pencapaian TPB pada OPD Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

No.	OPD	Tercapai	Belum Tercapai		N/A	TKD	Jumlah
		SS	SB	TTT			
1	BPKPD	2	0	0	0	0	2
2	BPS	0	0	0	1	0	1
3	DINSOSPMD	4	0	0	0	0	4
4	DISDUKCAPIL	2	0	0	1	0	3
5	DISKOMINFO	0	1	0	0	0	1
6	INSPEKTORAT	1	0	0	0	0	1
7	KESBANGPOL	0	0	1	0	0	1
8	SATPOL PP	3	0	0	1	0	4
9	SETDA (Bagian Barjas)	1	0	0	0	0	1
10	SETDA (Bagian Organisasi)	1	1	0	0	0	2
11	SETWAN	0	1	0	0	0	1
Jumla		**14**	**3**	**1**	**3**	**0**	**21**

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023



Grafik 2. 24 Capaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola tiap Perangkat Daerah

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023

Tabel 2. 123 Pencapaian TPB Perangkat Daerah Pilar Hukum dan Tata Kelola Kabupaten Belitung Timur

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu	1 Kasus	0	0	0	Menurun	SS	SATPOL PP
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per	N/A	N/A	N/A	N/A	Menurun	N/A	SATPOL PP
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam	39 Kasus	22 Kasus	53 Kasus	34 Kasus	Menurun	SS	SATPOL PP
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat	100%	100 %	100%	100%	Menurun	SS	SATPOL PP
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam	Tidak Ada Kasus	10 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	Menurun	SS	DINSOSPMD
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. (Jmlah Kasus)	N/A	Laki - laki = 9 Orang	Laki - laki = 3 Orang	Laki - laki = 1 Orang	Menurun	SS	DINSOSPMD
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. (Jumlah	N/A	6 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	Menurun	SS	DINSOSPMD
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat menjadi 4,0	N/A	BPS

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	34,54%	35,46%	36,98%	39,85%	Meningkat	SS	BPKPD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	100% WTP	100% WTP	100% WTP	100% WTP	Meningkat menjadi 60%	SS	BPKPD
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	65,18%	66,02%	66,88%	67,29%	Meningkat menjadi 50%	SS	SETDA (Bagian Organisasi)
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja	N/A	14,77%	5,54%	40,18%	Menjadi menjadi 80%	SS	SETDA (Bagian Barjas)
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	0%	30,30%	31,25%	100,00%	Meningkat menjadi45%	SS	INSPEKTORAT
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	73,83	78,73	Meningkat menjadi 80%	SB	SETDA (Bagian Organisasi)
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat	8%	8%	8%	8%	Meningkat (%)	SB	SETWAN

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN				TARGET NASIONAL	STATUS KETERCAPAIAN 2022	OPD
		2019	2020	2021	2022			
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga ekselutif(Eselon I	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	Meningkat	SS	DINSOSPMD
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga	95,30%	99,65%	99,79%	99,80%	Meningkat	SS	DISDUKCAPIL
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	N/A	N/A	N/A	N/A	Meningkat menjadi 77,4%	N/A	DISDUKCAPIL
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	98,71%	98,86%	99,21%	99,81%	Meningkat menjadi 85%	SS	DISDUKCAPIL
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur	0	0	0	0	Meningkat	SB	DISKOMINFO
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	ada	TTT	KESBANGPOL

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2023

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2025 DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap target kinerja yang telah direncanakan selaras dengan realisasi di lapangan. Fokus utama penilaian mencakup tingkat capaian kinerja, penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan proyek fisik, serta efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam merespons kebutuhan lokal. Melalui pemantauan ini pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif sejak dini, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal dan transparan bagi seluruh masyarakat Belitung Timur.

Selain meninjau aspek administratif, evaluasi ini juga menyoroti dampak nyata program pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial di berbagai kecamatan. Capaian indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan angka kemiskinan, menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan agenda pembangunan tahun berjalan. Hasil dari proses evaluasi ini berfungsi sebagai landasan strategis untuk menyempurnakan prioritas pembangunan di sisa tahun anggaran serta menjadi referensi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan tepat sasaran di masa mendatang.

2.2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD TAHUN 2025-2029

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter utama pembangunan yang harus ditinjau secara rutin guna mengukur efektivitas kinerja daerah sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun perencanaan periode selanjutnya. Bagian ini menyajikan analisis perkembangan indikator makro di Kabupaten Belitung Timur secara mendalam sampai dengan tahun 2025. Gambaran mengenai dinamika pencapaian pembangunan daerah berdasarkan data yang terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 124 Capaian Indikator Makro Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi				2025	
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55	3,79	4,72	-0.03	4,11	4,3
2	Inflasi (%)	5,61	4,17	3,8	1,38	3±1	2,69
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,2	6,49	6,73	6,36	5,99	6,69
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,78	2,5	2,41	2,63	2,35	3,05
5	Rasio Gini (nilai)	0,243	0,25	0,228	0,251	0,224	0,231
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,42	72,29	73,31	73,62	73,78	73,99

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Penyajian data capaian indikator makro ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial Kabupaten Belitung Timur selama periode analisis, yang sekaligus menjadi rujukan penting dalam mengidentifikasi tren

serta tantangan pembangunan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan strategis ke depan. Tinjauan lebih mendalam mengenai perkembangan dan capaian pada setiap dimensi indikator makro di Kabupaten Belitung Timur dipaparkan dalam rincian berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 mencapai 4,3%, sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 4,11%. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2024 dengan angka -0,03%, capaian 2025 menunjukkan adanya pemulihan yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi daerah, baik dari sisi produksi maupun konsumsi masyarakat, sehingga mampu kembali ke jalur positif sesuai arah pembangunan.

2. Inflasi Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 mencatat angka inflasi sebesar 2,69. Nilai ini mencerminkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu, yang masih berada dalam kategori terkendali dan relatif stabil. Inflasi sebesar 2,69 menunjukkan bahwa tekanan harga di tingkat konsumen belum memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, serta mencerminkan efektivitas pengendalian harga oleh pemerintah daerah dan stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok. Capaian inflasi ini juga menjadi indikator penting dalam menilai kondisi makroekonomi daerah, terutama dalam kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung pada sektor konsumsi rumah tangga. Stabilitas inflasi di level ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan bahwa kebijakan fiskal dan distribusi barang berjalan secara efisien. Di sisi lain, inflasi yang relatif rendah ini perlu terus dipantau secara berkala, terutama menjelang akhir tahun dan masa transisi anggaran, di mana potensi kenaikan harga dapat terjadi akibat peningkatan permintaan dan fluktuasi pasokan. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pengawasan distribusi bahan pangan, energi, dan transportasi, agar inflasi tetap berada dalam kisaran yang aman dan tidak mengganggu stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, inflasi sebesar 2,69 di Kabupaten Belitung Timur dapat dianggap sebagai sinyal positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Nilai ini mendukung iklim investasi yang kondusif, menjaga daya beli masyarakat, serta menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap komponen penyumbang inflasi dan strategi pengendaliannya perlu terus diperkuat agar tren positif ini dapat dipertahankan di masa mendatang.

3. Tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,69%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 5,99%. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2024, capaian ini belum sepenuhnya memenuhi harapan. Hal ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan perlu terus diperkuat, terutama melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta pengembangan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

4. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 mencapai 3,05%, lebih rendah dari target 3,25%. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan

kondisi ketenagakerjaan dengan semakin banyak masyarakat yang terserap dalam lapangan kerja. Penurunan pengangguran mencerminkan efektivitas kebijakan penciptaan kesempatan kerja, baik melalui pengembangan sektor formal maupun dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

5. Rasio Gini Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,231, sedikit lebih tinggi dari target 0,224. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masih relatif terkendali, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan target pemerataan. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, dengan memperkuat akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 mencapai 73,99, melampaui target sebesar 73,78. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup. Peningkatan IPM yang konsisten dari tahun ke tahun mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan manusia sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD TAHUN 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) memuat indikator tujuan dan indikator sasaran pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. IKU menjadi instrumen penting untuk menilai konsistensi pelaksanaan misi pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. IKU bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan manifestasi dari visi dan misi strategis pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. IKU berfungsi sebagai instrumen pengukur keberhasilan yang objektif melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikelola memberikan dampak nyata (outcome) bagi pemangku kepentingan, sekaligus menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan yang berbasis data (evidence-based policy). Hasil pelaksanaan pembangunan daerah melalui pengukuran indikator tujuan dan sasaran dengan capaian tahun 2025 tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 125 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TAHUN 2025	
				TARGET	REALISASI
[1] Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.					
[1.1] Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	82,58	82,58	80,67
[1.1.1] Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	66,37 (B)	70,01(BB)	69 (B)
	Indeks SPBE	Nilai	4,16	3,5	4,16
	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	79,03	80	81,56

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TAHUN 2025	
				TARGET	REALISASI
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,01	4,05	4,51
	Maturitas SPIP	Level	3 (3,021)	3	2 (2,468)
[1.1.2] Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	83,45	83,71	71,49
[2] Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.					
[2.1] Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,62	73,98	73,99
[2.1.1] Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,69	11,79	11,78
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,99	9,13	9,03
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	84,09	85	21,3
[2.1.2] Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,89	73,04	74,12
	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	17,1	16,34	6,11
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen	10,32	10,32	10,32
[2.1.3] Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	Angka Kemiskinan	Angka	6,36	6,2	6,69
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	59,28	59,68	60,74
	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,55	87,83	87,69
	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	67,66	68,86	72,57
	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	52,67	54,34	55,67
[3] Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan , pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan					
[3.1] Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-0.03	3,05	4,3
	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Ribu Rupiah	82.608,71	83.940,00	89.141,78

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TAHUN 2025	
				TARGET	REALISASI
	Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI)	Nilai	26,49	26,49	127,77
	Rasio Gini	Nilai	0,251	0,225	0,231
[3.1.1] Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rupiah	1.617.560	3.168.130	1.666.810
	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Juta Rupiah	181.320	191.390	196.150
	PDRB Industri Pengolahan	Juta Rupiah	1.066.580	1.146.850	1.107.420
	Tingkat Inflasi	Persen	1,38	3±1	2,69
[3.1.2] Meningkatnya pertumbuhan investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	1.068.106	450.000	1.073.894,75
[3.1.3] Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,63	2,6	3,05
[4] Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan					
[4.1] Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Nilai	NA	73,925	69,36
[4.1.1] Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Angka	63,1	75,83	74,8
[4.1.2] Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	73,53	72,02	63,92
[5] Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan					
[5.1] Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	NA	17,67	NA
[5.1.1] Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,76	76,34	76,27
	Indeks Risiko Bencana	Angka	152,06	152,06	112,36

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur, Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 secara umum menunjukkan dinamika yang beragam antara keberhasilan dan tantangan. Dari sisi tata kelola pemerintahan, nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP belum sepenuhnya mencapai target, meskipun indeks profesionalisme ASN dan pelayanan publik mengalami peningkatan yang

signifikan. Hal ini mencerminkan adanya komitmen dalam memperbaiki kualitas aparatur dan layanan, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam akuntabilitas serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pada aspek pembangunan manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil melampaui target dengan nilai 73,99. Peningkatan ini didukung oleh membaiknya indikator kesehatan seperti usia harapan hidup yang naik menjadi 74,12 tahun serta penurunan drastis prevalensi stunting hingga 6,11%. Namun demikian, indikator pendidikan menunjukkan stagnasi, dengan rata-rata lama sekolah yang sedikit menurun dan indeks literasi masyarakat yang justru turun tajam. Kondisi ini menegaskan perlunya perhatian lebih pada kualitas pendidikan dan literasi sebagai fondasi peningkatan SDM.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 4,3% dan berhasil melampaui target, dengan PDRB per kapita meningkat menjadi Rp1.073.894,75. Inflasi terkendali pada angka 2,69% dan investasi menunjukkan pemulihan setelah penurunan di tahun sebelumnya. Namun, tingkat pengangguran terbuka sedikit meningkat menjadi 3,05%, sementara ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio Gini masih berada di atas target. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi daerah tumbuh, distribusi hasil pembangunan belum sepenuhnya merata dan penciptaan lapangan kerja masih perlu diperkuat.

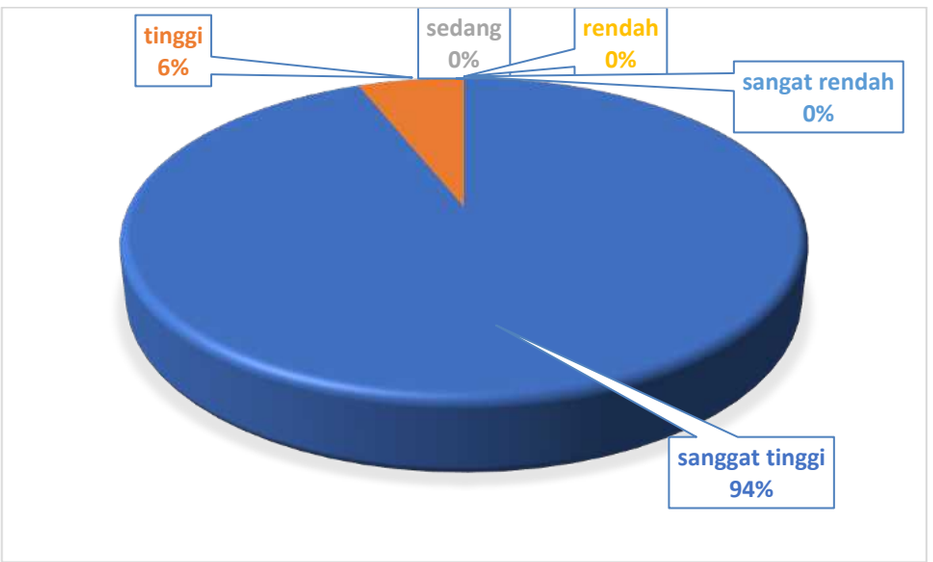
Pada dimensi infrastruktur dan lingkungan hidup, capaian indeks pembangunan infrastruktur wilayah menurun dibanding target, menandakan perlunya percepatan pembangunan sarana prasarana yang merata. Di sisi lain, kualitas lingkungan hidup menunjukkan perbaikan dengan indeks mencapai 76,27 serta penurunan risiko bencana yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pengelolaan lingkungan, meskipun tantangan pembangunan infrastruktur masih menjadi agenda penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2025

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 terhadap Penyusunan RKPD Kab Belitung Timur Tahun 2027 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif dapat menjadi pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS pada Tahun perencanaan selanjutnya di Tahun 2027 sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2027. Sedangkan, evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2027 dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2027.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD bahwa capaian rata-rata kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat impresif dan didominasi oleh kategori penilaian tertinggi. Dari total 33 perangkat daerah yang dievaluasi, mayoritas besar berada pada kategori "Sangat Tinggi" dengan persentase mencapai 94% atau sebanyak 31 perangkat daerah. Sementara itu, sisanya sebesar 6% yaitu sebanyak 2 perangkat daerah masuk ke dalam

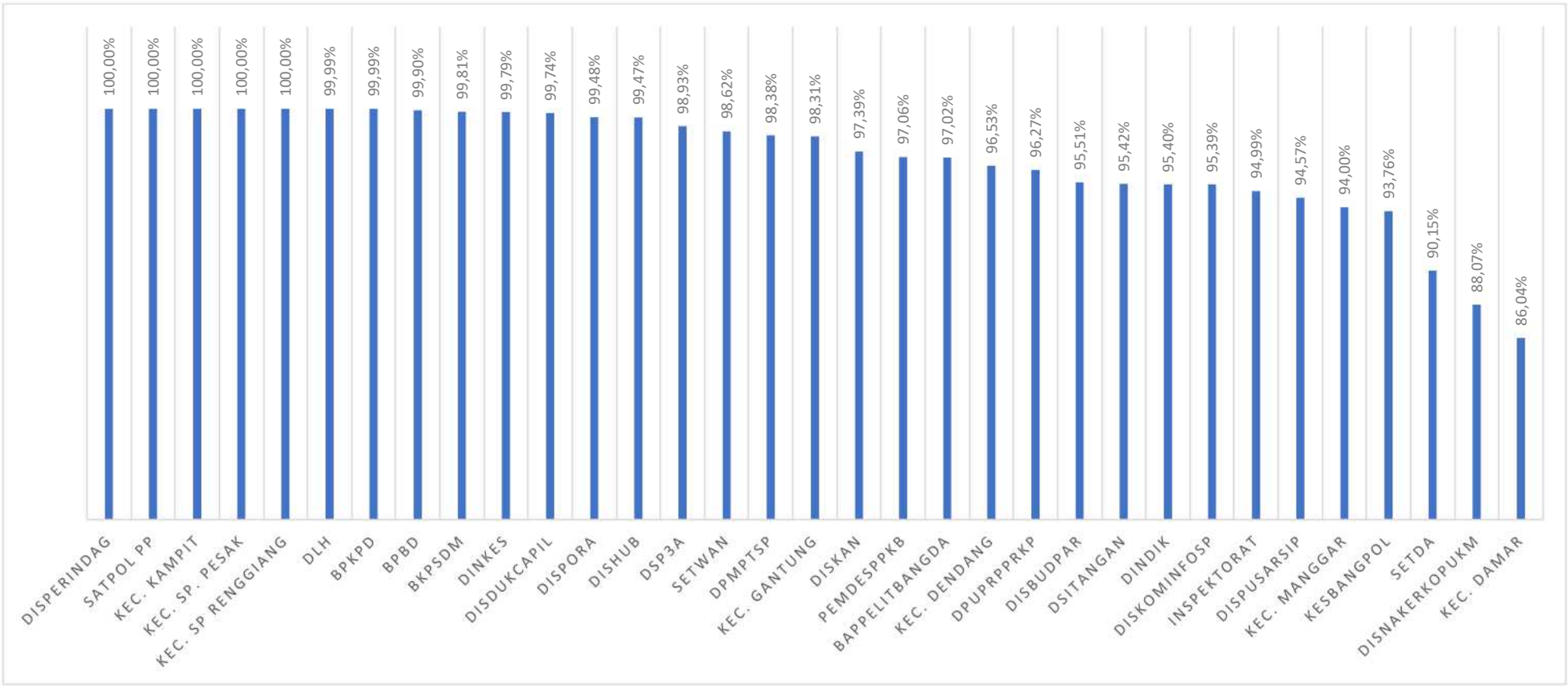
kategori "Tinggi", dan tidak ada satu pun perangkat daerah yang berada dalam kategori kinerja "sedang", "rendah", maupun "sangat rendah". Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, efektivitas dan kualitas kerja di lingkungan pemerintah daerah sudah berjalan dengan optimal dan sesuai standar yang ditetapkan. Persentase rata-rata kinerja perangkat daerah tahun 2025 digambarkan pada grafik dan tabel dibawah ini.



Grafik 2. 25 Persentase Perangkat Daerah berdasarkan Predikat Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2025

Grafik 2. 26 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025



Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2025

Tabel 2. 126 Rincian Realisasi Anggaran, Kegiatan dan Kinerja Output Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	Realisasi Anggaran (Rp)			Realisasi Kegiatan		Rata-Rata Kinerja	
		Realisasi Keuangan	%	Predikat	%	Predikat	%	Predikat
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.870.812.359	85,39%	Tinggi	83,33%	Tinggi	97,06%	Sangat Tinggi
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.725.082.774	90,76%	Sangat Tinggi	99,15%	Sangat Tinggi	98,38%	Sangat Tinggi
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.164.774.609	91,01%	Sangat Tinggi	92,42%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.391.815.733	93,28%	Sangat Tinggi	99,65%	Sangat Tinggi	98,93%	Sangat Tinggi
5	Dinas Pendidikan	176.924.510.373	78,59%	Tinggi	84,29%	Tinggi	95,40%	Sangat Tinggi
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29.679.743.614	90,23%	Sangat Tinggi	97,29%	Sangat Tinggi	96,27%	Sangat Tinggi
7	Dinas Lingkungan Hidup	11.202.585.329	91,79%	Sangat Tinggi	99,99%	Sangat Tinggi	99,99%	Sangat Tinggi
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.706.817.518	89,64%	Tinggi	90,05%	Sangat Tinggi	99,74%	Sangat Tinggi
9	Dinas Perhubungan	12.032.862.048	94,92%	Sangat Tinggi	98,83%	Sangat Tinggi	99,47%	Sangat Tinggi
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.357.182.305	92,05%	Sangat Tinggi	99,75%	Sangat Tinggi	95,39%	Sangat Tinggi
11	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	12.525.930.455	88,78%	Tinggi	89,31%	Tinggi	99,48%	Sangat Tinggi
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.954.751.500	90,74%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	95,51%	Sangat Tinggi
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.703.787.866	93,90%	Sangat Tinggi	99,96%	Sangat Tinggi	94,57%	Sangat Tinggi
14	Dinas Perikanan	9.357.566.831	91,65%	Sangat Tinggi	99,16%	Sangat Tinggi	97,39%	Sangat Tinggi
15	Sekretariat Daerah	35.808.175.273	92,71%	Sangat Tinggi	99,38%	Sangat Tinggi	90,15%	Sangat Tinggi
16	Dinas Kesehatan	161.445.200.816	92,25%	Sangat Tinggi	99,74%	Sangat Tinggi	99,79%	Sangat Tinggi
17	Sekretariat DPRD	32.694.925.874	93,90%	Sangat Tinggi	99,68%	Sangat Tinggi	98,62%	Sangat Tinggi
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	104.972.033.721	96,74%	Sangat Tinggi	96,73%	Sangat Tinggi	99,99%	Sangat Tinggi

NO	PERANGKAT DAERAH	Realisasi Anggaran (Rp)			Realisasi Kegiatan		Rata-Rata Kinerja	
		Realisasi Keuangan	%	Predikat	%	Predikat	%	Predikat
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.371.285.587	95,76%	Sangat Tinggi	99,51%	Sangat Tinggi	99,81%	Sangat Tinggi
20	Inspektorat	11.974.649.653	94,94%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	94,99%	Sangat Tinggi
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.243.502.934	93,00%	Sangat Tinggi	96,91%	Sangat Tinggi	93,76%	Sangat Tinggi
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.066.256.110	90,85%	Sangat Tinggi	99,97%	Sangat Tinggi	99,90%	Sangat Tinggi
23	Satuan Polisi Pamong Praja	9.180.603.343	93,84%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.462.773.685	91,26%	Sangat Tinggi	92,71%	Sangat Tinggi	97,02%	Sangat Tinggi
25	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.596.201.787	90,30%	Sangat Tinggi	99,35%	Sangat Tinggi	88,07%	Tinggi
26	Dinas Pertanian dan Pangan	12.184.356.414	92,54%	Sangat Tinggi	99,54%	Sangat Tinggi	95,42%	Sangat Tinggi
27	Kecamatan Manggar	2.606.841.597	88,98%	Tinggi	89,04%	Tinggi	94,00%	Sangat Tinggi
28	Kecamatan Gantung	2.623.687.313	83,80%	Tinggi	98,80%	Sangat Tinggi	98,31%	Sangat Tinggi
29	Kecamatan Kelapa Kampit	2.836.726.959	88,88%	Tinggi	99,42%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi
30	Kecamatan Simpang Pesak	2.240.387.688	83,38%	Tinggi	83,67%	Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi
31	Kecamatan Damar	2.407.373.723	86,81%	Tinggi	99,65%	Sangat Tinggi	86,04%	Tinggi
32	Kecamatan Simpang Renggiang	2.058.321.142	83,28%	Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Dendang	2.366.951.937	84,00%	Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	96,53%	Sangat Tinggi
34	RSUD Muhammad Zein	42.978.021.727	94,37%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi
	TOTAL	**760.716.500.597**	**89,12%**	**Tinggi**	**94,53%**	**Sangat Tinggi**	**97,46**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2025

2.2.3 CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian program dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun N terhadap target akhir RPJMD 2025-2029 dengan mencantumkan status capaiannya.

Capaian target kinerja tahunan dalam RPJMD merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah secara bertahap setiap tahun. Target ini ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah, serta dijabarkan melalui penetapan target tahunan membantu memastikan bahwa arah pembangunan tetap konsisten dan terukur sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda untuk memudahkan evaluasi. Simbol penanda yang digunakan adalah sebagai berikut,

Tabel 2. 127 Kode Capaian beserta Status Capaian Kinerja Tahunan dan Status Capaian Kinerja RPJMD

Status Capaian kinerja Tahunan		Status Capaian Kinerja RPJMD	
Kode Capaian	**Kategori**	**Kode Capaian**	**Kategori**
T	Tinggi (85 – 100)	TT	Telah Tercapai (100)
S	Sedang (50 - 84)	AT	Akan Tercapai (50 - 99)
R	Rendah (< 50)	UK	Upaya Keras (< 50)

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana program-program pembangunan daerah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam RPJMD 2025–2029, setiap program prioritas yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah. Indikator ini menjadi dasar dalam menyusun target tahunan yang realistis dan dapat dicapai oleh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja program dilakukan sejak tahap perencanaan teknokratik, dengan mempertimbangkan baseline capaian sebelumnya, proyeksi kebutuhan masyarakat, serta kemampuan fiskal daerah. Misalnya, untuk program peningkatan kualitas layanan kesehatan, indikator kinerjanya dapat berupa persentase cakupan imunisasi dasar lengkap atau rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Target tahunan dari indikator ini disusun secara bertahap hingga mencapai sasaran akhir RPJMD.

Kinerja program juga harus selaras dengan indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah, sehingga terdapat kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan tahunan. Dalam hal ini, indikator kinerja program menjadi jembatan antara sasaran strategis RPJMD dan kegiatan operasional perangkat daerah. Konsistensi dan integrasi antar dokumen perencanaan menjadi kunci keberhasilan pencapaian target pembangunan.

Indikator kinerja program dalam RPJMD harus mendukung pencapaian target nasional. Oleh karena itu, penyusunan dan pemantauan indikator ini harus dilakukan secara partisipatif, berbasis data, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Dengan pendekatan ini, indikator kinerja program tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 128 Capaian RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PENDIDIKAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persentase	91	87	87	100,00%	87	87	100,00%	TT	Dinas Pendidikan
	APK SD	Persentase	100	100	104,64	104,64%	100	104,64	104,64%	TT	
	APK SMP	Persentase	97	93	95,50	102,69%	93	95,5	102,69%	TT	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah Dikdas yang menerapkan kurikulum Mulok	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
	Persentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan seseuai kebutuhan	Persentase	96	88	89,68	101,91%	92	89,68	101,91%	TT	
	Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	Persentase	98	93	99	106,45%	95	99	106,45%	TT	
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra daerah	Persentase	70	50	50	100,00%	50	50	100,00%	TT	
URUSAN KESEHATAN											
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	Nilai	60	119	240	201,68%	119	240	201,68%	TT	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persentase	11,51	16,34	17,1	104,65%	15,38	17,1	104,65%	TT	

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk;	Rasio	1,01	0,86	0,82	95,35%	0,9	0,82	95,35%	AT	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi Paripurna	Persentase	100	100	75	75,00%	100	75	75,00%	AT	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar;	Persentase	100	100	83,99	83,99%	100	83,99	83,99%	AT	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;	Persentase	100	100	90,45	90,45%	100	90,45	90,45%	AT	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar;	Persentase	100	100	78	78,00%	100	78	78,00%	AT	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar;	Persentase	100	100	85,12	85,12%	100	85,12	85,12%	AT	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	Persentase	100	100	97	97,00%	100	97	97,00%	AT	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	Persentase	100	100	96,56	96,56%	100	96,56	96,56%	AT	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	Persentase	100	100	81	81,00%	100	81	81,00%	AT	

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	Persentase	100	100	79,9	79,90%	100	79,9	79,90%	AT	
	Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	Persentase	100	100	92,1	92,10%	100	92,1	92,10%	AT	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar;	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar;	Persentase	100	100	88	88,00%	100	88	88,00%	AT	
	Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase	87	78	82	105,13%	80	82	105,13%	TT	
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) %;	Persentase	100	98,6	100	101,42%	99	100	101,42%	TT	
	Persentase Penilaian Capaian Tatanan Kehidupan Sehat Mandiri	Persentase	91	71	78,45	110,49%	81	78,45	110,49%	TT	

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
	Cakupan balita wasting yang ditangani	Persentase	100	100	7	7,00%	100	7	7,00%	UK	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	95	75	85	113,33%	80	85	113,33%	TT	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	Persentase	50	50	85	170,00%	50	85	170,00%	TT	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri (Persen)	Persentase	80	40	46,5	116,25%	50	46,5	116,25%	TT	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	39	0	0	0,00%	-0	0	0	UK	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	18,26	12,26	0	0,00%	12,26	0	0,00%	UK	
	Persentase irigasi dalam kondisi baik, luas irigasi yang dapat berfungsi dengan baik dan efisiensi penggunaan air irigasi	Persentase	72,9	52,9	0	0,00%	57,9	0	0,00%	UK	

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persentase	55	38	41,75	109,87%	40,57	41,75	109,87%	TT	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	30	8	8	100,00%	16	8	100,00%	TT	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	90,09	87	78,34	90,05%	87,35	78,34	90,05%	AT	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata dan dipelihara	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	80,7	79,7	80,28	100,73%	79,9	80,28	100,73%	TT	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase	53,18	37,5	0	0,00%	40,62	0	0	UK	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang tertata	Persentase	99,86	99,61	0	0%	99,71	0	0,00%	UK	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase	1,86	2,06	0	0%	2,01	0	0,00%	UK	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persentase	100	100	99,35	99%	100	99,35	99,35%	TT	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	Persentase	85	70	0	0%	75	0	0,00%	UK	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	100	0	0%	100	0	0,00%	UK	

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	Kecamatan Damar
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN DENDANG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN GANTUNG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN MANGGAR
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN SIMPANG PESAK
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100	100	0	0%	100	0	0,00%	UK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	0	0%	100	0	0,00%	UK	
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	0	0%	100	0	0,00%	UK	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang tersedia	Persentase	100	83	75	90,36%	100	75	90,36%	AT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	12	12	12	100,00%	23	12	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	Persentase	100	62,44	62,44	100%	72,5	62,44	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan RAD PUG	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang terlayani	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Ramah Anak	Persentase	100	20,51	2,56	12,48%	38,46	2,56	12,48%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persentase	91,05	89,47	93,75	105%	90	93,75	104,78%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	10,09	4,28	4,51	105%	4,73	4,51	105,37%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persentase	80	76,19	80,51	106%	77,27	80,51	105,67%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pekerja	2796	2716	6222	229%	2736	6222	229,09%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	59,78	59,78	19,44	33%	59,78	19,44	32,52%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	35	32,4	21,67	67%	33	21,67	66,88%	AT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai izin usaha	Persentase	10,86	8,26	0,82	9,93%	8,26	0,82	9,93%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru Usaha Mikro	Persentase	10,86	8,26	0,82	10%	8,92	0,82	9,93%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,9	85,4	85,5	100%	85,9	85,5	100,12%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	7,69	17,94	0	0%	15,38	0	0,00%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	94	91,86	90,04	98%	92	90,04	98,02%	AT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Nilai	76,08	75,26	76,42	102%	75,46	76,42	101,54%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara	Nilai	86	84,71	83,29	98%	84,91	83,29	98,32%	TT	
	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	63	62,7	63,05	101%	62,77	63,05	100,56%	TT	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase	72,5	32,5	37	114%	32,5	37	113,85%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Persentase	90	90	90	100%	90	90	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Perizinan Berusaha dan Persetujuan lingkungan yang diterbitkan kabupaten	Persentase	60	35	40	114%	40	40	114,29%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase	25	5	0	0%	10	0	0,00%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya.	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti di Kabupaten	Persentase	90	80	80	100%	80	80	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Persentase	69,85	68,85	68,9	100,07%	69,85	68,9	100,07%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	75	30	7,07	23,57%	40	7,07	23,57%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	85,7	85,45	86,45	101%	85,5	86,45	101,17%	TT	

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi penduduk yang meninggal	Persentase	99,99	99,96	100	100%	99,97	100	100,04%	TT	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan pada penduduk usia 0-17 tahun	Persentase	99,87	99,82	99,77	100%	99,83	99,77	99,95%	TT	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi penduduk yang menikah	Persentase	82,72	82,22	82,9	101%	82,32	82,9	100,83%	TT	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi penduduk yang bercerai	Persentase	43,72	43,22	45,22	105%	43,32	45,22	104,63%	TT	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama antardesa terfasilitasi	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang diberdayakan	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	Persentase	100	100	100	100%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	Anak	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif	Persentase	83	75,4	75,4	100,00%	77	75,4	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Bina Keluarga Aktif	Persentase	88	80	80	100,00%	80	80	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat (km)	Km	590,3	510,3	510,3	100,00%	510,3	510,3	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	16,1	15,5	15,08	97,29%	15,6	15,08	97,29%	AT	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	Unit	3	2	2	100,00%	2	2	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek TIK / Teknologi Digital	Angka	3,5	3	3	100,00%	2,5	3	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2,6	2,6	0	0,00%	2,6	0	0,00%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Predikat	Level II	Level II	0	0	Level II	0	0	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) (pelaku usaha)	Investor	445	365	369	101,10%	385	369	101,10%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (persen)	Persentase	2	2	-61,82	-3091%	2	-61,82	-3091%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (persen)	Persentase	88	84	97,7	116,31%	85	97,7	116,31%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (persen)	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman modal (persen)	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	Persentase	4	2,75	3,1	112,73%	3	3,1	112,73%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persentase	32	25	24,36	97,44%	26	24,36	97,44%	AT	

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka aktif	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Nilai	75	65	65	100,00%	67	65	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	67	35	0	0,00%	35	0	0,00%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Nilai	67	25	0	0,00%	25	0	0,00%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persentase	75	25	25	100,00%	25	25	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persentase	75	60	60	100,00%	60	60	100,00%	TT	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	Persentase	75	70	42	60,00%	65	42	60,00%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	Persentase	51	21	21	100,00%	25	21	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina	Persentase	75,5	36	45,56	126,56%	50	45,56	126,56%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persentase	72	60,5	61	100,83%	62	61	100,83%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	Tingkat digitalisasi arsip	Nilai	91	90,9	91	100,11%	91	91	100,11%	TT	
	Nilai Pengawasan kearsipan eksternal	Nilai	87,25	87	87,5	100,57%	87,05	87,5	100,57%	TT	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	Persentase	78	75,05	75,09	100,05%	75,2	75,09	100,05%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Persentase	75	67	0	0,00%	68	0	0,00%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	5	3	76,39	2546,33%	3	76,39	2546,33%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	3	3	229,73	7657,67%	3	229,73	7657,67%	TT	

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	5	3	24,09	803,00%	3	24,09	803,00%	TT	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persentase	15	15	20,07	133,80%	15	20,07	133,80%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase	5	3	14,89	496,33%	3	14,89	496,33%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	20	10	25	250,00%	10	25	250,00%	TT	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	20	20	20	100,00%	20	20	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	30	30	30	100,00%	30	30	100,00%	TT	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	20	20	20	100,00%	20	20	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	5	5	0	0,00%	5	0	0,00%	UK	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	15	15	27	180,00%	15	27	180,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	80	40	40	100,00%	40	40	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	30	0	0	0	10	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	10	0	0	0	NA	0	0	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	42,707.00	43.966	41.861,55	95,21%	41,864.00	41.861,55	95,21%	AT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2943,56	1.800	1.435,03	79,72%	2.733,31	1435,03	79,72%	AT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	Ha	124.320,70	124.320,7	124.320,7	100,00%	124.320,70	124320,7	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	74,94	67	70	104,48%	70,61	70	104,48%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	60	40	0	0,00%	45	0	0,00%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	USD	355.241.688,01	271.012.182,91	264.700.000	97,67%	289.983.035,71	264700000	97,67%	AT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase	3,19	3,19	5,15	161,44%	3,19	5,15	161,44%	TT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Tertib Ukur	Nilai	72	68	61,47	90,40%	69	61,47	90,40%	AT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	Persentase	3	5,95	2,02	33,95%	3	2,02	33,95%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	3	32,5	1,37	4,22%	3	1,37	4,22%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Industri	3	66,67	3,8	5,70%	3	3,8	5,70%	UK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
SEKRETARIAT DAERAH											
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan pemerintahan dan kerjasama yang difasilitasi	Persentase	100	100	0	0,00%	100	0	0,00%	UK	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kebijakan Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	Persentase	100	100	0	0,00%	100	0	0,00%	UK	

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
	Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Persentase	100	100	0	0,00%	100	0	0,00%	UK	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan	Persentase	100	100	0	0,00%	100	0	0,00%	UK	
SEKRETARIAT DPRD											
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00%	TT	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Rancangan Perda Tahun N	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
PERENCANAAN											
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	PERENCANAAN
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	PERENCANAAN

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implemetasi rencana kelitbangan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	100	100	0	0,00%	100	0	0,00%	UK	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	100	100	0	0,00%	100	0	0,00%	UK	
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	10	0	0	0,00%	0	0	0,00%	UK	
KEUANGAN											

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00%	TT	URUSAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00%	TT	
	Persentase Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
	Persentase Realisasi Anggaran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	98	98	98	100,00%	98	98	100,00%	TT	
	Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang telah bersertifikat	Persentase	96	95	95	100,00%	96	95	100,00%	TT	URUSAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
	Persentase aset daerah yang tercatat dalam neraca daerah	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase	15	13	13	100,00%	14	13	100,00%	TT	URUSAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
KEPEGAWAIAN											

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi, dan Evaluasi Kinerja ASN yang Sesuai dengan Prosedur dan Sasaran yang Ditentukan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persentase	20	10	10	100,00%	12	10	100,00%	TT	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
INSPEKTORAT DAERAH											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/ rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	93,84	93,6	93,71	100,12%	93.64	93,71	100,12%	TT	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (Irban Kesra, Irban Pemerintahan, Irban Ekbang dan Irban Investigasi) (Persen)	Persentase	83,25	82,98	0	0,00%	83.03	0	0,00%	UK	

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
	Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	Persentase	-	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Tindak Lanjut Hasil Konsultansi	Persentase	95	82	0	0,00%	85	0	0,00%	UK	INSPEKTORAT DAERAH
	Peringkat Capaian Atas Target Rencana Aksi Program pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) pada area Pengawasan Tingakt Provinsi	Peringkat	3	3	0	0,00%	3	0	0,00%	UK	
	Persentase Perangkat Daerah ZI yang ditingkatkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase	9	6	0	0,00%	6	0	0,00%	UK	
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN DAMAR											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN DAMAR
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN DENDANG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN GANTUNG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN MANGGAR

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN SIMPANG PESAK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	TT	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
PEMERINTAHAN UMUM											
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	90	70	0	0,00%	70	0	0,00%	UK	PEMERINTAHAN UMUM

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2029 (Akhir Periode RPJMD)	TAHUN 2025			TARGET PROGRAM RKPD 2026	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD		STATUS CAPAIAN KINERJA RPJMD	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM S.D. TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S.D. TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4 X 100%	11	12
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	0	0,00%	100	0	0,00%	UK	PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	85	70	0	0,00%	70	0	0,00%	UK	PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	85	70	0	0,00%	70	0	0,00%	UK	PEMERINTAHAN UMUM
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	85	70	0	0,00%	70	0	0,00%	UK	PEMERINTAHAN UMUM

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026 (diolah)

2.2.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM UNGGULAN DAN ANDALAN TAHUN 2025

2.2.4.1 PROGRAM UNGGULAN

2.2.4.1.1 [PU.01] Nyaman Layanan Publik

Program inisiatif pelayanan publik yang menggunakan sistem terpadu satu pintu sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan dalam sistem administrasi elektronik, portal informasi publik, aplikasi *mobile*, dan manajemen pengaduan digital. Dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, sehingga dapat menciptakan pengalaman layanan publik yang lebih baik dan responsif.

Guna mengoptimalkan capaian Program Unggulan Nyaman Layanan Publik, tanggung jawab pelaksanaan didelegasikan kepada perangkat daerah, yaitu: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagai instansi pelaksana utama. Berikut hasil pelaksanaan Program Unggulan Nyaman Layanan Publik.

Tabel 2. 129 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman Layanan Publik

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.01	Nyaman Layanan Publik	Meningkatnya kemudahan akses layanan publik melalui digitalisasi	Persentase aduan masyarakat yang terselesaikan melalui sistem pengaduan digital	100	96,67	96,67%
			Persentase kunjungan layanan digital terpadu (Lawang Beltim)	30	29,54	98,47%
			Persentase layanan publik yang terdigitalisasi	50	51,52	100,00%
			Persentase unit layanan yang terintegrasi ke dalam sistem satu pintu digital	70	72,73	100,00%
			Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan digital (hasil Survei IKM Digital)	70	70	100,00%
Rata-Rata Capaian						99,03%

Pelaksanaan Program Unggulan Nyaman Layanan Publik pada tahun pertama periode RPJMD tahun 2025-2029 menunjukkan performa yang sangat impresif dengan rata-rata capaian mencapai 99,03%. Angka ini merefleksikan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam melakukan transformasi digital pelayanan publik untuk mempermudah akses bagi masyarakat.

Salah satu fokus utamanya adalah program "Nyaman Layanan Publik" yang dijalankan oleh perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital. Dengan sistem administrasi elektronik dan manajemen pengaduan digital, pemerintah berupaya menciptakan pengalaman pelayanan yang transparan dan akuntabel bagi seluruh warga. Target utama dari inisiatif ini adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan digital dengan indikator kinerja yang terukur secara sistematis.

Berdasarkan evaluasi tersebut menunjukan bahwa upaya pembenahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan tersebut telah membuahkan hasil signifikan, di mana hasil survei kepuasan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester II tahun 2025 menunjukkan nilai IKM sebesar 90,25 dengan mutu pelayanan kategori "A" atau berkinerja "Sangat Baik". Pencapaian ini melampaui target indeks kepuasan tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 70.

2.2.4.1.2 [PU.02] Nyaman Internet Desa

Program Unggulan Internet Desa Nyaman merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi transformasi digital dengan menyediakan akses internet yang luas, merata, dan berkualitas di seluruh desa—termasuk wilayah pulau dan blank spot—guna mendukung penguatan ekonomi digital, literasi masyarakat, serta efektivitas pelayanan publik berbasis digital.

Tabel 2. 130 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman Internet Desa

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.02	Internet Desa Nyaman	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa	Jumlah pusat layanan internet di ruang publik di desa yang berfungsi (titik hotspot)	5	5	100%
			Persentase desa yang memiliki akses internet aktif (tetap dan/atau nirkabel)	70	100	100%
	Rata-Rata Capaian					100%

Implementasi Program Unggulan Internet Desa Nyaman tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan untuk pencapaian terhadap target dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Program ini secara strategis berhasil mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa melalui dua indikator utama.

1. Jumlah pusat layanan internet di ruang publik di desa yang berfungsi (titik hotspot)

   Ketersediaan akses internet publik di area terbuka Desa masih belum memadai karena pemasangan jaringan baru terbatas pada aset-aset milik pemerintah desa saja. Untuk mengoptimalkan jangkauan diperlukan pendataan lebih lanjut mengenai titik-titik ruang publik strategis yang mendesak membutuhkan konektivitas. Hingga tahun 2025 tercatat telah

tersedia 7 (tujuh) titik akses, namun alokasi anggaran desa hanya mampu mencakup pembiayaan hingga bulan April. Setelah periode tersebut, keberlangsungan layanan akan tetap terjaga melalui skema pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyedia layanan.

2. Persentase desa yang memiliki akses internet aktif (tetap dan/atau nirkabel) Penyediaan akses internet di lingkup pemerintahan desa telah mencapai kemajuan signifikan dengan mencakup 39 desa dengan lokasi kantor desa yang sangat mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi Keuangan di Pemerintah Desa sudah menggunakan Aplikasi Siskeudes Link dimana untuk pembayaran dengan kriteria tertentu sudah melalui transfer langsung dari Bank Persepsi sehingga kebutuhan akan internet sangat dibutuhkan. Namun secara keseluruhan integrasi jaringan berjalan dengan baik, meskipun masih ditemukan hambatan teknis di Desa Simpang Tiga. Berdasarkan hasil monitoring di lokasi tersebut kualitas koneksi dilaporkan masih lambat, sehingga diperlukan optimasi lebih lanjut untuk memastikan pelayanan publik digital berjalan maksimal.

2.2.4.1.3 [PU.03] Nyaman ASN Berkemajuan

Program Unggulan Nyaman ASN Berkemajuan Kabupaten Belitung Timur secara strategis diarahkan untuk mencapai sasaran utama berupa meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN. Melalui kerangka kerja ini, diharapkan setiap aparatur tidak hanya memiliki kualifikasi yang unggul, tetapi juga mampu menghadirkan terobosan kreatif yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Tujuan utamanya meningkatkan keterampilan ASN, mendorong inovasi dan kreativitas, serta menerapkan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan memastikan ASN mematuhi standar profesional tinggi diharapkan dapat memperkuat kontribusi ASN dalam memajukan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2. 131 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman ASN Berkemajuan

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.03	Nyaman ASN Berkemajuan	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	80	80,49	100,00%
			Jumlah inovasi pelayanan publik yang diinisiasi oleh ASN per tahun	111	35	31,53%
	Rata-Rata Capaian					100,00%

Guna memastikan keberhasilan sasaran tersebut, pengukuran dilakukan secara sistematis melalui dua indikator utama, yaitu:

1. Indeks Profesionalisme ASN
   Program Unggulan Nyaman ASN Berkemajuan telah menunjukkan hasil yang positif dengan capaian Indeks Profesionalisme ASN yang melampaui target, yakni mencapai 80,49 dari target 80. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan dan akses bagi ASN untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualifikasi pendidikan sebagai salah satu dimensi utama penyusun nilai Indeks Profesionalisme ASN. Selain penguatan aspek akademik, peningkatan indeks ini juga didorong oleh pemenuhan kebutuhan Diklat Kepemimpinan (PIM) bagi pejabat struktural, khususnya di level Eselon IV dan Eselon III, guna memastikan standar kompetensi manajerial terpenuhi secara merata demi terciptanya birokrasi yang lebih profesional dan berkemajuan di Kabupaten Belitung Timur. Melalui integrasi pendidikan tinggi dan pelatihan manajerial ini, diharapkan ASN Kabupaten Belitung Timur memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap dinamika teknologi dan transformasi digital guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih profesional serta akuntabel.
2. Jumlah inovasi pelayanan publik yang diinisiasi oleh ASN tahun 2025 sebanyak 35 dari total 113 inovasi daerah yang diajukan. Berdasarkan hasil pelaksanaan penjaringan dan pengusulan inovasi daerah, target awal yang ditetapkan sebanyak 30 inovasi daerah telah terlampau, dengan realisasi 35 inovasi yang berhasil disubmit ke IGA Kemendagri. Selanjutnya diperlukan penguatan pembinaan inovasi serta pendampingan berkelanjutan agar inovasi yang diusulkan tidak hanya memenuhi aspek administratif tetapi juga memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

2.2.4.1.4 [PU.04] Nyaman Bersinergi

Program Unggulan Nyaman Bersinergi dirancang secara strategis untuk mendorong peningkatan partisipasi sektor non-pemerintah dalam berbagai dimensi pembangunan. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi sektor non-pemerintah dalam berbagai aspek pembangunan. Fokus utama program ini diarahkan pada diversifikasi pembiayaan melalui skema kemitraan, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, hingga pengembangan inovasi program pemerintah yang bersifat kolaboratif.

Tabel 2. 132 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman Bersinergi

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.04	Nyaman Bersinergi	Meningkatnya partisipasi sektor non-pemerintah dalam pembiayaan, pelaksanaan, atau inovasi program pembangunan	Jumlah kegiatan mendukung pembangunan yang melibatkan mitra non-pemerintah daerah	10	11	100,00%

Efektivitas pencapaian program untuk memastikan terciptanya sinergi yang inklusif serta berkelanjutan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat fiskal maupun akselerasi pembangunan daerah, yang diukur melalui:

1. Jumlah kegiatan pendukung pembangunan yang melibatkan mitra non-pemerintah daerah.
   Upaya penguatan kolaborasi sektor non-pemerintah juga mencatatkan hasil yang melampaui ekspektasi, dimana terdapat 11 kegiatan pembangunan yang berhasil melibatkan mitra non-pemerintah daerah dari target semula sebanyak 10 kegiatan. Hal ini membuktikan bahwa skema kemitraan dalam aspek pembiayaan dan pelaksanaan program pembangunan telah diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah. Sinergi tersebut diwujudkan melalui kontribusi nyata perusahaan swasta dalam skema pembiayaan produktif seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), keterlibatan akademisi dalam perumusan program berbasis riset, serta kemitraan aktif dengan berbagai lembaga kemasyarakatan lainnya.

2.2.4.1.5 [PU.05] Nyaman Desa Berdaya

Program unggulan yang menjadi prioritas adalah “Nyaman Desa Berdaya”, dengan sasaran terbangunnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam mengakselerasi pengembangan usaha ekonomi produktif yang berfokus pada hilirisasi produk olahan sumber daya alam lokal siap konsumsi serta fasilitasi pembentukan unit usaha desa guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Tabel 2. 133 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman Desa Berdaya

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.05	Nyaman Desa Berdaya	Terbangunnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dalam	Jumlah desa yang mengembangkan produk olahan SDA lokal siap	5	2	40,00%

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		pengembangan usaha ekonomi produktif.	konsumsi (ready to eat)			
			Jumlah unit usaha ekonomi produktif desa yang terbentuk atau difasilitasi.	4	2	50,00%
	Rata-Rata Capaian					45,00%

Program ini diharapkan mampu menciptakan desa yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat posisi Belitung Timur sebagai daerah yang memiliki identitas ekonomi berbasis kearifan lokal. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan program melalui indikator sebagai berikut:

1. Jumlah desa yang mengembangkan produk olahan SDA lokal siap konsumsi (ready to eat).
   Dalam upaya mendorong hilirisasi potensi desa melalui program Nyaman Desa Berdaya indikator jumlah desa yang mengembangkan produk olahan SDA lokal siap konsumsi (ready to eat) mencatatkan realisasi sebesar 2 desa dari target 5 desa pada tahun 2025, sehingga progres capaian kinerja untuk indikator tersebut saat ini berada di angka 40,00%. Meskipun administratif dan sertifikasi bukan lagi menjadi masalah, namun belum tercapainya target pengembangan produk olahan SDA lokal siap konsumsi di Kabupaten Belitung Timur karena terbatasnya akses desa terhadap teknologi pengolahan pangan modern (seperti mesin retort atau pengemasan vakum industri) yang krusial untuk menjamin ketahanan produk di wilayah kepulauan. Kondisi tersebut diperberat oleh tingginya biaya logistik pengadaan bahan, serta belum optimalnya kapasitas inovasi SDM desa dalam menjaga kontinuitas produksi di tengah fluktuasi pasokan bahan baku lokal yang bersifat musiman, sehingga desa masih kesulitan dalam memenuhi standar kuantitas dan konsistensi yang diminta oleh pasar retail modern.

2. Jumlah unit usaha ekonomi produktif desa yang terbentuk atau difasilitasi.
   Indikator ini menunjukkan capaian positif dalam pelaksanaan PU.5 Nyaman Desa Berdaya, yang salah satunya tercermin dari terbentuknya BUM Desa di seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung Timur. Keberadaan BUM Desa tersebut menjadi bukti konkret bahwa desa telah memfasilitasi unit usaha ekonomi produktif sebagai wadah pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Unit usaha yang dijalankan bersifat beragam, meliputi penguatan ketahanan pangan, BUM Desa

Mart, penyediaan gas, serta usaha pengolahan berbasis sumber daya alam lokal desa. Variasi jenis usaha ini menggambarkan adanya proses fasilitasi dan pendampingan desa dalam mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, proporsi unit usaha yang bergerak di sektor pengolahan masih terbatas, yakni baru 2 (dua) unit usaha dari total 39 BUM Desa yang ada atau sekitar 5 persen, yaitu BUMDes Air Madu dan BUMDes Batu Penyu, sehingga ke depan diperlukan penguatan fasilitasi pada pengembangan unit usaha produktif berbasis hilirisasi dan peningkatan nilai tambah untuk memperluas dampak ekonomi desa.

2.2.4.1.6 [PU.06] RT Ku Nyaman

Program Unggulan RT Ku Nyaman Kabupaten Belitung Timur dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif Rukun Tetangga (RT) dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta mediasi sosial di tingkat lingkungan, sehingga diharapkan terbentuk lingkungan yang harmonis, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat peran RT sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial dan pembangunan berbasis komunitas.

Tabel 2. 134 Capaian Indikator Program Unggulan RT Ku Nyaman

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.06	RT-Ku Nyaman	Mendorong keterlibatan aktif RT dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta mediasi sosial tingkat lingkungan	Persentase RT aktif yang terlibat dalam program pelayanan publik	50	100	100,00%

Pelaksanaan pembangunan yang ada di Pemerintahan Desa diwajibkan untuk melibatkan seluruh RT, sehingga proses pelaksanaan perencanaan sampai dengan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan perwujudan SDGs ke-11 yaitu Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman, salah satu bentuk program pelayanan publik yang menghadirkan keterlibatan RT secara penuh yaitu Program Lomba Rumah Bersih, Sehat dan Nyaman se-Kabupaten Belitung Timur yang berkolaborasi dengan RT yang ada di setiap desa sebagai penilai lomba. Hal ini merupakan program inklusif dan partisipatif serta membangun kesadaran serta tanggungjawab masing-masing Lembaga dan masyarakat terhadap lingkungan pada level akar rumput. Bentuk lain dari program pelayanan publik juga Program Gotong Royong RT yang mendorong

pemeliharaan lingkungan dari, oleh dan untuk RT. Saat ini jumlah RT yang ada di seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten sebanyak 775 RT, oleh karena adanya kewajiban keterlibatan RT dalam setiap perencanaan dan Pembangunan yang ada di setiap desa sebagaimana peraturan yang berlaku sehingga capaian untuk persentase RT aktif yang terlibat dalam program pelayanan publik sebesar 100%.

2.2.4.1.7 [PU.07] Nyaman Cerdas

Program Unggulan Nyaman Cerdas diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat secara menyeluruh melalui perbaikan capaian indikator-indikator pendidikan utama yang mencerminkan akses, keberlanjutan, dan hasil pendidikan. Program ini menitikberatkan pada upaya memastikan setiap warga memperoleh kesempatan belajar yang setara dan berkelanjutan, sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, sekaligus mendorong peningkatan tingkat pendidikan rata-rata penduduk. Melalui penguatan akses layanan pendidikan, penurunan hambatan ekonomi, serta dukungan terhadap keberlangsungan sekolah, Nyaman Cerdas menjadi instrumen strategis dalam membangun sumber daya manusia yang lebih berdaya saing, adaptif, dan siap mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pada Tahun 2025, kinerja program ini menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian kinerja 99,41%.

Tabel 2. 135 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman Cerdas

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.07	Nyaman Cerdas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	11,79	11,78	99,92%
			Rata-rata lama Sekolah	9,13	9,03	98,90%
	Rata-Rata Capaian					99,41%

Pengukuran capaian pelaksanaan program ini dengan indikator sebagai berikut:

1. Angka Harapan Lama Sekolah

   Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) ditargetkan sebesar 11,79 tahun dan terealisasi sebesar 11,78 tahun, atau mencapai 99,92 persen. Capaian yang sangat mendekati target ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mendorong akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi anak usia sekolah, serta menjaga keberlanjutan partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa berbagai intervensi pendidikan yang dilaksanakan, termasuk pengurangan hambatan ekonomi dan penguatan dukungan terhadap peserta didik, telah berkontribusi positif dalam memastikan

anak-anak tetap bersekolah dan memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

2. Rata-rata Lama Sekolah
   Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan capaian yang tinggi, dengan target 9,13 tahun dan realisasi 9,03 tahun, atau mencapai 98,90 persen. Capaian ini menggambarkan adanya peningkatan tingkat pendidikan penduduk usia dewasa secara bertahap sebagai hasil dari akumulasi kebijakan dan program pendidikan yang telah berjalan. Meskipun demikian, capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan kebijakan dan intervensi yang lebih terarah, khususnya untuk mendorong penyelesaian pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi, agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.

2.2.4.1.8 [PU.08] Nyaman Sehat

Program Unggulan Nyaman Sehat Kabupaten Belitung Timur merupakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui penguatan layanan kesehatan dasar, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di setiap lapisan masyarakat. Program ini diarahkan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih merata, memperkuat peran puskesmas dan posyandu sebagai garda terdepan, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sebagai fondasi utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2. 136 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman Sehat

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.08	Nyaman Sehat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	119	206*)	26,89%
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100	82,69*)	82,69%
			Prevalensi stunting	16,34	17,1*)	95,35%
			Tingkat UHC	99	100,05	100,00%
	Rata-Rata Capaian					76,23%

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Unggulan Nyaman Sehat Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 dengan capaian rata-rata sebesar 76,23%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan

daerah telah mengalami kemajuan namun belum sepenuhnya optimal. Pengukuran capaian pelaksanaan program ini dengan indikator sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)
   Indikator AKI mencatatkan realisasi sebesar 206 dari target yang ditetapkan sebesar 119, sehingga capaian kinerjanya baru menyentuh angka 26,89%. Kematian ibu dari 1.532 kelahiran tercatat sebanyak 4 kasus kematian ibu dari 1.532 kelahiran. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kehamilan dan persalinan berisiko tinggi pada ibu berusia di atas 40 tahun, adanya hambatan dalam sistem rujukan ke rumah sakit tipe A dan B bagi ibu hamil dengan risiko penyakit jantung, serta masih terbatasnya kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Hal ini menegaskan perlunya optimalisasi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara berkelanjutan, penguatan sistem rujukan, serta upaya preventif yang lebih intensif untuk menekan angka kematian ibu di Kabupaten Belitung Timur.
2. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan
   Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan mencapai realisasi 82,69% dari target 100%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 82,69%. Tercatat sebanyak 1.524 bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari total target kelahiran 1.843 bayi. Realisasi ini belum mencapai target sepenuhnya karena masih terdapat ibu hamil yang belum melahirkan. Namun demikian, seluruh bayi yang telah lahir telah memperoleh pelayanan kesehatan standar melalui tiga kali kunjungan, sehingga capaian pelayanan bayi baru lahir dapat dikatakan telah terlaksana secara optimal pada 100% dari jumlah bayi yang tersedia.
3. Prevalensi stunting
   Upaya penekanan stunting menunjukkan hasil yang cukup baik dengan realisasi sebesar 17,1% dari target 16,34%, yang menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 95,35%. Berdasarkan data per 1 Desember 2025, jumlah peserta yang dibiayai melalui APBD Kabupaten tercatat sebanyak 35.111 jiwa, sedangkan peserta yang ditanggung oleh APBD Provinsi berjumlah 11.540 jiwa. Pada bulan Oktober, Pemerintah Provinsi menambahkan kuota kepesertaan bagi Kabupaten Belitung Timur sebesar 5.000 jiwa. Sehubungan dengan penambahan tersebut, Dinas Kesehatan mengusulkan adanya pemindahan kuota dari provinsi untuk menyesuaikan kebutuhan daerah. Dengan demikian, total kepesertaan per 1 Desember mencapai 46.651 jiwa, yang mencerminkan adanya peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan melalui sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
4. Tingkat UHC

Indikator tingkat Universal Health Coverage (UHC) berhasil mencapai target maksimal dengan realisasi 100,05 dari target 99, artinya realisasi UHC melebihi jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur sebesar 0,05%. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk menghitung tingkat UHC tersebut masih menggunakan jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur semester I tahun 2025 yang sebanyak 133.053 orang. Tingkat realisasi tersebut akan terkoreksi setelah data jumlah penduduk semester II tahun 2025 resmi dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri di bulan Februari 2026. Berdasarkan data peserta per tanggal 1 Desember yang di biayai oleh APBD Kabupaten sejumlah 35,111 jiwa, Yang dibiayai menggunakan APBD Provinsi sejumlah 11,540 jiwa. Pada bulan oktober, Provinsi menambahkan jumlah kuota kepersertaan Kabupaten Belitung Timur sebesar 5000 jiwa. Dengan adanya penambahan kepersertaan tersebut Dinas Kesehatan mengusulkan untuk pemindahan kuota provinsi. Total kepersertaan pertanggal 1 Desember sebesar 46,651 jiwa.

2.2.4.1.9 [PU.09] Nyaman Sejahtera

Program Unggulan Nyaman Sejahtera pada Tahun 2025 diarahkan untuk menurunkan jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran. Pelaksanaan program ini menunjukkan capaian kinerja yang baik, khususnya pada aspek ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Indikator persentase penerima bantuan sosial yang tepat sasaran sesuai hasil verifikasi dan validasi DTKS/PBKE mencapai target 100 persen, dengan realisasi juga sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sosial telah berjalan optimal dan sesuai dengan basis data yang ditetapkan, sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Sementara itu, indikator persentase penerima manfaat yang puas terhadap layanan bantuan sosial ditargetkan sebesar 100 persen, dengan realisasi mencapai 87,18 persen. Capaian tersebut menggambarkan bahwa mayoritas penerima manfaat telah merasakan kualitas layanan bantuan sosial yang baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam peningkatan mutu layanan, mekanisme penyaluran, serta aspek komunikasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Program Unggulan Nyaman Sejahtera pada Tahun 2025 mencapai 93,59 persen, yang menunjukkan bahwa program ini telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perlindungan sosial serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok pra-sejahtera di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2. 137 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman Sejahtera

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.09	Nyaman Sejahtera	Menurunnya jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran	Persentase penerima bantuan sosial yang tepat sasaran (sesuai verifikasi dan validasi DTKS/P3KE)	100	100	100,00%
			Persentase penerima manfaat yang puas terhadap layanan bansos	100	87,18	87,18%
	Rata-Rata Capaian					93,59%

2.2.4.1.10 [PU.10] Petani dan Nelayan Nyaman

Program Unggulan Petani dan Nelayan Nyaman diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, yang secara utama diukur melalui indikator persentase petani dan nelayan yang berada di atas garis kemiskinan. Pada Tahun 2025, capaian indikator ini belum dapat disajikan secara kuantitatif karena masih memerlukan penguatan basis data terpadu, khususnya dalam mengidentifikasi posisi petani dan nelayan pada struktur desil kesejahteraan.

Tabel 2. 138 Capaian Indikator Program Unggulan Petani dan Nelayan Nyaman

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.10	Petani dan Nelayan Nyaman	Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan	Persentase Petani/Nelayan yang Berada di Atas Garis Kemiskinan	0	0	0

Namun demikian, pelaksanaan Program Unggulan ini pada Tahun 2025 juga dapat dilihat dari capaian Program Andalan yang telah dilaksanakan dan memberikan dampak langsung bagi petani dan nelayan. Berbagai intervensi melalui peningkatan produktivitas, dukungan sarana dan prasarana, penguatan akses permodalan, serta pendampingan usaha menjadi indikator antara (intermediate outcome) yang mencerminkan arah peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran.

Sebagai tindak lanjut untuk penguatan pengukuran kinerja, diperlukan koordinasi dengan Dinas Sosial guna menyandingkan data petani dan nelayan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyelarasan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai status kesejahteraan petani dan nelayan, termasuk posisi mereka pada desil di atas garis kemiskinan, sehingga ke depan

pengukuran indikator dapat dilakukan secara lebih terukur, akurat, dan mendukung perencanaan program yang semakin tepat sasaran.

2.2.4.1.11 [PU.11] Nyaman Kreatif Berkarya

Program unggulan yang berfokus pada sektor industri kreatif adalah Nyaman Kreatif Berkarya dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, magang, serta mendukung kerja sama dengan berbagai stakeholder. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan kompetitif dengan mengoptimalkan setiap fasilitas yang tersedia, dan memfasilitasi akses pasar melalui platform digital dan pameran kreatif.

Tabel 2. 139 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman Kreatif Berkarya

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.11	Nyaman Kreatif Berkarya	Mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor industri kreatif berbasis potensi lokal	Jumlah pelaku industri kreatif yang memperoleh akses pasar melalui platform digital	0	5	
			Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti pelatihan, magang, atau pendampingan	0	20	0,00%
	Rata-Rata Capaian					

1. **Industri Kreatif**
   Industri Kreatif adalah salah satu sektor yang fokus pada pembuatan atau penciptaan suatu produk atau jasa yang bernilai ekonomi dari pengembangan kreativitas ,bakat ,dan keterampilan.
   Para Pelaku industri kreatif tidak semuanya terlahir dengan pemikiran yang kreatif. Kreatifitas merupakan hal yang dapat diasah oleh setiap individu, kreativitas seorang pengusaha dapat dipicu dengan memasang pola piker yang selalu ingin melakukan inovasi ,rutin melakukan diskusi dan interaksi yang memaksa kita untuk mengeluarkan sebuah ide ,bertemu orang baru, hingga sikap pantang menyerah dalam berinovasi.
2. **Rekapitulasi Data Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Sub Sektor Kabupaten Belitung Timur**
   Pelaku usaha ekonomi kreatif Kabupaten Belitung Timur mencakup berbagai subsektor seperti kuliner, kriya, fashion, seni pertunjukkan, musik, fotografi, seni rupa, penerbitan, tv & video,dan desain interior. Yang didukung melalui pemerintah daerah melalui pendataan dan pembinaan di Pusat Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kualitas

produk dan daya tarik pariwisata daerah,menjadikannya sektor penting penggerak ekonomi lokal selain pertambangan dan pertanian.
Subsektor Ekraf Pariwisata di Belitung Timur:

- Kuliner
  Pengembangan makanan dan minuman khas daerah yang memanfaatkan sumber daya lokal .Berjumlah 159 Pelaku Usaha,yang sudah terdaftar Hak Intelektual Kekayan berjumlah 12 Pelaku Usaha
- Kriya & Seni Rupa
  Pengrajin yang membuat produk seperti anyaman rotan,rajutan,miniatur kater,tenun ,atau kerajinan dari bahan lokal, dan seni lokal sebagai daya tarik . Berjumlah 20 Pelaku Usaha kriya dan 3 Pelaku Seni Rupa
- Fashion
  Perancang Busana yang mengintegrasikan budaya lokal Berjumlah:12 Pelaku Usaha, yang sudah terdaftar Hak Intelektual Kekayaan Berjumlah 4 Pelaku usaha
- Seni pertunjukkan
  Seniman yang menampilkan tarian,musik, atau pertunjukkan budaya lokal. Berjumlah 11 Pelaku Usaha yang sudah terdaftar hak kekayaan intelektual berjumlah 1 pelaku usaha.
- Musik
  Menampilkan Pertunjukkan musik tradisional dan modern : Berjumlah 15 Pelaku Usaha.
- Fotografi
  Pelaku di Bidang Visual yang mengabadikan keindahan alam dan budaya Belitung Timur. Berjumlah 8 Pelaku Usaha.
- Penerbitan
  Penulis yan berasal dari daerah lokal berjumlah 2 Orang
- Tv & Radio
  Siaran Tv & Radio Daerah Lokal : Berjumlah 2 Siaran
- Desain Interior
  Perancangan ruang (hunian, komersial, publik) agar nyaman, estetis,dan meningkatkan kualitas hidup :Berjumlah 1 Pelaku usaha.

3. **Skala Usaha dan Metode Pemasaran**
   - Skala Usaha ekraf dapat dikategorikan menjadi UKM yaitu usaha yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang usaha besar, dengan modal dan omset tertentu yang berbeda antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Contoh: Kuliner, Fashion, Kerajinan.
   - Metode Pemasaran ekonomi kreatif melalui media sosial dan jualan offline.
4. **Evaluasi hasil Pelatihan yang sudah dilakukan**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur melaksanakan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif tahun 2022, 2023, dan 2024.

Hasil Pelatihan Ekonomi Kreatif

- Peningkatan Kualitas SDM
  Pelatihan dan sertifikasi terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di sektor parekraf.
- Pengembangan Produk
  Program ini mendorong inovasi dalam pengemasan produk dan penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan, yang mengikuti tren pasar.
- Akses Pasar Digital
  Pelaku usaha Ekraf diajarkan untuk memasarkan produk mereka secara luas melalui platform digital.
- Meningkatkan Wawasan Pelaku Usaha

Dampak Pelatihan Ekonomi Kreatif

- Peningkatan Kesejahteraan: Sektor Ekraf berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Belitung Timur.
- Penciptaan Lapangan Kerja: Program ini membuka lapangan kerja barudan mendukung pelaku UMKM.

Kendala Pelatihan Ekonomi Kreatif

- Akses Pendanaan
  Keterbatasan Modal dan kesulitan mengakses dana atau skema pembiayaan khusus menjadi tantangan utama bagi banyak pelaku usaha.
- Kualitas SDM yang belum merata
  Kualitas sumber daya manusia yang belum merata di berbagai daerah menjadi tantangan dalam penyerapan materi pelatihan dan inovasi.
- Perlindungan HKI
  Masih lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menyulitkan pelaku usaha untuk mengamankan karya dan inovasi mereka.
- Daya Beli Masyarakat
  Rendahnya daya beli masyarakat menjadi hambatan dalam pemasaran produk kreatif.
- Infrastruktur Pendukung
  Kurangya Infrastruktur yang memadai ,terutama di daerah terpemcil,menghambat pengembangan ekraf secara optimal.

2.2.4.1.12 [PU.12] UMKM ku Nyaman Berdaya

Pada Program Unggulan ini), pemerintah daerah menetapkan sasaran strategis untuk meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM lokal yang aktif dan berkelanjutan. Salah satu indikator kinerja kunci yang diukur adalah Persentase UMKM yang memperoleh akses pembiayaan atau permodalan.

Meskipun target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 adalah 0%, dikarenakan belum dapat menganggarkan intervensi Dinas terhadap indikator ini, realisasi di lapangan menunjukkan capaian positif. Tercatat sebanyak 100 unit UMKM atau setara dengan 0,48% dari total populasi UMKM telah berhasil mendapatkan akses permodalan. Data capaian ini diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi dari pihak perbankan selaku penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk mendukung pencapaian tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Belitung Timur melakukan intervensi aktif melalui kolaborasi strategis dengan pihak perbankan penyalur KUR serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi fasilitasi dan sosialisasi intensif mengenai pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta skema pembiayaan usaha mikro lainnya, guna mempermudah pelaku usaha dalam mengakses suntikan modal bagi pengembangan bisnisnya.

Selain fokus pada aspek permodalan, Program Unggulan UMKM Ku Nyaman Berdaya juga mendorong adaptasi teknologi digital guna memperluas jangkauan pasar pelaku usaha lokal. Pada indikator kinerja "Jumlah UMKM yang onboarding ke platform e-commerce atau marketplace digital", realisasi tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target perencanaan awal.

Meskipun target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan untuk tahun 2025 adalah sebesar 0 (nol), realisasi di lapangan mencatatkan keberhasilan sebanyak 15 UMKM yang telah melakukan onboarding atau bergabung ke dalam platform perdagangan digital. Capaian inisiatif ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam upaya mewujudkan sasaran program, yakni meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM lokal agar lebih aktif, adaptif terhadap teknologi, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 140 Capaian Indikator Program Unggulan UMKM ku Nyaman Berdaya

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.12	UMKM Ku Nyaman Berdaya	Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM lokal yang aktif dan berkelanjutan	Jumlah UMKM yang onboarding ke platform e-commerce atau marketplace digital	0	15	
			Persentase UMKM yang memperoleh akses pembiayaan atau bantuan permodalan	0	0,48	
	Rata-Rata Capaian					

2.2.4.1.13 [PU.13] Nyaman Kerja

Program Unggulan Nyaman Kerja berfokus pada penguatan sektor ketenagakerjaan daerah. Program ini secara khusus menetapkan sasaran utama pada tersedianya lapangan kerja baru guna menyerap tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator jumlah lapangan kerja tersedia, yang mencerminkan sejauh mana iklim investasi dan pengembangan kawasan seperti KIAK mampu menciptakan peluang ekonomi riil bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya program ini bertujuan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif di mana ketersediaan lapangan kerja tidak hanya sekadar angka administratif, tetapi benar-benar terwujud melalui unit usaha yang beroperasi secara aktif. Dengan adanya sinergi antara penciptaan lapangan kerja di sektor formal dan validitas data lapangan yang akurat, Program Nyaman Kerja diharapkan dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2. 141 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman Kerja

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.13	Nyaman Kerja	Tersedianya lapangan kerja baru	Jumlah lapangan kerja tersedia		3.178	

Peralihan hak pengelolaan Kawasan Industri/Kawasan Khusus (KIAK) melalui MoU kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur saat ini masih menghadapi tantangan besar terkait rendahnya realisasi operasional unit usaha. Meskipun secara administratif proses perizinan terus berjalan, hasil monitoring menunjukkan bahwa hanya terdapat 30 unit usaha yang benar-benar aktif beroperasi di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah yang lebar antara minat investasi dengan

kesiapan eksekusi di kawasan tersebut, sehingga potensi ekonomi yang diharapkan dari penandatanganan hak pengelolaan belum mampu terakselerasi secara maksimal bagi pembangunan daerah.

Selain itu masih terdapat masalah krusial mengenai akurasi data ketenagakerjaan yang berisiko menghasilkan pelaporan yang semu. Selama ini, ketersediaan lapangan kerja hanya dihitung berdasarkan asumsi bahwa setiap NIB yang terbit otomatis menyerap dua tenaga kerja, padahal realita di sektor formal menurut data Disnaker menunjukkan angka yang berbeda. Diskoneksi antara data administratif berbasis sistem OSS dengan data faktual lapangan ini menyebabkan gambaran serapan tenaga kerja di Belitung Timur tidak akurat, sehingga diperlukan sinkronisasi segera agar kebijakan ketenagakerjaan yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi rill para pelaku usaha yang aktif.

2.2.4.1.14 [PU.14] Gerbang Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meluncurkan Program Unggulan Gerbang Ekonomi sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur perekonomian daerah melalui optimalisasi infrastruktur transportasi laut. Program ini secara khusus menyasar pada peningkatan peran Pelabuhan Manggar agar dapat berfungsi optimal sebagai pusat distribusi logistik dan titik utama mobilitas penumpang di wilayah Belitung Timur. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator jumlah fasilitas pelabuhan yang berhasil direhabilitasi maupun dibangun, guna memastikan ketersediaan sarana pendukung yang memadai bagi arus barang dan manusia.

Tabel 2. 142 Capaian Indikator Program Unggulan Gerbang Ekonomi

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.14	Gerbang Ekonomi	Meningkatkan peran Pelabuhan Manggar sebagai pusat distribusi logistik dan mobilitas penumpang di Belitung Timur	Jumlah fasilitas pelabuhan yang direhabilitasi/ dibangun	0	0	0

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus berupaya memperkuat konektivitas wilayah melalui optimalisasi sektor perhubungan laut, dengan fokus utama pada pengembangan Pelabuhan Manggar dan Pelabuhan

Dendang. Saat ini Pelabuhan Manggar diproyeksikan untuk membuka rute strategis menuju Ketapang dan Jakarta. Namun, rencana pengerukan untuk mengatasi kendala pendangkalan alur pelayaran masih belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Di sisi lain, prospek konektivitas semakin kuat seiring dengan adanya rencana hibah kapal cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Semarang) yang diharapkan dapat mempercepat mobilitas warga.

Sejalan dengan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan angkutan penyeberangan, pengoperasian kapal Roro (Roll-on/Roll-off) menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran distribusi logistik daerah. Sementara itu, untuk memperpendek jarak distribusi menuju Jakarta, pengembangan Pelabuhan Dendang kini terus dikejar. Saat ini, progres pembangunan sedang berada pada tahap pemenuhan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), yang akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Amdal pada tahun 2026 sebagai syarat utama dimulainya konstruksi fisik. Sinergi pengembangan kedua pelabuhan ini diharapkan mampu menghidupkan jalur logistik dan transportasi laut yang lebih efisien bagi masyarakat Belitung Timur.

2.2.4.1.15 [PU.15] Nyaman Infrastruktur

Program Unggulan PU.15 Infrastruktur Nyaman diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan layanan publik di desa sebagai fondasi utama dalam mendukung kualitas hidup masyarakat dan aktivitas sosial ekonomi. Pada Tahun 2025, capaian program ini menunjukkan hasil yang sangat baik, khususnya pada indikator akses terhadap layanan dasar.

Secara keseluruhan, capaian Program Unggulan Infrastruktur Nyaman pada Tahun 2025 menunjukkan arah pembangunan yang positif, dengan fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada masyarakat. Penyempurnaan data indikator jalan kabupaten ke depan akan semakin memperkuat evaluasi kinerja program serta menjadi dasar penajaman kebijakan dan prioritas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2. 143 Capaian Indikator Program Unggulan Infrastruktur Nyaman

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.15	Infrastruktur Nyaman	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan layanan publik di desa.	Persentase desa yang memiliki akses terhadap air bersih layak	97	97,43	100,00%
			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	79,55		
	Rata-Rata Capaian					100,00%

1. Persentase desa yang memiliki akses terhadap air bersih layak
   Ditargetkan 97% desa yang memiliki akses terhadap air besih layak dan terealisasi sebesar 97,43%. Dengan target 38 desa dari 39 desa yang ada di Kab Belitung Timur. 1 desa yang belum di mendapatkan akses air layak yaitu Desa Buku Limau. Desa Buku Limau merupakan wilayah yang dikelilingi laut sehingga tidak memiliki sumber air baku alami sehingga sulit untuk membuat sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
2. Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik
   Indikator Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2025 belum dapat disajikan capaian kinerjanya secara definitif, karena data masih dalam proses penetapan berdasarkan hasil survei kondisi jalan Tahun 2025. Saat ini, pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis masih melakukan pengolahan, verifikasi, dan validasi data hasil survei untuk memastikan akurasi dan keterpaduan informasi kondisi jalan kabupaten.
   Data capaian indikator tersebut direncanakan baru dapat disajikan pada bulan Januari 2026, setelah seluruh tahapan penetapan hasil survei diselesaikan. Hasil ini nantinya akan menjadi dasar penting dalam pengukuran kinerja pembangunan infrastruktur jalan, evaluasi capaian program, serta perumusan kebijakan dan penentuan prioritas peningkatan serta pemeliharaan jalan kabupaten secara lebih terarah dan berkelanjutan.

2.2.4.1.16 [PU.16] Nyaman Lestari

Program Unggulan Nyaman Lestari Berfokus pada aspek lingkungan hidup. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan melalui penghijauan (reboisasi) di lokasi pasca tambang timah, serta memperketat pengawasan terhadap pabrik atau perusahaan di Belitung Timur untuk memastikan alokasi program pelestarian lingkungan. Selain itu, program ini memberikan perhatian khusus pada masalah sampah dengan menyediakan sistem pengelolaan yang baik.

Tabel 2. 144 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman Lestari

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.16	Nyaman Lestari	Meningkatnya kualitas lingkungan di wilayah pasca tambang melalui reklamasi atau penghijauan	Indeks Kualitas Lahan	62,7		
		Terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di wilayah Belitung Timur	Persentase pengelolaan sampah	100	56,8	56,80%
	Rata-Rata Capaian					56,80%

1. Indeks Kualitas Lahan

   Indikator Indeks Kualitas Lahan pada Program Unggulan PU.16 Nyaman Lestari Tahun 2025 belum dapat disajikan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan data Indeks Kualitas Lahan masih dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penetapan oleh instansi terkait, sehingga belum tersedia data final yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran capaian indikator pada tahun berjalan.

   Ketersediaan data Indeks Kualitas Lahan menjadi sangat penting untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan, khususnya di wilayah pasca tambang yang menjadi sasaran intervensi melalui kegiatan reklamasi dan penghijauan. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong percepatan penyelesaian data tersebut agar ke depan pengukuran kinerja Program Unggulan Nyaman Lestari dapat dilakukan secara lebih akurat dan menjadi dasar perencanaan serta evaluasi kebijakan peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

   Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur memiliki kewenangan yang terbatas dalam pengelolaan dan pengendalian kualitas lahan. Beberapa aspek strategis, seperti penetapan kebijakan kehutanan, pengelolaan kawasan hutan, serta pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pertambangan tertentu, berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sebagai contoh kewenangan pemulihan dilahan Hutan Lindung ada pada kewenangan Kementrian Kehutanan, serta kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai) dibawah kewenangan Badan Pengelola DAS Baturusa dan Cerucuk, Hutan Produksi berada pada kewenangan KPHP Gunung Duren,serta Kawasan Reklamas dikawasan Pertambangan berada dibawah penilaian dan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung dan Kementrian ESDM melalui fungsi pengawasan Inspektur Tambang. Kondisi ini membatasi ruang intervensi langsung pemerintah kabupaten dalam upaya peningkatan Indeks Kualitas Lahan, namun tetap melakukan pemulihan lahan terbuka terutama eks tambang dan sepadan pantai diluar Kawasan Hutan dan kewenangan lembaga lainnya, dengan mengembangkan Demonstrasi Plot (Demplot) Revegetasi Lahan Kritis eks tambang yang berada di Desa Lenggang dengan luasan 10 Ha mencakup lahan revegetasi dan Utilitas pembenihan dan Pembibitan tanaman lokal dan Pioneer yang dimulai sejak tahun 2011 silam.

   Dinas Lingkungan Hidup tetap berupaya melakukan langkah-langkah strategis yang berada dalam ruang kewenangan kabupaten. Salah satu upaya melalui INOVASI yang dilakukan melalui pendampingan pengendalian air pada lahan kritis yang dikembangkan secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat, seperti Kelompok Tani (Poktan) dan/atau Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).

Pendampingan ini bertujuan untuk memperbaiki fungsi hidrologis lahan, mengurangi degradasi lebih lanjut, serta mendukung pemulihan kualitas lahan secara bertahap. Selain itu juga bersama kelompok peduli lingkungan hidup seperti Selatan Puake dan Kelompok Sayang Kampong di Desa Dendang sekitarnya dan dipantai Tambak Sukamandi, yang aktif melakukan penanaman dan pembibitan Bakau dikawasan Mangrove yang kritis disepadan pantai.

Kegiatan pendampingan tersebut telah dilaksanakan, antara lain, di lokasi Aik Apau, Desa Dendang, Kecamatan Dendang, yang merupakan kawasan lahan kritis bekas tambang. Melalui pengelolaan air yang lebih baik dan penerapan praktik pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, lahan yang sebelumnya tidak produktif mulai diarahkan menjadi lahan produktif berbasis ketahanan pangan lokal desa.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi percepatan restorasi lahan kritis eks tambang dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Selain berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan kelompok tani dan perikanan, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan Indeks Kualitas Lahan, meskipun dilakukan dalam keterbatasan kewenangan formal pemerintah kabupaten.

Dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif ini, DLH Kabupaten Belitung Timur berupaya menjembatani keterbatasan kewenangan melalui penguatan peran masyarakat, sehingga peningkatan kualitas lahan dapat tetap berjalan secara berkelanjutan dan mendukung tujuan pembangunan lingkungan hidup daerah.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas lahan dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup memiliki demonstration plot (demplot) yang berfungsi sebagai sarana percontohan penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan, khususnya pada lahan kritis dan lahan terdegradasi.

Demplot DLH berperan sebagai media pembelajaran dan transfer pengetahuan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan kualitas lahan. Melalui demplot ini, DLH menyediakan bibit tanaman yang sesuai dengan karakteristik lahan setempat serta melaksanakan kegiatan penanaman dan penghijauan pada lahan kritis, termasuk lahan bekas tambang, dengan pendekatan konservasi tanah dan air.

Secara fungsional, demplot DLH memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan struktur dan kesuburan tanah, peningkatan tutupan vegetasi, serta pengendalian erosi dan degradasi lahan. Dampak tersebut secara bertahap mendukung peningkatan kualitas lahan dan menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Belitung Timur.

Melalui keberadaan demplot ini, DLH Kabupaten Belitung Timur berupaya mengoptimalkan peran fasilitatif dan pembinaan dalam keterbatasan kewenangan yang dimiliki, sehingga upaya peningkatan kualitas lahan tetap dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

2. Persentase pengelolaan sampah

   Pada tahun 2025 capaian pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala sehingga realisasi sampai dengan November berada pada 56,80% sampah tertangani dan 0,02% sampah dikurangi.

   Kendala utama yang dihadapi adalah pertumbuhan timbulan sampah yang meningkat pesat, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat. Kondisi ini menyebabkan beban layanan pengangkutan dan pengolahan sampah semakin besar, sementara kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas.

   Selain itu, terdapat potensi peningkatan timbulan sampah organik, khususnya yang berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sampah organik ini berpotensi menjadi masalah lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik, namun di sisi lain juga menjadi peluang untuk dikembangkan melalui strategi pengolahan sampah berbasis pengomposan, budidaya maggot, atau pengolahan organik lainnya guna mengurangi beban sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

   Dalam rangka meningkatkan pengolahan sampah pada tahap akhir, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berencana menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait pengembangan teknologi pengolahan sampah, termasuk opsi penggunaan insinerator., kerja sama ini masih berada pada tahap kajian dan perencanaan teknis, sehingga implementasi penuh direncanakan akan dilanjutkan dan dimatangkan pada tahun 2026 dan 2027 mendatang.

   Keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada dukungan pemerintah desa, khususnya melalui alokasi anggaran dalam APBDes. Dukungan tersebut diarahkan untuk penguatan pengelolaan sampah di tingkat desa, seperti pengadaan sarana pengolahan, operasional bank sampah, serta kegiatan pengurangan sampah berbasis masyarakat.

   Secara keseluruhan, pelayanan pengelolaan sampah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 masih memerlukan penguatan dari sisi kapasitas layanan, inovasi pengolahan, serta kolaborasi lintas sektor. Hal ini menjadi dasar penyusunan rencana peningkatan kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2026, dengan fokus pada optimalisasi pengurangan sampah organik, percepatan teknologi pengolahan akhir, serta peningkatan peran pemerintah desa dan masyarakat.

2.2.4.1.17 [PU.17] Nyaman Air Bersih

Program Unggulan Nyaman Air Bersih (PU.17) menunjukkan capaian yang sangat positif. Indikator kinerja utama program ini, yaitu "Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan," berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja tercatat mencapai 41,72%, melampaui target tahunan sebesar 40,57% (dengan capaian kinerja 100%). Keberhasilan melampaui target ini mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program dalam memperluas cakupan layanan air bersih kepada masyarakat.

Faktor pendorong utama keberhasilan ini adalah adanya intervensi strategis berupa penambahan infrastruktur layanan. Secara spesifik, terdapat penambahan 150 Sambungan Rumah (SR) Baru pada tahun berjalan. Penambahan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan rasio layanan, sehingga lebih banyak rumah tangga yang kini dapat menikmati akses air minum yang layak dan aman.

Dari sisi pendanaan, pencapaian output ini didukung oleh optimalisasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum Tahun 2025. Dukungan anggaran ini terbukti efektif dalam memfasilitasi pembangunan fisik jaringan perpipaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih secara berkelanjutan.

Tabel 2. 145 Capaian Indikator Program Unggulan Nyaman Air Bersih

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.17	Nyaman Air Bersih	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	40,57	41,75	100,00%

2.2.4.2 PROGRAM ANDALAN

2.2.4.2.1 [PA.01] Gratis, sepatu, tas dan alat tulis untuk anak sekolah

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa terkecuali. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat peserta didik yang mengalami keterbatasan ekonomi, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kelancaran proses pembelajaran dan menurunkan motivasi belajar peserta didik.

Sebagai upaya untuk mendukung pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur khususnya Dinas Pendidikan melaksanakan program Bantuan Perlengkapan Peserta Didik. Program ini diharapkan dapat membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan layak. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak manfaatnya secara langsung, yaitu antara lain:

1. Meringankan beban ekonomi orang tua/wali peserta didik dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.
2. Meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
3. Mendukung kelancaran proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
4. Mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak bagi seluruh peserta didik.

Tabel 2. 146 Capaian Indikator Program Andalan Gratis, Sepatu, Tas dan Alat Tulis Untuk Anak Sekolah

KODE	PROGRAM ANDALAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PA.01	Gratis Seragam, Sepatu, Tas, dan Alat Tulis untuk Anak Sekolah	Meningkatnya kualitas pendidikan	Jumlah anak penerima bantuan	500	743	100,00%

Realisasi fisik penyaluran bantuan mencakup distribusi paket perlengkapan sekolah yang terdiri dari seragam, sepatu, tas, ikat pinggang, dan alat tulis. Pada jenjang SD, dialokasikan sebanyak 173 paket, di mana sisa 20 paket dijadwalkan penyerahannya pada bulan Desember khusus untuk wilayah Kecamatan Simpang Pesak dan Dendang. Untuk jenjang SMP, bantuan diberikan kepada 160 siswa terpilih setelah melalui proses verifikasi ketat yang menyandingkan 600 usulan sekolah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) guna memastikan validitas status keluarga kurang mampu. Sementara itu, pada sektor pendidikan nonformal, intervensi pemerintah menjangkau 410 peserta didik melalui pemberian sepatu, tas, dan alat tulis yang komposisinya disesuaikan dengan tingkat kehadiran dan kebutuhan siswa.

2.2.4.2.2 [PA.02] 1.000 (Seribu) Beasiswa Kuliah Sarjana (S1)

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah telah menetapkan target penerima beasiswa sebanyak 75 orang dengan pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,- yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025. Pelaksanaan program beasiswa tersebut telah berjalan dengan baik, dengan capaian kinerja dan realisasi keuangan mencapai 100 persen.

Penerima beasiswa merupakan masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas pada kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 5 sebagaimana tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penetapan penerima dilakukan secara selektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk pengendalian dan penjaminan kualitas pelaksanaan program, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh. Selanjutnya, mahasiswa penerima beasiswa ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Bupati Belitung Timur.

Tabel 2. 147 Capaian Indikator Program Andalan 1.000 (Seribu) Beasiswa Kuliah Sarjana (S1)

KODE	PROGRAM ANDALAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.07-PA.02	1.000 (Seribu) Beasiswa Kuliah Sarjana (S1)	Meningkatnya kualitas pendidikan	Jumlah penerima beasiswa S1	75	75	100,00%

2.2.4.2.3 [PA.03] Pelayanan dan Penggunaan BPJS Secara Gratis Bagi Masyarakat yang Belum Terdaftar

Program Andalan Pelayanan dan Penggunaan BPJS Secara Gratis Bagi Masyarakat yang Belum Terdaftar (Kode PU.08-PA.03) pada tahun 2025 berhasil terlaksana dengan sangat baik, dengan capaian kinerja mencapai 100%. Berdasarkan target yang telah ditetapkan sebesar 45.761 jiwa, realisasi fisik di lapangan mencatatkan angka yang melampaui target, yakni mencapai 46.651 jiwa per akhir periode pelaporan. Hal ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap jaminan pelayanan kesehatan telah terpenuhi secara optimal.

Secara rinci, total realisasi kepesertaan sebanyak 46.651 jiwa per tanggal 1 Desember tersebut merupakan hasil kolaborasi pembiayaan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Komposisi pembiayaan terdiri dari

35.111 jiwa yang dibiayai melalui APBD Kabupaten dan 11.540 jiwa yang dibiayai melalui bantuan APBD Provinsi. Sinergi anggaran ini menjadi kunci dalam memastikan cakupan kesehatan semesta (UHC) tetap terjaga bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dinamika positif dalam pengelolaan kepesertaan terjadi pada bulan Oktober, di mana Pemerintah Provinsi memberikan tambahan kuota kepesertaan (PBI) untuk Kabupaten Belitung Timur sebesar 5.000 jiwa. Menindaklanjuti penambahan tersebut, Dinas Kesehatan mengambil langkah strategis dengan mengusulkan pemindahan atau pengalihan sebagian kepesertaan yang sebelumnya menjadi beban kabupaten ke dalam kuota provinsi. Langkah optimalisasi ini memastikan bahwa seluruh kuota yang tersedia terserap maksimal, sehingga total akumulasi kepesertaan tetap terjaga di angka 46.651 jiwa pada akhir tahun.

Tabel 2. 148 Capaian Indikator Program Andalan Pelayanan dan Penggunaan BPJS Secara Gratis Bagi Masyarakat yang Belum Terdaftar

KODE	PROGRAM ANDALAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.08-PA.03	Pelayanan dan Penggunaan BPJS Secara Gratis Bagi Masyarakat yang Belum Terdaftar	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah kepesertaan/tahun	45.761	46.651	100,00%

Selain sinergi anggaran dengan Pemerintah Provinsi untuk pembiayaan iuran kepesertaan (PBI), Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Kesehatan meluncurkan Program BEJASE BELTIM, yang merupakan akronim dari “Bersama Jaminan Kesehatan Semesta Masyarakat Belitung Timur”.

Program BEJASE merupakan skema cost sharing pembiayaan iuran alih segmen kepesertaan dari PBPU Mandiri menunggak ke PBPU Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta bagi masyarakat miskin atau tidak mampu di Kabupaten Belitung Timur. Pada Tahun 2025, sasaran program difokuskan pada peserta PBPU Mandiri Kelas III yang termasuk dalam Desil 1 sampai dengan Desil 5.

Pelaksanaan Program BEJASE BELTIM dilaksanakan pada periode September sampai dengan Desember 2025, dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 983 jiwa. Total realisasi pembiayaan cost sharing yang dibayarkan sebesar Rp39.320.000.

2.2.4.2.4 [PA.04] Bantuan Kebutuhan Hidup Senilai 2 Juta Rupiah Per KK Setiap Tahun

Program Andalan Bantuan Kebutuhan Hidup Senilai 2 Juta Rupiah Per KK Setiap Tahun pada Tahun Anggaran 2025 berhasil mencapai target kinerja yang sempurna dengan persentase capaian 100%. Berdasarkan indikator kinerja "Jumlah KK penerima bantuan", target yang ditetapkan sebanyak 17 Kepala Keluarga (KK) telah berhasil direalisasikan seluruhnya kepada 17 KK penerima manfaat. Program ini bertujuan untuk menurunkan jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran.

Secara teknis pelaksanaan, realisasi bantuan ini dilakukan pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 dengan dukungan anggaran sebesar Rp 34.000.000,-. Penetapan kuota penerima sebanyak 17 KK didasarkan pada legalitas yang kuat, yakni merujuk pada Surat Keputusan Bupati Nomor: HK.00.03-577 TAHUN 2024 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024. Hal ini memastikan bahwa bantuan dialokasikan secara spesifik kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi pemerintah daerah.

Untuk menjamin akurasi dan ketepatan sasaran (targeting), proses penentuan penerima manfaat dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi berjenjang. Data sasaran dari SK Bupati tersebut telah dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) untuk memastikan pemenuhan kriteria masyarakat miskin. Selain itu, validasi final dilakukan melalui sistem SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation). Dengan mekanisme ini, anggaran yang tersedia dapat disalurkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran kepada warga yang benar-benar terdata dan terverifikasi sebagai prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Tabel 2. 149 Capaian Indikator Program Andalan Bantuan Kebutuhan Hidup Senilai 2 Juta Rupiah Per KK Setiap Tahun

KODE	PROGRAM ANDALAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.09-PA.04	Bantuan Kebutuhan Hidup Senilai 2 Juta Rupiah Per KK Setiap Tahun	Menurunnya jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran	Jumlah KK penerima bantuan	17	17	100,00%

2.2.4.2.5 [PA.05] Insentif Umroh (Gratis) Nyaman Beltim Berkah

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Program Andalan (PA. 5) Insentif Umroh Gratis "Nyaman Beltim Berkah" dengan target perencanaan awal sebanyak 7 (tujuh) orang

penerima manfaat. Salah satu keunggulan strategis dari program ini adalah skema pembiayaannya yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan bersumber sepenuhnya dari kolaborasi lintas sektor melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam realisasinya, pelaksanaan program mencatatkan capaian yang melampaui target awal. Berdasarkan ketersediaan dana dan kesepakatan dalam Forum CSR, jumlah penerima manfaat yang diberangkatkan bertambah menjadi total 8 (delapan) orang. Sebaran penerima manfaat ini merepresentasikan pemerataan wilayah di 7 (tujuh) kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur. Secara rinci, setiap kecamatan mendapatkan alokasi masing-masing 1 (satu) orang perwakilan, dengan pengecualian khusus bagi Kecamatan Kelapa Kampit yang mendapatkan kuota sebanyak 2 (dua) orang.

Untuk memastikan kelancaran dan kekhusyukan ibadah, pemerintah daerah bersama mitra CSR menjamin seluruh komponen layanan dalam satu paket umroh yang komprehensif. Fasilitas yang diterima oleh masing-masing jemaah meliputi biaya transportasi domestik dari Belitung menuju Jakarta (Pergi-Pulang/PP), transportasi internasional dari Jakarta menuju Arab Saudi (PP), serta biaya kelengkapan administrasi dan kesehatan yang mencakup pembuatan paspor serta imunisasi meningitis dan polio. Pelaksanaan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan apresiasi dan kesejahteraan rohani bagi masyarakat melalui sinergi yang efektif dengan dunia usaha.

Tabel 2. 150 Capaian Indikator Program Andalan Insentif Umroh (Gratis) Nyaman Beltim Berkah

KODE	PROGRAM ANDALAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.09-PA.05	Insentif Umroh (Gratis) Nyaman Beltim Berkah	Menurunnya jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran	Jumlah penerima insentif	7	8	100,00%
	Rata-Rata Capaian					100,00%

2.2.4.2.6 [PA.06] Bantuan Tunai Majelis Taklim dan Remaja Masjid

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus berupaya memperkuat peran lembaga keagamaan melalui pelaksanaan Program Andalan (PA. 6) Bantuan Tunai Majelis Taklim dan Remaja Masjid. Pada perencanaan Tahun Anggaran 2025, program ini menetapkan indikator kinerja berupa pemberian fasilitas bantuan kepada 39 kelompok Majelis Taklim dengan dukungan pagu anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 45.000.000,-.

Dalam tahap implementasi dan realisasi, penyaluran bantuan dilaksanakan menggunakan mekanisme dana hibah. Berdasarkan data realisasi, seluruh alokasi anggaran sebesar Rp 45.000.000,- telah terserap sepenuhnya kepada 1 (satu) lembaga penerima utama, yaitu Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD BKMT) Kabupaten Belitung Timur.

Penyaluran yang terpusat melalui PD BKMT ini merupakan strategi pengelolaan bantuan hibah daerah, di mana PD BKMT bertindak sebagai organisasi induk yang menaungi dan mengelola kegiatan pembinaan bagi majelis taklim di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Dengan demikian, meskipun secara administratif tercatat satu penerima hibah, dana tersebut didayagunakan untuk mendukung operasional dan keberlanjutan aktivitas keagamaan sesuai dengan sasaran program.

Tabel 2. 151 Capaian Indikator Program Andalan Bantuan Tunai Majelis Taklim dan Remaja Masjid

KODE	PROGRAM ANDALAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.09-PA.06	Bantuan Tunai Majelis Taklim dan Remaja Masjid	Menurunnya jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran	Jumlah penerima bantuan	39	1	2,56%

2.2.4.2.7 [PA.07] Gratis Bantuan Bibit Sawit Unggul dan Pupuk

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja Program Unggulan Petani dan Nelayan Nyaman dengan fokus Program Andalan Gratis Bantuan Bibit Sawit Unggul dan Pupuk (Kode PU.10-PA.07) belum terlaksana. Berdasarkan data indikator kinerja jumlah bibit sawit dan pupuk yang disalurkan, realisasi fisik tercatat nol, selaras dengan penetapan target perencanaan tahun 2025 yang juga sebesar nol. Kondisi belum adanya capaian kinerja ini disebabkan oleh belum tersedianya alokasi pagu anggaran pada tahun berjalan, sehingga kegiatan operasional pendistribusian bantuan kepada sasaran strategis belum dapat direalisasikan. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah memastikan keberlanjutan inisiatif ini dengan mengalokasikan anggaran pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2026, di

mana realisasi kegiatan direncanakan akan mulai berjalan efektif pada tahun tersebut sesuai dengan target dan sasaran peningkatan kesejahteraan petani yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 152 Capaian Indikator Program Andalan Gratis Bantuan Bibit Sawit Unggul dan Pupuk

KODE	PROGRAM ANDALAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.10-PA.07	Gratis Bantuan Bibit Sawit Unggul dan Pupuk	Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan	Jumlah bibit sawit yang disalurkan (batang)	0	0	
			Jumlah pupuk yang disalurkan (kg)	0	0	
	Rata-Rata Capaian					

2.2.4.2.8 [PA.08] Gratis Bantuan Perahu, Perawatan Perahu, dan Sembako Nelayan Musim Angin Kencang

Pada Program Unggulan Gratis Bantuan Perahu, Perawatan Perahu, dan Sembako Nelayan Musim Angin Kencang, Dinas perikanan melalui Subkegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap memberikan bantuan perahu sebanyak 5 Unit dan bahan pembuatan perahu sebanyak 10 Unit. Perahu ini diberikan kepada KUB Bintang Laut Timur Desa Lalang, KUB Olifier Jaya Mandiri Desa Lalang, KUB Pulau Tang Desa Burung Mandi, KUB Bakau Jelutor Desa Sukamandi, dan KUB Mengguru Jaya Desa Cendil. Perahu yang diberikan merupakan perahu <3GT disertai mesin ketinting 14 PK.

Bahan Pembuatan Perahu adalah bahan yang diberikan untuk membuat sebuah perahu dari Fiberglass. Keterampilan Pembuatan perahu ini merupakan hasil dari pelatihan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan kepada nelayan Kabupaten Belitung Timur. Adapun bahan-bahan yang diberikan antara lain Gelcoat, Katalis, Mat, Pewarna, Resin, dan Roving. Adapun Kelompok Nelayan yang menerima bantuan bahan pembuatan perahu adalah KUB Sederhana Desa Lalang, KUB Pengempang Nyiur Melambai Desa Lalang, KUB Mirang Mudong Desa Padang, KUB Maju Bersama Desa Aik Kelik, KUB Sinar Laut Desa Mengkubang, KUB Harapan Makmur Desa Tanjung Batu Itam, KUB Harapan Baru Desa Tanjung Batu Itam, KUB Camar Laut Desa Dendang, KUB Murah Rezeki Desa Buding, dan KUB Pering Sehati Desa Mayang.

Sembako Nelayan Musim Angin Kencang telah diterima nelayan dalam acara penyerahan simbolis bantuan kepada pelaku usaha perikanan Tahun 2025 di Pantai Burung Mandi, Kecamatan Damar sebanyak 44 karung beras oleh CSR Yamaha dan 111 Karung beras diserahkan oleh Bapak Bupati Kamarudin Muten. Bantuan ini juga diberikan pada acara dialog audiensi bersama masyarakat nelayan di Pantai Serdang, Desa Baru Kecamatan Manggar berupa 110 karung beras kepada nelayan. Hal ini menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap nelayan yang mengalami kesulitan dikarenakan tidak bisa melaut karena kondisi cuaca buruk dan angin kencang, dengan bermitra dengan perusahaan melalui program CSR, maupun bantuan langsung dari Bupati, maka bantuan ini dapat terealisasi.

Tabel 2. 153 Capaian Indikator Program Andalan Gratis Bantuan Gratis Bantuan Perahu, Perawatan Perahu, dan Sembako Nelayan Musim Angin Kencang

KODE	PROGRAM ANDALAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.09-PA.08	Bantuan Sembako bagi Nelayan pada Musim Kencang	Menurunnya jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran	Jumlah nelayan penerima bantuan sembako	0	265	100,00%
PU.10-PA.08	*Gratis Bantuan Perahu, Perawatan Perahu, dan Sembako Nelayan Musim Angin Kencang*	Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan	Jumlah KUB penerima *bantuan perahu*	15	15	100,00%
			Jumlah perahu *fiber yang menerima perawatan* - bantuan	0	10	100,00 %
			Jumlah perahu *kayu* yang menerima perawatan	0	0	
	Rata-Rata Capaian					

2.2.4.2.9 [PA.09] Bantuan Modal 2 s/d 50 Juta Rupiah untuk Membuka Usaha dan Pengembangan Usaha (UMKM)

Realisasi Program Andalan Bantuan Modal 2 s.d 50 Juta Rupiah untuk Membuka Usaha dan Pengembangan Usaha (UMKM) pada Tahun 2025 belum menetapkan penerima bantuan, sejalan dengan strategi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Belitung Timur yang memproyeksikan pelaksanaan fisik program ini pada Tahun Anggaran 2026. Penundaan ini bertujuan untuk mematangkan persiapan intervensi melalui Program Pengembangan UMKM dan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro yang berorientasi pada peningkatan skala usaha, dengan fokus bantuan berupa alat pendukung produksi, pemasaran, dan digitalisasi yang mencakup aspek produksi, pengolahan, SDM, serta desain dan teknologi. Sebagai langkah persiapan, pemerintah daerah juga tengah mengevaluasi kriteria dalam

Peraturan Bupati agar tidak hanya menyasar UMKM existing, tetapi juga secara inklusif mengakomodasi pelaku usaha baru dari kategori keluarga miskin serta mengarahkan output usaha untuk mendukung rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.

Tabel 2. 154 Capaian Indikator Program Andalan Bantuan Modal 2 s/d 50 Juta Rupiah untuk Membuka Usaha dan Pengembangan Usaha (UMKM)

KODE	PROGRAM ANDALAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PU.12-PA.09	Bantuan Modal 2 s/d 50 Juta Rupiah untuk Membuka Usaha dan Pengembangan Usaha (UMKM)	Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM lokal yang aktif dan berkelanjutan	Jumlah UMKM penerima	10	0	0,00%

2.2.4.2.10 [PA.10] 10.000 (Sepuluh Ribu) Lapangan Kerja Tersedia

Progres pengembangan Kawasan Industri Aik Kelik (KIAK) saat ini telah mencapai tahap penerbitan izin, apabila seluruh perizinan dan izin usaha telah lengkap dan terpenuhi, maka proses pembangunan Kawasan Industri Aik Kelik dapat segera dilaksanakan, yang pada tahap konstruksi dan pengembangannya akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Selanjutnya Sampai dengan 30 November 2025, berdasarkan data OSS, ketersediaan data lapangan kerja masih bersumber dari jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit, dengan asumsi bahwa setiap NIB mencerminkan penciptaan rata-rata dua lapangan kerja. Berdasarkan data tersebut, jumlah NIB yang terbit selama Tahun 2025 tercatat sebanyak 1.361 NIB, sehingga secara estimatif berkontribusi terhadap penambahan lapangan kerja di Kabupaten Belitung Timur yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.507 orang. Pendekatan ini digunakan sebagai indikator sementara dalam mengukur dinamika penciptaan lapangan kerja, seiring dengan keterbatasan data riil ketenagakerjaan yang tersedia secara periodik. Tingginya jumlah pelaku usaha yang mengurus NIB tersebut didukung oleh intervensi dari OPD dalam melaksanakan kegiatan KIK MERAN (Keliling Kampung Melayani Perizinan).

Tabel 2. 155 Capaian Indikator Program Andalan 10.000 (Sepuluh Ribu) Lapangan Kerja Tersedia

KODE	PROGRAM ANDALAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PA.10	10.000 (Sepuluh Ribu) Lapangan Kerja Tersedia	Tersedianya lapangan kerja baru	jumlah lapangan kerja tersedia	-	2.707	

Kemudian berdasarkan data lowongan kerja sektor formal yang terhimpun selama Tahun 2025, tercatat sebanyak 200 (dua ratus) kebutuhan

tenaga kerja yang berasal dari berbagai perusahaan dan instansi di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Lowongan tersebut tersebar pada beragam sektor lapangan usaha, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran; aktivitas keuangan dan asuransi; pendidikan; kesehatan dan aktivitas sosial; industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta aktivitas jasa lainnya. Jenis jabatan yang dibutuhkan cukup beragam, mulai dari tenaga operasional, administrasi, tenaga pemasaran, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis dan pendukung, dengan persyaratan tingkat pendidikan yang bervariasi dari SMP/sederajat hingga pendidikan tinggi (D3 dan S1). Data ini menunjukkan adanya dinamika kebutuhan tenaga kerja formal yang relatif beragam sepanjang tahun 2025, sekaligus mencerminkan peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

2.2.4.2.11 [PA.11] Renovasi 1.000 (Seribu) Rumah Warga Tak Layak

Program strategis ini dirancang sebagai solusi konkret untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menekan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara masif di seluruh wilayah kabupaten. Dengan mengintegrasikan skema pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas bangunan, program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik hunian, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat, aman, dan bermartabat bagi setiap keluarga.

Tabel 2. 156 Capaian Indikator Program Andalan Renovasi 10.000 (Sepuluh Ribu) Rumah Warga Tak Layak

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PA.11	*Renovasi 1.000 (Seribu) Rumah Warga Tak Layak*	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan layanan publik di desa.	Jumlah RTLH direnovasi	67	64	95.52%

Implementasi program ini mengedepankan prinsip ketepatan sasaran dengan memanfaatkan basis data validasi yang ketat agar bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Melalui sinergi antara anggaran daerah, dukungan pusat, dan kolaborasi berbagai sektor, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur optimis bahwa pemenuhan target 10.000 unit ini akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pada akhirnya hunian yang layak diharapkan mampu memberikan dampak domino positif terhadap peningkatan produktivitas ekonomi serta kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh warga Belitung Timur.

Target renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Anggaran Perubahan 2025 ditetapkan sebanyak 67 unit. Namun, realisasi fisik hanya mencapai 64 unit, yang meliputi 28 unit pembangunan rumah baru dan 36 unit peningkatan kualitas. Selisih 3 unit tersebut disebabkan oleh satu calon penerima yang meninggal dunia serta dua calon lainnya yang tidak mampu melengkapi berkas validasi DTKS hingga batas waktu yang ditentukan.

2.3 TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERDASARKAN RKPD TAHUN 2026

Dalam RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 terdapat 280 usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah terpetakan. Usulan tersebut diakomodir berdasarkan hasil verifikasi yang telah sesuai dengan agenda dan prioritas daerah pada tahun berkenaan. Adapun daftar pokok-pokok pikiran DPRD secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 157 Rangkuman Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berdasarkan Prioritas RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026

Prioritas RKPD 2026	Perangkat Daerah Pengampu	Pengusul	Jumlah Usulan
[1] Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	1
		Iwan Rahmawan	1
		KAMRI	1
		Yeri Candra Pratama	1
	Dinas Kesehatan	Agus Firmansyah	1
		Aprialdi Binsar Marudut Simbolon	1
		Candra Aryaputra	3
		DWI NANDA PUTRA	1
		JIMMY TJONG	1
		KAMRI	1
		Ramlan	1
		TJONG JUNG MIN	1
		Yeri Candra Pratama	2
		Zulchaidir	1
	Dinas Pendidikan	AKHIRUDDIN, A.Md	3
		Candra Aryaputra	1
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Agus Firmansyah	1
[2] Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Dinas Perikanan	Agus Firmansyah	1
		AKHIRUDDIN, A.Md	2
		Candra Aryaputra	3
		HARMINTON	2
		Heru Indratno	1
		ISMANSYAH, S.IP	1
		KAMRI	1
		Oscar Habib	3
		RUDIANSYAH	1
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Agus Firmansyah	1
		Candra Aryaputra	1
		Yeri Candra Pratama	2
	Dinas Pertanian dan Pangan	Agus Firmansyah	1
		AKHIRUDDIN, A.Md	3
		Aprialdi Binsar Marudut Simbolon	1
		Candra Aryaputra	4
		Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	1
		Endriansyah	9
		FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	1
		HAIRIL ANWAR	3
		HARMINTON	1
		Heru Indratno	6

Prioritas RKPD 2026	Perangkat Daerah Pengampu	Pengusul	Jumlah Usulan
		ISMANSYAH, S.IP	5
		Iwan Rahmawan	5
		KAMRI	6
		Oscar Habib	4
		Ramlan	1
		RUDIANSYAH	3
		SARDIDI, SE	1
		SUBANDRI	4
		SULADI	1
		TJONG JUNG MIN	2
		Yeri Candra Pratama	2
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Aprialdi Binsar Marudut Simbolon	1
		Candra Aryaputra	1
		Endriansyah	1
		Zulchaidir	1
[3] Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	AKHIRUDDIN, A.Md	7
		Candra Aryaputra	5
		Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	1
		Endriansyah	2
		FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	2
		HARMINTON	1
		ISMANSYAH, S.IP	4
		Iwan Rahmawan	5
		JIMMY TJONG	1
		SARDIDI, SE	1
		SULADI	6
		TJONG JUNG MIN	1
		Yeri Candra Pratama	1
	Dinas Perhubungan	AKHIRUDDIN, A.Md	24
		Aprialdi Binsar Marudut Simbolon	1
		Candra Aryaputra	2
		Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	1
		DWI NANDA PUTRA	1
		Endriansyah	4
		FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	2
		HAIRIL ANWAR	2
		HARMINTON	1
		Heru Indratno	8
		ISMANSYAH, S.IP	4
		Iwan Rahmawan	7
		KAMRI	2
		OMAN ANGGARI, SH, MH	5
		Oscar Habib	6
		Ramlan	1
		RUDIANSYAH	3
		SARDIDI, SE	1
		SULADI	8
		TJONG JUNG MIN	1
		Yeri Candra Pratama	4
		Zulchaidir	3
[4] Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber	Dinas Lingkungan Hidup	Agus Firmansyah	1
		AKHIRUDDIN, A.Md	3
		DWI NANDA PUTRA	1
		Endriansyah	1

Prioritas RKPD 2026	Perangkat Daerah Pengampu	Pengusul	Jumlah Usulan
Daya Secara Berkelanjutan		HARMINTON	2
		Heru Indratno	6
		Iwan Rahmawan	3
		SULADI	1
[5] Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Satuan Polisi Pamong Praja	SARDIDI, SE	1
		Yeri Candra Pratama	1
	Sekretariat Daerah	Agus Firmansyah	1
		AKHIRUDDIN, A.Md	4
		Candra Aryaputra	1
		Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	1
		FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	2
		HAIRIL ANWAR	4
		HARMINTON	1
		ISMANSYAH, S.IP	1
		JIMMY TJONG	2
		KAMRI	2
		RUDIANSYAH	1
		TJONG JUNG MIN	1
		Yeri Candra Pratama	1
		Zulchaidir	1
Grand Total			**280**

Informasi detail mengenai pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026 beserta perkembangan pelaksanaannya, sebagaimana terangkum dalam tabel Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berdasarkan Prioritas RKPD Kabupaten Belitung Timur, dapat ditelaah lebih lanjut pada lampiran dokumen RKPD ini.

2.4 TELAAH USULAN ASPIRASI BERDASARKAN RKPD TAHUN 2026

Dalam RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 terdapat 216 usulan aspirasi yang telah terpetakan. Usulan tersebut diakomodir berdasarkan hasil verifikasi yang telah sesuai dengan agenda dan prioritas daerah pada tahun berkenaan. Adapun daftar usulan aspirasi secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 158 Rangkuman Usulan Aspirasi Berdasarkan Prioritas RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026

Prioritas RKPD 2026	Perangkat Daerah	Kecamatan	Desa	Profil Usulan		
				Bansos	Hibah	Total Usulan
[1] Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Damar	Sukamandi		1	1
		Manggar	Padang		1	1
	Dinas Pendidikan	Dendang	Nyuruk		1	1
		Gantung	Gantung		1	1
			Selingsing		1	1
		Manggar	Baru		1	1
			Lalang		1	1
		Simpang Renggiang	Lintang		1	1

Prioritas RKPD 2026	Perangkat Daerah	Kecamatan	Desa	Profil Usulan		
				Bansos	Hibah	Total Usulan
[3] Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Damar	Air Kelik	2		2
			Sukamandi	1		1
		Dendang	Balok	11		11
			Jangkang	2		2
			Nyuruk	3		3
		Gantung	Batu Penyu	15		15
			Gantung	13		13
			Jangkar Asam	1		1
			Lenggang	1		1
			Lilangan	1		1
			Limbongan	5		5
			Selingsing	7		7
		Kelapa Kampit	Buding	3		3
			Cendil	3		3
			Mayang	13		13
			Mentawak	11		11
			Pembaharuan	3		3
			Senyubuk	6	1	7
		Manggar	Baru	16		16
			Kelubi	2		2
			Kurnia Jaya	13		13
			Lalang	4		4
			Lalang Jaya	6		6
			Padang	11		11
		Simpang Pesak	Simpang Pesak	13		13
			Tanjung Batu Itam	4		4
			Tanjung Kelumpang	4		4
		Simpang Renggiang	Lintang	9		9
[5] Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Damar	Sukamandi		1	1
		Manggar	Lalang		2	2
			Mekar Jaya		3	3
			Padang		6	6
	Sekretariat Daerah	Dendang	Nyuruk		1	1
		Gantung	Lenggang		2	2
		Kelapa Kampit	Mentawak		2	2
			Pembaharuan		1	1

Prioritas RKPD 2026	Perangkat Daerah	Kecamatan	Desa	Profil Usulan		
				Bansos	Hibah	Total Usulan
		Manggar	Baru		2	2
			Lalang Jaya		1	1
			Padang		2	2
		Simpang Renggiang	Lintang		1	1
Total Usulan				**183**	**33**	**216**

Informasi detail mengenai usulan aspirasi Tahun 2026 beserta perkembangan pelaksanaannya, sebagaimana terangkum dalam tabel Rangkuman Usulan Aspirasi Berdasarkan Prioritas RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun, dapat ditelaah lebih lanjut pada lampiran dokumen RKPD ini.

2.5 RUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.5.1 RUMUSAN PERMASALAHAN

2.5.1.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dipetakan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta hasil evaluasi RKPD Kabupaten Belitung Timur tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi **RKPD Tahun 2025**. Berikut adalah permasalahan daerah berdasarakan urusan pemerintahan yang telah teridentifikasi:

Tabel 2. 159 Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Belum Optimalnya angka rata-rata lama sekolah (Tahun 2025 = 9,03 Tahun)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Belum optimalnya capaian SPM urusan pendidikan (tahun 2024 = 83,48%)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kualitas hasil belajar peserta didik belum optimal (Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi pada tahun 2024 = 30,60%)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	masih tingginya angka prevalensi stunting (tahun 2024 = 17,1%)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Belum optimalnya capaian SPM Urusan kesehatan (tahun 2024 = 90,71%)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Keterbatasan tenaga kesehatan dan distribusinya (Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 = 71%)
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	keterbatasan sumber air baku pada daerah tertentu
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pada sebagian tempat sarana dan prasarana pada jaringan telah mengalami kerusakan dan penurunan fungsi sehingga tidak lagi memadai dalam mendukung pelayanan secara optimal
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana air limbah sanitasi aman
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum optimalnya integrasi sistem drainase lingkungan dengan saluran induk, terjadinya sedimentasi, penyumbatan sampah dan kerusakan konstruksi pada jaringan drainase, Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta memelihara fungsi saluran drainase
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	Masih terdapatnya perumahan dan permukiman kumuh

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
	UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, keterbatasan pengawasan, serta kurangnya integrasi perencanaan sektoral dan data geospasial mutakhir
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Masih tingginya backlog (Kesenjangan Kebutuhan) rumah
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Belum optimalnya capaian SPM urusan Trantibumlinmas (tahun 2025 = 93,35 dengan nilai capaian maksimal/optimal yaitu 100)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Belum optimalnya capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (tahun 2025 = 93,35 dengan nilai capaian maksimal/optimal yaitu 100)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Belum optimalnya capaian Indeks Resiko Bencana (tahun 2025 = 112,36 dengan nilai capaian maksimal/optimal yaitu 80)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur masih diatas rata-rata Provinsi Bangka Belitung (tahun 2025 = 6,69%)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tingginya Garis Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur (Tahun 2025 = Rp. 925.729)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Belum optimalnya capaian SPM Urusan Sosial (tahun 2024 = 88,76%)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Belum Optimalnya Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (capaian tahun 2025 = 76%)
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Angkatan Kerja di Belitung Timur masih didominasi oleh Pendidikan SMA ke bawah
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Masih rendahnya kesempatan kerja pada dunia usaha, dunia industri
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kebutuhan tenaga kerja atau lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kurangnya pelatihan berbasis kompetensi untuk pencari kerja
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Rendahnya Penyerapan atau Penempatan Tenaga Kerja setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Terbatasnya jumlah Instruktur Pelatihan Kerja yang memiliki Sertifikasi Kompetensi sesuai Standar Nasional
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Rendahnya pengetahuan Perusahaan dan Pekerja tentang Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku dan

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
		rendahnya kesadaran Perusahaan dan Pekerja dalam melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Rendahnya kesadaran Perusahaan dan Pekerja untuk membentuk Kelembagaan Hubungan Industrial di Perusahaan
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Belum terpenuhinya Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi seluruh Pekerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Masih rendahnya Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD (capaian 2025 = 0,24%)
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rendahnya minat petani lokal pada usaha sub sektor tanaman pangan
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Belum optimalnya upaya penganekaragaman konsumsi pangan pokok dan penyediaan bahan pangan pokok
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Kurangnya pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi ASN di Dinas Pertanian dan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Masih tingginya sengketa pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum optimalnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Peraturan Daerah untuk Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebagai data pendukung pengambilan kebijakan masih kurang.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Masih kurangnya data dasar dan data dukung untuk pengembangan kegiatan rehabilitasi lahan.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum optimalnya publikasi dan informasi kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat terhadap kebijakan lingkungan hidup.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan aksi, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Masih kurangnya data dasar pendukung untuk perhitungan IKA, IKU, dan IKL sebagai data penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum optimalnya ketaatan pemegang izin lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Masih terbatasnya uji parameter dan ketersediaan alat utama laboratorium yang mampu dilakukan oleh UPT Laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 untuk mendukung optimalisasi Laboratorium Lingkungan.

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	UPT Laboratorium tidak bisa menarik retribusi jasa laboratorium sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah dari jasa laboratorium lingkungan akan berkurang.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum optimalnya cakupan pelayanan pengelolaan persampahan.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Minimnya sumber daya aparatur serta belum terakreditasinya laboratorium sebagai sarana-prasarana penunjang pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan SDA seperti sumberdaya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir trennya mengalami penurunan. Penurunan nilai IKLH disebabkan oleh maraknya kegiatan penambangan di Daerah Aliran Sungai sehingga menyebabkan degradasi lingkungan sungai.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bisa diakses publik masih perlu ditingkatkan.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum optimalnya system pengelolaan persampahan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta kurangnya infrastruktur yang tersedia.
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum tercapainya target AKPIP Perangkat daerah yaitu nilai A
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum Optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (tahun 2025 = … dengan nilai capaian maksimal/optimal yaitu 100)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Terkendalanya pemanfaatan data kependudukan dikarenakan sulitnya untuk memenuhi syarat standar ISO 27001
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terbatasnya sumber daya manusia baik teknis maupun non teknis dalam menjalankan tugas dan fungsi
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	konektivitas wilayah dari dan menuju Kabupaten Belitung Timur masih belum memadai dengan kata lain masih sangat tergantung dengan fasilitas yang terdapat di kabupaten Belitung
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Keselamatan Transportasi (*Transportasi Safety*) masih perlu ditingkatkan

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Belum optimalnya pelayanan angkutan di wilayah Kabupaten Belitung Timur
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Belum meratanya jangkauan transportasi angkutan umum bagi masyarakat ataupun pelajar
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Belum optimalnya sarana dan prasarana transportasi angkutan umum bagi masyarakat ataupun pelajar.
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan ASDP Manggar, Pelabuhan Dendang dan pelabuhan pengumpan lokal lainnya;
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Belum optimalnya pelayanan fasilitas perlengkapan jalan terutama penerangan jalan umum;
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Belum meratanya pembangunan fasilitas keselamatan jalan seperti rambu – rambu lalu lintas, marka jalan, RPPJ, Lampu Penerangan Jalan Umum, Pita Penggaduh, Cermin Tikungan, Lampu APILL di wilayah Kabupaten Belitung Timur
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terbatasnya jaringan transportasi antar pulau.
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Pengelolaan usaha angkutan umum masih dilakukan secara pribadi/perorangan.
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan analisis beban kerja dan peta jabatan;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi Publik;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya transformasi digital birokrasi untuk mendukung pengembangan Kabupaten Cerdas (smart city);
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya Sarana Prasarana Pendukung pengelolaan informasi komunikasi;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya Sarana Prasarana Kantor guna menunjang Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara lebih baik;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kesenjangan Infrastruktur digital antar wilayah yang menghambat pemerataan akses layanan publik digital;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rendahnya Literasi Digital Masyarakat, terutama dikawasan pedesaan dan pesisir;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Interoperabilitas Sistem Informasi Pemerintahan yang belum optimal;

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Implementasi Smart City yang belum maksimal;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Keterbatasan SDM TIK berkualitas dilingkungan Pemerintah Daerah;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya mekanisme pelayanan informasi publik sesuai dengan standar layanan PPID;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rendahnya Kapasitas verifikasi dan klarifikasi informasi Publik ditingkat Kabupaten;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terbatasnya Platform partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kapasitas SDM PPID yang belum memadai dalam pengelolaan informasi publik secara profesional;
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Infrastruktur dan sistem dokumentasi informasi publik yang belum terkelola dengan baik;
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam mengurus koperasi dan mengelola UMKM
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Belum optimalnya kemampuan berwirausaha bagi Koperasi dan UMKM
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Belum optimalnya penataan kelembagaan bagi koperasi dan UMKM
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan penggunan teknologi bagi UMKM
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya daya saing produk UMKM
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya kreativitas dan inovasi pelaku usaha UMKM dalam pengembangan produknya
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya kepatuhan Pelaku Usaha dalam pemenuhan perizinan bagi UMKM
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	Masih rendahnya pengetahuan pengurus koperasi terkait laporan keuangan, perpajakan, dan pemahaman regulasi

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
	USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha UMKM terkait laporan keuangan, perpajakan, dan pemahaman regulasi
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya digitalisasi dalam pemasaran produk UMKM
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih kurangnya sarana pendukung yang dimiliki pelaku usaha UMKM
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum tersusunnya dokumen detail investasi yang akan ditawarkan
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum adanya Pusat Data dan Informasi Investasi
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum Maksimal Penggunaan Digital web untuk promosi
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Masih Sedikit Kegiatan Promosi Investasi Daerah ke Luar Daerah/Luar Negeri
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Tidak Seluruh Kecamatan memiliki RDTR
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Revisi Rencana Tata Ruang wilayah yang belum selesai
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kurangnya Regulasi Pelaksanaan perlakuan Investasi Sampai ke tingkat Desa
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum adanya Regulasi tentang Hiilirisasi Produk
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum adanya Infrastruktur Pelabuhan Umum orang dan Barang yang Aktif
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum Termanfaatkannya spasial Khsusus Kawasan Industri
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Layanan perizinan yang bersifat online dan mandiri sehingga banyak pelaku usaha yang membuat izin usaha tidak sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Aplikasi perizinan online yang tepusat di Kementerian sehingga jika ada masalah terhadap proses perizinan butuh waktu yang agak lama untuk penyelesaiannya karena harus menghubungi helpdesk yang responnya agak lambat.

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi di urusan PTSP
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kurang optimalnya pelaksanaan MPP karena sarana prasarana yang belum ideal
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Belum Optimalnya capaian Cakupan pelatih dan wasit yang bersertifikasi (capaian tahun 2025 = 88,94%)
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Belum Optimalnya Capaian Persentase Peningkatan Prestasi olahraga (capaian 2025 = 72%)
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (capaian 2025 = 2,77%)
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Belum optimalnya Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (capaian 2025 = 24, 36%)
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Belum optimalnya Penyelenggaraan statistik sektoral dari sisi Produsen Data;
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang belum komprehensif dan terintegrasi;
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Sistem Pengumpulan dan pengolahan data yang belum terstandarisasi antar OPD;
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Pemanfaatan Big Data yang belum optimal untuk analisis kebijakan ;
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Kapasitas SDM Statistik yang terbatas dalam penguasaan metodologi mutakhir;
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Belum optimalnya Sarana Prasarana Kantor guna menunjang Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara lebih baik.;
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Diseminasi dan Publikasi data statistik yang belum efektif;
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum optimalnya Penyelenggaraan keamanan informasi untuk menuju ISO 27001;
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kerentanan Keamanan Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah Yang masih tinggi;
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang belum terintegrasi;
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum optimalnya Sarana Prasarana Kantor guna menunjang Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara lebih baik;
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kesadaran Keamanan Siber yang masih rendah dikalangan aparatur;
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Keterbatasan SDM Bidang Persandian dan Keamanan Informasi yang tersertifikasi;
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Penerapan Tata Kelola Pengamanan Informasi rahasia dan klasifikasi data yang belum optimal.
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum optimalnya upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum optimalnya upaya pelestarian cagar budaya
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	kurangnya minat generasi muda dalam kegiatan kesenian dan pelestarian budaya
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Minimnya pengemasan atraksi budaya menjadi event unggulan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Menurunya angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, yang disebabkan perubahan formulasi perhitungan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (capaian 2025 = 21,7)
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya Perpustakaan Yang Memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) , (Capaian 2025 = 42,5%)
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Belum Optimalnya Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, (Capaian 2025 = 81,95%)
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terbatasnya wewenang untuk memfasilitasi kebutuhan Nelayan
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terbatasnya anggaran sehingga sulit untuk memenuhi aspirasi/ tuntutan Nelayan
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terbatasnya SDM Penyuluh di lapangan sehingga sulit melakukan pembinaan secara menyeluruh ke semua wilayah
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Masih rendahnya kesadaran Nelayan untuk tertib administrasi perizinan penangkapan ikan dalam Usaha Penangkapan Ikan seperti SIPI, SIPPI, SLO, SBB, Buku Kapal dan lain-lain
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kurangnya pembinaan pelaku usaha perikanan secara berkala serta minat dan motivasi kelompok perikanan;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Masih adanya sarana dan prasarana yang belum termanfaatkan secara optimal dan belum optimalnya pendataan dan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingginya Biaya Pakan, sehingga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk biaya Produksi hingga harga jual ikan tinggi, menyebabkan daya beli masyarakat terhadap Ikan budi daya menurun;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Masih rendahnya keterampilan masyarakat untuk budidaya dengan menerapkan teknologi tepat guna, atau hingga saat ini masyarakat masih menerapkan metode extensif hingga semi intensif, belum pada penerapan metode intensif. Hal tersebut dikarenkan masyarakat mengeluh untuk menggunakan sistem yang sedikit Lebih Rumit;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Menggunakan Benih Ikan unggul yang berasal dari induk Bersertifikat.

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Minimnya Agen Pemulihan Ekonomi / Pembudidaya Ikan pada Generasi /Kelompok Millenial;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Minimnya jumlah Calon Induk Berkualitas pada Komoditas Unggulan termasuk penerapan Teknologi pendukung Tepat Guna;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Minimnya praktek pembudidayaan dan pembenihan ikan yang baik/memenuhi Standar Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)/ Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta Produktifitas Unit Pembenihan Rakyat masih Rendah;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkelompok, dimana Motivasi masyarakat berkelompok hanya untuk mendapatkan bantuan, sehigga fungsi berkelompok hampir tidak ada;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Manajemen keuangan pembudidaya yang masih belum baik, Dimana dari Kegiatan Bantuan, Keuntungan yang diperoleh sebagian tidak digunakan sebagai modal produksi kembali.
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Stuck pasar Pada Komoditas Tertentu, dan Waktu Tertentu, yaitu pada Komoditas Ikan Lele, Dimana Sewaktu-waktu Ikan Lele sulit untuk dipasarkan sedangkan apabila ikan lele sudah masuk ukuran panen harus dijual, apabila ukuran melebihi dari ukuran panen, Harganya menurun drastis.
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rumah produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) belum memenuhi standar sanitasi dan hygiene GMP/SSOP;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sarana Produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) terbatas/kurang memadai;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Unit Pengolahan Ikan (UPI) belum memiliki/memenuhi standar produk olahan;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terbatasnya intervensi langsung sektor perikanan untuk penurunan angka stunting;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Harga ikan sebagai bahan baku produk olahan, terus meningkat terutama pada saat musim panceklik;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kurangnya tenaga penyuluh perikanan;
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tidak beroperasinya tempat pelelangan ikan.
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kualitas air untuk budidaya yang kurang baik dikarenakan kondisi lingkungan/Topografi lahan kritis
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Status lahan untuk pengembangan kawasan destinasi wisata; tidak dalam staus clean and clear

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Terbatasnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terkait pengelolaan destinasi oleh Pokdarwis dan pengembagan produk ekonomi kreatif;
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Koordinasi lintas sektoral (lembaga/stakeholder) yang mendukung sektor pariwisata kurang sinergis
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pariwisata
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	keterbatasan anggaran pengembangan dan pemeliharaan destinasi wisata
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	belum optimalnya pemanfaatan media digital dalam kegiatan promosi pariwisata
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kurangnya SDM bidang pariwisata yang memiliki kemampuan teknis seperti pemandu wisata bersertifikat.
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kurangnya kolaborasi dengan influencer dalam mempromosikan agenda wisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Terbatasnya ketersediaan/bantuan pupuk untuk petani
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Sistem irigasi yang belum berjalan optimal
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Masih Cukup tingginya serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan kasus penyakit hewan
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana, serta infrastruktur pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian untuk merubah perilaku dan sikap perani di Kabupaten Belitung Timur dalam berusaha tani
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian dan merubah prilaku sikap dan keterampilan
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Belum adanya upaya penegakan peraturan daerah terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap aktifitas pengalihan fungsi lahan pertanian.
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Masih cukup tingginya tingkat inflasi yang disumbangkan oleh beberapa jenis komoditas pertanian tertentu
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Masih rendahnya nilai tukar petani yang disebabkan pola pertanian tradisional
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Terbatasnya anggaran bersumber dari APBD untuk pengembangan sarana distribusi perdagangan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kurangnya infrastruktur logistik dan ketergantungan pada distributor luar daerah menyebabkan harga Bapokting di Belitung Timur menjadi tidak stabil dan sulit dikendalikan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rendahnya adaptasi pengecer terhadap sistem digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang terintegrasi
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Tidak tersedianya gedung pelayanan dan laboratorium metrologi legal

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Tidak tersedianya Kendaraan khusus operasional Kemetrologian yg dpt melayani seluruh pelayanan dan pengawasan Kemetrologian keseluruh wilayah Belitung Timur sampai ke tingkat desa
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rendahnya tingkat kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi pelabelan serta kebenaran kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rendahnya kesadaran mandiri pemilik UTTP (Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan) dalam melakukan kewajiban tera/tera ulang secara berkala.
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Rendahnya tingkat pemahaman pemerintah daerah akan pentingnya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pemerintah daerah tidak memahami bahwa barang kebutuhan pokok adalah kebutuhan primer
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pemerintah daerah tidak dapat memahami bahwa kontribusi perdagangan antar daerah dapat meningkatkan PAD
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Pemerintah daerah tidak memahami bahwa pelabuhan adalah jalan terbaik untuk mengatasi masalah inflasi yang bersumber dari fluktuasi dan disparitas harga
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Terbatasnya anggaran bersumber dari APBD untuk kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan ke pelaku usaha IKM
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kurangnya pemahaman pelaku IKM terhadap pentingnya Izin Usaha
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Terbatasnya kemampuan produksi IKM dalam memenuhi permintaan pasar dalam jumlah yang banyak
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	Belum optimalnya tata kelola reformasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, dengan (capaian IRB 2024 = 82,58 dengan nilai capaian maksimal/optimal yaitu 100)
4.02	SEKRETARIAT DPRD	Belum Optimalnya Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (capaian 2024 = 87,96 dengan nilai capaian maksimal/optimal yaitu 100)
5.01	PERENCANAAN	Belum optimalnya nilai Sakip kabupaten pada komponen perencanaan kinerja (capaian 2024 = 22,24, dengan target 30)
5.01	PERENCANAAN	Belum optimalnya nilai Sakip kabupaten pada komponen pengukuran kinerja (capaian 2024 = 19,91, dengan target 30)
5.01	PERENCANAAN	Belum optimalnya indeks perencanaan
5.02	KEUANGAN	Menurunya capaian IPKD (capaian 2025 = 71,49) yang mana (capaian tahun 2024 = 83,45)

KODE	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
5.02	KEUANGAN	Efektfitas dan efesiensi perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungawaban keuangan masih belum optimal dan sesuai peraturan yang ada
5.02	KEUANGAN	Masih adanya peraturan kepala daerah yang belum diterbitkan khususnya mengenai pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
5.02	KEUANGAN	Masih lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek, dan wajib pajak, serta lemahnya sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak
5.02	KEUANGAN	Masih adanya kondisi yang belum optimal sesuai harapan yang dihadapi pada saat proses penyusunan Laporan kekayaan daerah terkait penyusunan Laporan keuangan daerah.
5.03	KEPEGAWAIAN	Belum Optimalnya Profesionalisme ASN (capaian 2024 = 79,03 dengan nilai capaian maksimal/optimal yaitu 100)
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	kesenjangan antara kompetensi ASN dengan tuntutan jabatan yang diemban. Pengembangan kompetensi ASN selama ini belum sepenuhnya didasarkan pada hasil analisis kebutuhan jabatan (TNA), sehingga pelatihan yang diselenggarakan belum mampu secara optimal menjawab tantangan kinerja organisasi.
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Belum optimalnya nilai Indeks Inovasi Daerah (IID)
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Belum optimalnya pemanfaatan penelitian dan kajian oleh daerah
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Belum optimalnya pemanfaatan inovasi dan teknologi oleh daerah
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Menurunya level maturitas SPIP (capaian 2025 = 2,468 pada level 2) yang mana (capaian tahun 2024 = 3,021 pada level 3) dan target pada tahun 2025 pada level 3
7.00	KECAMATAN	Belum optimalnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (tahun 2025 = 90 dengan nilai capaian maksimal/optimal yaitu 100)
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belum maksimalnya pendataan, pemantauan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan daerah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belum maksimalnya pemantauan terhadap perkembangan politik di daerah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah

Sumber: Bapperida (diolah), 2026

2.5.1.2 Permasalahan Kewilayahan Kabupaten Belitung Timur

Permasalahan kewilayahan di Kabupaten Belitung Timur merupakan refleksi dari dinamika pembangunan pada tingkat kecamatan yang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, sosial kemasyarakatan, maupun pemanfaatan potensi daerah. Identifikasi permasalahan ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah kecamatan.

Tabel 2. 160 Permasalahan Kewilayahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Permasalahan
1	Manggar	Masih terdapat permukiman nelayan dengan keterbatasan sanitasi.
		Infrastruktur lingkungan dan jalan lingkungan belum merata kualitasnya.
		Perlunya penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.
		Perlunya pemberdayaan masyarakat terutama di daerah pesisir.
2	Gantung	Akses jalan pemukiman yang rusak dan perlu peningkatan jalan di 7 desa se-Kecamatan Gantung.
		Tidak adanya saluran drainase dan saluran drainase yang rusak sehingga mengakibatkan genangan saat musim hujan (Desa Lilangan, Desa Lenggang, dan Desa Gantung).
		Masih terdapat ruang kelas sekolah yang rusak/tidak memadai, toilet yang rusak/tidak memadai, serta pagar sekolah yang belum memadai.
3	Kelapa Kampit	Banjir tahunan di Desa Mayang dan Buding serta kebakaran hutan dan lahan di Desa Buding, Mentawak, dan Senyubuk.
		Infrastruktur pariwisata dan pemberdayaan UMKM lokal yang masih perlu ditingkatkan.
		Keterbatasan sarana dan prasarana nelayan.
4	Simpang Pesak	Sumber daya lokal yang belum terkelola dengan baik.
		Pelatihan kelompok UMKM dan industri kecil desa yang masih belum maksimal.
		Bantuan modal usaha UMKM yang belum maksimal dan belum merata.
5	Damar	Belum optimalnya kapasitas dan keterampilan SDM lokal dalam pengelolaan potensi lokal.
		Permasalahan sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan lingkungan.
		Belum meratanya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung.
		Keterbatasan lahan dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam.
6	Simpang Renggiang	Struktur perekonomian masih didominasi sektor primer sehingga diversifikasi ekonomi belum optimal.

No	Kecamatan	Permasalahan
		Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar wilayah masih perlu ditingkatkan.
		Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan.
		Pemanfaatan potensi lokal (pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM) belum optimal.
7	Dendang	Jalan masih berupa tanah puru, terutama akses permukiman dan menuju pelabuhan rakyat.
		Fasilitas kesehatan dan pendidikan belum memenuhi standar.

Sumber: Bapperida (diolah), 2026

Secara umum, permasalahan kewilayahan yang dihadapi oleh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan adanya kesenjangan pada aspek kapasitas sumber daya manusia, kualitas infrastruktur, serta optimalisasi potensi daerah yang belum sepenuhnya termanfaatkan. Adapun akar masalah yang perlu difokuskan dalam menangani kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Parsialisasi layanan digital, rendahnya kompetensi IT ASN
2. Ketergantungan pada timah, rendahnya hilirisasi agromaritim
3. Stunting, angka putus sekolah, kemiskinan di atas rata-rata provinsi
4. Konektivitas antar kecamatan belum merata, RTLH masih tinggi
5. Degradasi lahan pasca tambang, ancaman banjir dan abrasi

Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang terintegrasi, berbasis kewilayahan, dan berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh kecamatan.

2.5.1.3 Permasalahan Utama dan Mendesak Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan daerah, dilakukan pengelompokan dan penajaman permasalahan menurut bidang urusan pemerintahan guna menentukan permasalahan yang bersifat utama dan mendesak sebagai dasar dalam penetapan isu strategis daerah. Adapun **permasalahan utama dan mendesak** tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem layanan digital pemerintah daerah masih berjalan secara parsial, integrasi data antar-perangkat daerah yang terbatas, standar keamanan data yang belum seragam, serta kualitas dan pemerataan konektivitas digital yang belum optimal
2. Kompetensi ASN belum sepenuhnya mendukung kebutuhan tata kelola modern dan digital.
3. Pengawasan internal belum mampu secara optimal mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan.
4. Data pemerintah daerah belum sepenuhnya akurat, mutakhir, dan terpadu dalam satu sistem.
5. Belum Optimalnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Belum optimalnya integrasi layanan informasi dan layanan pengaduan publik, ditandai dengan belum tersedianya satu nomor layanan terpadu
8. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (Tahun 2024 = 8,99 Tahun)
9. Belum optimalnya capaian SPM urusan pendidikan (tahun 2024 = 83,48%)
10. Kualitas hasil belajar peserta didik belum optimal, dan belum meratanya pembinaan kompetensi siswa (Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi pada tahun 2024 = 30,60%)
11. masih tingginya angka prevalensi stunting (tahun 2024 = 17,1%)
12. Belum optimalnya capaian SPM Urusan kesehatan (tahun 2024 = 90,71%)
13. Keterbatasan tenaga kesehatan dan distribusinya (Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 = 71%)
14. Angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur masih diatas rata-rata Provinsi Bangka Belitung (tahun 2025 = 6,69%)
15. Tingginya Garis Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur (Tahun 2025 = Rp. 925.729)
16. Belum optimalnya capaian SPM Urusan Sosial (tahun 2024 = 88,76%)
17. Belum optimalnya produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan berbasis digital
18. Belum optimalnya pengembangan dan daya saing sektor ekonomi kreatif berbasis digital.

19. Belum optimalnya konektivitas transportasi antar wilayah Kecamatan Kabupaten Belitung Timur
20. Keterbatasan ruang terbuka publik yang layak
21. Belum meratanya cakupan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur dasar permukiman
22. Masih adanya rumah tidak layak huni
23. Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan
24. Belum optimal upaya pengendalian kualitas lingkungan

2.5.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan Isu Strategis Daerah dilakukan melalui proses analisis yang komprehensif dan partisipatif. Proses ini diawali dengan identifikasi permasalahan pembangunan serta evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, data tersebut dilakukan pengelompokan dan penajaman guna mendapatkan Permasalahan Utama dan Mendesak. Dari hasil penajaman tersebut, Isu Strategis Daerah kemudian dilahirkan dengan mengonversikan permasalahan utama dan mendesak maupun potensi yang daerah dimiliki. Adapun Isu Strategis Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 161 Isu Strategis Kabupaten Belitung Timur

Permasalahan Utama dan Mendesak	Isu Strategis
Sistem layanan digital pemerintah daerah masih berjalan secara parsial, integrasi data antar-perangkat daerah yang terbatas, standar keamanan data yang belum seragam, serta kualitas dan pemerataan konektivitas digital yang belum optimal	Tata kelola pemerintahan berbasis digital yang belum optimal untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah
Kompetensi ASN belum sepenuhnya mendukung kebutuhan tata kelola modern dan digital.	
Pengawasan internal belum mampu secara optimal mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan.	
Data pemerintah daerah belum sepenuhnya akurat, mutakhir, dan terpadu dalam satu sistem.	
Belum Optimalnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	
Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
Belum optimalnya integrasi layanan informasi dan layanan pengaduan publik, ditandai dengan belum tersedianya satu nomor layanan terpadu	
Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (Tahun 2024 = 8,99 Tahun)	Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
Belum optimalnya capaian SPM urusan pendidikan (tahun 2024 = 83,48%)	
Kualitas hasil belajar peserta didik belum optimal, dan belum meratanya pembinaan kompetensi siswa	

Permasalahan Utama dan Mendesak	Isu Strategis
(Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi pada tahun 2024 = 30,60%)	
masih tingginya angka prevalensi stunting (tahun 2024 = 17,1%)	Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan mempercepat penurunan angka stunting
Belum optimalnya capaian SPM Urusan kesehatan (tahun 2024 = 90,71%)	
Keterbatasan tenaga kesehatan dan distribusinya (Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 = 71%)	
Angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur masih diatas rata-rata Provinsi Bangka Belitung (tahun 2025 = 6,69%)	Percepatan upaya pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan layanan dasar
Tingginya Garis Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur (Tahun 2025 = Rp. 925.729)	
Belum optimalnya capaian SPM Urusan Sosial (tahun 2024 = 88,76%)	
Belum optimalnya produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan berbasis digital	Peningkatan teknologi, sarana prasarana, pelaku usaha, dan akses pasar berbasis digital untuk mendorong produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, serta memperkuat daya saing pelaku ekonomi kreatif melalui digitalisasi dan perlindungan HaKI
Belum optimalnya pengembangan dan daya saing sektor ekonomi kreatif berbasis digital.	
Belum optimalnya konektivitas transportasi antar wilayah Kecamatan Kabupaten Belitung Timur	Peningkatan jaringan transportasi antar-kecamatan untuk mendukung konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi ekonomi
Keterbatasan ruang terbuka publik yang layak	Peningkatan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka publik yang layak sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
Belum meratanya cakupan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur dasar permukiman	Pemerataan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur dasar permukiman
Masih adanya rumah tidak layak huni	
Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana-prasarana, penerapan pemilahan dan pengolahan di sumber (3R), serta

Permasalahan Utama dan Mendesak	Isu Strategis
	peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah
Belum optimalnya upaya pengendalian kualitas lingkungan	Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan
	Penurunan emisi gas rumah kaca dan efisiensi energi di lingkungan pemerintah daerah

Sumber: Bapperida (diolah), 2026

Secara keseluruhan, Isu Strategis Kabupaten Belitung Timur mencakup berbagai dimensi pembangunan yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan utama daerah. Isu-isu tersebut meliputi optimalisasi tata kelola pemerintahan digital, peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan penanggulangan kemiskinan. Secara proporsional, rumusan ini juga menyasar penguatan daya saing ekonomi pada sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif, yang diiringi dengan pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas transportasi, dan penyediaan ruang terbuka publik. Lebih lanjut, komitmen terhadap keberlanjutan turut diintegrasikan secara berimbang melalui peningkatan pengelolaan persampahan, pemulihan kualitas lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Keseluruhan isu strategis ini saling berkesinambungan dan menjadi satu kesatuan landasan yang utuh dalam merumuskan arah pembangunan daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan langkah fundamental untuk memetakan kapasitas riil fiskal daerah di tengah dinamika perekonomian global dan nasional. Secara khusus, kebijakan keuangan tahun ini diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal dan sinergi kebijakan pusat-daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Meskipun terdapat tantangan dalam pemenuhan batas maksimal belanja pegawai, kebijakan ini disusun dengan mengoptimalkan skenario masa transisi dan relaksasi kebijakan nasional terbaru guna menjaga stabilitas operasional serta keberlanjutan pelayanan publik**.**

Bab ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kondisi makro ekonomi, proyeksi pendapatan, belanja daerah, serta pembiayaan yang akan menjadi asumsi dasar dalam penyusunan APBD. Melalui pendekatan yang holistik, dengan mempertimbangkan peluang sektor unggulan serta tantangan internal dan eksternal, analisis ini ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tahun 2027 dirumuskan secara realistis, efektif, dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat..

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 merupakan implementasi tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2025–2029. Sejalan dengan Misi Ketiga RPJMD, arah kebijakan ekonomi tahun ini difokuskan pada perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam tahapan pembangunan tahun 2027, prioritas kebijakan diarahkan pada penguatan fondasi ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif. Upaya akselerasi ekonomi ini disinergikan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan konektivitas antarwilayah, serta penegakan regulasi perlindungan lingkungan hidup.

Kinerja perekonomian Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2027 tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis, baik pada tatanan global maupun nasional. Ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga komoditas, serta arah kebijakan fiskal dan moneter pemerintah pusat memiliki transmisi langsung terhadap stabilitas ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai asumsi makro ekonomi global dan target pembangunan nasional menjadi prasyarat mutlak dalam menyusun proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah yang realistis dan adaptif.

3.1.1 KONDISI EKONOMI GLOBAL

Perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2025 secara umum menunjukan proses pemulihan yang bertahap di tengah masih berlangsungnya ketidakpastian global. Memasuki akhir tahun, perkembangan ekonomi global pada triwulan IV tahun 2025 kembali menunjukan tanda-tanda stabilisasi setelah sempat memuncak pada periode sebelumnya. Kondisi ini memberikan ruang bagi bank sentral berbagai negara dunia, termasuk Federal Reserve, untuk mulai melonggarkan kebijakan moneter melalui pemankasan suku bunga secara bertahap pada penghujung tahun. Langkah tersebut terbukti efektif dalam memulihkan daya beli rumah tangga dan memperbaiki indeks kepercayaan konsumen yang sempat tertekan, sehingga kekhawatiran akan terjadinya resesi global dapat diredam.

Dari sisi geopolitik, tekanan yang relatif tinggi pada triwulan III tahun 2025 mulai mengalami pergeseran dinamika pada akhir tahun 2025. Walaupun konflik di Timur Tengah dan ketegangan antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung, pasar global mulai menunjukan kemampuan adaptasi terhadap disrupsi rantai pasok. Ketegangan perdagangan sempat mereda pada triwulan IV tahun 2025 seiring dengan adanya kesepakatan sementara terkait tarif antara kekuatan ekonomi besar, yang memberikan kepastian lebih baik bagi sektor manufaktur global. Meskipun risiko geopolitik tetap menjadi variabel yang diwaspadai, fokus otoritas global di akhir tahun lebih tertuju pada penguatan kemadirian energi dan reorganisasi jalur logistik untuk memitigasi dampak konflik jangka panjang dari disrupsi rantai pasok terhadap stabilitas enonomi nasional.

Dinamika pasar komoditas pada penutupan tahun 2025 menunjukan pola penyesuaian yang berbeda antar sektor. Harga energi, khususnya minyak

mentah, cenderung terkoreksi turun seiring dengan melimpahnya pasokan dari negara produsen non-OPEC dan efisiensi konsumsi di negara-negara industri. Sebaliknya, komoditas logam mulia seperti emas mencatatkan performa yang terus membaik sebagai aset aman (*safe haven*) di tengah fluktuasi kebijakan proteksionisme, dengan kenaikan signifikan secara tahunan. Secara kolektif, capaian ekonomi tahun 2025 menggambarkan fase transisi dari stabilitas yang rapuh menuju pemulihan yang lebih berimbang, meskipun tantangan struktural dalam perdagangan internasional masih memerlukan perhatian intensif di tahun mendatang.

3.1.2 KONDISI DAN KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2025 tumbuh sebesar 5,39 persen (YoY) dan 5,11 persen (CtC) pada keseluruhan tahun 2025. Peningkatan pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, aktivitas produksi yang meningkat, ekspor yang tetap terjaga, realisasi investasi yang terus bertumbuh, serta akseerasi belanja pemerintah sebagai penopang daya beli dan aktivitas usaha. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif. Dari sisi lapangan usaha, semua sektor mencatatkan pertumbuhan positif, kecuali sektor Pengadaan Air dan sektor Pertambangan. Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,89 persen (YoY) dan 8,78 persen (CtC). Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi berikutnya, yaitu sebesar 8,09 persen (YoY) dan 8,35 persen (CtC). Sementara itu, sektor Pertambangan masih mengalami kontraksi sebesar 1,31 persen (YoY) dan 0,66 persen (CtC) yang terutama disebabkan penurunan ekspor batu bara.

Realisasi pendapatan negara tahun 2025 perlu terus ditingkatkan di tengah ketidakpastian global dan normalisasi harga komoditas. Realisasi Pendapatan Negara akhir triwulan IV tahun 2025 mencapai Rp2.756,3 triliun atau sekitar 91,7 persen dari target APBN 2025 dan terkontraksi sebesar 3,3 persen dari realisasi APBN tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun (95,3 persen terhadap pagu). Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat yang tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun dan

Transfer ke Daerah (TKD) yang tercatat sebesar Rp849,0 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,04 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.

Pada triwulan IV tahun 2025, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sejak Oktober hingga Desember sebesar 4,75 persen. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makro prudensial untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pada akhir triwulan IV tahun 2025 Rupiah tercatat sebesar Rp16.690, melemah sebesar 0,18 persen (MtM). Hingga akhir triwulan IV tahun 2025 tingkat inflasi tercatat 2,92 persen (YoY) pada Desember tahun 2025, meningkat dari triwulan sebelumnya dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2025 sebesar 1,5 – 3,5 persen (YoY).

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV tahun 2025 tetap terjaga, namun mengalami defisit secara keseluruhan tahun 2025. NPI triwulan IV tahun 2025 mencatatkan surplus USD6,1 miliar. Di sisi lain, NPI keseluruhan tahun 2025 mencatatkan defisit USD7,8 miliar, setelah selama enam tahun sebelumnya secara beruntun membukukan surplus. Neraca transaksi berjalan pada triwulan IV tahun 2025 mencatat defisit sebesar USD2,5 miliar atau 0,7 persen dari PDB, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang membukukan surplus USD4,0 miliar atau 1,1 persen dari PDB. Untuk keseluruhan tahun 2025, neraca transaksi berjalan mencatat defisit rendah sebesar USD1,5 miliar atau 0,1 persen dari PDB, menyempit dari defisit USD8,6 miliar atau 0,6 persen dari PDB pada tahun 2024. Neraca perdagangan barang pada triwulan IV tahun 2025 mencatat surplus USD10,2 miliar, lebih rendah dari surplus triwulan sebelumnya sebesar USD16,1 miliar. Secara keseluruhan 2025, surplus neraca perdagangan barang mencapai USD49,8 miliar, lebih tinggi dari surplus USD39,8 miliar pada tahun 2024.

Beberapa lembaga seperti World Bank, IMF, OECD, ADB, dan Oxford Economics telah melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dari berbagai negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh lembaga-lembaga tersebut pada tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran 5,0–5,3 persen. Beberapa faktor

yang diprakirakan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu kondisi keuangan yang akomodatif sehingga memperkuat ekspansi investasi swasta, peningkatan belanja investasi publik melalui optimalisasi peran Danantara. Selain itu, stimulus fiskal secara terukur akan menjaga daya beli masyarakat dan menopang konsumsi swasta sehingga memberikan dorongan tambahan terhadap pertumbuhan.

3.1.3 KONDISI DAN KEBIJAKAN EKONOMI PROVINSI

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV 2025 menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi. Sumber pertumbuhan pada periode ini berasal dari dua lapangan usaha dengan andil tertinggi, yakni lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Moobil dan Sepeda Motor. Meningkatnya kinerja LU Pertanian ditopang oleh kenaikan produksi perikanan serta membaiknya produksi komoditas kelapa sawit dan karet, sementara kinerja LU Perdagangan sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan, termasuk pembelian kendaraan. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung utamanya disumbang oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tetap kuat, serta akselerasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru mendorong geliat mobilitas dan belanja masyarakat, di tengah kenaikan harga timah dan perluasan dapur MBG.

Pada triwulan IV 2025, realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp8,65 triliun atau turun 5,57% (yoy) dibandingkan realisasi tahun 2024. Realisasi tersebut setara dengan 95,53% dari pagu. Sedangkan realisasi belanja daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp8,58 triliun atau setara dengan 91,04% dari pagu. Secara tahunan, realisasi belanja daerah tersebut terkontraksi 10,61% (yoy). Sementara realisasi belanja APBN Kementerian/Lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp2,98 triliun atau setara dengan 92,89% dari pagu.

Pada triwulan IV 2025, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi 2,77% (yoy), meningkat dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 1,82% (yoy), masih berada dalam level yang terjaga. Laju inflasi Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang terus terjaga pada triwulan IV 2025 dipengaruhi oleh terkendalinya harga komoditas utama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ditengah telah masih berlangsungya masa tanam beberapa komoditas. Secara spasial, Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,02% (yoy), diikuti Kabupaten Belitung Timur mengalami inflasi 2,69% (yoy), Kota Pangkalpinang inflasi sebesar 2,58% (yoy), dan Tanjungpandan (Kabupaten Belitung) mengalami inflasi 1,44% (yoy). Dengan demikian, capaian inflasi tahunan Provinsi, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang tercatat masih terkendali di dalam sasaran 2,5±1%. Sementara capaian inflasi 2 (dua) daerah Kabupaten IHK lainnya berada di luar kisaran.

Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV 2025 masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit yang menunjukkan tren positif disertai dengan kualitas kredit yang tecermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) yang terus membaik dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) masih tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sehingga berdampak pada peningkatan Loan to Deposit Ratio (LDR).

Pada triwulan IV tahun 2025, secara umum transaksi nontunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat tumbuh melambat. Perlambatan tercatat pada seluruh kanal dan infrastruktur sistem pembayaran. Sementara itu, transaksi tunai menunjukkan Net Outflow, sejalan dengan peningkatan kebutuhan uang kartal pada momen perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, serta libur sekolah maupun peningkatan aktivitas ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Seluruh indikator kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV 2025 menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 menurun, diringi dengan tingkat kemiskinan pada September 2025 yang juga menurun. Hal tersebut juga terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan lalu yang membaik pada triwulan IV 2025 dan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan laporan yang juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan tahun 2026, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian diprakirakan ditopang oleh LU utama, antara lain LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU Industri Pengolahan; serta LU Perdagangan. Akselerasi perekonomian tersebut berasal dari komoditas unggulan CPO dan timah, yang turut didukung oleh tumbuhnya harga global. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian diprakirakan berasal dari komponen Konsumsi Rumah Tangga, serta Ekspor Barang dan Jasa. Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2026 diprakirakan berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1% (yoy), serta sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2025.

3.1.4 KONDISI DAN KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN

Kinerja perekonomian Kabupaten Belitung Timur selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan kecenderungan pemulihan pasca tekanan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,56 persen pada tahun 2021, kemudian melambat menjadi 3,79 persen pada tahun 2022, dan meningkat kembali menjadi 4,72 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi kontraksi sebesar -0,03 persen yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap aktivitas ekonomi daerah. Pada tahun 2025, perekonomian kembali tumbuh sebesar 4,30 persen. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat pada kisaran 4,30–4,65 persen pada tahun 2026 dan tahun 2027 seiring dengan penguatan struktur ekonomi daerah.

Stabilitas harga daerah yang tercermin dari tingkat inflasi relatif terkendali meskipun berfluktuasi. Inflasi tercatat sebesar 4,01 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 4,17 persen pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 3,80 persen pada tahun 2023 dan 1,38 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025, inflasi kembali meningkat menjadi 2,69 persen. Untuk periode 2026–2027, inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 3±1 persen, yang mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Dari sisi kesejahteraan, PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021 PDRB per kapita tercatat sebesar 69,33 juta rupiah, meningkat menjadi 75,44 juta rupiah pada tahun 2022 dan 80,32 juta rupiah pada tahun 2023. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 82,61 juta rupiah dan mencapai 89,76 juta rupiah pada tahun 2025. Pada periode proyeksi,

PDRB per kapita diperkirakan meningkat menjadi 90,35 juta rupiah pada tahun 2026 dan berada pada kisaran 90,35–94,47 juta rupiah pada tahun 2027. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan rata-rata pendapatan masyarakat, meskipun tetap perlu diiringi dengan upaya menjaga pemerataan hasil pembangunan.

Dari aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren menurun dari 3,78 persen pada tahun 2021 menjadi 2,41 persen pada tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 3,05 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pada periode proyeksi, TPT ditargetkan menurun menjadi 2,33 persen pada tahun 2026 dan berada pada kisaran 2,63–2,92 persen pada tahun 2027 melalui penguatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio menunjukkan kondisi yang relatif terkendali dan cenderung membaik, dari 0,243 pada tahun 2021 menjadi 0,231 pada tahun 2025. Pada periode proyeksi, Gini Ratio ditargetkan berada pada kisaran 0,217 pada tahun 2026 dan 0,210–0,230 pada tahun 2027, yang mencerminkan upaya peningkatan pemerataan pembangunan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2025 menunjukkan kecenderungan menurun meskipun sempat meningkat pada tahun 2022 dan kembali mengalami kenaikan tipis pada tahun 2025 menjadi 6,69 persen. Melalui berbagai intervensi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan terintegrasi, target penurunan kemiskinan pada tahun 2026 dan 2027 sebesar 6,04 persen dan 5,87 persen. Upaya ini akan difokuskan pada peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dari 71,91 pada tahun 2021 menjadi 73,99 pada tahun2025. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Target IPM tahun 2026 dan tahun 2027 sebesar 74,35 dan 74,71, peningkatan IPM difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat

kesehatan masyarakat, serta pengembangan ekonomi yang inklusif untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Tabel 3. 1 Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027

Indikator	Target			
	Nasional	Provinsi	Kabupaten	
			2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 - 6,5	4,00 - 4,50	4,30 - 4,65	4,30 – 4,65
Inflasi (%)	2,5±10	1,95	3±1	3±1
PDRB per kapita (Rp. Juta)	-	79,64 - 86,50	90,35	90,35 – 94,47
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30 - 4,87	3,90 - 4,05	2,33	2,63 – 2,92
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 6,5	4,52 - 4,53	6,04	5,87
Rasio Gini (nilai)	0,362 - 0,367	0,211 - 0,219	0,217	0,210 – 0,230
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	-	75,66	74,35	74,71
Indeks Modal Manusia	0,575	0,575	-	-
IKLH	76,84	76,99	76,51	76,68
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57	55,59	18,39	18,39

Sumber: RKP 2027, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027

3.1.5 TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2026 DAN TAHUN 2027

Memasuki tahun 2026 dan 2027, perekonomian daerah Kabupaten Belitung Timur dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersumber dari dinamika global dan nasional, serta permasalahan struktural perekonomian daerah. Tantangan tersebut mencerminkan kebutuhan penguatan struktur ekonomi daerah, peningkatan daya saing sektor usaha, serta pemerataan akses terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi tantangan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu mengoptimalkan kebijakan pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan riil yang dihadapi daerah.

Berdasarkan permasalahan perekonomian daerah dalam RKPD Tahun 2027, beberapa arah kebijakan untuk mengantisipasi tantangan utama perekonomian daerah antara lain:

1. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah

   Permasalahan masih belum optimalnya produktivitas dan pengembangan hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri pengolahan dan ekonomi kreatif mencerminkan tantangan dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Tantangan ke depan adalah mendorong peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor-sektor unggulan tersebut agar mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Penguatan Daya Saing UMKM dan Ekonomi Lokal

   UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, namun masih menghadapi keterbatasan dalam akses permodalan, teknologi, dan pasar. Tantangan perekonomian daerah adalah bagaimana memperkuat daya saing UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi UMKM dalam rantai nilai ekonomi daerah dan regional.

3. Pemerataan Infrastruktur Ekonomi, Konektivitas Wilayah, dan Infrastruktur Digital

   Keterbatasan konektivitas transportasi antar wilayah serta belum meratanya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, termasuk infrastruktur digital, menjadi tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian daerah. Tantangan ke depan adalah memastikan ketersediaan infrastruktur ekonomi, konektivitas wilayah, dan infrastruktur digital yang memadai dan merata guna menurunkan biaya logistik, memperluas akses pasar, mendukung transformasi digital pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif antarwilayah.

4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Daerah

   Permasalahan ketenagakerjaan, termasuk kesenjangan keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan dunia usaha, menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan perekonomian daerah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu

beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan teknologi.

5. Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah terhadap Dinamika Eksternal

   Ketergantungan terhadap sektor tertentu dan keterbatasan diversifikasi ekonomi menjadikan perekonomian daerah rentan terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan kondisi ekonomi nasional dan global. Tantangan ke depan adalah memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor potensial.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 disusun dengan semangat efisiensi berbasis kinerja, penguatan kemandirian fiskal, dan akselerasi digitalisasi tata kelola keuangan. Menyikapi keterbatasan ruang fiskal (fiscal space) yang dinamis serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, strategi keuangan daerah pada tahun rencana menuntut adanya perubahan paradigma (shifting paradigm) yang interkonektif antara optimalisasi pendapatan dan disiplin belanja. Kebijakan ini diformulasikan sebagai respons strategis dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), guna menciptakan kesinambungan fiskal daerah yang kokoh.

Dari sisi penerimaan, strategi keuangan daerah menitikberatkan pada perluasan basis perpajakan dan penguatan kemandirian fiskal melalui implementasi skema Opsen Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) serta intensifikasi dan modernisasi retribusi daerah berbasis elektronik (e-government). Upaya ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kuantitatif, melainkan juga untuk menciptakan sistem pemungutan yang lebih transparan, akuntabel, dan ramah investasi guna menggerakkan simpul-simpul ekonomi lokal.

Sebaliknya, dari sisi pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen melakukan pengetatan pembelanjaan melalui kebijakan rasionalisasi belanja daerah secara menyeluruh. Fokus utama ditekankan pada pengendalian Belanja Pegawai guna melakukan transisi bertahap menuju batas maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah di luar tunjangan guru, serta pemenuhan alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik secara proporsional.

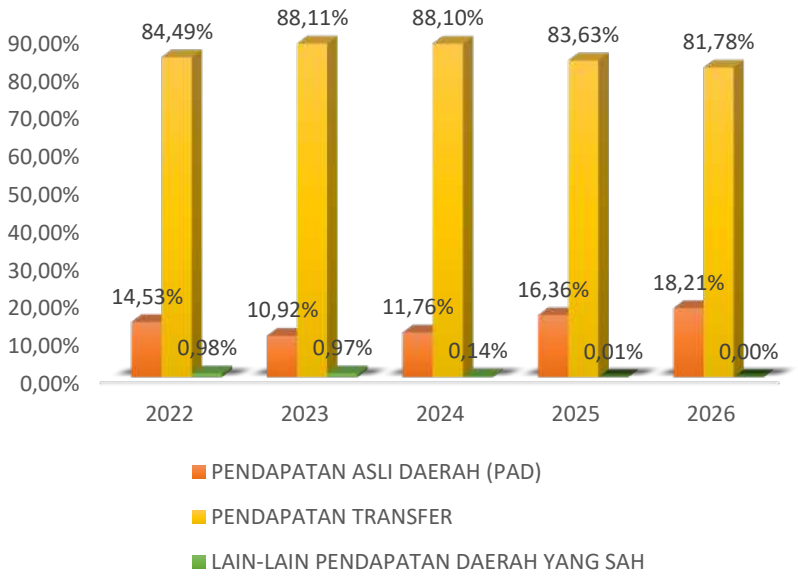
Kebijakan fiskal ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan (fiskal sustainabilitas). Melalui penajaman prioritas (refocussing) dan eliminasi belanja non-prioritas, Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alokasi belanja modal yang memadai demi menuntaskan target-target pembangunan infrastruktur strategis, mendukung keberlanjutan Program Unggulan dan Program Andalan (PU-PA), serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara inklusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur..

3.2.1 KINERJA KEUANGAN DAERAH

Kinerja pelaksanaan APBD menguraikan analisis terhadap realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2021-2025.

3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk tahun anggaran 2027, salah satunya dilandaskan pada kinerja pendapatan di masa lalu, kebijakan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan Nasional yang bersifat dinamis serta memperhatikan dinamika perekonomian ekonomi global terkini.



Grafik 3. 1 Proporsi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur

Struktur pendapatan daerah dalam periode 2022-2026 menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan kecenderungan kontraksi pada total volume fiskal. Berdasarkan data historis dan proyeksi, pendapatan daerah mencapai titik ekspansi tertinggi pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar **Rp896,81 miliar**. Namun, memasuki periode perencanaan berikutnya, kapasitas fiskal daerah mengalami penurunan (net-negative growth) hingga menyentuh angka **Rp759,42 miliar** pada tahun 2026. Penurunan total pendapatan sebesar **15,3%** ini utamanya dipicu oleh volatilitas dan penurunan nominal pada komponen Pendapatan Transfer, yang terkontraksi dari Rp790,16 miliar (2023) menjadi Rp621,09 miliar (2026). Hal ini mengindikasikan adanya penyempitan ruang fiskal (*fiscal space*) yang signifikan dalam mendanai program-program prioritas daerah.

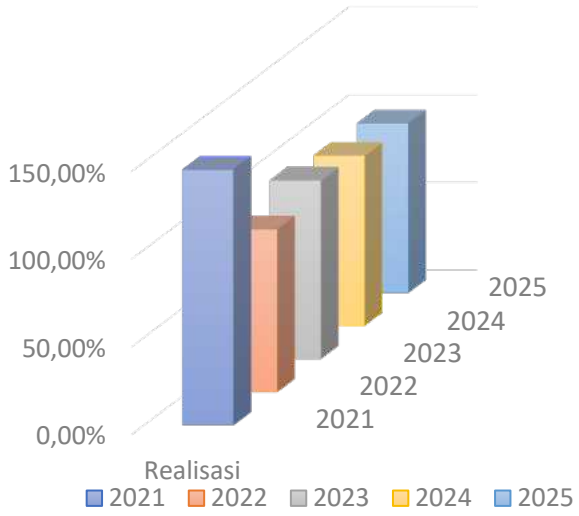
Di tengah tren penurunan total pendapatan, performa kemandirian fiskal daerah menunjukkan sinyal positif melalui penguatan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami tren peningkatan (*upward trend*) dari **10,92%** pada tahun 2023 menjadi **18,21%** pada proyeksi tahun 2026. Secara nominal, terjadi pertumbuhan PAD dari Rp97,95 miliar menjadi Rp138,32 miliar. Transformasi

struktur ini mencerminkan adanya keberhasilan dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, meskipun secara agregat belum mampu mengompensasi penurunan drastis pada dana transfer pusat yang masih mendominasi struktur anggaran di atas angka 80%.

Lebih lanjut, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami degradasi kontribusi yang sangat signifikan, menyusut dari Rp8,64 miliar (2022) menjadi hanya Rp10 juta (2026). Hilangnya kontribusi sektor ini menyebabkan hilangnya diversifikasi sumber pendanaan alternatif. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, strategi kebijakan fiskal dalam **RKPD 2027** harus difokuskan pada penguatan resiliensi ekonomi lokal dan optimalisasi *local taxing power*. Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip efisiensi belanja yang berbasis pada skala prioritas (*budget follow program*) guna memitigasi risiko penurunan kapasitas fiskal, sekaligus memastikan keberlanjutan target-target pembangunan daerah di tengah keterbatasan sumber daya keuangan.

Tabel 3. 2 Rincian Anggaran Pendapatan Daerah

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN TRANSFER	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	TOTAL PENDAPATAN DAERAH
2022	128.256.199.761	746.010.500.214	8.646.848.214	882.913.548.189
2023	97.955.234.467	790.163.206.515	8.695.735.177	896.814.176.159
2024	102.461.502.970	767.784.168.091	1.249.750.000	871.495.421.061,00
2025	130.880.650.183	669.123.899.946	100.000.000	800.104.550.129
2026	138.321.181.936	621.096.442.000	10.000.000	759.427.623.936



Grafik 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur

3.2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

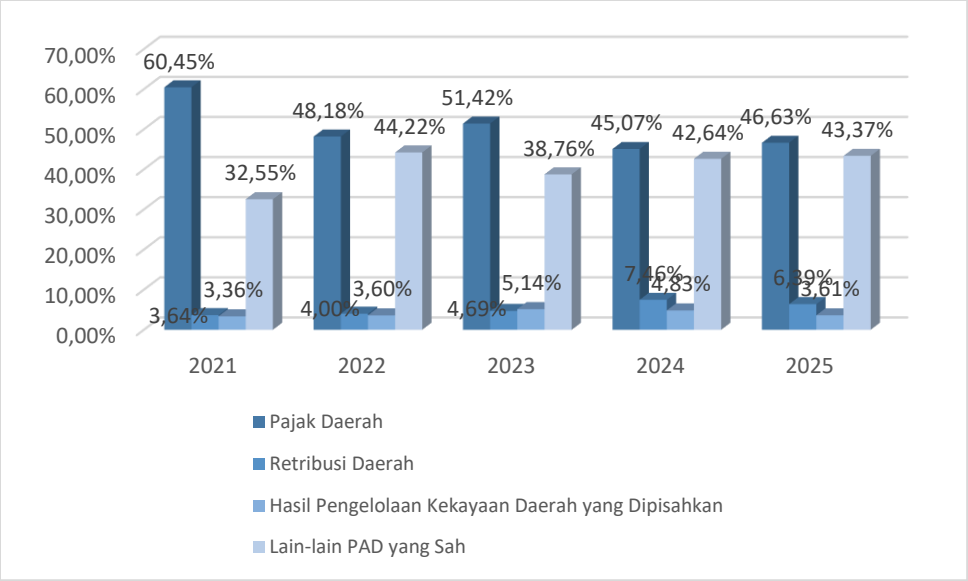
Berikut rincian kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 3. 3 Rincian Anggaran pada Komponen Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	TOTAL PAD
2021	66.020.698.070	4.513.130.833	3.918.728.951	36.757.592.428	**111.210.152.303**
2022	67.908.354.863	4.827.890.000	4.282.259.902	51.237.694.996	**128.256.199.761**
2023	51.049.854.537	5.061.802.000	5.523.052.522	36.320.525.407	**97.955.234.467**
2024	41.745.502.690	7.542.823.521	4.820.000.000	48.353.176.759	**102.461.502.970**
2025	65.042.000.000	8.157.961.423	4.420.623.853	53.260.064.907	**130.880.650.183**

Tabel 3. 4 Realisasi Pendapatan pada Komponen Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	TOTAL PAD
2021	70.542.484.276,20	4.248.191.721,00	3.918.728.951,73	37.988.138.760,81	116.697.543.709,74
2022	57.353.157.980,80	4.764.580.048,00	4.282.259.902,25	52.631.339.258,51	119.031.337.189,56
2023	55.223.937.728,88	5.033.957.058,00	5.523.052.522,61	41.627.097.735,32	107.408.045.044,81
2024	44.973.390.194,5	7.444.090.486	4.814.815.725	42.547.206.642	99.779.503.046,49
2025	57.136.836.170,06	7.831.773.874,56	4.420.623.853,81	53.140.899.446,92	122.530.133.345,35



Grafik 3. 3 Realisasi Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung Timur

3.2.1.1.2 Pendapatan Transfer

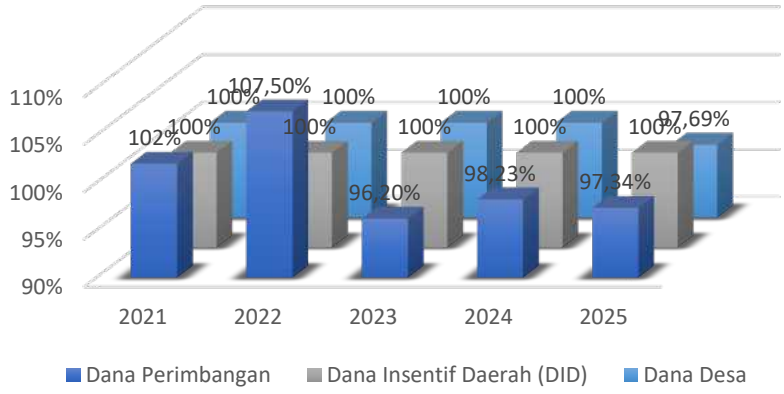
Pendapatan Transfer yang diterima Kabupaten Belitung Timur terdiri Dana Perimbangan (DTU dan DAK), Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Sementara Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan transfer disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Rincian Anggaran Pendapatan Transfer

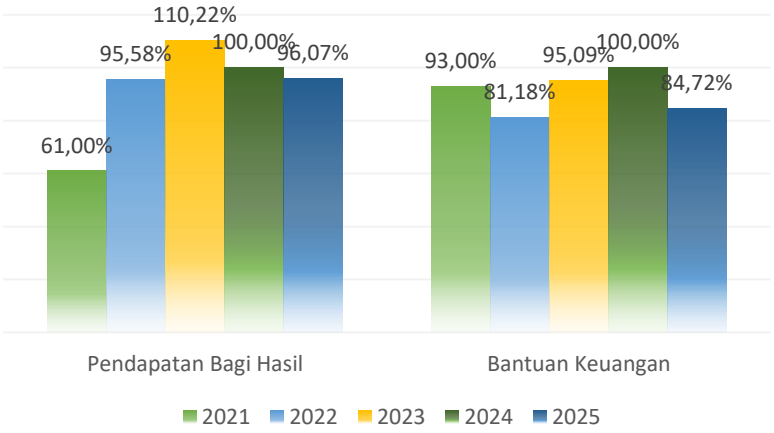
Tahun	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			Pendapatan Transfer Antar Daerah	
	Dana Perimbangan	DID	Dana Desa	Bagi Hasil Pajak	Bantuan Keuangan
2021	588.932.463.000	17.102.842.000	47.315.188.000	55.457.572.440	2.959.200.000
2022	653.703.757.250	1.841.413.000	36.364.806.000	49.926.190.631	3.907.933.333
2023	674.167.326.842	26.408.103.000	3.883.640.000	48.015.136.673	2.689.000.000
2024	645.154.152.000	30.100.485.000	39.725.596.000	52.803.935.091	93.176.934.900
2025	578.145.946.569	14.324.031.000	39.418.079.000	36.115.581.377	1.120.262.000



Grafik 3. 4 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur



Grafik 3. 5 Realisasi DanaTransfer Pemerintah Pusat



Grafik 3. 6 Perbandingan Realisasi Dana Transfer

Secara umum, postur pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur menunjukkan dominasi mutlak dari Pendapatan Transfer jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rerata kontribusi PAD berada di bawah 15% dari total kapasitas fiskal daerah, mempertegas status kemandirian fiskal yang masih berada dalam kategori belum mandiri.

Berdasarkan realisasi PAD selama 5 tahun ini, realisasi total PAD bergerak fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di tahun terakhit. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh komponen **Pajak Daerah**, yang sempat terkontraksi tajam dari Rp67,90 Miliar (2022) merosot ke Rp51,04 Miliar (2023) dan menyentuh titik terendah Rp41,74 Miliar pada tahun 2024, sebelum melompat kembali ke angka Rp65,04 Miliar pada tahun 2025. Sebaliknya, sektor **Retribusi Daerah** menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten setiap tahunnya, merangkak dari Rp4,51 Miliar (2021) hingga mencapai Rp8,15 Miliar (2025).

Berdaarkan tabel 3.5, Pendapatan Transfer (Pusat dan Antar Daerah) bernilai jauh lebih besar dan menjadi tulang punggung utama pembiayaan pembangunan daerah dengan pola pergerakan titik akumulasi transfer tertinggi di tahun 2023 berkisar Rp755,16 Miliar, kemudian di tahun 2024 terdapat lonjakan signifikan pada Bantuan Keuangan Antar Daerah sebesar Rp93,17 Miliar, lalu menurun tajam pada Dana Perimbangan di tahun 2025 menjadi Rp578,14 Miliar dan Bantuan Keuangan menjadi hanya Rp1,12 Miliar.

Melalui analisis diagnostik, tingginya volatilitas pada postur pendapatan Belitung Timur disebabkan oleh dua faktor utama:

1. **Sisi Pendapatan Transfer (Eksternal):** Kebijakan fiskal pusat dan formula baru penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pasca-implementasi regulasi turunan UU HKPD berdampak langsung pada penurunan Dana Perimbangan di tahun 2025. Ketergantungan eksternal yang tinggi ini menciptakan ketidakpastian dalam penyusunan plafon belanja jangka menengah.
2. **Sisi Pajak Daerah (Internal):** Penurunan tajam Pajak Daerah pada tahun 2023–2024 mengindikasikan adanya kontraksi ekonomi pada sektor makro

pembentuk PDRB (seperti fluktuasi komoditas tambang/perkebunan) atau adanya masa transisi penyesuaian regulasi tarif pajak daerah baru.

Merespons temuan diagnostik di atas, Pemerintah Daerah telah melaksanakan langkah-langkah strategis:

- **Intensifikasi Retribusi secara Konsisten:** Keberhasilan pertumbuhan Retribusi Daerah (2021–2025) merupakan hasil nyata dari perbaikan tata kelola objek pungutan dan penyesuaian tarif berbasis pelayanan publik.
- **Percepatan Digitalisasi Pajak (ETPD):** Lompatan pemulihan nilai Pajak Daerah dan komponen *Lain-lain PAD yang Sah* (mencapai Rp53,26 Miliar) pada tahun 2025 membuktikan bahwa kebijakan perluasan kanal pembayaran digital dan integrasi basis data wajib pajak berbasis IT mulai memberikan daya ungkit fiskal.

3.2.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu 2021-2025. Analisis terhadap perkembangan komponen ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Historis (2021-2023) Pada tahun 2021, pendapatan pada sektor ini memberikan kontribusi maksimal sebesar Rp24,59 Miliar, yang secara dominan bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan. Namun, memasuki tahun 2022 dan 2023, terjadi koreksi nilai yang signifikan menjadi rata-rata Rp8,6 Miliar per tahun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya alokasi pendapatan yang bersifat spesifik (*earmarked*) dari jenjang pemerintahan di atasnya maupun penyesuaian regulasi sektoral.
2. Kinerja Pendapatan Hibah Penerimaan hibah mencatatkan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp1,74 Miliar. Namun, tren ini tidak berkelanjutan, di mana pada tahun-tahun berikutnya nilai hibah mengalami kontraksi hingga mencapai titik terendah pada proyeksi tahun 2025 sebesar Rp100 Juta. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi kerja sama pihak ketiga dan peningkatan lobi pendanaan ke pemerintah pusat maupun provinsi.

3. Memasuki periode perencanaan 2024 dan 2025, terlihat adanya penurunan drastis pada pos Lain-Lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang diproyeksikan menjadi nihil pada tahun 2025. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa ketergantungan pendapatan pada aspek regulasi eksternal memiliki risiko ketidakpastian yang tinggi.

Tabel 3. 6 Anggaran Pendapatan Lain-Lain PD yang Sah

TAHUN	HIBAH	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TOTAL
2021	500.000	24.594.782.437	24.595.282.437
2022	1.749.750.000	6.987.098.214	8.646.848.214
2023	249.750.000	8.445.985.177	8.695.735.177
2024	249.750.000	1.000.000.000	1.249.750.000
2025	100.000.000	0	100.000.000

Mengingat kapasitas Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat cenderung mengalami rasionalisasi dan kontraksi (sebagaimana potret tahun 2025), mengingat ruang fiskal dari pendapatan non-PAD mengalami penyusutan signifikan, maka proyeksi pendapatan tahun 2027 wajib bertumpu pada penguatan kemandirian lokal. Akselerasi Fondasi Digital tidak lagi sekadar pilihan, melainkan instrumen diagnostik utama untuk memperluas basis Pajak dan Retribusi Daerah guna menutup celah penurunan fiskal dari sektor transfer pusat.

3.2.1.2 Belanja Daerah

Menurut PP 12 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan komponen beban belanja terbesar bagi daerah. Berdasarkan data historis, anggaran Belanja Operasi menunjukkan peningkatan yang konsisten, mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp777,31 Miliar.

Peningkatan belanja operasi, khususnya pada pos belanja pegawai di tahun 2025 dan 2026, dipengaruhi secara langsung oleh implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Kebijakan ini mengamanatkan penataan tenaga non-ASN, di mana struktur kepegawaian pemerintah hanya terdiri dari PNS dan PPPK.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan transformasi tenaga honorer menjadi PPPK melalui dua tahap pengangkatan. Proses ini disesuaikan dengan kuota formasi yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat, yang secara otomatis berimplikasi pada peningkatan alokasi anggaran belanja pegawai dalam jangka pendek guna menjamin kepastian status dan kesejahteraan aparatur.

Meskipun terjadi peningkatan pada pos pegawai, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen melakukan rasionalisasi pada belanja barang dan jasa serta beban operasional lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal agar kapasitas belanja pembangunan tetap terjaga di tengah beban belanja pegawai yang meningkat.

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp140,95 Miliar. Terjadi kontraksi pada alokasi belanja modal menjadi Rp53,69 Miliar. Penurunan ini merupakan dampak dari keterbatasan ruang fiskal akibat prioritas pemenuhan belanja pegawai mandatori serta penyesuaian terhadap regulasi UU HKPD mengenai batas maksimal persentase belanja pegawai.

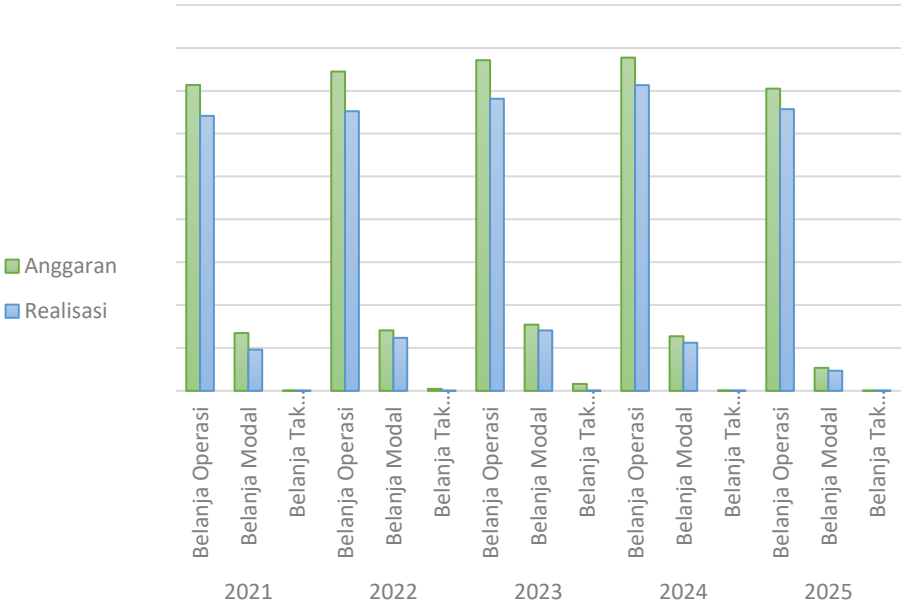
Tabel 3. 7 Anggaran Belanja Kabupaten Belitung Timur

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga
2021	713.518.845.576,00	134.827.452.347,00	938.791.769,00
2022	744.770.306.026,00	141.093.496.846,00	4.706.480.080,00
2023	771.338.851.881,00	154.392.050.365,00	16.118.836.845,00
2024	777.319.202.331,00	127.410.219.477,00	1.000.000.000,00
2025	704.996.427.701,00	53.693.285.735,00	600.000.000,00

Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Belitung Timur

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga
2021	641.440.914.877,89	96.095.891.289,57	635.975.007,00

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga
2022	652.310.550.764,50	123.645.920.737,09	249.084.207,00
2023	681.366.908.279,00	140.952.247.876,00	627.079.203,00
2024	713.084.137.276,00	112.181.291.716,00	559.132.832,00
2025	657.108.271.602,53	46.905.627.405,62	587.088.502,00



Grafik 3. 7 Realisasi Belanja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025

Sumber: BPKPD Kab.Belitung Timur, data diolah kembali, 2026

Kondisi riil belanja daerah Kabupaten Belitung Timur selama periode 2021–2025 secara deskriptif memperlihatkan dominasi yang sangat kontras antara alokasi konsumtif aparatur dan investasi publik. Postur Belanja Daerah secara mutlak dikuasai oleh kelompok **Belanja Operasi**, yang mencatatkan tren peningkatan konsisten dari Rp641,44 Miliar pada tahun 2021, naik menjadi Rp652,31 Miliar (2022), Rp681,36 Miliar (2023), hingga menyentuh puncaknya sebesar Rp713,08 Miliar pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2025 menjadi Rp657,10 Miliar, nilainya tetap mendominasi struktur anggaran belanja domestik.

Kontras dengan Belanja Operasi, performa **Belanja Modal** (infrastruktur dan pelayanan dasar) menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan di akhir periode analisis. Sempat menunjukkan sinyal positif dengan kenaikan bertahap

dari Rp96,09 Miliar (2021), Rp123,64 Miliar (2022), hingga mencapai Rp140,95 Miliar pada tahun 2023, nilai Belanja Modal langsung terkontraksi pada tahun 2024 menjadi Rp112,18 Miliar dan mengalami kemerosotan ekstrem pada tahun 2025 menjadi hanya sebesar Rp46,90 Miliar. Sementara itu, alokasi **Belanja Tak Terduga** bergerak fluktuatif pada rentang Rp249 Juta hingga Rp635 Juta dalam lima tahun terakhir.

Hasil diagnosis mendalam terhadap anomali belanja—khususnya anjloknya Belanja Modal secara drastis pada tahun 2025—mengidentifikasi adanya tekanan rigiditas fiskal yang sangat kuat pada APBD Kabupaten Belitung Timur. Akar masalah utama bersumber dari tingginya beban belanja wajib (mandatory spending) di sektor operasi serta dampak langsung dari berkurangnya kapasitas Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang memicu rasionalisasi anggaran secara besar-besaran. Dalam struktur penganggaran konvensional, ketika pendapatan daerah terkontraksi, sektor Belanja Modal sering kali menjadi komponen pertama yang dikorbankan untuk menjaga keseimbangan neraca.

Kondisi fiskal historis yang tergambar pada tabel 3.8 di atas menjadi sinyal peringatan bagi Pemerintah Daerah, mengingat implementasi penuh amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menuntut batas maksimal Belanja Pegawai sebesar 30% dan batas minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 40%. Rasionalisasi ekstrem pada Belanja Modal tahun 2025 menunjukkan bahwa daerah belum sepenuhnya siap menghadapi kepatuhan tersebut jika pola penganggaran tidak segera diubah secara radikal.

Sebagai respons kebijakan konkret yang telah dan sedang ditempuh, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menerapkan strategi pengendalian belanja secara rigid melalui pendekatan *value for money* dan simulasi restrukturisasi belanja daerah. Kebijakan terukur dilakukan dengan membatasi pertumbuhan belanja barang/jasa yang bersifat konsumtif, melakukan efisiensi ketat pada pos Belanja Operasi, serta mengarahkan alokasi belanja daerah secara fokus dan presisi pada **Program Unggulan dan Program Andalan (PU-**

PA) yang berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan layanan dasar.

Oleh karena itu, penyusunan proyeksi belanja untuk tahun anggaran 2027 dirancang bukan lagi sekadar mengikuti tren belanja historis, melainkan diformulasikan sebagai instrumen transisi strategis untuk menyehatkan postur APBD, memulihkan porsi Belanja Modal, dan menjamin kepatuhan bertahap terhadap regulasi UU HKPD.

3.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Piutang Daerah.
2. pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga, Dana Talangan, Pemberian Pinjaman Dana Bergulir; dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Prinsip pembiayaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk dapat diminimalkan sehingga pembiayaan dianggarkan dapat untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus pada tahun anggaran berjalan, maka arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam Kebijakan umum pembiayaan, bahwa penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah,serta pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, maka pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 137.250.986.725 dari target yang direncanakan tersebut telah terealisasi Rp 133.352.609.670, tidak mencapai target yang dianggarkan pada penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp 101.622.945,00.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel dibawah ini yang menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/ kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 3. 9 Anggaran Pembiayaan Kabupaten Belitung Timur

Tahun	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan Netto
2021	105.285.162.858,00	0	105.285.162.858,00
2022	110.473.654.663,00	500.000.000,00	109.973.654.663,00
2023	154.035.018.028,00	500.000.000,00	153.535.018.028,00
2024	137.250.986.725,00	4.000.000.000,00	133.750.986.725,00
2025	53.512.484.057,00	0	53.512.484.057,00

Tabel 3. 10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Belitung Timur

Tahun	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan Netto
2021	104.150.078.761,00	0	104.150.078.761,00
2022	110.772.619.463,00	0	110.772.619.463,00
2023	153.680.929.458,00	0	153.680.929.458,00
2024	137.352.609.670,00	4.000.000.000	133.352.609.670,00
2025	53.469.906.557,00	0,00	53.469.906.557,00

Tren pergerakan kapasitas pembiayaan neto yang disajikan pada table 3.10 ini mengindikasikan adanya perubahan fundamental dalam manajemen penyerapan fiskal daerah. Tingginya angka SiLPA yang menumpuk pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 mencerminkan adanya hambatan ejakulasi program di tingkat perangkat daerah, kendala regulasi pengadaan barang dan jasa, serta akumulasi *over-target* pendapatan yang belum

terpetakan secara presisi sejak awal perencanaan. Penumpukan SiLPA ini secara tidak langsung mengunci ruang fiskal yang seharusnya bisa segera dinikmati oleh pelayanan publik pada tahun berjalan.

Namun, penurunan drastis kapasitas Pembiayaan Netto hingga menyusut ke angka Rp53,46 Miliar pada tahun 2025 tidak boleh dinilai sebagai pelemahan kemampuan keuangan semata. Diagnosis yang lebih komprehensif menunjukkan bahwa penurunan ini merupakan dampak dari perbaikan manajemen kas daerah dan peningkatan efisiensi penyerapan operasional yang jauh lebih rigid. Langkah penyehatan anggaran tersebut didukung oleh kebijakan akselerasi pelaksanaan lelang dini untuk proyek-proyek infrastruktur strategis daerah, yang secara otomatis menekan sisa sisa tender yang tidak efisien dan meminimalkan keterlambatan serapan di akhir tahun anggaran.

Sebagai keberlanjutan dari diagnostik kebijakan yang telah berjalan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen untuk memantapkan sistem monitoring realisasi anggaran secara berkala. Formulasi proyeksi pembiayaan untuk tahun anggaran 2027 didasarkan pada asumsi manajemen likuiditas yang sehat dan presisi. Target utamanya adalah menjaga agar SiLPA tetap berada pada tingkat yang rasional dan efisien, sehingga kapasitas pembiayaan tidak lagi diandalkan sebagai instrumen penyelamat defisit dari perencanaan yang tidak matang, melainkan murni difungsikan sebagai cadangan stabilitas fiskal yang terukur dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

3.2.2 PROYEKSI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tahun 2027 memiliki arti strategis sebagai bagian dari masa transisi penataan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU HKPD. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyikapi batasan proporsi belanja pegawai maksimal 30% dengan senantiasa memperhatikan dinamika kebijakan nasional terbaru yang memberikan ruang relaksasi melalui perpanjangan masa transisi. Momentum ini dimaknai sebagai titik kulminasi dari serangkaian upaya penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang dijalankan secara bertahap dan terukur. Kepatuhan terhadap arah regulasi ini tetap menjadi komitmen daerah untuk menjamin kesehatan postur APBD yang

berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas operasional pelayanan publik melalui pemanfaatan kebijakan relaksasi guna menghindari implikasi administratif yang dapat menghambat pembangunan daerah.

Implikasi positif dari penataan belanja pegawai secara berkelanjutan adalah terciptanya ruang fiskal yang lebih luas untuk direalokasikan pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah Daerah berkomitmen melakukan trade-off strategis dengan menggeser alokasi dana operasional birokrasi menjadi belanja modal infrastruktur pelayanan publik yang ditargetkan minimal mencapai 40% dari total belanja APBD. Pergeseran ini memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah tidak habis untuk membiayai 'mesin' pemerintahan, melainkan digunakan untuk 'bahan bakar' pembangunan, seperti peningkatan kualitas jalan penghubung antar-kecamatan, revitalisasi fasilitas kesehatan primer, serta penyediaan sarana pendidikan yang modern guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun, guna mengakselerasi pemenuhan target infrastruktur pelayanan publik tersebut di tengah keterbatasan kapasitas fiskal eksisting, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengambil langkah terobosan yang akuntabel melalui pemanfaatan instrumen pembiayaan alternatif. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, daerah menangkap arahan dan peluang penerimaan Pinjaman Daerah sebagai pengungkit finansial. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman ini akan dialokasikan secara rigid dan prudent khusus untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis daerah yang memiliki *multiplier effect* tinggi terhadap perekonomian masyarakat. Langkah ekspansif yang terukur ini diambil agar backlog pembangunan infrastruktur vital dapat teratasi lebih cepat tanpa mengorbankan stabilitas likuiditas kas daerah.

Sejalan dengan penataan sisi belanja dan pemanfaatan pembiayaan alternatif tersebut, arah kebijakan keuangan tahun 2027 juga berfokus pada upaya agresif dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi basis pajak baru, termasuk optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi kewenangan baru daerah. Selain itu,

digitalisasi sistem retribusi daerah pada sektor pariwisata dan perikanan akan diperkuat untuk meminimalisir kebocoran penerimaan. Dengan memperbesar porsi PAD dalam struktur pendapatan, Kabupaten Belitung Timur berupaya membangun pondasi kemandirian fiskal yang kokoh, sehingga mampu lebih responsif dan fleksibel dalam membiayai prioritas pembangunan daerah tanpa sepenuhnya bergantung pada fluktuasi kebijakan keuangan pusat.

Komitmen kemandirian fiskal ini berjalan selaras dengan tanggung jawab terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (green development), yang mekanismenya mulai ditata secara bertahap sejak tahun anggaran sebelumnya. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan pembersihan aset melalui penghapusan dan lelang terbuka terhadap kendaraan operasional berbahan bakar fosil dengan umur pemakaian di atas 10 tahun pada Perubahan APBD TA 2026. Hasil dari lelang aset ini secara langsung dikapitalisasi untuk memperkuat struktur penerimaan daerah pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah.

Selanjutnya, momentum tersebut ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2027 melalui kebijakan penajaman belanja modal yang pro-lingkungan, di mana alokasi anggaran akan difokuskan pada pengadaan kendaraan berbasis listrik (Electric Vehicle) sebagai pengganti moda transportasi yang telah ditiadakan. Pendekatan lintas tahun anggaran ini tidak hanya berhasil memotong beban biaya pemeliharaan tinggi dan konsumsi BBM fosil secara permanen, tetapi juga menjadi bukti nyata kepeloporan birokrasi daerah dalam mempercepat transisi energi bersih dan reduksi emisi karbon di tingkat lokal

3.2.3 PROYEKSI DAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah pada tahun 2027 diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang moderat, dengan tetap mengandalkan tiga sumber utama:

3.2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan terjadi melalui beberapa strategi utama, antara lain penguatan kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan basis penerimaan daerah. Digitalisasi sistem perpajakan menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan, dengan fokus pada peningkatan

kepatuhan wajib pajak serta transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, dimana salah satu asumsinya adalah peningkatan potensi pada Pajak Opsen PKB dan Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak PBJT-Tenaga Listrik.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mulai Tanggal 5 Januari 2025 diberlakukan Opsen Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Besaran Opsen Pajak PKB dan Opsen Pajak BBNKB adalah 66% (enam puluh enam persen) dari Pajak terutang dan besaran Opsen Pajak MBLB adalah 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak terutang. Sebesar 66% dari Pajak Provinsi PKB dan BBNKB diopsen kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Begitupun sebaliknya, sebesar 25% dari Pajak Kabupaten MBLB diopsen kepada Pemerintah Provinsi.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berkomitmen bersama untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pemungutan PKB, opsen PKB, BBNKB, opsen BBNKB, pajak MBLB dan opsen Pajak MBLB. Sinergi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bersinergi dalam melakukan Penagihan Pajak.
2. Optimalisasi Penerimaan Pajak.
3. Bersinergi dalam melakukan pendaftaran, pendataan, pertukaran data dan informasi, pemanfaatan program, pengelolaan, pengurusan izin, pengawasan, pendampingan, dukungan kapasitas, penagihan, perluasan titik layanan pembayaran, sosialisasi dan edukasi serta penindakan di lapangan.
4. Kerjasama dilakukan dalam hal pendanaan biaya operasional.
5. Rekonsiliasi Pajak, dan sebagainya.

Selain itu, pemanfaatan aset daerah dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi peluang strategis untuk

menciptakan sumber PAD baru yang lebih berkelanjutan, guna mendukung kemandirian fiskal daerah. Selain itu, terdapat peningkatan terhadap pendapatan BLUD (RSUD dan Puskesmas) pada lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3. 11 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2027

KODE	URAIAN	APBD	PROYEKSI APBD
		2026	2027
1	*2*	*3*	*5*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**759.427.623.936**	**802.800.390.630**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**138.321.181.936**	**150.000.000.000**
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	70.734.939.180	76.178.939.180
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	51.995.400.587	48.463.039.325
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.578.283.047	6.000.000.000
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	10.012.559.122	19.358.021.495
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**621.096.442.000**	**652.135.418.630**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	586.671.442.000	615.437.134.638
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.425.000.000	36.698.283.992
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**10.000.000**	**1.500.000.000**

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, SIPD, 2026

3.2.3.2 Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur pada periode evaluasi dan proyeksi ke depan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional serta dinamika pendapatan transfer. Pendapatan transfer tetap menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2027, total Pendapatan Transfer diproyeksikan mencapai Rp652,13 Miliar. Komponen ini terdiri dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Diproyeksikan sebesar Rp615,43 Miliar, diasumsikan naik Rp 30 Miliar dari tahun 2026.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah: Diproyeksikan sebesar Rp36,69 Miliar, yang mencerminkan sinergi pendanaan di lingkup regional.

Tabel 3. 12 Proyeksi Pendapatan Transfer

KODE	URAIAN	APBD	PROYEKSI APBD
		2026	2027
1	*2*	*3*	*4*
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**621.096.442.000**	**652.135.418.630**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	586.671.442.000	615.437.134.638
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.425.000.000	36.698.283.992

4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.000.000	1.500.000.000

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, SIPD, 2026

3.2.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

Sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren yang sangat fluktuatif. Setelah sempat mencapai angka signifikan pada tahun 2021 sebesar Rp24,59 Miliar, pendapatan pada pos ini mengalami penurunan drastis hingga diproyeksikan hanya sebesar Rp10Juta pada tahun 2026. Namun, pada tahun perencanaan 2027, terdapat upaya optimasi dengan proyeksi sebesar Rp1,5 Miliar. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan yang bersumber dari pengembalian hibah atau pendapatan sah lainnya direncanakan secara konservatif guna menghindari risiko defisit anggaran.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk Tahun 2027, salah satunya masih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan Nasional yang bersifat dinamis serta memperhatikan dinamika perekonomian ekonomi global terkini. Arah kebijakan perekonomian tahun 2027 juga disusun dengan memperhatikan dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2029. Dengan harapan ekonomi nasional, regional dan lokal akan tumbuh sampai dengan akhir tahun anggaran 2026, maka diproyeksikan sumber-sumber ekonomi akan membawa dampak dalam mencapai target perencanaan pendapatan daerah. Semakin tinggi penerimaan pemerintah pusat maka akan berpengaruh terhadap potensi naiknya penerimaan dana perimbangan/transfer dari pemerintah pusat dan sebaliknya. Semakin tinggi penerimaan provinsi maka akan semakin berpengaruh terhadap potensi naiknya dana bagi hasil bagi provinsi. Selanjutnya, semakin tumbuhnya dunia usaha dan semakin membaiknya pelayanan pemerintah daerah diharapkan mampu mendukung tercapainya target Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027, memuat beberapa hal terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah.

3.2.4 PROYEKSI BELANJA DAERAH

Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2027 disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Proyeksi belanja ini diarahkan sebagai instrumen fiskal utama untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di tengah dinamika ekonomi makro dan penyesuaian arah kebijakan di tingkat nasional, postur belanja dirancang secara cermat agar tetap memiliki daya ungkit yang optimal terhadap pencapaian target-target sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dihadapkan pada tantangan pengelolaan ruang fiskal yang cukup ketat. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh proporsi Belanja Operasi, khususnya komponen Belanja Pegawai, yang memakan porsi signifikan dari total postur belanja daerah. Penganggaran komponen gaji, tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dialokasikan secara presisi dengan berpijak pada kebutuhan dan realisasi riil Tahun Anggaran 2025. Pendekatan penganggaran ini merupakan langkah strategis untuk menjamin kelancaran pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak aparatur secara adil, meskipun hal ini menempatkan Pemerintah Daerah dalam fase transisi menuju pemenuhan batas maksimal proporsi belanja pegawai sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Di samping penataan komponen belanja pegawai tersebut, struktur Belanja Operasi tahun anggaran ini juga mengakomodasi kewajiban finansial daerah berupa alokasi Belanja Bunga. Penganggaran Belanja Bunga ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan penarikan Pinjaman Daerah yang diambil sebagai instrumen pembiayaan alternatif. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman secara tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan skema perjanjian, guna tetap menjaga kredibilitas dan stabilitas pengelolaan keuangan daerah di mata publik dan lembaga keuangan.

Menyikapi keterbatasan ruang gerak fiskal tersebut, strategi alokasi belanja daerah mutlak difokuskan pada rasionalisasi kegiatan dan penajaman prioritas. Distribusi pagu anggaran diarahkan secara ketat untuk mengamankan dan mendanai Program Unggulan dan Program Andalan (PU-PA) yang dirancang untuk memberikan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat. Di tengah penyesuaian ini, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen mengoptimalkan belanja modal dan infrastruktur strategis, seraya mereduksi inefisiensi pada kegiatan-kegiatan yang semata-mata bersifat penunjang administratif. Komitmen penajaman belanja modal ini juga diwujudkan melalui kebijakan pengadaan yang berwawasan lingkungan (*green procurement*), di mana alokasi Belanja Modal dialokasikan secara khusus untuk pengadaan kendaraan berbasis listrik (Electric Vehicle) sebagai moda transportasi operasional dinas yang baru. Langkah ini diambil bukan sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja, melainkan sebagai substitusi strategis atas penghapusan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil berusia di atas 10 tahun yang telah dilelang pada Perubahan APBD 2026, sehingga mampu memotong beban biaya pemeliharaan tinggi dan konsumsi BBM secara permanen sekaligus memelopori transisi energi bersih di lingkungan birokrasi.

Untuk menjamin bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat terealisasi secara efektif dan selaras dengan prioritas daerah, pelaksanaan belanja tahun 2027 perlu dikawal dengan sistem pengendalian yang terintegrasi. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa seluruh usulan pembangunan, aspirasi masyarakat, dan target kinerja perangkat daerah dapat dieksekusi secara tepat sasaran, transparan, dan sinergis, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara maksimal di tengah segala keterbatasan anggaran yang ada.

Perhitungan proyeksi belanja daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 tetap mengacu pada pencapaian prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. Meskipun daerah mengadopsi prinsip fleksibilitas atas perkembangan kebijakan relaksasi fiskal nasional, secara teknokratis RKPD 2027 ini tetap diproyeksikan untuk memenuhi ambang batas (threshold) kebijakan belanja yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Alokasi anggaran sedikitnya 20% dari total belanja untuk bidang Pendidikan.
2. Alokasi sedikitnya 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah bawahan untuk pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik.
3. Alokasi Belanja Pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD.
4. Alokasi sebesar 10% untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari Dana Transfer Umum.

Selain pemenuhan belanja wajib di atas, beberapa komponen pendapatan bersifat earmarked artinya penggunaannya sudah ditentukan, belanja earmarked yaitu pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, pendapatan BLUD, Dana Desa, dan Dana Kapitasi. Komponen pendapatan yang termasuk Dana Alokasi Non Fisik adalah Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) dan beberapa pendapatan yang sesuai dengan menu tema DAK Non Fisik. Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang diusulkan oleh Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang belanjanya juga diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan di RS. Walaupun telah menyandang status BLUD, pendanaan RSUD juga tetap didukung oleh APBD. Dana Desa adalah bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Kapitasi adalah dana besaran pembayaran per bulan yang di bayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

3.2.4.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi diproyeksikan sebesar **Rp666.156.769.569**, mendominasi struktur belanja daerah. Pengalokasian pada kelompok belanja ini diutamakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas administratif, penyelenggaraan pelayanan dasar, serta fungsi pengawasan Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp434.976.382.822. Sebagaimana dijelaskan pada kebijakan makro, besaran ini telah memperhitungkan

kebutuhan riil aparatur di luar komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil), serta menjadi bagian dari langkah transisi penyesuaian postur belanja daerah.

- Belanja Barang dan Jasa diestimasikan sebesar Rp210.952.704.970. Alokasi ini diterapkan dengan prinsip optimalisasi, meningkat dari pagu yang sama dengan tahun 2026, dengan memprioritaskan pemenuhan standar harga dan kebutuhan esensial operasional kantor, serta persediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan.
- Pada Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mengalokasikan anggaran Belanja Bunga sebesar Rp709.250.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Munculnya pos anggaran baru ini merupakan konsekuensi logis yang akuntabel atas diambilnya kebijakan pembiayaan alternatif melalui Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah). Dana pinjaman tersebut dikapitalisasi secara rigid untuk mengakselerasi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik yang strategis. Alokasi sebesar Rp709,25 juta pada tahun 2027 ini merupakan perwujudan kewajiban pemerintah daerah dalam membayar bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berjalan, guna menjaga kredibilitas fiskal daerah
- Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp9.990.431.777 guna memperkuat sinergitas dengan lembaga non-pemerintah dan mendukung program-program pemberdayaan kelompok masyarakat.
- Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp9.528.000.000 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan memitigasi risiko kerentanan sosial di tengah masyarakat.

3.2.4.2 Belanja Modal

Sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah ruang fiskal yang terbatas, alokasi Belanja Modal didorong mengalami peningkatan signifikan dari Rp66.656.027.289 pada tahun 2026 menjadi Rp102.702.207.236 pada tahun 2027. Lonjakan kapasitas belanja aset yang naik hampir tiga kali lipat ini merupakan implementasi nyata dari

langkah terobosan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif, yakni melalui Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah). Kebijakan ekspansif yang terukur ini diambil sebagai pengungkit (leverage) fiskal guna mengatasi keterbatasan APBD murni, sehingga proyek-proyek strategis daerah yang memiliki dampak ekonomi luas (multiplier effect) dapat diakselerasi pemenuhannya tanpa mengorbankan stabilitas likuiditas daerah. Kebijakan investasi aset fisik yang didanai melalui kombinasi kapasitas riil daerah dan pinjaman strategis ini diarahkan secara presisi pada lokus-lokus strategis dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan mendapatkan porsi terbesar yakni Rp66.712.907.500. Alokasi ini mengalami lonjakan drastis dari tahun sebelumnya (Rp9.739.388.770) dan secara spesifik diarahkan untuk penyediaan, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas pelayanan publik serta penataan ruang publik yang representatif. Prioritas pembangunan dan rehabilitasi pada pos ini mencakup penataan kawasan Taman Kota Simpang Lima yang selaras dengan rencana strategis pengembangan tata ruang, serta pemenuhan standar infrastruktur pemerintahan pada Kantor Camat Manggar, gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), dan kawasan Kantor Bupati.
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dialokasikan sebesar Rp19.657.788.576 guna meningkatkan kualitas konektivitas wilayah, aksesibilitas ekonomi, serta infrastruktur dasar. Salah satu lokus prioritas penanganan fisik pada pos ini adalah peningkatan/pemeliharaan ruas Jalan Selindang, peningkatan ruas jalan di kawasan mineapolitan, dan pemeliharaan ruas jalan yang menjadi jalur logistik pengangkutan hasil perkebunan kelapa sawit.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.834.571.830, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.561.911.330, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp100.000.000 dialokasikan untuk mendukung modernisasi peralatan kerja dan peningkatan kapabilitas teknis pelayanan. Fokus pemenuhan pada kelompok ini mencakup pengadaan fasilitas Oksinerator Dinas Lingkungan Hidup (LH) guna mendukung

optimalisasi pengelolaan limbah dan standar pelestarian lingkungan daerah

3.2.4.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada rekening BTT ini juga termasuk didalmnya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dimana penganggarannya tidak melebihi anggaran bantuan sosial yang direncanakan. Di tahun 2027 penganggaran BTT sebesar Rp. 600.000.000

3.2.4.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada jenis belanja ini terdiri dari Belanja Bagi Hasil pajak dan retribusi ke desa dan bantuan keuangan ke desa (Alokasi Dana Desa dan Dana Desa).

Belanja bagi hasil kepada desa wajib dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dianggarakan sebesar 10% dari target pajak dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten yang memiliki desa setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belanja daerah, berikut adalah rincian proyeksi belanja Kabupaten Belitung Timur:

Tabel 3. 13 Rincian Proyeksi Belanja Daerah

KODE	URAIAN	APBD	PROYEKSI APBD
		2026	2027
1	*2*	*3*	*5*
5	**BELANJA DAERAH**	**792.575.481.029**	**863.349.305.340**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**671.256.769.569**	**666.156.769.569**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	464.251.121.522	434.976.382.822
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.368.249.395	210.952.704.970
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	0	709.250.000
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	6.257.065.000	9.990.431.777
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	5.550.000.000	9.528.000.000

KODE	URAIAN	APBD	PROYEKSI APBD
		2026	2027
1	*2*	*3*	*5*
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**34.046.179.947**	**102.702.207.236**
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.834.571.650	14.669.599.830
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.739.388.770	66.712.907.500
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.397.923.887	19.657.788.576
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.074.295.640	1.561.911.330
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	100.000.000
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**600.000.000**	**600.000.000**
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	600.000.000	600.000.000
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	**87.502.865.165**	**93.890.328.535**
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	7.857.819.265	8.132.845.000
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	79.645.045.900	85.757.483.535

3.2.5 PROYEKSI DAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2027 disusun dengan pendekatan yang lebih progresif dan ekspansif melalui pemanfaatan instrumen pembiayaan alternatif untuk menopang percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang murni mengandalkan kapasitas internal ekosistem kas daerah, postur pembiayaan tahun 2027 mengombinasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan penarikan pinjaman modal eksternal secara akurat guna menutup defisit anggaran akibat ekspansi belanja publik.

Berdasarkan struktur proyeksi APBD TA 2027, terdapat perubahan arsitektur yang sangat signifikan pada pos Pembiayaan Daerah dengan rincian analisis sebagai berikut:

a. Lonjakan Target Penerimaan Pembiayaan melalui Kombinasi SiLPA dan Pinjaman

- Total Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2027 diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan sebesar 79,90%, yaitu tumbuh dari Rp33.247.857.093 pada APBD 2026 menjadi Rp59.813.888.710 pada proyeksi APBD 2027.
- Komponen Penerimaan Pembiayaan tahun 2027 tidak lagi ditopang secara tunggal oleh sisa anggaran, melainkan dikontribusikan oleh dua sumber utama:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA): Diproyeksikan sebesar Rp29.613.888.710. Nilai ini bergerak rasional mencerminkan estimasi sisa efisiensi realisasi belanja tahun anggaran berjalan.
2. Penerimaan Pinjaman Daerah: Ditetapkan secara agresif namun terukur sebesar Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah). Instrumen ini menjadi faktor utama pengungkit kapasitas fiskal daerah tahun 2027 untuk mendanai berbagai program prioritas publik.

b. Efisiensi Total melalui Nol-isasi Pengeluaran Pembiayaan

Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menetapkan kebijakan komitmen penuh fiskal publik berupa alokasi Rp0 (Nihil) pada tahun 2027. Ditiadakannya alokasi pengeluaran pembiayaan ini menegaskan bahwa fokus likuiditas daerah sepanjang tahun 2027 dialokasikan sepenuhnya secara Netto (Pembiayaan Netto sebesar Rp59.813.888.710) untuk menutupi celah fiskal pada belanja operasional dan belanja modal, tanpa melakukan penyertaan modal dinas atau pembentukan dana cadangan baru yang sifatnya tidak mendesak.

c. Penyeimbang Defisit Anggaran (Fiscal Gap Closure)

- Secara struktur makro, total Pembiayaan Netto sebesar Rp59.813.886.710 diarahkan seluruhnya sebagai instrumen penyeimbang untuk menutup Defisit Anggaran yang timbul akibat tingginya belanja investasi fisik daerah.
- Kombinasi pembiayaan ini berhasil mengunci total postur APBD Kabupaten Belitung Timur tahun 2027 pada angka berimbang Rp863.349.305.340, memastikan seluruh agenda kerja teknokratis yang tertuang di dalam RKPD mendapatkan kepastian dukungan pendanaan yang sah dan kredibel.

Melalui arsitektur Pembiayaan Daerah yang tertata, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjaga kedisiplinan fiskal yang tinggi. Masuknya dana Pinjaman Daerah sebesar Rp30 Miliar memberikan ruang gerak yang luas bagi akselerasi infrastruktur sekaligus membawa konsekuensi pemenuhan kewajiban belanja bunga yang harus dikelola secara akurat, efektif, dan transparan oleh seluruh lini perangkat daerah.

Tabel 3. 14 Proyeksi Pembiayaan Daerah

KODE	URAIAN	APBD	PROYEKSI APBD - RPJMD
		2026	2027
1	*2*	*3*	*5*
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**57.399.512.173**	59.713.886.710
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.299.512.173	59.613.886.710
6 . 1. 1	Sisa lebih pembayaran	100.000.000	29.613.886.710
6 . 1. 4	Penerimaan pinjaman daerah		30.000.000.000
6 . 1 . 5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		100.000.000
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan kerangka pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur yang dirancang untuk mengarahkan pencapaian Visi dan Misi daerah selama periode 2025–2029 pada setiap tahun perencanaan. Sasaran dan prioritas pembangunan dalam bab ini dirumuskan melalui proses perencanaan yang menyeluruh dan terintegrasi, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014–2034. Selain itu, penyusunan kerangka pembangunan ini juga mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat nasional serta kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan.

Implementasi kerangka pembangunan tersebut pada tahun 2027 tidak terlepas dari realitas dan kapasitas fiskal daerah. Sebagaimana telah diuraikan pada kebijakan keuangan daerah di Bab III, postur APBD berada dalam masa transisi penyesuaian porsi belanja pegawai, yang secara langsung berimplikasi pada terbatasnya ruang fiscal. Tantangan ini menuntut adanya rasionalisasi yang cermat, di mana sasaran pembangunan daerah harus difokuskan secara ketat untuk mendanai Program Unggulan dan Program Andalan (PU-PA) yang memiliki daya ungkit tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, termasuk penuntasan target infrastruktur strategis daerah.

Lebih lanjut, penetapan sasaran dan prioritas pembangunan merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipatif, antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada seluruh tingkatan serta pengumpulan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Belitung Timur. Untuk memastikan usulan-usulan partisipatif tersebut terkawal secara proporsional dan selaras dengan prioritas daerah di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengoptimalkan pemanfaatan PREASISI (Pemantauan REalisasi Aspirasi, Sinkronisasi Informasi, dan Sinergi Implementasi). Sementara itu, untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan RKPD, proses pengendalian dan evaluasi (Dalev) terhadap seluruh tahapan dan capaian kinerja kegiatan teknokratik akan dipantau secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan demikian, dokumen ini mencerminkan keselarasan yang solid antara efisiensi anggaran, pengendalian sistemik, dan aspirasi publik sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, responsif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Timur disusun sebagai penjabaran operasional dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Seluruh arah kebijakan tahunan difokuskan untuk mengakselerasi pencapaian Visi '**BELTIM NYAMAN & BERKEMAJUAN**', sehingga target kinerja yang ditetapkan memiliki relevansi kuat dalam mewujudkan daerah yang inovatif, berdaya saing, dan mandiri, serta memberikan dampak perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat

Visi:

"BELTIM NYAMAN & BERKEMAJUAN"

<table>
<tr><th>NYAMAN</th><th>BERKEMAJUAN</th></tr>
<tr><td>Secara etimologi berarti sesuatu yang memberikan atau menghasilkan kepuasan/ kelegaan/ keamanan/ ketenangan/ keceriaan</td><td rowspan="3">Kondisi masyarakat Belitung Timur yang merasakan perbaikan dan perubahan positif secara berkesinambungan dalam semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat. Seperti, pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, fasilitas dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan pemerataan pembangunan.</td></tr>
<tr><td>iNovatif, berdaYA saing, dan MANdiri</td></tr>
<tr><td>Gerakan bersama dengan semangat kolaborasi, sinergisitas, dan gotong royong antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat, dalam mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan, sebagai upaya menciptakan daya saing dan kemandirian daerah, demi terwujudnya kehidupan masyarakat Belitung Timur yang Maju, Sejahtera, dan Bahagia</td></tr>
</table>

Berdasarkan visi *"Beltim Nyaman & Berkemajuan"*, maka upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi tersebut dituangkan dalam **5 (Lima) Misi Kabupaten Belitung Timur** sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. **MISI 1:** Mewujudkan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital dan Kepemimpinan Kolaboratif
2. **MISI 2:** Mengembangkan Sumberdaya Manusia Yang Sehat, Cerdas Produktif, Berakhlak, Berbudaya, dan Bahagia
3. **MISI 3:** Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.
4. **MISI 4:** Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik yang Berkualitas dan Memadai Untuk Pemerataan Kesejahteraan
5. **MISI 5:** Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan Visi 'BELTIM NYAMAN & BERKEMAJUAN', tujuan dan sasaran pembangunan secara khusus menitikberatkan pada penguatan elemen '**NYAMAN**' yang dimaknai secara strategis sebagai **iNovatif, berdaYA saing, dan MANdiri**. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses

transformasi tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran pembangunan dirancang untuk memacu semangat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, guna mengoptimalkan potensi daerah melalui inovasi yang berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci utama dalam menciptakan kemandirian daerah yang tangguh serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal demi terwujudnya masyarakat Belitung Timur yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Secara alur, visi–misi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode lima tahun menjadi landasan serta dijabarkan ke dalam Tujuan untuk dioperasionalkan lewat program–program penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tercapainya tujuan juga dianggap sebagai *impact* keberhasilan dari tercapainya program–program yang ditetapkan. Tujuan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**

   Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih merupakan tujuan dari misi pertama yaitu membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut perlu didukung oleh peningkatan kapasitas dalam beberapa hal antara lain perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; pengelolaan keuangan; dan juga pengawasan. Selain itu peningkatan kinerja dan koordinasi antar pemangku kepentingan juga mengambil peran penting upaya pembenahan penyelenggaraan ketatapemerintahan.

2. **Tujuan 2: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat**

   Peningkatan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kualitas lingkungan hidup yang ada. Kabupaten Belitung Timur masih memiliki permasalahan dengan kualitas sanitasi dan air minum. Akses sanitasi dan air minum yang aman dan layak, pelayanan persampahan serta peningkatan aksesibilitas menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kinerja kualitas hidup di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam lima tahun mendatang. Selain itu, terdapat juga urgensi isu dan beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup yang harus diselesaikan.

3. **Tujuan 3: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

   Peningkatan perekonomian lokal membawa dampak yang luas bagi kondisi perekonomian di suatu daerah. Dengan meningkatnya perekonomian lokal di suatu daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan semakin baik. Peningkatan perekonomian lokal dapat dicapai melalui beberapa hal,

salah satunya adalah pengembangan sektor prioritas daerah. Selain itu, Kabupaten Belitung Timur juga perlu mengembangkan potensi daerah terutama pada sektor yang berhubungan dengan ekonomi biru.

4. **Tujuan 4: Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata**

   Peningkatan pembangunan infrastruktur yang layak serta dapat diakses secara luas dengan mudah oleh masyarakat menjadi tujuan pembangunan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terjangkau dan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kinerja infrastruktur wilayah sehingga secara beriringan dapat mendorong produktivitas masyarakat. Pembangunan infrastruktur akan meliputi pengembangan infrastruktur internet di perdesaan, sehingga pemberdayaan desa akan semakin meningkat.

5. **Tujuan 5: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

   Fokus kepada kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur, dimana terdapat permasalahan terkait pencemaran lingkungan dari aktivitas penambangan timah. Tujuan yang ditetapkan berfokus pada penurunan intensitas emisi GRK. Tujuan ini memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan keberlanjutan lingkungan melalui tata kelola yang bijaksana, pengembangan ekonomi hijau, serta pengendalian pencemaran dan perubahan iklim. Selain itu, tujuan ini juga berfokus pada persampahan, perbaikan kualitas air, dan penegakan regulasi terkait pencemaran.

Berdasarkan 5 (lima) Tujuan tersebut maka upaya-upaya yang menjadi target pembangunan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan sasaran yang dibutuhkan sebagaimana RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Daerah Berdasarkan Misi

NO	MISI	KODE	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET RPJMD 2027	TARGET RKPD 2027
1	**Mewujudkan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital dan Kepemimpinan Kolaboratif**	**1.1**	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	80,67	83,54	83,54
		1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	69	73	73
				Indeks SPBE	Nilai	4,16	3,25	2,5
				Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	81,56	70	70
				Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,51	4,15	4,15
				Maturitas SPIP	Level	2	3	3
		1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	71,49	84,23	84,23
2	**Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas Produktif, Berakhlak, Berbudaya, dan Bahagia**	**2.1**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Nilai**	73,99	74,71	74,71
		2.1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,78	11,99	11,99
				Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,03	9,42	9,42
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	21,3	87	21,4522,73
		2.1.2	Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terintegrasi	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,12*	73,35	74,35
				Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	16,34*	14,42	14,42
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	10,32	9,92	9,92
		2.1.3		Angka Kemiskinan	Angka	6,69	5,87	5,87

NO	MISI	KODE	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET RPJMD 2027	TARGET RKPD 2027
			Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	NA	60,47	60,47
				Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,69	88,38	88,38
				Indeks Perlindungan Anak	Nilai	72,57	71,26	71,26
				Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,67	57,67	57,67
3	**Mempercepat Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif, Serta Memperkuat Kolaborasi antar Pelaku Pembangunan**	**3.1**	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**Persen**	4,3	4,30 – 4,65	4,30 – 4,65
				Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita	**Ribu Rupiah**	89.761,70	90.350,00	90.350,00 – 94.470,00
				Indonesia Blue Economy Indeks (IBEI)	**Nilai**	127,778	31,62	31,62
				Rasio Gini	**Nilai**	0,231	0,208	0,210 – 0,230
		3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Milyar Rupiah	1.666.810	3.632.720	3.632.720
				PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Milyar Rupiah	196.150	227.160	227.160
				PDRB Industri Pengolahan	Milyar Rupiah	1.107.420	1.272.770	1.272.770
				Tingkat Inflasi	Persen	2,69	3±1	3±1
		3.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	1.073.895	494.000	1.155.000
		3.1.3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,05	2.26	2,63 – 2,92

NO	MISI	KODE	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET RPJMD 2027	TARGET RKPD 2027
4	**Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik yang Berkualitas dan Memadai untuk Pemerataan Kesejahteraan**	**4.1**	**Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata**	**Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah**	**Nilai**	69,36	80,18	80,18
		4.1.1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Nilai	84,5	80,67	80,67
		4.1.2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	63,92	79,69	79,69
5	**Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan**	**5.1**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**Persen**	NA	19,11	18,39
		5.1.1	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,27	76,68	76,68
				Indeks Risiko Bencana	Nilai	112,36	148,72	148,72

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur (diolah)

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029, pembangunan daerah memiliki penahapan setiap tahun agar memiliki fokus yang selaras dengan arah kebijakan, sasaran, dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Adapun penahapan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur secara detail disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Penahapan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
Prakondisi Transformasi: Fokus kepada penataan arah, regulasi, dan infrastruktur pendukung sebagai pijakan untuk pembangunan transformasi pada tahun 2026	**Fondasi Transformasi:** Fokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, layanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan kesejahteraan sosial, pengembangan awal sektor-sektor ekonomi unggulan, pembangunan infrastruktur dasar, serta upaya perlindungan awal lingkungan hidup.	**Pengembangan Fondasi:** Peningkatan sistem tata kelola digital, pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata dan terintegrasi, penguatan ekonomi kreatif dan pertanian, konektivitas wilayah, serta penguatan regulasi lingkungan.	**Penguatan Fondasi:** Konsolidasi tata kelola berbasis digital, akselerasi SDM unggul dan berbudaya, percepatan pertumbuhan ekonomi sektor prioritas, peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur publik, dan optimalisasi pengelolaan SDA secara berkelanjutan.	**Konsolidasi Capaian:** Menuju kondisi “Beltim Nyaman dan Berkemajuan”, dilakukan konsolidasi hasil transformasi dengan mendorong stabilitas dan daya tahan sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.	**Transisi Menuju RPJPD Tahap II (2045**): Akselerasi dan pemantapan arah pembangunan jangka panjang berfokus pada sistem pemerintahan bersih dan akuntabel, SDM unggul, ekonomi tangguh, infrastruktur berdaya saing, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pada Tahap III (2027), Pengembangan fondasi melalui peningkatan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata dan terintegrasi, serta peningkatan sektor ekonomi seperti pertanian dan ekonomi kreatif. Pada tahap ini, juga diperkuat konektivitas antar wilayah serta regulasi dan kesadaran terhadap perlindungan lingkungan hidup.

4.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.2.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah teknis dalam pengerucutan fokus prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran daerah yang diukur dengan indikator kinerja utama. Selain itu juga mempertimbangkan sasaran pembangunan makro tahun 2027. Detail mengenai strategi tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027

MISI		TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Berfokus pada percepatan digitalisasi birokrasi, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong kepemimpinan kolaboratif.
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	
2	Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan melalui penguatan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, serta distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang lebih merata dan terintegrasi di seluruh wilayah
			Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	
			Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	Berfokus pada penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan terpadu melalui peningkatan ketepatan sasaran program, pemutakhiran data sosial yang berkelanjutan, serta perluasan jangkauan layanan sosial hingga ke wilayah pesisir dan terpencil.
3	Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan , pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Mengoptimalkan penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah secara berkelanjutan.
			Meningkatnya pertumbuhan investasi	
			Meningkatnya kesempatan kerja	

MISI		TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
4	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Mengoptimalkan keterhubungan antar-kecamatan melalui pengembangan konektivitas wilayah dan kebutuhan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi daerah.
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dasar dan pemenuhan Infrastruktur dasar permukiman serta penyediaan ruang terbuka publik
5	Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengurangan, penanganan, dan pengolahan sampah di seluruh wilayah
				Mengoptimalkan upaya pengendalian kualitas lingkungan dengan pendekatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
				Mendorong penurunan emisi gas rumah kaca dan efisiensi energi di lingkungan pemerintah daerah

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur (diolah)

4.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan RPJMD 2025-2029, tahun 2027 merupakan fase Pengembangan Fondasi. Makna filosofis dan operasional dari fase ini adalah perluasan jangkauan serta peningkatan kualitas dari fondasi yang telah diletakkan sebelumnya. Jika pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan tata kelola birokrasi, maka pada tahun 2027 fokus tersebut bergeser pada integrasi layanan dan akselerasi pertumbuhan sektor-sektor prioritas yang didukung oleh teknologi digital.

Tabel 4. 4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2027

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Berfokus pada percepatan digitalisasi birokrasi, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong kepemimpinan kolaboratif.	1. Penguatan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sistem digital perpajakan dan retribusi daerah, peningkatan kapasitas pengelolaan aset sebagai sumber PAD, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan evaluasi kinerja penerimaan daerah. 2. Optimalisasi *smart government* melalui pemantapan Lawang Beltim sebagai portal pelayanan digital terpadu, sinergi dengan pemanfaatan Pusat Operasional Jaringan dan Data sebagai pusat kendali terintegrasi, yang terus didukung oleh keandalan manajemen keamanan data serta pemerataan infrastruktur konektivitas digital di seluruh wilayah. 3. Peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan kapasitas digital SDM ASN 4. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi pelayanan perizinan berbasis digital. 5. Peningkatan kepemimpinan kolaboratif yang terintegrasi melalui penguatan koordinasi dan kemitraan strategis antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta lembaga/organisasi mitra lainnya dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital
Berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui penguatan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, serta distribusi tenaga pendidik yang lebih merata dan terintegrasi di seluruh wilayah	1. Optimalisasi pembangunan sarana prasarana pendidikan, perluasan pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta peningkatan pemerataan dan kompetensi tenaga pendidik di seluruh wilayah 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan, penguatan pemanfaatan teknologi layanan kesehatan digital, serta pemerataan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di seluruh wilayah
Berfokus pada penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan terpadu	Optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), peningkatan ketepatan sasaran dan integrasi program

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
melalui peningkatan ketepatan sasaran program, pemutakhiran data sosial yang berkelanjutan, serta perluasan jangkauan layanan sosial hingga ke wilayah pesisir dan terpencil.	perlindungan sosial, serta perluasan cakupan layanan sosial bagi masyarakat di seluruh wilayah termasuk pesisir dan terpencil.
Mengoptimalkan penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah secara berkelanjutan	Peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui: • penyediaan teknologi sarana dan prasarana • penguatan pelaku usaha • perluasan akses pasar • peningkatan kompetensi pelaku usaha, dan • fasilitasi perlindungan HaKI
Mengoptimalkan keterhubungan antar-kecamatan melalui pengembangan konektivitas wilayah dan kebutuhan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi daerah.	Meningkatkan konektivitas antar-kecamatan melalui: - pengembangan jaringan transportasi - Memperbaiki dan memperluas jaringan jalan - penambahan trayek, dan - penguatan layanan penyeberangan
Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dasar dan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman serta penyediaan ruang terbuka publik baru yang memadai	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	Peningkatan akses jalan lingkungan, drainase, dan persampahan
	Penyediaan ruang terbuka publik yang baru sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat
Mengoptimalkan pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengurangan, penanganan, dan pengolahan sampah di seluruh wilayah.	Meningkatkan efektivitas pengelolaan persampahan melalui : • penguatan sarana-prasarana • penerapan pemilahan dan pengolahan berbasis 3R • mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor swasta
Mengoptimalkan upaya pengendalian kualitas lingkungan dengan pendekatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Memperkuat upaya pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan melalui : • pemantauan yang lebih intensif • penegakan regulasi
Mendorong penurunan emisi gas rumah kaca dan efisiensi energi di lingkungan pemerintah daerah	Melaksanakan transisi energi bersih sektor transportasi melalui peralihan kendaraan dinas pemerintahan secara bertahap ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB)

Sumber : Bapperida Kab. Belitung Timur, 2026 (diolah)

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam merumuskan prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2027 disusun melalui pendekatan teknokratik yang menekankan analisis berbasis data serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya, sebagaimana tersaji pada Bab 2. Berdasarkan rancangan awal RKPD 2027, terdapat beberapa hambatan struktural yang memerlukan intervensi tajam, yaitu antara lain:

1). Di sektor tata kelola, sistem layanan digital pemerintah daerah masih bersifat parsial dengan integrasi data antar perangkat daerah yang belum optimal. Hal ini berdampak pada kurang akuratnya data kemiskinan dan layanan publik yang belum sepenuhnya responsif. Pada tahun 2027, penuntasan integrasi data melalui *Single Data System* menjadi target utama untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
2). Permasalahan ekonomi di Belitung Timur dicirikan oleh rendahnya produktivitas serta daya saing ekonomi daerah akibat minimnya kontribusi sektor unggulan selain pertambangan. Meskipun sektor pertanian dan perikanan merupakan penyumbang PDRB terbesar, namun proses hilirisasi masih sangat minim. Pada tahun 2027, pengembangan fondasi diarahkan pada penciptaan ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan kompetitif, dengan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia serta memfasilitasi akses pasar melalui platform digital.
3). Isu lingkungan hidup juga menjadi variabel yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan tahun 2027. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan timah liar telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan degradasi lahan kritis. Hal ini diperburuk oleh rendahnya indeks kualitas tutupan lahan yang secara konsisten menurun sejak tahun 2021. Pada tahun 2027, kebijakan ditekankan pada penguatan regulasi persampahan dan perlindungan keanekaragaman hayati, termasuk rehabilitasi ekosistem mangrove untuk mengurangi laju abrasi di kawasan pesisir.

Sehingga dalam perumusan fokus permasalahan dan isu strategis untuk menentukan tema pembangunan di tahun 2027 juga perlu mempertimbangkan dampak masalah terhadap kewilayahan.

Berikut disajikan analisis prioritas pembangunan daerah berdasarkan permasalahan utama yang menjadi isu strategis daerah:

Tabel 4. 5 Prioritas Daerah Berdasarkan Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
Sistem layanan digital pemerintah daerah masih berjalan secara parsial, integrasi data antar-perangkat daerah yang terbatas, standar keamanan data yang belum seragam, serta kualitas dan pemerataan konektivitas digital yang belum optimal	Tata kelola pemerintahan berbasis digital yang belum optimal untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah	Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
Kompetensi ASN belum sepenuhnya mendukung kebutuhan tata kelola modern dan digital.		
Pengawasan internal belum mampu secara optimal mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan.		
Data pemerintah daerah belum sepenuhnya akurat, mutakhir, dan terpadu dalam satu sistem.		
Belum Optimalnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		
Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
Belum optimalnya integrasi layanan informasi dan layanan pengaduan publik, ditandai dengan belum tersedianya satu nomor layanan terpadu		
Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (Tahun 2024 = 8,99 Tahun)	Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Pengembangan Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Lebih Merata dan Terintegrasi.
Belum optimalnya capaian SPM urusan pendidikan (tahun 2024 = 83,48%)		
Kualitas hasil belajar peserta didik belum optimal, dan belum meratanya pembinaan kompetensi siswa (Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi pada tahun 2024 = 30,60%)		
masih tingginya angka prevalensi stunting (tahun 2024 = 17,1%)	Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan	
Belum optimalnya capaian SPM Urusan kesehatan (tahun 2024 = 90,71%)		

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
Keterbatasan tenaga kesehatan dan distribusinya (Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 = 71%)	mempercepat penurunan angka stunting	
Angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur masih diatas rata-rata Provinsi Bangka Belitung (tahun 2025 = 6,69%)	Percepatan upaya pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan layanan dasar	
Tingginya Garis Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur (Tahun 2025 = Rp. 925.729)		
Belum optimalnya capaian SPM Urusan Sosial (tahun 2024 = 88,76%)		
Belum optimalnya produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan berbasis digital	Peningkatan teknologi, sarana prasarana, pelaku usaha, dan akses pasar berbasis digital untuk mendorong produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, serta memperkuat daya saing pelaku ekonomi kreatif melalui digitalisasi dan perlindungan HaKI	Penguatan Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif.
Belum optimalnya pengembangan dan daya saing sektor ekonomi kreatif berbasis digital.		
Belum optimalnya konektivitas transportasi antar wilayah Kecamatan Kabupaten Belitung Timur	Peningkatan jaringan transportasi antar-kecamatan untuk mendukung konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi ekonomi	Penguatan Konektivitas Antarwilayah dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Permukiman serta Ruang Terbuka Publik
Keterbatasan ruang terbuka publik yang layak	Peningkatan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka publik yang layak sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat	
Belum meratanya cakupan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur dasar permukiman	Pemerataan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur dasar permukiman	
Masih adanya rumah tidak layak huni		

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana-prasarana, penerapan pemilahan dan pengolahan di sumber (3R), serta peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah	Penguatan Tata Kelola dan Kualitas Lingkungan Hidup
Belum optimalnya upaya pengendalian kualitas lingkungan	Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan	
	Penurunan emisi gas rumah kaca dan efisiensi energi di lingkungan pemerintah daerah	

Sumber: Bapperida Kabupaten Belitung Timur (diolah)

Berikut disajikan dampak isu strategis daerah terhadap kewilayahan berdasarkan klasifikasi isu strategis daerah dan fokus permasalahan di kecamatan :

Tabel 4. 6 Dampak Isu Strategis Daerah terhadap Kewilayahan

Klasifikasi Isu Strategis Daerah	Fokus Permasalahan di Kecamatan	Dampak Terhadap Kewilayahan
Tata Kelola & Digital	Parsialisasi layanan digital, rendahnya kompetensi IT ASN	Kesenjangan kualitas layanan publik antar desa dan kota
Ekonomi & Investasi	Ketergantungan pada timah, rendahnya hilirisasi agromaritim	Kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas global
SDM & Sosial	Stunting, angka putus sekolah, kemiskinan di atas rata-rata provinsi	Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal di sektor industri
Infrastruktur	Konektivitas antar kecamatan belum merata, RTLH masih tinggi	Terhambatnya distribusi logistik dan mobilitas masyarakat
Lingkungan	Degradasi lahan pasca tambang, ancaman banjir dan abrasi	Menurunnya daya dukung lingkungan untuk pemukiman

Berdasarkan hasil analisis penentuan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, maka Kabupaten Belitung Timur menentukan tema pembangunan untuk tahun 2027 adalah **"Akselerasi Fondasi Digital dan Penguatan Kesejahteraan Merata Berbasis Potensi Lokal"**. Tema ini merupakan sintesis dari tiga mandat utama yang harus diemban pada tahun 2027:

1. **“Akselerasi Fondasi Digital”**: Frasa ini secara langsung menjawab mandat utama Tahap III, yaitu “Peningkatan sistem tata kelola digital”, serta selaras dengan Misi 1 RPJMD. Kata “akselerasi” dipilih untuk menekankan bahwa fokusnya bukan lagi pada inisiasi, melainkan pada percepatan, perluasan, dan integrasi sistem digital yang telah dibangun pada tahap sebelumnya.
2. **“Penguatan Kesejahteraan Merata”**: Komponen ini merangkum mandat pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata dan terintegrasi, serta secara implisit mengamanatkan pemanfaatan DTSEN untuk memastikan pemerataan dan ketepatan sasaran. Ini selaras dengan Misi 2 RPJMD dan visi “Nyaman”.
3. **“Berbasis Potensi Lokal”**: Unsur ini mengikat tema besar dengan realitas di lapangan, memastikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi (sebagaimana diamanatkan dalam penguatan ekonomi kreatif dan pertanian) digerakkan oleh potensi unik masing-masing wilayah kecamatan. Ini sejalan dengan Misi 3 RPJMD dan menjadi jembatan menuju arah pembangunan kewilayahan.

Selanjutnya intervensi terhadap isu strategis dalam penyelesaian permasalahan daerah dilakukan melalui operasional dari program prioritas Kabupaten Belitung Timur yang dijabarkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Prioritas Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Sasaran RPJMD

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
[1] Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital				
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan				
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek TIK/Teknologi Digital	angka	2,75
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	persen	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	indeks	2,6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	level	2
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Level	2
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Pengawasan kearsipan eksternal	Nilai	62
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	persen	87,05
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat digitalisasi arsip	Nilai	91
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	persen	75,2
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	persen	100
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	persen	100
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	100

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	persen	40,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	persen	85,50
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi penduduk yang meninggal	persen	100,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan pada penduduk usia 0-17 tahun	persen	99,84
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi penduduk yang menikah	persen	84,00
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi penduduk yang bercerai	persen	47,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	persen	100
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan pemerintahan dan kerjasama yang difasilitasi	persen	100
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	persen	100
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	persen	100
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kualitas kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan,dan sumber daya alam	persen	100
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan	persen	100
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Predikat	Tepat Waktu

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Perda Tahun N	persen	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	persen	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	persen	100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD Pada Bidang Perekonomian dan SDA	persen	100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	100
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	70
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	persen	100
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	persen	2
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi, dan Evaluasi Kinerja ASN yang Sesuai	persen	100

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
		dengan Prosedur dan Sasaran yang Ditentukan		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	persen	14
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	persen	93,69
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (Irban Kesra, Irban Pemerintahan, Irban Ekbang dan Irban Investigasi) (Persen)	persen	83,08
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	persen	0
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Tindak Lanjut Hasil Konsultansi	persen	90
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Peringkat Capaian Atas Target Rencana Aksi Program pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) pada area Pengawasan Tingkat Provinsi	persen	3
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah ZI yang ditingkatkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	persen	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	persen	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Damar	Nilai	92
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Dendang	Nilai	88,5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gantung	Nilai	88

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kelapa Kampit	Nilai	88,3
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Manggar	Nilai	91,6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Simpang Pesak	Nilai	88,5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Simpang Renggiang	Nilai	85,5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik Kecamatan	persen	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persen	100
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	persen	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	persen	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	persen	100
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	75
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	persen	85
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	persen	85
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	persen	75

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
		Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	persen	75
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Predikat	Tepat Waktu
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Predikat	Tepat Waktu
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan tepat waktu	persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Anggaran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persen	98
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu	persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang telah bersertifikat	persen	96
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang tercatat dalam neraca daerah	persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian Keuangan Daerah	persen	14
[2] Pengembangan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang lebih merata dan terintegrasi.				
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	persen	88
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP	persen	94
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah Dikdas yang menerapkan kurikulum Mulok	persen	100

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok	persen	100
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan seseuai kebutuhan	persen	94
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	persen	96
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pengembangan bahasa dan sastra daerah	persen	55
Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terintegrasi				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	persen	14.42
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk;	Rasio	0.94
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi Paripurna	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	Nilai	119
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Pengelolaan Limbah)	persen	82
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	99
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penilaian Capaian Tatanan Kehidupan Sehat Mandiri	persen	81

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan balita wasting yang ditangani	persen	100
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	persen	85
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	Persentase	50
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	persen	65
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya				
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	60
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Ramah Anak	persen	56,41
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang terlayani	persen	100
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	persen	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	persen	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persen	100
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan RAD PUG	persen	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka aktif	persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	persen	70
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	persen	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan	persen	27

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	persen	3
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	persen	23
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang tersedia	persen	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	persen	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	persen	67
Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terintegrasi				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Bina Keluarga Aktif	persen	82
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif	persen	77
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	Orang	2
[3] Penguatan pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif .				
Meningkatnya Kesempatan Kerja				
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Pekerja	2756
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi				
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	59,78
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	33
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Persen	9,58
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Persen	9,58

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persen	70
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilesatarikan dan Dikembangkan	Persen	62
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	65
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan wisatawan ke Museum	Persen	65
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	65
		Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	70
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	15
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	80
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	80
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase jumlah cadangan pangan	Persen	100
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	86.4
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	15.38
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	92,5
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Hortikultura, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan,	Persen Persen Persen	3 3 5

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan LP2B	Persen	15
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen Persen	10 3
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen Persen	20 30
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluhan Pertanian yang ditingkatkan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen Persen	20 5
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	Hektar	124320.7
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2800
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	42073
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	71.67
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	50
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	100
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	3.19
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	USD	310281848,21

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Tertib Ukur	Persen	70
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	Persen	3
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	3
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, Akurat dan terkini	Persen	3
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi				
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	93,5
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman modal	Persen	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA)	Investor	405
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	100
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen	2
Meningkatnya Kesempatan Kerja				
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	90,23
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	Persen	9,04
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	78,26
[4] Penguatan Konektivitas Antarwilayah dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Permukiman serta Ruang Terbuka Publik				
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah				
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	Unit	3

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	KM	590,3
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	15.8
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah				
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata dan dipelihara	Persen	100
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	Persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	5,5
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	80
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persen	40
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik, luas irigasi yang dapat berfungsi dengan baik dan efisiensi penggunaan air irigasi	Persen	62,9
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	14,26
		Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	38

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis	Persen	40
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	62,44
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	60,82
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang tertata	Persen	99,76
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	80,28
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	77,43
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	1,96
[5] Penguatan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup				
Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Perizinan Berusaha dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan Kabupaten	Usaha	45
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti di Kabupaten	Persen	80
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	15
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Persen	52.5
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Persen	69.85
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Persen	90

PRIORITAS / SASARAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Nilai	75.66
		Indeks Kualitas Lahan	Nilai	62.84
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	85,11
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	Persen	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluhan lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur (diolah)

4.3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

4.3.1.1 Fokus Utama Prioritas Nasional Berdasarkan RPJMN 2025-2029

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, pengembangan taman bumi (geopark) telah ditetapkan sebagai bagian dari Prioritas Nasional (PN) 2 dan PN 3. PN 2 berfokus pada pemantapan sistem pertahanan keamanan negara serta kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan, sementara PN 3 menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, dan penguatan sektor agromaritim serta industri kreatif. Dalam konteks RPJMD Belitung Timur, pengembangan geopark sebagai salah satu aset strategis daerah perlu diintegrasikan ke dalam prioritas pembangunan. Hal ini sejalan dengan arahan RPJMN yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, dan penyusunan rencana aksi terintegrasi untuk mewujudkan geopark sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, khususnya dalam kerangka UNESCO Global Geopark. Dalam RPJMN 2025-2029, pengembangan geopark Belitung Timur (Beltim) masuk ke dalam Prioritas Nasional (PN) 2 dan Prioritas Nasional (PN) 3. Berikut penjelasannya:

- **Prioritas Nasional (PN) 2:**
  Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan (ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru). Dalam konteks ini, geopark Belitung Timur dianggap sebagai area preservasi yang perlu dikelola secara berkelanjutan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, dan penyusunan rencana aksi terintegrasi.
- **Prioritas Nasional (PN) 3:**
  Melanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agromaritim. Pada PN 3, geopark Belitung Timur disebutkan sebagai bagian dari diversifikasi atraksi pariwisata, khususnya dalam kerangka pengembangan UNESCO Global Geopark. Berikut beberpa *highlight* intervensi berdasarkan RPJMN 2025-2029:
  1. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem, dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi.
  2. Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan.
  3. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi.
  4. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.
  5. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri.
  6. Penguatan pengelolaan hutan lestari.

Dengan demikian, pengembangan geopark Belitung Timur memiliki posisi strategis dalam dua prioritas nasional, yaitu PN 2 dan PN 3, yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan dan penguatan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan seperti yang tertuang dalam RPJMN 2025 - 2029, yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan kota desa yang akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa pembangunan desa dan Kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan Kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pencapaian pembangunan kewilayahan di Indonesia telah menunjukkan sejumlah kemajuan signifikan, terutama dalam (1) pengembangan kawasan pusat pertumbuhan (kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan destinasi pariwisata prioritas); (2) investasi pada kawasan pusat pertumbuhan, (3) peningkatan perkembangan status pembangunan desa; (4) peningkatan jumlah wilayah metropolitan Jawa; (5) penurunan tingkat kemiskinan desa dan daerah tertinggal; serta (6) revitalisasi badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama.

Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan dilaksanakan melalui intervensi lintas sektor dengan fokus pada beberapa aspek (a) pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur, termasuk perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, persampahan, layanan kesehatan, dan konektivitas; (b) transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan perdesaan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi skala lokal, pengembangan indikasi 30 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), penguatan lembaga ekonomi desa, pengelolaan dampak perubahan iklim, serta pengelolaan urbanisasi untuk memastikan terciptanya sinergi desa dan kota dalam pertukaran sumber daya, tenaga kerja, dan akses pasar sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan; (c) penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; (d) pembangunan 30 daerah tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengurangan risiko bencana; (e) pembangunan kawasan.

Untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam RPJMN 2025-2029, pembangunan kawasan perdesaan Belitung Timur (Beltim) masuk ke dalam Prioritas Nasional (PN) 6. Berikut penjelasannya:

- **Prioritas Nasional (PN) 6:**

  Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Pada PN.6 Pengembangan Kawasan Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT) di Belitung Timur merupakan strategi terobosan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan berdaya saing. KAMPIT dirancang sebagai kawasan yang mengintegrasikan inovasi, kewirausahaan, pertanian modern, ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kawasan ini secara langsung menjawab arah pembangunan pada Prioritas Nasional ke-6, karena:

  1. Mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah, melalui penguatan pelaku ekonomi lokal di desa dan kecamatan sekitar kawasan KAMPIT.
  2. Meningkatkan pemerataan ekonomi, karena pengembangan kawasan dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif dan

mengintegrasikan desa-desa penyangga ke dalam rantai nilai ekonomi kawasan.

3. Memberantas kemiskinan secara berkelanjutan, melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan vokasi dan kewirausahaan, serta dukungan terhadap transformasi UMKM menuju digitalisasi dan naik kelas.
4. Memperkuat kolaborasi multipihak, baik dari sisi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi dan inkubator bisnis sebagai penggerak inovasi.
5. Menjadi model pengembangan kawasan terintegrasi, berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, sesuai dengan pendekatan "local-based development" yang dianjurkan dalam RPJMN.

Pembangunan Kawasan Perdesaan mensyaratkan pentingnya kerjasama dan sinergi program dan kegiatan antara kabupaten dan desa-desa yang ada dalam kawasan. Berdasarkan potensi dan model sinergisme yang telah dirumuskan sebelumnya, terdapat kebutuhan untuk melakukan pembangunan dalam Kawasan Pedesaan Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT). RPKP ini dirancang untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dengan melalui proses alur pembangunan kawasan melalui sinergi program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin antara Pusat, kabupaten dan desa, maupun antar desa menjadi syarat penting dalam implementasi pembangunan Kawasan Pedesaan Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT). Dokumen ini memilih implementasi PKP dalam kurun waktu lima tahun. Adapun fokus target pengembangan Kawasan pedesaan Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT) sebagai berikut:

1. **Tahun Pertama,** difokuskan pada penyusunan kebijakan dan regulasi pendukung, pembentukan dan pembinaan BUMDESMA kawasan, penguatan kapasitas kelembagaan wisata, penyusunan kajian dan masterplan kawasan, penguatan kapasitas UMKM, pelaksanaan event-event penunjang.
2. **Tahun Kedua,** difokuskan pada pemenuhan infrastruktur wisata, pemenuhan infrastruktur pendukung, penguatan kapasitas BUMDESMA Kawasan, penguatan kapasitas kelembagaan wisata, penguataan kapasitas UMKM, pelaksanaan event–event penunjang wisata,
3. **Tahun Ketiga,** difokuskan pada pemenuhan infrastruktur wisata, pemenuhan infrastruktur pendukung, penguatan kapasitas BUMDESMA Kawasan, penguatan kapasitas kelembagaan wisata, penguataan kapasitas UMKM, pelaksanaan event–event penunjang wisata,
4. **Tahun Keempat,** difokuskan pemenuhan infrastruktur wisata, infrastruktur pendukung, penguatan kapasitas BUMDESMA Kawasan berkelanjutan, penguatan

kapasitas kelembagaan wisata, penguataan kapasitas UMKM, pelaksanaan event–event penunjang wisata,

5. **Tahun Kelima,** difokuskan pada pengembangan kawasan wisata berkelanjutan, penguatan kapasitas BUMDESMA Kawasan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan wisata berkelanjutan, penguataan kapasitas UMKM berkelanjutan, pelaksanaan event–event penunjang wisata.

4.3.1.2 Sinergi Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 Berdasarkan Sasaran Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur disusun dengan mengedepankan prinsip sinkronisasi terhadap kebijakan nasional guna memastikan keterpaduan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi ini dilakukan melalui intervensi dukungan program pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP tahun berkenaan. Melalui pendekatan ini, Belitung Timur diarahkan untuk berkontribusi dalam pencapaian target-target pembangunan nasional, sekaligus memperoleh dukungan strategis dari pemerintah pusat guna mempercepat realisasi tujuan pembangunan daerah. Menyelaraskan tema pembangunan daerah (RKPD) dengan tema nasional (RKP) merupakan langkah krusial untuk memastikan arah kebijakan di tingkat lokal berjalan beriringan dengan target makro nasional.

Secara prinsip, tema RKPD 2027 fokus pada "**Bagaimana potensi lokal diakselerasi lewat digitalisasi demi kesejahteraan yang merata,**" sementara RKP 2027 fokus pada "**Bagaimana pertumbuhan ekonomi dipacu lewat produktivitas, investasi, dan industri.**" Dilihat dari penyelarasan ini Daerah tidak hanya menjadi objek pertumbuhan nasional, melainkan motor penggerak utamanya. Fondasi digital dan optimalisasi potensi lokal di tingkat daerah merupakan prasyarat utama untuk memacu produktivitas rakyat. Ketika produktivitas lokal meningkat berkat efisiensi digital, iklim investasi daerah akan membaik. Investasi dan hilirisasi industri berbasis potensi lokal inilah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan kesejahteraan yang merata di tingkat tapak. Keselarasan tema Pembangunan antara RKPD dengan RKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 8 Sinergi Kabupaten Belitung Timur Terhadap Prioritas Nasional

Fokus RKP 2027	Fokus RKPD 2027	Keselarasan
Produktivitas	Akselerasi Fondasi Digital	Menggunakan digitalisasi untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas komoditas lokal

Fokus RKP 2027	Fokus RKPD 2027	Keselarasan
Investasi dan Industri	Berbasis Potensi Lokal	Mendorong masuknya investasi pada sektor hilirisasi industri pengolahan yang berbasis bahan baku unggulan daerah, sehingga menciptakan nilai tambah (*value-added*) di tingkat lokal
Pertumbuhan Berkualitas	Kesejahteraan Merata	Memastikan hasil pertumbuhan dari sektor industri dan investasi tidak menumpuk di pusat kota, melainkan terdistribusi ke wilayah pedesaan melalui pemerataan akses digital dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Melalui logika penyelarasan tema yang telah diuraikan, Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pencapaian target nasional merupakan akumulasi dari keberhasilan pelaksanaan program di tingkat tapak. Sebagai wujud nyata pembagian peran tersebut, berikut disajikan matriks program prioritas daerah yang berfungsi sebagai penopang utama (*supporting system*) bagi indikator kinerja Prioritas Nasional, sekaligus sebagai pengungkit roda ekonomi domestik berbasis potensi lokal. Penjabaran program pendukung prioritas nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9 Sinergi Kabupaten Belitung Timur Terhadap Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
[PN 1] Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia				
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan				
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	75
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	85
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	85
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	75
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	75
[PN 2] Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru				
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi				

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	100
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	15.38
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	86,40
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	92,5
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	15
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	80
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	80
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	Hektar	124320,7
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2800
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	42073
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	71,67

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	Persen	15
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi hortikultura	Persen	3
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	5
		Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	3
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	5
		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Persen	20
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	20
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	30
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	10
		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	3
[PN 3] Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
Meningkatnya Kesempatan Kerja				
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Pekerja	90,23

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	9,04
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Persen	78,26
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	2756
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	59,78
	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	33
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Persen	9,58
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	9,58
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah				
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	Unit	3
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	KM	590,3
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	15,8
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah				
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan	Persen	100

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
		Strategis Lainnya yang ditata dan dipelihara		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	Persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	5,5
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	80
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persen	47
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik, luas irigasi yang dapat berfungsi dengan baik dan efisiensi penggunaan air irigasi	Persen	62,9
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	14,26
		Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	38
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis	Persen	40
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	62,44

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	60,82
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang tertata	Persen	99,76
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	80,28
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	80
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	1,96
[PN 4] Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan				
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Ramah Anak	Persen	56,41
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang terlayani	Persen	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Persen	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka aktif	Persen	100
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan RAD PUG	Persen	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	Persen	100

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	27
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	27
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	Persen	3
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	70
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	100
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	88
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	Persen	100

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP	Persen	94
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	Persen	96
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra daerah	Persen	55
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	Persen	30
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina	Persen	60
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah Dikdas yang menerapkan kurikulum Mulok	Persen	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok	Persen	100
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan seseuai kebutuhan	Persen	94
Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terintegrasi				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	Persen	119
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan balita wasting yang ditangani	Persen	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Bina Keluarga Aktif	Persen	82
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	99

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	Persen	65
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen	82
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penilaian Capaian Tatanan Kehidupan Sehat Mandiri	Persen	100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif	Persen	78
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	Persen	85
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi Paripurna	Persen	100
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	Persen	50
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	14,42
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	Nilai	0,94
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	Nilai	2
[PN 5] Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri				
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi				
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	93,5
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA)	Investor	405
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen	2
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman modal	Persen	100
[PN 6] Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan				
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi				
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, Akurat dan terkini	Persen	3
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	3
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	Persen	3

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	50
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	100
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	3,19
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	USD	310281848,2
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Tertib Ukur	Persen	70
[PN 7] Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan				
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan				
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kualitas kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan,dan sumber daya alam	Persen	100
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan	Persen	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Damar	Nilai	92
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Dendang	Nilai	88,5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gantung	Nilai	88
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kelapa Kampit	Nilai	88,3

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Manggar	Nilai	91,6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Simpang Pesak	Nilai	88,5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Simpang Renggiang	Nilai	85,5
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Predikat	Tepat Waktu
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Perda Tahun N	Persen	100
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi penduduk yang meninggal	Persen	100
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan pada penduduk usia 0-17 tahun	Persen	99,84
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi penduduk yang menikah	Persen	84
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi penduduk yang bercerai	Persen	47
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persen	14
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	100
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan pemerintahan dan kerjasama yang difasilitasi	Persen	100
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	Persen	100
		Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	Persen	100
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	40
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	85,55
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD Pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Tindak Lanjut Hasil Konsultansi	Persen	90
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Peringkat Capaian Atas Target Rencana Aksi Program pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) pada area Pengawasan Tingakt Provinsi	Persen	3

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah ZI yang ditingkatkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persen	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	93,69
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (Irban Kesra, Irban Pemerintahan, Irban Ekbang dan Irban Investigasi)	Persen	83,08
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	Persen	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persen	100
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persen	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	100
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	Persen	100

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	tingkat kematangan aspek TIK/ Teknologi digital	Angka	2.5
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Level	2
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.6
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Predikat	Tepat Waktu
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Predikat	Tepat Waktu
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan tepat waktu	Persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Anggaran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	98
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu	Persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang telah bersertifikat	Persen	96
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang tercatat dalam neraca daerah	Persen	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	14

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
[PN 8] Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur				
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persen	70
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilesatarikan dan Dikembangkan	Persen	62
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	65
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan wisatawan ke Museum	Persen	65
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	65
		Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	70
Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Perizinan Berusaha dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan Kabupaten	Usaha	45
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUO UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti di Kabupaten	Persen	80

PRIORITAS NASIONAL / SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	15
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Persen	52,5
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Persen	69.85
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Persen	90
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Nilai	75,66
		Indeks Kualitas Lahan	Nilai	62,84
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	85,11
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	Persen	100
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100

Sumber: Bapperida Beltim (diolah), 2026

4.3.1.3 Sinergi Direktif Presiden Berdasarkan RKP 2027

Dalam rangka sinergi langkah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyatakan komitmennya untuk mengacu dan menindaklanjuti arahan serta direktif Presiden Republik Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang konkret, terukur, dan berdampak. Penyusunan perencanaan daerah akan diarahkan agar sejalan dengan tema RKP Tahun 2027, yaitu *"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri"*, dengan mekanisme transmisi sebagaimana tertuang dalam Trisula Pembangunan dan direktif Presiden sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan (pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan GNI per kapita menjadi 8.000 USD)
    - Meningkatkan penerimaan negara dengan deregulasi dan kemudahan berusaha.
    - Meningkatkan kapasitas ekonomi dengan hilirisasi dan pengembangan kawasan industri serta penguatan rantai pasok dan konektivitas wilayah
    - Meningkatkan belanja sektor prioritas
    - Transisi energi bersih dan ekonomi hijau
2. Peningkatan SDM (Indeks Modal Manusia menjadi 0,59)
    - Meningkatkan infrastruktur layanan dasar pendidikan dengan revitalisasi dan peningkatan kualitas sekolah serta madrasah, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik
    - Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar (preventif dan protektif) dan perlindungan sosial adaptif
    - Meningkatkan kualitas SDM untuk jangka panjang dengan penguatan gizi dan kesehatan anak sejak dini (pra-stunting dan penyakit menular)
3. Penurunan Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan menjadi 4,5-5,0% serta tingkat kemiskinan ekstrem menjadi <0,5%*, rasio gini turun menjadi 0,372-0,375)
    - Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan vokasi dan kewirausahaan inklusif
    - Meningkatkan akses ke pekerjaan formal dengan penciptaan kerja bernilai tambah
    - Menjaga upah riil lebih stabil
    - Menurunkan kerentanan terhadap shock dengan bantuan sosial adaptif dan usaha produktif afirmatif

Tema RKP 2027 akan diturunkan menjadi langkah-langkah konkret yang implementatif dengan penekanan prioritas pembangunan pada RKP 2027

yang terdiri dari direktif presiden dan program-program konkret, terukur dan *high-impact*, dapat terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 1 Highlight Direktif Presiden

Enabler yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah konkret pada pelaksanaan program-program direktif Presiden adalah:

1. Pemerataan akses infrastruktur dasar berbasis mitigasi risiko lingkungan dan bencana
2. Digitalisasi dan penguatan satu data pembangunan, peningkatan kapasitas/kualitas/integritas pelayanan publik.

4.3.1.3.2 Intervensi Daerah dalam Sinergi Program Direktif Presiden

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)

Peraturan Presiden No 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, mengamanatkan peran K/L/D dalam Program MBG diantaranya terkait pengawasan keamanan dan mutu pangan.

Intervensi daerah untuk mendukung program MBG ini antara lain:

a. Penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan sesuai dengan kewenangan dinas terkait
b. Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi untuk SPPG
c. Pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan

2. Digitalisasi Pembelajaran

A. Komitmen Belitung Timur Dalam Transformasi Pembelajaran Digital
Transformasi pembelajaran digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Dunia pendidikan terus bergerak, dan kita di Kabupaten Belitung Timur tidak ingin tertinggal.
Transformasi digital bukan hanya tentang gawai dan jaringan, ini tentang bagaimana kita mengubah cara belajar dan mengajar menjadi lebih relevan, kreatif, dan adaptif dengan perkembangan zaman.
Kabupaten Belitung Timur berkomitmen untuk menjadi kabupaten yang tidak hanya siap bertransformasi, tetapi juga menjadi pelopor pendidikan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Kesiapan Infrastruktur Penunjang Pembelajaran Digital
Secara konkret, berbagai langkah strategis telah kami lakukan diantaranya adalah:
- Pengadaan peralatan TIK di satuan pendidikan

Meliputi: bangunan lab, chrome book, proyektor, router dan connector type C to HDMI

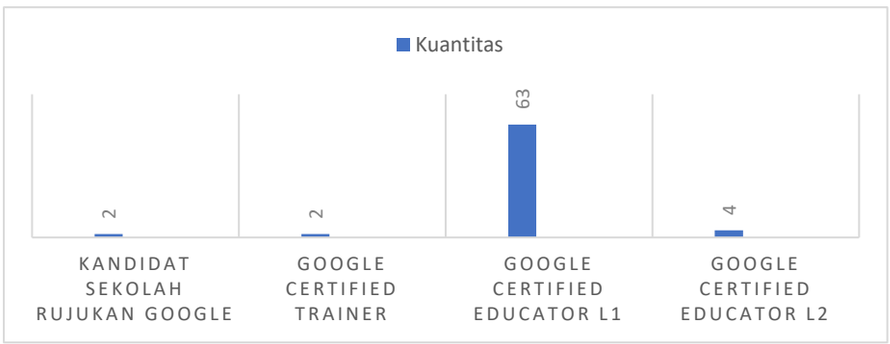
- Jaringan internet satuan pendidikan
  Pelaksanaan MoU dengan penyedia jaringan internet IconNet dengan kecepatan hingga 50 Mbps per satuan pendidikan.
- Kandidat sekolah rujukan google dan google certified trainer serta educator
  Beberapa sekolah di Kabupaten Belitung Timur saat ini tengah dipersiapkan sebagai kandidat sekolah rujukan google. Pendidik juga telah mengikuti pelatihan dan berhasil mendapatkan sertifikasi sebagai google certified educator dan google certified trainer.

Tabel 4. 8 Kesiapan Perangkat TIK di Sekolah Tahun 2025

No.	Satuan pendidikan	Tingkat Ketersediaan Perangkat TIK
1.	Pendidikan Kesetaraan	16.7 %
2.	Sekolah Dasar (SD)	87.6 %
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	90.9 %

Tabel 4. 9 Kesiapan Jaringan Internet di Sekolah Tahun 2025

No.	Satuan Pendidikan	Persentase Terkoneksi Internet	Keterangan
1.	PAUD	100 %	Full terkoneksi
2.	Sekolah Dasar (SD)	100 %	Wilayah Pulau : 3.8 % Wilayah Darat : 96.2 %
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100 %	Full terkoneksi



Grafik 4. 1 Data kandidat sekolah rujukan google, GCT dan GCE L1, L2 Tahun 2025

Selain kesiapan infrastruktur jaringan, Dinas Pendidikan juga melakukanan berbagai pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung kegiatan Digitalisasi Pendidikan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan Penggunaan TIK untuk Pendidikan (semua jenjang)
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi bidang Pendidikan (semua jenjang)
- Fasilitasi Komunitas Belajar PTK (SMP)

3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

Sejalan dengan PSN Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara proaktif mendukung pembangunan SMA Unggul Garuda yang berlokasi di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit. Program ini bertujuan untuk menciptakan pusat pendidikan menengah berkualitas tinggi dengan sistem

asrama (boarding school) yang berfokus pada Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Komitmen daerah ini diwujudkan melalui penyiapan beberapa alternatif lokasi lahan untuk pembangunan, penyediaan akses jalan menuju Sekolah Unggul Garuda dan prasarana infrastruktur lainnya yang dibutuhkan. Inisiatif ini merupakan implementasi langsung dari Misi 2 RPJMD dan mendukung pencapaian PN 4 (Pembangunan SDM), yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi.

4. Sekolah Rakyat

A. Komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam Mendukung Sekolah Rakyat

Menindaklanjuti surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : S-33/ MS/ PR.04.01/ 3/ 2025 Perihal Dukungan Partisipasi Pemerintah Daerah se- Indonesia dalam Pembentukan Sekolah Rakyat, dimana Pemerintah Daerah menyiapkan lokasi lahan, minimal berupa tanah dengan luas lahan 5 sampai dengan 10 hektar.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendukung sepenuhnya Program Sekolah Rakyat dan menyiapkan lahan dengan luas ± 8,6 (Delapan koma enam) hektare. Adapun lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang terletak di dalam Area Kompleks Perkantoran Terpadu Dusun Menggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan titik koordinat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10 Titik Koordinat Lokus Sekolah Rakyat di Kabupaten Belitung Timur

No	X	Y
1	192341.280	9679412.502
2	192370.319	9679331.762
3	192400.413	9679210.719
4	192421.221	9679026.692
5	192205.235	9678988.853
6	192129.306	9679326.485
Luas Total : ± 8,6 Hektar		

Dokumen pendukung sebagai kelengkapan usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Belitung Timur yang telah disiapkan antara lain:

- Surat dukungan oleh Kepala Daerah
- SK Penunjukan Tanah Lokasi Pembangunan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- Dokumen Proposal Usulan Rencana lokasi Sekolah Rakyat
- Dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK)
- Surat Pernyataan Kepala Daerah terkait dokumen usulan benar adanya

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen dalam proses rekruitmen siswa program Sekolah Rakyat sejumlah 9 rombongan belajar (Rombel) yang terdiri dari 3 Rombel tingkat Sekolah Dasar (SD), 3 Rombel tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 3 Rombel tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menugaskan SKPD terkait dalam rangka mendukung proses rekrutmen tersebut. Sebagai pertimbangan dalam proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

B. Urgensi Pengembangan Sekolah Rakyat di Kabupaten Belitung Timur

Penanganan kemiskinan memerlukan strategi yang bersifat holistik. Tidak hanya berfokus pada sasaran saja melainkan juga perlu upaya untuk mendukung lingkungan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Terdapat strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menanggulangi kemiskinan. Beberapa strategi tersebut berfokus pada pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan wilayah tinggi angka kemiskinan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendukung pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia khususnya Sekolah Rakyat. Terdapat beberapa pandangan mengenai urgensi pengembangan Sekolah Rakyat di Kabupaten Belitung Timur yang meliputi:

1. Merujuk pada regulasi dan program yang ada, perlindungan dan jaminan sosial masih menjadi fokus penanganan masyarakat miskin. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun Pemerintah Pusat dalam konteks Nasional. Program ini memang memiliki manfaat secara langsung dan cepat pada masyarakat miskin. Namun program ini memiliki potensi sulit dilakukan dalam jangka panjang karena bergantung pada pendapatan daerah dalam kondisi tertentu. Intervensi kemiskinan juga perlu dipandang sebagai langkah dalam membangun pengembangan kesejahteraan sosial yang meningkatkan pendapatan sehingga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Berbagai dukungan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia telah dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur khususnya melalui perlindungan dan jaminan sosial. Berbagai bentuk bantuan sosial tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 11 Bantuan Sosial yang Disalurkan Pemerintah

Kecamatan	DTKS		PBI-JK (jiwa)	BPNT (KK)	PKH (KK)
	Jiwa	KK			
Dendang	2873	1266	2246	333	**161**
Gantung	7695	3386	5693	798	**476**
Simpang Pesak	2606	1135	2416	317	**177**
Damar	4603	2062	4155	468	**231**
Manggar	11.349	5013	8966	1763	**1025**
Simpang Renggiang	1456	764	1303	247	**145**
Kelapa Kampit	5803	2669	3757	696	**405**
TOTAL	**36.265**	**16.295**	**28.536**	**4.622**	**2.620**

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan informasi bahwa terdapat beberapa program bantuan sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur yang meliputi Program Keluarga Harapan, Program BPNT/Sembako, dan Program PBI JK. Adapun jumlah penerima manfaat pada masing-masing program sejumlah 2.620 Keluarga untuk Program Keluarga Harapan, 4.622 Keluarga untuk Program BPNT/Sembako, dan 28.536 Jiwa untuk Program PBI JK.

2. Penanggulangan Kemiskinan dengan pendekatan pengembangan kesejahteraan sosial di Kabupaten Belitung Timur melalui pendekatan menyeluruh yang meliputi berbagai aspek pendidikan,

kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar keberhasilan program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi eksisting di wilayah Kabupaten Belitung Timur yang telah diuraikan sebelumnya, Sekolah Rakyat sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin khususnya usia anak sekolah agar dapat merasakan pemerataan pendidikan termasuk kurikulum yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

3. Model/Konsep Pendidikan Sekolah Rakyat sebagaimana program prioritas Bapak Presiden sangat cocok untuk Kabupaten Belitung Timur yang merupakan Kabupaten Kepulauan, yang dimana Kabupaten Belitung Timur terdapat 3 Kecamatan yang terdapat pulau kecil berpenghuni, sehingga Sekolah Rakyat ini dapat mengakomodir Putera-Puteri Belitung Timur yang berprestasi untuk semua Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung Timur.

Dalam proses seleksi calon siswa yang akan menerima pendidikan di Sekolah Rakyat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur menggerakkan TKSK dan PSM Desa untuk melakukan assesment dilapangan dan terkumpul sejumlah 75 Anak. Hasil akhir dari assesment tersebut terdapat 32 Anak yang terseleksi dimana orangtuanya sudah bersedia untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan dengan rombel yang dilaksanakan adalah SMP sebanyak 1 rombel. Data dukung pendidikan dari baik calon siswa maupun fasilitas pendukung lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 12 Satuan Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Jenjang	Jumlah			
			Sekolah	Siswa	Guru	Rombel
1	Manggar	PAUD :	29	1048	94	89
		SD	31	4086	296	208
		SMP	7	1989	130	70
Jumlah			67	7123	520	367
2	Damar	PAUD :	7	323	23	23
		SD	9	1270	89	62
		SMP	2	583	38	22
Jumlah			18	2176	150	107
3	Kelapa Kampit	PAUD :	20	698	62	59
		SD	17	1790	150	102
		SMP	5	929	80	33
Jumlah			42	3417	292	194
4	Simpang Renggiang	PAUD :	6	160	15	16
		SD	8	722	65	48
		SMP	2	294	20	11
Jumlah			16	1176	100	75
5	Gantung	PAUD :	20	819	72	59
		SD	20	3124	187	138
		SMP	5	1320	92	49
Jumlah			45	5263	351	246
6	Simpang Pesak	PAUD :	7	189	26	17
		SD	10	873	84	60
		SMP	2	365	32	15
Jumlah			19	1427	142	92
7	Dendang	PAUD :	8	273	29	22
		SD	10	1047	88	62
		SMP	2	352	28	14
Jumlah			20	1672	145	98
Total			227	22254	1700	1179

Tabel 4. 13 Guru yang telah mengikuti Sertifikasi se-Kab.Beltim

NO	JENJANG	JUMLAH BERSERTIFIKAT PENDIDIK
1	TK	79
2	SD	737
3	SMP	275
4	PENGAWAS	6
JUMLAH		1097

5. Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen untuk mendukung prioritas nasional pengentasan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengentasan kemiskinan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional ini, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Tim koordinasi penanggulangan Kemiskinan merencanakan serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Perangkat Daerah dan 7 UPTD untuk melaksanakan 3 (tiga) Strategi Percepatan Pengentasan kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem antara lain mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat miskin, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat miskin dan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan, selengkapnya dapat dilihat melalui Tabel berikut:

Tabel 4. 14 Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belitung Timur

NO	NAMA OPD	STRATEGI	SIFAT	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Dinas Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	470.000.000
2	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12.142.000.000
3	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.218.000.000,00
4	Dinas Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000
5	Dinas Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	695.000.000
6	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	190.000.000
7	Dinas Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	800.000.000
8	Dinas Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	470.000.000
9	Dinas Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	800.000.000
10	Dinas Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	695.000.000
11	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.430.000.000
12	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	190.000.000
13	Dinas Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000

NO	NAMA OPD	STRATEGI	SIFAT	SUB KEGIATAN	PAGU
14	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.218.000.000,00
15	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.150.000.000
16	Dinas Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000
17	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.218.000.000,00
18	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	755.000.000
19	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.218.000.000,00
20	Dinas Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000
21	Dinas Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	695.000.000
22	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	190.000.000
23	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	18.400.000
24	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	275.971.500
27	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	324.214.000
28	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	251.365.000
29	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	410.559.300
30	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.360.000
31	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	288.467.000
32	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	88.044.500
33	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	93.766.600
35	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	49.017.500
36	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	104.288.300
37	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	268.545.000
39	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	15.000.000
40	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	15.000.000

NO	NAMA OPD	STRATEGI	SIFAT	SUB KEGIATAN	PAGU
41	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.436.340.200
43	UPT Puskesmas Manggar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.380.000
44	UPT Puskesmas Manggar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.760.000
45	UPT Puskesmas Manggar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	29.160.000
47	UPT Puskesmas Manggar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.200.000
48	UPT Puskesmas Manggar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	234.720.000
49	UPT Puskesmas Manggar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	103.620.000
50	UPT Puskesmas Mengkubang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.000.000
52	UPT Puskesmas Mengkubang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.000.000
53	UPT Puskesmas Mengkubang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	103.998.400
54	UPT Puskesmas Mengkubang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.080.000
56	UPT Puskesmas Mengkubang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	111.910.000
57	UPT Puskesmas Mengkubang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	130.800.000
58	UPT Puskesmas Gantung	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.640.000
59	UPT Puskesmas Gantung	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.640.000
61	UPT Puskesmas Gantung	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.400.000
62	UPT Puskesmas Gantung	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35.280.000
63	UPT Puskesmas Gantung	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	171.370.000
65	UPT Puskesmas Gantung	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	116.280.000
66	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.880.000

NO	NAMA OPD	STRATEGI	SIFAT	SUB KEGIATAN	PAGU
67	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.960.000
68	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.100.000
69	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170.081.000
70	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	100.020.000
71	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.352.000
72	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.640.000
73	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.800.000
74	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.400.000
76	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	142.990.000
77	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	103.500.000
78	UPT Puskesmas Renggiang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.720.000
80	UPT Puskesmas Renggiang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.040.000
81	UPT Puskesmas Renggiang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.680.000
82	UPT Puskesmas Renggiang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.320.000
83	UPT Puskesmas Renggiang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	122.050.000
85	UPT Puskesmas Renggiang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	80.580.000
86	UPT Puskesmas Dendang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.344.000
87	UPT Puskesmas Dendang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.760.000
89	UPT Puskesmas Dendang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.240.000
90	UPT Puskesmas Dendang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	28.800.000

NO	NAMA OPD	STRATEGI	SIFAT	SUB KEGIATAN	PAGU
91	UPT Puskesmas Dendang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	114.843.000
92	UPT Puskesmas Dendang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	74.947.000
93	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000
94	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	730.000.000
95	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000
96	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	290.000.000
97	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8.500.000.000
98	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	300.000.000
99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	24.828.800
100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35.496.500
101	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000

NO	NAMA OPD	STRATEGI	SIFAT	SUB KEGIATAN	PAGU
102	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Penyediaan Permakanan	72.046.000
103	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Penyediaan Sandang	49.488.000
104	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Penyediaan Alat Bantu	80.080.200
105	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	13.650.000
106	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.345.942.751
107	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	310.000.000
108	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	75.000.000
109	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	570.000.000
110	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.819.200
111	Dinas Pertanian dan Pangan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	4.830.000
112	Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	100.000.000
113	Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	1.225.500.000
114	Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	430.000.000

NO	NAMA OPD	STRATEGI	SIFAT	SUB KEGIATAN	PAGU
115	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000
116	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.350.000.000
117	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	226.999.400
118	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	392.400.000
119	Dinas Perhubungan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	25.000.000
120	Dinas Perhubungan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	764.142.000
121	Dinas Perhubungan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	535.000.000
122	Dinas Perikanan	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	100.000.000
123	Dinas Perikanan	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	240.000.000
124	Dinas Perikanan	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	34.000.000
125	Dinas Perikanan	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	106.000.000
126	Dinas Perikanan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	620.000.000
127	Dinas Perikanan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000

NO	NAMA OPD	STRATEGI	SIFAT	SUB KEGIATAN	PAGU
128	Dinas Perikanan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000
129	Dinas Perikanan	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000

6. Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk sebagai wadah kolektif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi berbasis prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif warga. Koperasi ini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa serta memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Program ini diarahkan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional serta percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki potensi sumber daya namun belum terorganisasi secara optimal.

Pembentukan Kopdes Merah Putih juga dimaksudkan sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi yang berbasis pada potensi lokal, integrasi rantai nilai, dan keterlibatan aktif masyarakat. Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi lokomotif pengembangan usaha produktif, distribusi hasil ekonomi yang merata, serta pengelolaan aset desa yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan akses pembiayaan koperasi, diperlukan intervensi program yang mencakup kegiatan pelatihan teknis, sosialisasi kebijakan, serta mekanisme monitoring dan pengawasan yang sistematis. Kegiatan tersebut ditujukan bagi pengurus dan pengawas koperasi untuk memastikan tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Adapun kontribusi operasional Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui:

Tabel 4. 15 Operasionalisasi Direktif Presiden Koperasi Desa Merah Putih Tahun 2027

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4. 16 Daftar Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Belitung Timur

No	Desa	Nama Koperasi	No. Akta Pendirian	Jenis Pendampingan
1	Desa Baru	Koperasi Desa Merah Putih Baru Kecamatan Manggar	AHU-0012125.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
2	Desa Bentaian Jaya	Koperasi Desa Merah Putih Bentaian Jaya	AHU-0026412.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
3	Desa Buku Limau	Koperasi Desa Merah Putih Buku Limau	AHU-0038940.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
4	Desa Kelubi	Koperasi Desa Merah Putih Kelubi	AHU-0038512.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
5	Desa Kurnia Jaya	Koperasi Desa Merah Putih Kurnia Jaya Kecamatan Manggar	Nomor AHU-0019966.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
6	Desa Lalang	Koperasi Desa Merah Putih Lalang Kecamatan Manggar	Nomor AHU-0017420.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
7	Desa Lalang Jaya	Koperasi Desa Merah Putih Lalang Jaya	AHU-0014426.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
8	Desa Mekar Jaya	Koperasi Desa Merah Putih Mekar Jaya Kecamatan Manggar	AHU-0008267.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
9	Desa Padang	Koperasi Desa Merah Putih Padang Kecamatan Manggar	AHU-0007945.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
10	Desa Batu Penyu	Koperasi Desa Merah Putih Batu Penyu	AHU-0011520.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
11	Desa Gantung	Koperasi Desa Merah Putih Gantung Kecamatan Gantung	AHU-0025425.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
12	Desa Jangkar Asam	Koperasi Desa Merah Putih Jangkar Asam	AHU-0026410.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
13	Desa Limbongan	Koperasi Desa Merah Putih Limbongan	AHU-0024582.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
14	Desa Lilangan	Koperasi Desa Merah Putih Lilangan	Nomor AHU-0017491.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
15	Desa Lenggang	Koperasi Desa Merah Putih Lenggang	AHU-0035165.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi

No	Desa	Nama Koperasi	No. Akta Pendirian	Jenis Pendampingan
16	Desa Selinsing	Koperasi Desa Merah Putih Selinsing	AHU-0024941.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
17	Desa Balok	Koperasi Desa Merah Putih Balok	AHU-0015205.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
18	Desa Dendang	Koperasi Desa Merah Putih Dendang Kecamatan Dendang	Nomor AHU-0021272.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
19	Desa Jangkang	Koperasi Desa Merah Putih Jangkang	AHU-0038515.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
20	Desa Nyuruk	Koperasi Desa Merah Putih Nyuruk	AHU-0025231.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
21	Desa Simpang Pesak	Koperasi Desa Merah Putih Simpang Pesak	AHU-0011260.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
22	Desa Dukong	Koperasi Desa Merah Putih Dukong	AHU-0011299.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
23	Desa Tanjung Kelumpang	Koperasi Desa Merah Putih Tanjung Kelumpang	AHU-0012085.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
24	Desa Tanjung Batu Itam	Koperasi Desa Merah Putih Tanjung Batu Itam	AHU-0012111.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
25	Desa Aik Madu	Koperasi Desa Merah Putih Aik Madu	AHU-0007901.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
26	Desa Lintang	Koperasi Desa Merah Putih Lintang	AHU-0012045.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
27	Desa Renggiang	Koperasi Desa Merah Putih Renggiang	AHU-0006594.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
28	Desa Simpang Tiga	Koperasi Desa Merah Putih Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggiang	AHU-0006569.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
29	Desa Air Kelik	Koperasi Desa Merah Putih Air Kelik	AHU-0011922.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
30	Desa Burong Mandi	Koperasi Desa Merah Putih Burong Mandi	AHU-0011772.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
31	Desa Mempaya	Koperasi Desa Merah Putih Mempaya	AHU-0011381.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi

No	Desa	Nama Koperasi	No. Akta Pendirian	Jenis Pendampingan
32	Desa Mengkubang	Koperasi Desa Merah Putih Mengkubang	Nomor AHU-0020028.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
33	Desa Sukamandi	Koperasi Desa Merah Putih Sukamandi	AHU-0006586.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
34	Desa Buding	Koperasi Desa Merah Putih Buding	Nomor AHU-0020013.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
35	Desa Cendil	Koperasi Desa Merah Putih Cendil	Nomor AHU-0021496.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
36	Desa Mayang	Koperasi Desa Merah Putih Mayang Kecamatan Kelapa Kampit	AHU-0011679.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
37	Desa Mentawak	Koperasi Desa Merah Putih Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit	AHU-0014482.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
38	Desa Pembaharuan	Koperasi Desa Merah Putih Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit	Nomor AHU-0019879.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi
39	Desa Senyubuk	Koperasi Desa Merah Putih Senyubuk	AHU-0032114.AH.01.29. TAHUN 2025	Sosialisasi dan Pendampingan Rapat Pendirian Koperasi

4.3.1.3.3 Program Strategis Nasional (ProSN)

Program Strategis Nasional (ProSN) merupakan penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas Nasional (PN), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan Kabupaten Belitung Timur terhadap Program Strategis Nasional diwujudkan melalui sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan nasional. Keselarasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Keselarasan antara Program Strategis Nasional dengan program pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 17 Keselarasan Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
A	**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**			
1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mandiri menjadi Usaha Kecil	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi Kepada UMKM
				Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2	Sekolah Rakyat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
B	**KETAHANAN PANGAN**			
1	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Penanganan kerawanan pangan	Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
C	**KESEHATAN UNTUK SEMUA**			
1	Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
2	Makan Bergizi Gratis	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
D	**PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN**			

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pengelolaan Pendidikan SMP	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Pengelolaan Pendidikan PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
E	**PERTUMBUHAN EKONOMI**			
1	Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
		Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota
2	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
3	Kemudahan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan penanaman modal
				Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur

4.3.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen penuh dalam mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027 yang mengusung tema "**Penguatan Ketahanan Pangan, Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah serta Pembangunan Pariwisata yang Berkualitas**", dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
2. Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan

Dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur diimplementasikan melalui sinkronisasi program daerah yang berfokus pada:

- Peningkatan Kualitas SDM: Melalui transformasi layanan pendidikan dan kesehatan yang terintegrasi.
- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: Transformasi birokrasi menuju pelayanan publik berbasis digital yang responsif dan akuntabel.
- Daya Saing Ekonomi**:** Mendorong hilirisasi sektor pertanian dan perikanan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Analisa keselarasan tema pembangunan Kabupaten Belitung Timur dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 18 Matriks Keselarasan Tema Pembangunan

Aspek Strategis	Tema Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tema Kabupaten Belitung Timur	Analisa Keselarasan
Transformasi Digital	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif dan andal	Akselerasi fondasi digital	Digitalisasi di tingkat kabupaten menjadi prasyarat utama untuk mewujdukan tata kelola pemerintahan provinsi yang responsif dan efisien
Ekonomi dan Hilirisasi	Ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan	Penguatan pertanian, perikanan dan potensi lokal	Belitung Timur mengunci sektor pertanian dan perikanan sebagai basis potensi lokal yang akan didorong menuju hilirisasi sesuai arahan provinsi
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya	Penguatan kesejahteraan merata dan layanan dasar terintegrasi	Fokus pada pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur merupakan langkah konkret dalam membangun SDM berkualitas di level provinsi
Sektor Pariwisata	Pembangunan pariwisata yang berkualitas	Penguatan ekonomi kreatif dan infrastruktur publik	Pengembangan ekonomi kreatif dan konektivitas wilayah di Belitung Timur secara langsung mendukung terciptanya ekosistem pariwisata yang berkualitas

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur

Tema RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027, yaitu "**Akselerasi Fondasi Digital dan Penguatan Kesejahteraan Merata Berbasis Potensi Lokal**", juga merupakan manifestasi teknis untuk mewujudkan peran Belitung Timur sebagai "**Gerbang Timur Bangka Belitung Berbasis Geo-Ecotourism dan Agromaritim**" (Mandat Kewilayahan 2025-2029).

Tabel 4. 19 Matriks Keselarasan Strategis

Pilar Kewilayahan 2025-2029	Fokus RKPD Belitung Timur 2027	Output Strategis
Gerbang Timur	Akselerasi Fondasi Digital & Konektivitas	Penguatan infrastruktur digital dan fisik di titik-titik masuk wilayah untuk efisiensi logistik dan layanan publik.
Agromaritim	Penguatan Pertanian dan Perikanan	Transformasi sektor primer menuju hilirisasi berbasis teknologi untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
Geo-Ecotourism	Ekonomi Kreatif & Kualitas Lingkungan	Pengembangan destinasi pariwisata berbasis komunitas yang lestari dan terintegrasi dengan ekosistem ekonomi kreatif.
Kesejahteraan	Pemerataan Layanan Dasar & Sosial	Memastikan pertumbuhan ekonomi dari sektor unggulan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi dengan arah dan prioritas pembangunan nasional dalam upaya mendorong pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan target pembangunan makro daerah yang mengacu pada kebijakan nasional, serta mempertimbangkan potensi dan tantangan wilayah. Adapun target pembangunan makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirinci pada Tabel 4.19.

Tabel 4. 20 Sasaran Indikator Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

INDIKATOR	TARGET
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,00 – 4,50
PDRB per Kapita (Rp Juta)	82,31 – 83,50
Kontribusi PDRB (%)	0,495
Tingkat Kemiskinan	4,50 – 4,53
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,99

INDIKATOR	TARGET
Rasio Gini	0,211 – 0,219
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,08 – 4,31
Indeks Modal Manusia	0,575
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	55,59

Sumber: Bappeda Prov Babel

4.3.3 TARGET PEMBANGUNAN SKALA MAKRO

Dengan memperhatikan analisa terhadap capaian pembangunan tahun sebelumnya di Kabupaten Belitung Timur dan arah kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027 maka target pembangunan Kabupaten Belitung Timur untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi, target pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2027 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 21 Target Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027

Indikator	Capaian		Target			
			Kabupaten		Nasional	Provinsi
	2024	2025	2026	2027		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,03	4,3	4,30 – 4,65	4,30 – 4,65	5,8 - 6,5	4,00 - 4,50
Inflasi (%)	1,38	2,69	3±1	3±1	2,5±10	1,95
PDRB per kapita (Rp. Juta)	82,61	89,76	90,35	90,35 – 94,47		79,64 - 86,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,63	3,05	2,33	2,63 – 2,92	4,30 - 4,87	3,90 - 4,05
Tingkat Kemiskinan (%)	6,36	6,69	6,04	5,87	6,0 - 6,5	4,52 - 4,53
Rasio Gini (nilai)	0,251	0,231	0,217	0,210 – 0,230	0,362 - 0,367	0,211 - 0,219
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	73,62	73,99	74,35	74,71		75,66
Indeks Modal Manusia					0,575	0,575
IKLH	71,33	76,27	76,51	76,68	76,84	76,99
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	-	18,39	18,39	39,57	55,59

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur (diolah)

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur periode 2021-2025 mengalami fluktuasi, dengan kontraksi pada tahun 2024 (-0,03 persen) dan pemulihan pada tahun 2025 (4,30 persen). Target pertumbuhan pada tahun 2026 dan tahun 2027 meningkat ke kisaran 4,30 – 4,65 persen dengan skenario pemulihan bertahap yang realistis, namun tetap memerlukan penguatan sektor unggulan dan peningkatan investasi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan. Target tersebut berada dalam rentang target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4,00-4,50 persen) dan masih berada di bawah target nasional sebesar 5,8-6,5 persen.

2. **Inflasi**

   Inflasi menunjukan tren terkendali dengan fluktuasi dalam batas moderat, dari 4,17 persen tahun 2022 hingga 1,38 persen pada tahun 2024 dan tahun 2025 kembali meningkat menjadi 2,69 persen. Target inflasi pada kisaran 3±1 pada tahun 2026 dan 2027 dinilai cukup realistis dan konsisten dengan sasaran stabilitas harga, namun memerlukan penguatan pengendalian pasokan dan distribusi untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi.

3. **PDRB per Kapita**

   PDRB per Kapita meningkat konsisten dari 69,33 juta pada tahun 2021 menjadi 89,76 juta tahun 2025, mencerminkan peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat. Target pada tahun 2026 menjadi 90,35 juta dan 90,35 – 94,47 juta di tahun 2027 menunjukan tren pertumbuhan yang moderat dan berkelanjutan. Namun demikian, capaian target ini perlu diimbangi dengan kebijakan pemerataan agar peningkatan pendapatan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada pada kisaran Rp.79,64-86,50 juta.

4. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

   Tingkat pengangguran terbuka menurun hingga tahun 2023 sebesar 2,41 persen namun meningkat kembali pada tahun 2025 sebesar 3,05 persen, menunjukan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Target penurunan menjadi 2,33 persen pada tahun 2026 dan 2,63 – 2,92 persen pada tahun 2027, namun masih lebih rendah dibandingkan target nasional 4,30-4,87 persen maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3,90-4,05 persen.

5. **Tingkat Kemiskinan**

   Kabupaten Belitung Timur menargetkan penurunan menjadi 5,87 persen pada tahun 2027 dari target tahun 2026 sebesar 6,04 persen. Target ini lebih rendah dibandingkan target nasional (6,0–6,5 persen), namun masih berada di atas target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4,52–4,53 persen). Penetapan target tersebut mempertimbangkan tren penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir serta upaya peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

6. **Rasio Gini**

   Rasio Gini berfluktuasi namun tetap dalam kategori ketimpangan sedang dengan capaian 0,231 pada tahun 2025. Target penurunan menjadi 0,217 pada tahun 2026 dan 0,210 – 0,230 pada tahun 2027. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan pemerataan pendapatan di masyarakat,arah pembangunan ekonomi yang semakin inklusif melalui penguatan UMKM, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan optimalisasi program perlindungan sosial. Target tersebut lebih baik dibandingkan

target nasional (0,362–0,367) dan sejalan dengan kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tingkat ketimpangan relatif rendah

7. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

   Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 IPM tercatat sebesar 71,91 dan meningkat menjadi 72,76 pada tahun 2022, serta terus naik menjadi 73,31 pada tahun 2023 dan 73,62 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, IPM diproyeksikan kembali meningkat menjadi 73,99. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Berbagai program pembangunan yang difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar telah memberikan kontribusi positif terhadap capaian tersebut. Ke depan, IPM Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan terus meningkat menjadi 74,35 pada tahun 2026 dan 74,71 pada tahun 2027. meskipun masih berada di bawah target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 75,66. Peningkatan tersebut diharapkan dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

8. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

   IKLH menunjukan peningkatan signifikan hingga 76,27 pada tahun 2025. Target peningkatan menjadi 76,51 di tahun 2026 dan 76,68 di tahun 2027. Meskipun masih sedikit di bawah target nasional (76,84) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (76,99), peningkatan ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

9. **Penurunan Intensitas Emisi GRK**

   Perubahan iklim di Kabupaten Belitung Timur semakin menjadi isu serius akibat pemicu (Driver) utama, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas industri, transportasi, serta alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan dan juga dipicu oleh pemicu (Driver) lain, yaitu pertumbuhan penduduk dengan laju 1,45% pada periode 2020-2023, yang berkontribusi pada peningkatan konsumsi energi, penggunaan bahan bakar fosil, dan produksi limbah yang mempercepat emisi metana. Tekanan (Pressure) semakin besar dengan meningkatnya aktivitas industri, transportasi, serta perubahan penggunaan lahan yang mengurangi daya serap karbon oleh vegetasi. Berdasarkan Kajian Inventarisasi Data Emisi GRK Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022, total emisi mencapai 8.661,63 Gg CO_2eq, yang menyebabkan keadaan (State) lingkungan semakin terdegradasi. Dampak (Impact) dari peningkatan emisi ini tidak hanya mencakup penurunan keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem, tetapi juga berdampak

pada kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta peningkatan risiko bencana akibat kenaikan muka air laut dan abrasi di wilayah pesisir.

target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tetap dipertahankan sebesar 18,39 persen. Target tersebut masih berada di bawah target nasional (39,57 persen) maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (55,59 persen), mengingat karakteristik daerah, kapasitas pelaksanaan program mitigasi, serta kontribusi sektor penyumbang emisi di Kabupaten Belitung Timur yang relatif berbeda dibandingkan tingkat nasional dan provinsi.

4.3.4 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

4.3.4.1 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN UMUM

Arah kebijakan kewilayahan umumnya berfokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan, dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah serta keseimbangan antar wilayah, bertujuan untuk memajukan dan mengoptimalkan potensi daerah, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, pelestarian lingkungan, dan pusat pertumbuhan baru. Arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Belitung Timur tahun 2027 diarahkan untuk mewujudkan Belitung Timur yang nyaman dan berkemajuan, berikut adalah fokus kewilayahan yang akan dilaksanakan pada periode RPJMD tahun 2025-2029:

A. Pengembangan Kewilayahan Berbasis UNESCO Global Geopark

Dengan adanya pengakuan Belitong dari UNESCO sebagai Global Geopark, daerah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan geologi. Daerah Belitung Timur sebagai bagian dari Belitong UNESCO Global Geopark (Belitong UGGp) memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata yang berbasis pada keunikan geologi dan warisan alam. Saat ini dari 24 geosite di Belitong UGGp terdapat 10 geosite yang terdapat di Belitung Timur antara lain Open Pit Nam Salu (OPNS), Gunung Lumut, Batu Pulas, Hutan Kerangan Cendil, Tebat Rasau, Burung Mandi, Pantai Punai, Garumedang Tektite, Batu Begalang dan Desa Buku Limau.

Pengembangan kewilayahan berbasis UNESCO Global Geopark bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan geologi. Pengembangan kewilayahan ini dilaksanakan dengan strategi pengembangan berupa:

1. **Pengembangan Infrastruktur Wisata**: Membangun infrastruktur wisata yang memadai, seperti jalan, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk prioritas di tahun 2027 diarahkan pada geosite Open Pit Nam Salu (OPNS) dan Desa Buku Limau guna mendukung persiapan revalidasi oleh UNESCO.

2. **Peningkatan Kualitas Pelayanan**: Meningkatkan kualitas pelayanan wisata, seperti penyediaan informasi, panduan wisata, dan fasilitas pendukung lainnya yang dilaksanakan diseluruh geosite di Belitung Timur.
3. **Pelestarian Lingkungan**: Melakukan upaya pelestarian lingkungan dan warisan geologi, seperti pengelolaan sampah, pengendalian polusi, dan perlindungan kawasan konservasi. Secara umum upaya ini dilakukan diseluruh geosite dengan prioritas pelaksanaan di geosite Desa Buku Limau.
4. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat**: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan geologi melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama-sama dengan Badan Pengelola Belitong UGGp dan Komunitas Pengelola geosite secara berkala mengadakan sekolah alam.
5. **Kerja Sama dengan Stakeholder**: Membangun kerja sama dengan stakeholder, seperti pemerintah, masyarakat, lembaga riset dan industri pariwisata, untuk meningkatkan pengembangan kewilayahan berbasis UNESCO Global Geopark.



Pengembangan kewilayahan berbasis UNESCO Global Geopark dapat memberikan manfaat bagi masyarakat daerah, seperti:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, masyarakat daerah dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
2. Pelestarian Lingkungan: Upaya pelestarian lingkungan dan warisan geologi dapat membantu menjaga keunikan dan keaslian daerah.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan geologi dapat membantu menjaga keberlanjutan pengembangan kewilayahan.

Pengembangan kewilayahan berbasis UNESCO Global Geopark dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan melestarikan warisan geologi. Dengan kerja sama dan komitmen dari semua stakeholder, daerah Belitung Timur dapat menjadi destinasi wisata yang berbasis

pada keunikan geologi dan warisan alam, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan geologi.

B. Kampong Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT)

Kecamatan Kelapa Kampit yang berada di Kab. Belitung Timur yang merupakan bagian dari Belitong UNESCO Global Geopark (UGGp) merupakan nilai tambah yang dapat meningkatkan potensi ekonomi melalui ekowisata. Desa Cendil dengan geosite Pantai Batu Pulas dan geosite Hutan Kerangas Cendil menjadi daya tarik utama pengembangan ekowisata. Desa lainnya yang menjadi daya tarik utama ialah Desa Cendil yang memiliki geosite Open Pit Nam Salu.

Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya sesuai UU Nomor 3 tahun 2024, salah satu pengaturan yang diberikan bagi desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama yang nanti pada akhirnya untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kelapa Kampit maka disusunlah perencanaan tematik pembangunan desa yang memaksimalkan potensi sumberdaya alam dan potensi wisata dengan titik pengembangan pada geosite Belitong UGGp dengan nama Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT). Sinergi perencanaan antar desa diperlukan dimana Desa Senyubuk dan Desa Cendil yang menjadi desa andalan yang didukung oleh Desa Buding, Desa Mayang, Desa Pembaharuan dan Desa Mentawak. Pembangunan Kawasan KAMPIT dilaksanakan dengan strategi pengembangan kewilayahan kecamatan di desa yang memiliki geopark, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi unik geopark secara berkelanjutan:

1. Pengembangan Produk dan Layanan Pariwisata Berbasis Warisan Geopark dengan melaksanakan:

   Identifikasi dan Interpretasi Geosite, Biosite, dan Culturesite: Lakukan inventarisasi menyeluruh terhadap potensi geologi, biologi, dan budaya yang unik di desa. Kembangkan materi interpretasi yang menarik dan mudah dipahami oleh wisatawan (papan informasi, pusat informasi, pemandu lokal terlatih).

   Pengembangan Paket Wisata Tematik: Rancang pengalaman wisata yang beragam dan menarik, menggabungkan aspek geologi (misalnya, tur ke formasi batuan unik, penelusuran gua), biologi (pengamatan flora fauna

endemik, wisata edukasi lingkungan), dan budaya (pertunjukan seni tradisional, kunjungan ke situs bersejarah).

Peningkatan Kualitas Fasilitas dan Infrastruktur Pariwisata Skala Kecil: Dukung pengembangan akomodasi (homestay), rumah makan, transportasi lokal, dan fasilitas pendukung lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan estetika lokal.

Pengembangan Produk Lokal Berbasis Kearifan Lokal dan Sumber Daya Geopark: Dorong inovasi produk kerajinan tangan, kuliner, dan produk pertanian yang memanfaatkan material lokal secara berkelanjutan dan memiliki cerita yang terkait dengan geopark. Fasilitasi pemasaran dan pengemasan produk.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pariwisata Berkelanjutan dengan mengupayakan:

   Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan: Berikan pelatihan keterampilan usaha, manajemen keuangan, pemasaran, dan layanan pelanggan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam rantai nilai pariwisata.

   Penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUB): Fasilitasi pembentukan dan pengembangan KUB di berbagai sektor pariwisata (pemandu wisata, pengelola akomodasi, produsen suvenir, penyedia transportasi) untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya saing.

   Akses Permodalan: Jalin kerjasama dengan lembaga keuangan mikro atau program pemerintah untuk memfasilitasi akses permodalan bagi usaha masyarakat di sektor pariwisata.

   Pemasaran dan Promosi Bersama: Kembangkan strategi pemasaran terpadu yang melibatkan platform digital, media sosial, dan kerjasama dengan agen perjalanan untuk menjangkau wisatawan yang relevan. Libatkan masyarakat dalam promosi geopark dan produk lokal.

3. Pelestarian Lingkungan dan Warisan Geopark dengan upaya:

   Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Lingkungan: Selenggarakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya konservasi warisan geologi, biologi, dan budaya. Libatkan sekolah dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan.

   Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Bertanggung Jawab: Implementasikan sistem pengelolaan sampah dan limbah yang efektif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dorong praktik pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang.

   Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan: Lakukan upaya konservasi dan rehabilitasi pada geosite, biosite, dan kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi, dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon, pembersihan, dan pengawasan.

Pengembangan Ekowisata yang Bertanggung Jawab: Pastikan kegiatan pariwisata dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Lokal melalui:

   Pelatihan Pemandu Geowisata dan Ekowisata Lokal: Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memandu wisatawan dengan memberikan informasi yang akurat dan menarik tentang geopark.

   Peningkatan Keterampilan Bahasa Asing: Berikan pelatihan bahasa asing kepada masyarakat yang berinteraksi langsung dengan wisatawan.

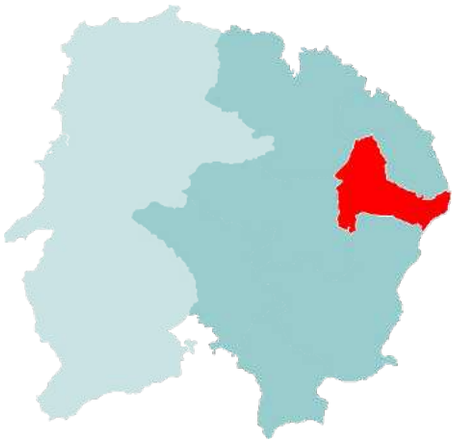
   Pengembangan Keterampilan Digital: Fasilitasi pelatihan penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, pemesanan daring, dan pengelolaan informasi geopark.

   Peningkatan Kualitas Pelayanan: Berikan pelatihan tentang standar pelayanan pariwisata yang baik dan berorientasi pada kepuasan wisatawan.

Program dan kegiatan adalah segala macam upaya yang direncanakan untuk dilaksanakan agar dapat menanggulangi masalah yang ada sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada dikawasan Perdesaan. Perumusan Program Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kampung Andalan Pusat Inovasi (KAMPIT) Kecamatan Kelapa Kampit Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari tujuan, sasaran, dan strategi yang dirumuskan. Adapun fokus target pengembangan Kawasan pedesaan Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT) sebagai berikut :

1. **Tahun Pertama,** difokuskan pada penyusunan kebijakan dan regulasi pendukung, pembentukan dan pembinaan BUMDESMA kawasan, penguatan kapasitas kelembagaan wisata, penyusunan kajian dan masterplan kawasan, penguatan kapasitas UMKM, pelaksanaan event-event penunjang.
2. **Tahun Kedua,** difokuskan pada pemenuhan infrastruktur wisata, pemenuhan infrastruktur pendukung penguatan kapasitas BUMDESMA Kawasan, penguatan kapasitas kelembagaan wisata, penguataan kapasitas UMKM, pelaksanaan event–event penunjang wisata,
3. **Tahun Ketiga,** difokuskan pada pemenuhan infrastruktur wisata, pemenuhan infrastruktur pendukung, penguatan kapasitas BUMDESMA Kawasan, penguatan kapasitas kelembagaan wisata, penguataan kapasitas UMKM, pelaksanaan event–event penunjang wisata,
4. **Tahun Keempat,** difokuskan pemenuhan infrastruktur wisata, infrastruktur pendukung, penguatan kapasitas BUMDESMA Kawasan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan wisata, penguataan kapasitas UMKM, pelaksanaan event–event penunjang wisata,
5. **Tahun Kelima,** difokuskan pada pengembangan kawasan wisata berkelanjutan, penguatan kapasitas BUMDESMA Kawasan berkelanjutan,

penguatan kapasitas kelembagaan wisata berkelanjutan, penguataan kapasitas UMKM berkelanjutan, pelaksanaan event–event penunjang wisata.



4.3.4.2 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PER KECAMATAN

Penerapan pendekatan kewilayahan dalam pembangunan tahun 2027 menuntut setiap kecamatan untuk mengoptimalkan potensi lokalnya sebagai penggerak ekonomi. Berikut adalah analisis mendalam mengenai arah pembangunan untuk masing-masing kecamatan berdasarkan profil potensi dan kebutuhan spesifiknya, berdasarkan pemetaan fokus permasalahan dalam klasifikasi isu strategis daerah yang sudah disajikan sebelumnya.

4.3.4.2.1 Kecamatan Manggar : Episentrum Pelayanan Publik Dan Ekonomi Urban

Kecamatan Manggar, dengan luas wilayah 229 km^2 dan populasi 38.129 jiwa, merupakan wajah depan Kabupaten Belitung Timur. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Manggar diarahkan menjadi hub bagi layanan publik digital dan perdagangan jasa di tahun 2027. Tema pembangunan wilayah Manggar tahun 2027 difokuskan pada "**Peningkatan Infrastruktur Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**". Sinkronisasi tema ini diarahkan pada perbaikan infrastruktur dasar dan jalan lingkungan yang selama ini kualitasnya belum merata.

Permasalahan utama di Manggar adalah kondisi sanitasi di pemukiman nelayan yang masih sangat terbatas serta adanya titik-titik rawan banjir di kawasan Desa Baru, Kurnia Jaya, dan Mekar Jaya. Pada tahun 2027, program "Infrastruktur Nyaman" akan difokuskan pada pembangunan drainase primer yang terintegrasi untuk mengatasi masalah genangan air secara permanen. Selain itu, Manggar sebagai pusat ekonomi memerlukan reaktivasi Pelabuhan Manggar sebagai "Gerbang Ekonomi" untuk memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor jasa kepelabuhan.

Tabel 4. 22 Proyek Prioritas di Kecamatan Manggar Tahun 2027

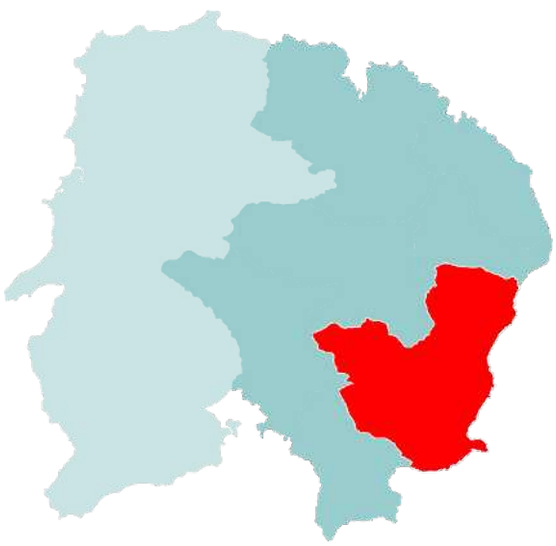
Proyek Prioritas	Sasaran Pembangunan	Indikator Keberhasilan
Pembangunan Ruang Terbuka Publik “Simpang Lima”	Optimalisasi *economic leverage* bagi Belitung Timur	Peningkatan PAD, Pertumbuhan UMKM, Peningkatan IKM
Pembangunan Kantor Camat Manggar	Mewujudkan sarana dan prasarana pusat pemerintahan kecamatan yang representatif dan akuntabel.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan kecamatan masuk kategori "Sangat Baik”
Reaktivasi Pelabuhan Manggar	Peningkatan distribusi logistik	Arus penumpang dan barang meningkat

Proyek Prioritas	Sasaran Pembangunan	Indikator Keberhasilan
Pembangunan Ruang Terbuka Publik “Simpang Lima”	Optimalisasi *economic leverage* bagi Belitung Timur	Peningkatan PAD, Pertumbuhan UMKM, Peningkatan IKM
Pembangunan Kantor Camat Manggar	Mewujudkan sarana dan prasarana pusat pemerintahan kecamatan yang representatif dan akuntabel.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan kecamatan masuk kategori "Sangat Baik”
Penataan Kawasan Pesisir & Sanitasi	Perbaikan lingkungan kumuh nelayan	Berkurangnya luasan pemukiman kumuh
Peningkatan Jalan Lingkungan khususnya di kawasan mineapolitan	Aksesibilitas antar RT	Persentase jalan kondisi baik di atas 80%
Digitalisasi Layanan Pasar Manggar	Penguatan ekonomi UMKM	Peningkatan transaksi digital pelaku usaha

Sumber : Bapperida, Kecamatan Manggar, 2026, diolah

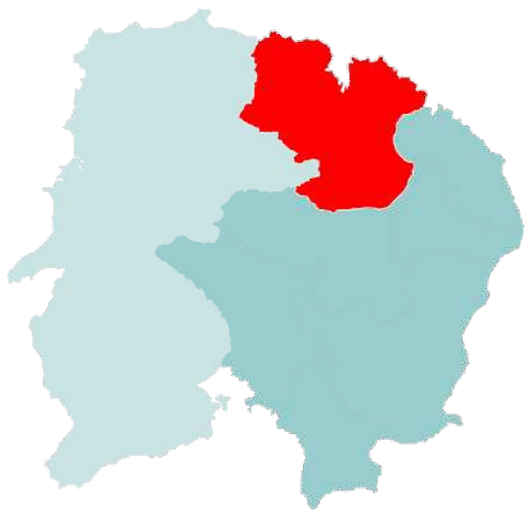
4.3.4.2.2 Kecamatan Gantung : Pusat Agromaritim Dan Ketahanan Sosial

Gantung memiliki peran krusial sebagai wilayah dengan luas terbesar (546,3 km^2) yang menyokong sektor pertambangan, pertanian, dan perikanan. Namun, tantangan sosial di kecamatan ini cukup berat, dengan angka stunting yang tercatat sebanyak 91 anak pada tahun 2025 dan angka putus sekolah yang perlu ditekan. Tema pembangunan Gantung untuk tahun 2027 adalah "**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat yang Didukung Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan SDM Lokal melalui Literasi Digital".**



Arah pembangunan tahun 2027 bagi Gantung menekankan pada rehabilitasi infrastruktur pendidikan. Terdapat usulan masif untuk rehabilitasi ruang kelas di SD 1, 8, 9, 11, 12, 13, dan 19, serta pembangunan laboratorium komputer untuk meningkatkan kompetensi literasi digital siswa. Di sektor ekonomi, optimalisasi pemanfaatan sawah Meranteh melalui mekanisasi pertanian menjadi prioritas untuk menjamin stabilitas harga pangan lokal. Selain itu, masalah ketiadaan akses internet di wilayah seperti Desa Lilangan dan Gusong Cine diantisipasi melalui program "Internet Desa Nyaman" agar pelayanan publik berbasis digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4.3.4.2.3 Kecamatan Kelapa Kampit : Transformasi KAMPIT, Geopark Belitong dan Sinergi Mitigasi Bencana



Kelapa Kampit memiliki peran strategis sebagai lokasi kawasan perdesaan prioritas nasional melalui program RPKP KAMPIT (Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu). Untuk tahun 2027, tema pembangunan kewilayahan di Kelapa Kampit ditetapkan secara spesifik, yaitu "**Sinergi Penanggulangan Bencana dengan Melibatkan Seluruh Elemen di Kecamatan Kelapa Kampit**". Tema ini dipilih sebagai respons atas masalah banjir tahunan di Desa Mayang dan Buding, serta tingginya kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Buding, Mentawak, dan Senyubuk.

Kecamatan Kelapa Kampit memiliki status strategis ganda sebagai lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui program KAMPIT dan tuan rumah SMA Unggul Garuda. Memasuki tahun 2027, SMA Unggul Garuda dijadwalkan telah melayani angkatan kedua setelah mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027. Oleh karena itu, arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada penguatan ekosistem pendukung sekolah tersebut untuk menjamin standar internasional yang dipadukan dengan kearifan lokal. Sehingga dengan demikian, prioritas pembangunan meliputi:

1. Infrastruktur Ketangguhan dan Keamanan: Mengingat SMA Unggul Garuda berlokasi di Desa Mayang yang memiliki titik rawan banjir, penanganan DAS Sungai Buding dan pembangunan drainase di area sekitar kampus menjadi prioritas utama untuk menjamin kenyamanan kegiatan belajar-mengajar. Pembangunan Pos Terpadu (Damkar, SatpolPP, dan Polisi) di Senyubuk juga diarahkan untuk memperkuat keamanan kawasan pendidikan ini.
2. Konektivitas dan Digitalisasi: Perbaikan jalan provinsi yang melintasi Kelapa Kampit dan pengaspalan akses menuju fasilitas pendukung sekolah akan dipercepat. Selain itu, melalui program "Internet Desa Nyaman", Kelapa Kampit ditargetkan memiliki konektivitas 100% untuk mendukung pembelajaran berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di SMA Garuda.
3. Hilirisasi Ekonomi dan Pariwisata Geopark: Untuk mendukung visi sekolah yang menyatu dengan pengabdian masyarakat, Kelapa Kampit mendorong hilirisasi kayu putih dan optimalisasi geosite Open Pit Nam Salu sebagai laboratorium alam bagi siswa.
4. Pemberdayaan SDM Lokal: Pemerintah daerah memastikan pemanfaatan kuota 20% bagi siswa lokal Belitung Timur serta penyiapan guru-guru

pendamping berkualitas untuk bersinergi dengan standar pengajaran nasional.

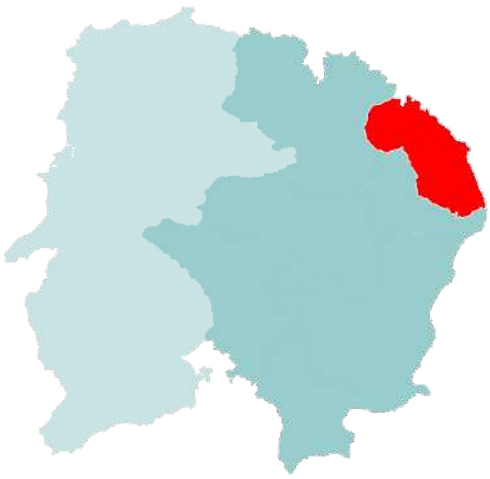
4.3.4.2.4 Kecamatan Simpang Renggiang : Diversifikasi Ekonomi dan Desa Digital



Kecamatan Simpang Renggiang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah namun memiliki potensi agribisnis yang sangat kompetitif. Tema pembangunan tahun 2027 di kecamatan ini adalah "**Kolaborasi SDM Unggul, Ekonomi Produktif Menuju Simpang Renggiang yang Berdaya, Inovatif, dan Nyaman Berkelanjutan**". Arah pembangunan tahun 2027 di Kecamatan Simpang Renggiang dirumuskan sebagai berikut:

1. Akselerasi Transformasi Digital: Memanfaatkan 100% konektivitas internet desa untuk mentransformasi layanan administrasi desa yang lebih transparan dan efisien. Penguatan platform digital diarahkan sebagai alat pemasaran strategis (*e-commerce*) bagi produk UMKM lokal.
2. Diversifikasi dan Hilirisasi Agromaritim: Fokus utama dialihkan dari ketergantungan sektor pertambangan menuju sektor pertanian berkelanjutan. Prioritas diarahkan pada penguatan Desa Lintang sebagai pusat produksi lada kualitas ekspor serta pengembangan komoditas manggis berstandar internasional. Selain itu, pengembangan budidaya air tawar diintensifkan sebagai penyokong ketahanan pangan.
3. Penguatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas: Pembangunan diarahkan pada pemenuhan sarana pendidikan digital (laboratorium komputer), peningkatan kualitas jalan penghubung (provinsi dan desa) untuk mempermudah distribusi hasil tani, serta pembangunan sumber air baku (embung) untuk mendukung lahan hortikultura yang ada.
4. Pemberdayaan SDM dan Ekonomi Kreatif: Mendorong wirausaha baru di kalangan milenial melalui pelatihan kewirausahaan inovatif. Sektor pariwisata dikembangkan melalui integrasi destinasi Tebat Rasau dan Eks-Sawah Jepang ke dalam jaringan Belitong Geopark guna menciptakan efek pengganda ekonomi bagi warga lokal.

4.3.4.2.5 Kecamatan Damar : Optimalisasi Smart Environment dan Pariwisata Pesisir



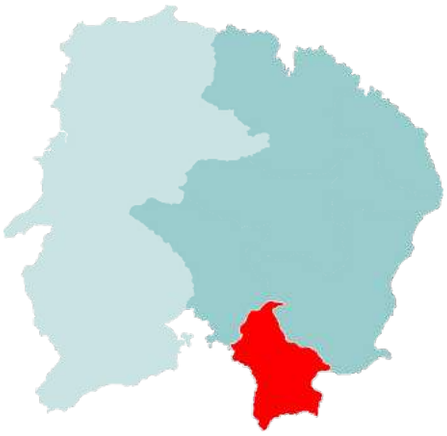
Kecamatan Damar memiliki luas wilayah 236,68 km^2 dengan populasi 13.885 jiwa yang tersebar di 5 desa. Sebagai wilayah yang memiliki peran strategis dalam sistem pengelolaan sampah kabupaten, Damar menjadi lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Trafo Mayang. Namun, dengan kapasitas TPA yang mulai penuh, arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada pengelolaan sampah berbasis *Smart Environment* dan pengembangan ekonomi non-ekstraktif.

Kecamatan Damar menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yaitu "**Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Lokal dalam Upaya Peningkatan Pembangunan serta Kesejahteraan Masyarakat yang Merata**". Tema ini dipilih sebagai kunci untuk mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di semua tingkatan, mulai dari desa.

Pemerintah daerah mengidentifikasi arah kebijakan pembangunan berdasarkan empat permasalahan utama yang harus diselesaikan di wilayah Damar pada tahun 2027:

1. Optimalisasi Kapasitas SDM: Belum optimalnya keterampilan SDM lokal dalam mengelola potensi wilayah yang masih terbatas. Program "Nyaman Cerdas" dan pelatihan vokasional diarahkan untuk menjawab celah kompetensi ini.
2. Ketahanan Sosial dan Lingkungan: Adanya tantangan pada aspek kemasyarakatan, kesehatan, dan degradasi lingkungan. Mengingat Damar adalah lokasi TPA Trafo Mayang, arah kebijakan difokuskan pada pengelolaan sampah berbasis *Smart Environment*.
3. Pemerataan Infrastruktur: Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung potensi lokal (pariwisata pesisir dan perkebunan) belum merata. Pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat fasilitas pendukung di Geosite Gurumerdang dan akses jalan produksi sawit/lada.
4. Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA): Adanya kesulitan dalam pemanfaatan potensi SDA akibat dampak keterbatasan lahan di wilayah kecamatan. Kebijakan diarahkan pada intensifikasi penggunaan lahan yang ada dan penarikan investasi industri hijau yang efisien ruang.

4.3.4.2.6 Kecamatan Simpang Pesak : Hilirisasi Sumber Daya Lokal dan Pengentasan Kemiskinan



Simpang Pesak menetapkan tema pembangunan 2027 yaitu "**Pengembangan Sumber Daya Lokal Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat**". Fokus utama kecamatan ini adalah transformasi dari penyedia bahan mentah menjadi penghasil produk bernilai tambah melalui kebijakan hilirisasi hasil perkebunan dan perikanan.

Arah kebijakan strategis di 4 desa (Simpang Pesak, Dukong, Tanjung Kelumpang, dan Tanjung Batu Itam) mencakup:

1. Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM: Penyaluran bantuan alat produksi, sertifikasi produk, dan pelatihan digitalisasi pemasaran bagi kelompok UMKM dan industri kecil desa.
2. Infrastruktur Logistik dan Perikanan: Peningkatan konektivitas pelabuhan untuk menekan biaya logistik antar-pulau serta perbaikan jalan akses nelayan yang selama ini menjadi kendala distribusi hasil laut.
3. Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan: Penanganan intensif terhadap 52 kasus stunting serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (khususnya 274 KK Desil 1) melalui program bantuan tunai, pemberdayaan ekonomi, dan renovasi rumah layak huni.
4. Ketangguhan Lingkungan: Pembangunan infrastruktur pengaman pantai/sungai untuk mitigasi abrasi dan banjir, serta pembangunan sistem peringatan dini bencana

4.3.4.2.7 Kecamatan Dendang : Konsolidasi Sektor Unggulan dan Konektivitas Maritim



Kecamatan Dendang memiliki tema pembangunan tahun 2027 untuk "**Meningkatkan Kesejahteraan pada Sektor Unggulan untuk Mencapai Kesejahteraan Berkelanjutan**". Dengan sektor dominan berupa perkebunan kelapa sawit dan perikanan tangkap, Dendang memerlukan infrastruktur yang mampu mendukung efisiensi distribusi. Arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada pemeliharaan rutin jalan-jalan produksi yang masih berupa laterit (*tanah puru*) dan pengaspalan akses menuju pelabuhan rakyat di Desa Dendang.

Salah satu masalah mendesak di Dendang adalah ketersediaan air bersih di Desa Balok yang sering mengalami kelangkaan saat musim kemarau. Pembangunan jaringan air minum (PAM) di Balok menjadi prioritas dalam program "Nyaman Air Bersih" tahun 2027. Selain itu, peningkatan kompetensi nelayan melalui pelatihan dan pemberian bantuan alat tangkap modern melalui Misi 3 dan program “Petani dan Nelayan Nyaman” akan diintensifkan guna meningkatkan nilai tambah produksi perikanan di wilayah ini.

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah ringkasan arah pembangunan kewilayahan per Kecamatan di tahun 2027.

Tabel 4. 23 Arah Pembangunan per Kecamatan tahun 2027

No	Kecamatan	Tema Pembangunan 2027	Arah Pembangunan
1	Manggar	Peningkatan Infrastruktur Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan Ruang Terbuka Publik”Simpang Lima”, Reaktivasi Pelabuhan Manggar, pembangunan drainase primer untuk pengendalian banjir, serta penataan sanitasi di pemukiman pesisir nelayan.
2	Damar	Pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dalam upaya peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat yang merata	Pengelolaan sampah berbasis *Smart Environment* (TPA Trafo Mayang), pengembangan pariwisata pesisir (Garumedang), dan investasi industri hijau.
3	Kelapa Kampit	Sinergi Penanggulangan Bencana dan Akselerasi Kualitas SDM Melalui Integrasi Ekosistem Sekolah Unggul	Mitigasi banjir (DAS Sungai Buding), dukungan operasional SMA Unggul Garuda (Angkatan II), hilirisasi kayu putih, dan wisata Geopark.
4	Gantung	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat yang Didukung Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan SDM Lokal melalui Literasi Digital	Rehabilitasi masif gedung sekolah dasar, mekanisasi sawah Meranteh, dan penyediaan akses internet di Desa Lilangan dan Gusong Cine.
5	Simpang Renggiang	Kolaborasi SDM Unggul, Ekonomi Produktif Menuju Simpang Renggiang yang Berdaya, Inovatif, dan Nyaman Berkelanjutan	Hilirisasi produk lada dan manggis ekspor, transformasi desa digital (e-commerce UMKM), serta pemenuhan sarana laboratorium komputer sekolah.
6	Simpang Pesak	Pengembangan Sumber Daya Lokal Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat	Hilirisasi hasil agromaritim (perkebunan dan perikanan), pengentasan kemiskinan ekstrem di 4 desa target, dan pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
7	Dendang	Meningkatkan Kesejahteraan pada Sektor Unggulan untuk Mencapai Kesejahteraan Berkelanjutan	Pemeliharaan rutin jalan produksi kebun, penyediaan jaringan air bersih (PAM) di Desa Balok, serta peningkatan akses menuju pelabuhan rakyat.

Sumber: Bapperida, 2026 (diolah)

4.3.5 PROGRAM UNGGULAN DAN ANDALAN

Sebagai katalis dalam pembangunan tahun 2027, berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan 17 Program Unggulan dan 11 Program Andalan yang menjadi instrumen utama untuk mencapai target fase Pengembangan Fondasi tahun 2027. Program-program ini dirancang untuk menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus menyelesaikan permasalahan strategis daerah. Program-program ini diusung oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang merata. Berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sektor-sektor unggulan, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, program-program ini dirancang untuk menciptakan perubahan positif yang terukur dan berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan daerah.

Tabel 4. 24 Deskripsi Program Unggulan Kepala Daerah

PROGRAM	DESKRIPSI
MISI 1: Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif	
Nyaman Layanan Publik	Program inisiatif pelayanan publik yang menggunakan sistem terpadu satu pintu sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan dalam sistem administrasi elektronik, portal informasi publik, aplikasi *mobile,* dan manajemen pengaduan digital. Dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, sehingga dapat menciptakan pengalaman layanan publik yang lebih baik dan responsif
Nyaman ASN Berkemajuan	Meningkatkan kualitas dan daya saing Aparatur Sipil Negara (ASN). Fokus program ini meliputi pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan dan standarisasi kompetensi. Tujuan utamanya meningkatkan keterampilan ASN, mendorong inovasi dan kreativitas, serta menerapkan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan memastikan ASN mematuhi standar profesional tinggi diharapkan dapat memperkuat kontribusi ASN dalam memajukan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Nyaman Bersinergi	Memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara), sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya bersama untuk memajukan daerah dengan investasi dan kerja sama. Program ini bertujuan pada: Mendorong kolaborasi yang efektif dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
Nyaman Desa Berdaya	Berkolaborasi dengan pemerintahan Desa untuk menggerakkan ekonomi lokal yang berbasis pengolahan sumber daya alam yang sesuai dengan potensi desa. Fokus kepada pengolahan dan pemanfaatan hasil alam menjadi produk siap konsumsi (*ready to eat*). Serta meningkatkan kapasitas pengolahan dan pemasaran serta memperkuat ekonomi dari desa.
RT Ku Nyaman	Kolaborasi dengan pemerintahan Desa dalam memperkuat peran RT sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat.
Internet Desa Nyaman	Meningkatkan pelayanan publik berbasis digital mulai dari Desa dengan menyediakan akses internet yang luas dan merata ke seluruh desa dengan jargon "Internet Untuk Semua" Program ini fokus pada penguatan komunikasi dan jaringan informasi di ruang publik, sekolah-sekolah, balai desa, dan fasilitas umum
MISI 2: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia	
Nyaman Cerdas : - Gratis Seragam, Sepatu, Tas, dan Alat Tulis untuk Anak Sekolah - 1.000 (Seribu) Beasiswa Kuliah Sarjana (S1)	Meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. Menyediakan fasilitas pendidikan berupa baju seragam, sepatu, tas, dan alat tulis sekolah gratis setiap tahunnya untuk siswa SD hingga SMA. Selain itu, menawarkan beasiswa kuliah sarjana (S1) bagi siswa berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi. Di samping itu, program ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
Nyaman Sehat: - Pelayanan dan Penggunaan BPJS Secara Gratis Bagi Masyarakat yang Belum Terdaftar	Berfokus pada pelayanan kesehatan prima yang cepat dan mudah diakses. Salah satu inisiatif utama adalah penyediaan susu, vitamin, dan makanan bergizi bagi ibu hamil dan menyusui, yang bertujuan untuk mencegah prevalensi stunting. Selain itu, terdapat program berobat gratis untuk semua lapisan masyarakat di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Program ini dilaksanakan dengan pola yang sinergi, tertib, dan berbasis data, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dan pengendalian
Nyaman Sejahtera: - Bantuan Kebutuhan Hidup Senilai 2 Juta Rupiah Per KK Setiap Tahun	Ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pra-sejahtera, dengan memberikan bantuan pangan kepada kelompok kategori disabilitas, anak terlantar dan warga miskin ekstrem. Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) untuk lansia (jompo) dan pemberian sembako rutin kepada masyarakat yang membutuhkan atau kesulitan kondisi perekonomian. Memastikan jaminan kesehatan terpenuhi,

PROGRAM	DESKRIPSI
- Insentif Umroh (Gratis) Nyaman Beltim Berkah - Bantuan Tunai Majelis Taklim dan Remaja Masjid	jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta memfasilitasi kelompok disabilitas agar mendapat akses pada lapangan kerja formal dan informal.
MISI 3: Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.	
Nyaman Kerja: -10.000 (Sepuluh Ribu) Lapangan Kerja Tersedia	Membuka lapangan pekerjaan baru melalui kerja sama strategis dengan investor. Program ini berfokus pada menarik investasi di sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan dan industri kreatif. Dengan memfasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah dan investor, program ini akan menciptakan berbagai peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, program ini juga menyediakan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, sehingga mereka siap mengisi posisi-posisi baru yang tercipta.
UMKM Ku Nyaman Berdaya : -Bantuan Modal 2 s/d 50 Juta Rupiah untuk Membuka Usaha dan Pengembangan Usaha (UMKM)	Mempercepat pertumbuhan UMKM lokal di Belitung Timur. Memberikan dukungan menyeluruh kepada pelaku UMKM melalui akses mudah terhadap modal usaha, pendampingan jangka panjang dalam manajemen bisnis, serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di setiap desa. Selain itu, program ini memperluas akses UMKM ke pasar nasional dan internasional melalui platform e-commerce, pameran produk, dan kerja sama dengan jaringan distribusi yang kuat, mendorong kemitraan dengan perusahaan besar dan investor untuk menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan berkelanjutan dengan membuka Klinik UMKM Beltim.
Petani & Nelayan Nyaman: - Gratis Bantuan Bibit Sawit Unggul dan Pupuk - Gratis Bantuan Perahu, Perawatan Perahu, dan Sembako Nelayan Musim Angin Kencang	Mendorong kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Dengan memberikan dukungan komprehensif kepada petani dan nelayan melalui penyediaan perlengkapan kerja, seperti jaring, perahu, dan alat tangkap modern bagi nelayan, serta sarana produksi pertanian, seperti benih unggul, bibit, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian, termasuk traktor dan kultivator. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keterampilan melalui pelatihan teknis, pendampingan penerapan teknologi, serta pengelolaan usaha berkelanjutan.
Nyaman Kreatif Berkarya	Berfokus pada sektor industri kreatif dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, magang, serta mendukung kerja sama dengan berbagai stakeholder. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan kompetitif dengan mengoptimalkan setiap fasilitas yang tersedia, dan memfasilitasi akses pasar melalui platform digital dan pameran kreatif
MISI 4: Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	
Gerbang Ekonomi	Reaktivasi Pelabuhan Manggar bertujuan menjadikannya sebagai pusat distribusi utama yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Belitung Timur. Reaktivasi ini melibatkan perbaikan aksesibilitas dan efisiensi distribusi barang dan orang, sehingga proses importasi dan eksportasi menjadi lebih cepat dan lancar. Revitalisasi pelabuhan mencakup pembenahan area muat dan bongkar barang, pengembangan terminal penumpang, serta peningkatan fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung lainnya.
Infrastruktur Nyaman: - Renovasi 1.000 (Seribu) Rumah Warga Tak Layak	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana publik di desa. Program ini mencakup penyediaan fasilitas penerangan jalan umum, pembangunan jembatan dan jalan desa, serta perluasan jangkauan akses air bersih. Selain itu, program ini juga berfokus pada pengembangan fasilitas olahraga dan seni, pembangunan rumah ibadah, perbaikan sistem drainase, dan penyediaan ruang terbuka hijau
MISI 5: Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	
Nyaman Lestari	Berfokus pada aspek lingkungan hidup. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan melalui penghijauan (reboisasi) di lokasi pasca tambang timah, serta memperketat pengawasan terhadap pabrik atau perusahaan di Belitung Timur untuk memastikan alokasi program pelestarian lingkungan. Selain itu, program ini memberikan perhatian khusus pada masalah sampah dengan menyediakan sistem pengelolaan yang baik.
Nyaman Air Bersih	Upaya menangani kondisi air bersih yang terdampak oleh aktivitas penambangan. Memastikan seluruh warga di Kabupaten Belitung Timur memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. Upaya yang dilakukan dengan pengembangan infrastruktur dan jaringan distribusi yang efisien ke setiap rumah warga. Serta pemantauan terhadap kualitas air, dan penegakan regulasi terkait pencemaran

Sumber: RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, diolah

Tabel 4. 25 Target Program Unggulan dan Andalan

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN	INDIKATOR	NO	PROGREAM ANDALAN	INDIKATOR	TARGET 2027	NO	PROGRAM PRIORITAS
PU.1	Nyaman Layanan Publik	Meningkatnya kemudahan akses layanan publik melalui digitalisasi	Persentase layanan publik yang terdigitalisasi				80%	PP.1	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan digital (hasil Survei IKM Digital)				100	PP.2	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Persentase kunjungan layanan digital terpadu (Lawang Beltim)				40	PP.3	PENDAFTARAN PENDUDUK
			Persentase aduan masyarakat yang terselesaikan melalui sistem pengaduan digital				100	PP.4	PENCATATAN SIPIL
			Persentase unit layanan yang terintegrasi ke dalam sistem satu pintu digital				80	PP.5	PENGELOLAAN ARSIP
								PP.6	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PU.2	Internet Desa Nyaman	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa	Persentase desa yang memiliki akses internet aktif (tetap dan/atau nirkabel)				75	PP.7	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			Jumlah pusat layanan internet di ruang publik di desa yang berfungsi (titik hotspot)				15	PP.1	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
PU.3	Nyaman ASN Berkemajuan	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN				80	PP.8	KEPEGAWAIAN DAERAH
								PP.9	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Jumlah inovasi pelayanan publik yang diinisiasi oleh ASN per tahun				131	PP.10	RISET DAN INOVASI DAERAH
PU.4	Nyaman Bersinergi	Meningkatnya partisipasi sektor non-					10	PP.11	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN	INDIKATOR	NO	PROGREAM ANDALAN	INDIKATOR	TARGET 2027	NO	PROGRAM PRIORITAS
		pemerintah dalam pembiayaan, pelaksanaan, atau inovasi program pembangunan	Jumlah kegiatan mendukung pembangunan yang melibatkan mitra non-pemerintah daerah					PP.12	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
								PP.10	RISET DAN INOVASI DAERAH
								PP.13	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
								PP.14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
								PP.15	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
								PP.16	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
								PP.17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
								PP.18	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
PU.5	Nyaman Desa Berdaya	Terbangunnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.	Jumlah desa yang mengembangkan produk olahan SDA lokal siap konsumsi (ready to eat)				15	PP.7	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
							4	PP.19	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN	INDIKATOR	NO	PROGREAM ANDALAN	INDIKATOR	TARGET 2027	NO	PROGRAM PRIORITAS
			Jumlah unit usaha ekonomi produktif desa yang terbentuk atau difasilitasi.					PP.20	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PU.6	RT-Ku Nyaman	Mendorong keterlibatan aktif RT dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta mediasi sosial tingkat lingkungan	Persentase RT aktif yang terlibat dalam program pelayanan publik				60	PP.7	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
PU.7	Nyaman Cerdas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	PA.1	Gratis Seragam, Sepatu, Tas, dan Alat Tulis untuk Anak Sekolah	Jumlah anak penerima bantuan	1000	PP.21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Rata-rata lama Sekolah	PA.2	1.000 (Seribu) Beasiswa Kuliah Sarjana (S1)	Jumlah penerima beasiswa S1	225	PP.17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PU.8	Nyaman Sehat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Tingkat UHC	PA.3	Pelayanan dan Penggunaan BPJS Secara Gratis Bagi Masyarakat yang Belum Terdaftar	Jumlah kepesertaan	58,345	PP.22	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Angka Kematian Ibu (AKI)				119		*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan				100		*Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*
			Prevalensi stunting				14,42		

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN	INDIKATOR	NO	PROGREAM ANDALAN	INDIKATOR	TARGET 2027	NO	PROGRAM PRIORITAS
PU.9	Nyaman Sejahtera	Menurunnya jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran	Persentase penerima bantuan sosial yang tepat sasaran (sesuai verifikasi dan validasi DTKS/P3KE)	PA.4	Bantuan Kebutuhan Hidup Senilai 2 Juta Rupiah Per KK Setiap Tahun	Jumlah KK penerima bantuan	514	PP.23	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			Persentase penerima manfaat yang puas terhadap layanan bansos	PA.8	Bantuan Sembako bagi Nelayan pada Musim Kencang	Jumlah nelayan penerima bantuan	300		
				PA.5	Insentif Umroh (Gratis) Nyaman Beltim Berkah	Jumlah penerima insentif	7	PP.17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				PA.6	Bantuan Tunai Majelis Taklim dan Remaja Masjid	Jumlah penerima bantuan	39	PP.17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PU.10	Petani dan Nelayan Nyaman	Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan	Persentase Petani/Nelayan yang Berada di Atas Garis Kemiskinan	PA.7	Gratis Bantuan Bibit Sawit Unggul dan Pupuk	Jumlah bibit sawit yang disalurkan (batang)	9000	PP.26	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
						Jumlah pupuk yang disalurkan (kg)	45000		

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN	INDIKATOR	NO	PROGREAM ANDALAN	INDIKATOR	TARGET 2027	NO	PROGRAM PRIORITAS
				PA.8	Gratis Bantuan Perahu, Perawatan Perahu, dan Sembako Nelayan Musim Angin Kencang	Jumlah KUB penerima	20	PP.27	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
						Jumlah perahu bantuan	10		
						Jumlah perahu yang menerima perawatan	90		
PU.11	Nyaman Kreatif Berkarya	Mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor industri kreatif berbasis potensi lokal	Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti pelatihan, magang, atau pendampingan				20	PP.28	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Jumlah pelaku industri kreatif yang memperoleh akses pasar melalui platform digital				5		
PU.12	UMKM Ku Nyaman Berdaya	Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM lokal yang aktif dan berkelanjutan	Persentase UMKM yang memperoleh akses pembiayaan atau bantuan permodalan	PA.9	Bantuan Modal 2 s/d 50 Juta Rupiah untuk Membuka Usaha dan Pengembangan Usaha (UMKM)	Jumlah UMKM penerima	50	PP.29	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Jumlah UMKM yang onboarding ke platform e-commerce atau marketplace digital						
PU.13	Nyaman Kerja	Tersedianya lapangan kerja baru	jumlah lapangan kerja tersedia	PA.10	10.000 (Sepuluh Ribu) Lapangan Kerja Tersedia	Jumlah lapangan kerja tersedia	139	PP.30	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
								PP.31	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PU.14	Gerbang Ekonomi	Meningkatkan peran Pelabuhan Manggar	Jumlah fasilitas pelabuhan yang direhabilitasi/dibangun				1	PP.32	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN	INDIKATOR	NO	PROGREAM ANDALAN	INDIKATOR	TARGET 2027	NO	PROGRAM PRIORITAS
		sebagai pusat distribusi logistik dan mobilitas penumpang di Belitung Timur							
PU.15	Infrastruktur Nyaman	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan layanan publik di desa.		PA.11	Renovasi 1.000 (Seribu) Rumah Warga Tak Layak	Jumlah RTLH direnovasi	200	PP.33	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
								PP.34	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik				82,1	PP.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Persentase desa yang memiliki akses terhadap **air bersih** layak				97	PP.36	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
								PP.37	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
PU.16	Nyaman Lestari	Meningkatnya kualitas lingkungan di wilayah pasca tambang melalui reklamasi atau penghijauan	Indeks Kualitas Lahan				62,84	PP.38	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
								PP.39	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
		Terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di wilayah Belitung Timur	Persentase pengelolaan sampah				100	PP.40	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN	INDIKATOR	NO	PROGREAM ANDALAN	INDIKATOR	TARGET 2027	NO	PROGRAM PRIORITAS
PU.17	Nyaman Air Bersih	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan				50	PP.41	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
								PP.36	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

4.3.6 KONSISTENSI TAHUNAN RPJMD

Konsistensi pengupayaan target pembangunan dalam RPJMD merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh program yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur. Detail target pada setiap program yang dijabarkan pada Tabel 4.13 menjadi acuan konkret bagi perangkat daerah dalam merancang intervensi yang tepat, serta menjadi dasar evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan. Dengan menjaga konsistensi tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa arah kebijakan tetap fokus, penggunaan sumber daya lebih efisien, dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Tabel 4. 26 Konsistensi Dukungan Program RKPD terhadap Sasaran RPJMD

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
1.1.1	**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN**				
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				PEMERINTAHAN UMUM
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	85	75	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				PEMERINTAHAN UMUM
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	85	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				PEMERINTAHAN UMUM
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	75	85	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				PEMERINTAHAN UMUM
	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	75	75	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				PEMERINTAHAN UMUM
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	75	75	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kebijakan pemerintahan dan kerjasama yang difasilitasi	Persentase	100	100	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase Kebijakan Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	Persentase	100	100	
	Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Persentase	100	100	
	Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan	Persentase	100	100	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				SEKRETARIAT DPRD
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Persentase Rancangan Perda Tahun N	Persentase	100	100	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				PERENCANAAN
	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				PERENCANAAN
	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	
	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase implemetasi rencana kelitbangan	Persentase	80	100	
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase	100	100	
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	48,5	70	
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	45	100	
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	NA	2	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				KEPEGAWAIAN
	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi, dan Evaluasi Kinerja ASN yang Sesuai dengan Prosedur dan Sasaran yang Ditentukan	Persentase	100	100	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persentase	9,71	14	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	93,71	93.69	
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (Irban Kesra, Irban Pemerintahan, Irban Ekbang dan Irban Investigasi) (Persen)	Persentase	88	83.08	
	Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	Persentase	0	0	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Tindak Lanjut Hasil Konsultansi	Persentase	82	90	
	Peringkat Capaian Atas Target Rencana Aksi Program pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) pada area Pengawasan Tingakt Provinsi	Peringkat	3	3	
	Persentase Perangkat Daerah ZI yang ditingkatkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase	4,2	6	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase kerjasama antardesa terfasilitasi	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang diberdayakan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENATAAN DESA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	7,07	40	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	86,45	85,5	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi penduduk yang meninggal	Persentase	100	100	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan pada penduduk usia 0-17 tahun	Persentase	99.77	99,84	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi penduduk yang menikah	Persentase	82,9	84	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi penduduk yang bercerai	Persentase	45,22	47	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase	100	100	
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	100	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	71,79	100	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	50	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persentase	88,19	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Indeks SPBE	Nilai	5	2,75	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	Baik	2,6	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Predikat	Level III	Level II	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persentase	61	65	
	Tingkat digitalisasi arsip	Nilai	91	91,1	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Nilai Pengawasan kearsipan eksternal	Nilai	87,5	87,1	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	Persentase	75,05	76	
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Persentase	67	69	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				KECAMATAN DAMAR
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				KECAMATAN DENDANG
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				KECAMATAN GANTUNG
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				KECAMATAN KELAPA KAMPIT

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				KECAMATAN MANGGAR
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				KECAMATAN SIMPANG PESAK
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				KECAMATAN DAMAR
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				KECAMATAN DENDANG
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				KECAMATAN GANTUNG
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				KECAMATAN MANGGAR
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				KECAMATAN SIMPANG PESAK
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				KECAMATAN DAMAR
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				KECAMATAN DENDANG
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				KECAMATAN GANTUNG
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				KECAMATAN MANGGAR
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				KECAMATAN SIMPANG PESAK
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				KECAMATAN DAMAR

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				KECAMATAN DENDANG
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				KECAMATAN GANTUNG
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				KECAMATAN MANGGAR
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				KECAMATAN SIMPANG PESAK
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				KECAMATAN DAMAR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,52	92	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				KECAMATAN DENDANG
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,37	88,5	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				KECAMATAN GANTUNG
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,56	88	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	88,2	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				KECAMATAN MANGGAR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93,65	91,6	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				KECAMATAN SIMPANG PESAK
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	92,39	84	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91,67	85,5	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				KECAMATAN DAMAR
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				KECAMATAN DENDANG
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				KECAMATAN GANTUNG
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				KECAMATAN MANGGAR
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				KECAMATAN SIMPANG PESAK

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88,05	97	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM)	Persen	100	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	100	84	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP)
	Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD	Nilai	81	83	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	88	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	87,18	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	87	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Indeks Kepuasan Masyarakat (pegawai disdukcapil)	Nilai	87,59	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86,15	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	**82**	**80,3**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91	82	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Nilai	91	90,5	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Indeks Kepuasan Masyarakat olehraga(Indeks)	Persen	80,43	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Nilai	78	83	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86,15	86,35	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Nilai	90	89,75	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	83,4	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NIlai	92	88,98	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SEKRETARIAT DPRD

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,19	88,51	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PERENCANAAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	NIlai	80	82	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				KEUANGAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	NIlai	77,78	95	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				KEPEGAWAIAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	NIlai	80,83	88,8	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PEMERINTAHAN UMUM
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai Kesbangpol)	NIlai	82,36	83	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				INSPEKTORAT DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NIlai	83,06	90	
1.1.2	**MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				URUSAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Persentase Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan tepat waktu	Persentase	100	100	
	Persentase Realisasi Anggaran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	98	98	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				URUSAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
	Persentase aset daerah yang telah bersertifikat	Persentase	95	96	
	Persentase aset daerah yang tercatat dalam neraca daerah	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				URUSAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
	Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase	12	14	
2.1.1	**MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN**				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	APK PAUD	Persentase	87	88	
	APK SD	Persentase	104,64	100	
	APK SMP	Persentase	95,5	96	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Persentase sekolah Dikdas yang menerapkan kurikulum Mulok	Persentase	100	100	
	Persentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok	Persentase	100	100	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Persentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan seseuai kebutuhan	Persentase	89,68	94	
	Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	Persentase	99	99	
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Persentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra daerah	Persentase	50	55	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	Persentase	21	30	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
	Persentase Perpustakaan yang dibina	Persentase	45,56	60	
2.1.2	**MENINGKATNYA PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI**				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Nilai	240	119	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persentase	17,1	14,42	
	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk;	Rasio	0,82	0,94	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi Paripurna	Persentase	75	100	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar;	Persentase	83,99	100	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;	Persentase	90,45	100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar;	Persentase	89,31	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar;	Persentase	85,12	100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	Persentase	97	100	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	Persentase	96,56	100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	Persentase	81	100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	Persentase	79,9	100	
	Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	Persentase	92,1	100	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;	Persentase	100	100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar;	Persentase	100	100	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar;	Persentase	88	100	
	Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase	82	82	
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) %;	Persentase	99,8	99	
	Persentase Penilaian Capaian Tatanan Kehidupan Sehat Mandiri	Persentase	71	81	
	Cakupan balita wasting yang ditangani	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	85	85	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	Persentase	85	85	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri (Persen)	Persentase	46,5	65	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	Anak	2	2	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase peserta KB aktif	Persentase	75,4	78	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Cakupan Bina Keluarga Aktif	Persentase	80	82	
2.1.3	**MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA**				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang tersedia	Persentase	100	100	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	100	100	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Pelaksanaan RAD PUG	Persentase	100	100	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100	100	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase keluarga yang terlayani	Persentase	100	100	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Desa Ramah Anak	Persentase	2,56	56,41	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase wirausaha muda	Persentase	3,1	3,1	
	Persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persentase	24,36	27	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	Persentase	90	100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase organisasi pramuka aktif	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Nilai	65	70	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilesatarikan dan Dikembangkan	Persentase	25	62	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Nilai	25	65	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persentase	25	70	
	persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persentase	60	65	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	persentase kunjungan wisatawan ke museum	Persentase	70	75	
3.1.1	**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI**				
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	19,44	59,78	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	21,67	33	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai izin usaha	Persentase	0,8	9,58	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persentase	0,8	9,58	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	85,5	86,4	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	0	15.38	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	90,04	92,5	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		229,73	3	
	Peningkatan Produksi Hortikultura		76,39	3	
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		24,09	5	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persentase	20,07	15	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase	25	10	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	14,89	3	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	20	20	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	30	30	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	100	20	
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	3,3	5	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	21,69	15	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	40	80	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	NA	10	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	NA	80	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	41861,552	42073	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1435,028	2800	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Luasan Kawasan Konservasi	Ha	124320,7	124320,7	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	69,76	71,67	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	0	50	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Nilai Ekspor Barang	USD	221848568,17	310281848,21	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	100	100	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase	5,15	3,19	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Indeks Tertib Ukur	Persentase	61,47	70	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	Persentase	2,02	3	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	1,37	3	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Industri	3,8	3	
3.1.2	**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI**				
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) (pelaku usaha)	Investor	384	405	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (persen)	Persentase	-63,64	2	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (persen)	Persentase	97,7	86	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (persen)	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman modal (persen)	Persentase	100	100	
3.1.3	**MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA**				
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persentase	93,75	90	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	4,51	9,04	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persentase	80,51	78,26	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pekerja	6222	2756	
4.1.1	**MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH**				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	Konektivitas Darat (km)	Km	510,3	590,3	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	15,08	15,8	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	Konektivitas Laut	Unit	2	3	
4.1.2	**MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH**				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	Rasio	52,9	62,9	
	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh InfrastrukturPengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	12,6	14,26	

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase irigasi dalam kondisi baik, luas irigasi yang dapat berfungsi dengan baik dan efisiensi penggunaan air irigasi	Persentase	37,93	38	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persentase	42	47	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	8	5,5	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	78	80	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata dan dipelihara	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	80	80,28	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase	34	40	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase kesesuaian tata ruang (Persen)	Persentase	77,43	77,43	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persentase	60,3	60,82	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase permukiman yang tertata	Persentase	99,4	99,76	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase	2,11	1,91	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (persen)	Persentase	99,37	100	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persentase	62,44	62,44	
5.1.1	**MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN**				
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Air	Nilai	76,42	75.66	
	Indeks Kualitas Udara	Nilai	63,05	62.84	
	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	83,29	85,11	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase	37	52.5	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Persentase	90	90	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Perizinan Berusaha dan Persetujuan lingkungan yang diterbitkan kabupaten	Persentase	35	45	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persentase	10	15	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase peningkatan pengetahuan teknis tentang lingkungan hidup bagi masyarakat	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	Persentase	100	100	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2027	PENANGGUNGJAWAB
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti di Kabupaten	Persentase	100	80	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase pengelolaan sampah	Persentase	69	69.85	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100	100	
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	NA	100	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100	
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan tahun 2027 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2029. Penuangan rencana kerja ini disusun secara analitis dengan berpijak pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan indikator makro daerah yang telah diuraikan pada Bab II. Capaian indikator pada tahun-tahun sebelumnya, baik yang telah melampaui target maupun yang masih memerlukan akselerasi, menjadi baseline objektif bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan bentuk intervensi program dan kegiatan yang paling tepat untuk dilaksanakan pada tahun 2027.

Dalam tataran implementasinya, matriks pendanaan pada bab ini memanifestasikan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana yang telah dijabarkan pada Bab III. Menghadapi postur APBD 2027 yang berada dalam fase transisi penyesuaian rasio belanja pegawai, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan keterbatasan ruang fiskal. Kondisi ini mengamanatkan bahwa alokasi pendanaan tidak lagi didistribusikan secara merata kepada seluruh Perangkat Daerah, melainkan difokuskan secara tajam dengan prinsip *money follows program*. Oleh karena itu, daftar rencana kerja di bab ini adalah bentuk operasionalisasi langsung dari strategi prioritas di Bab IV, di mana porsi anggaran yang tersedia diarahkan secara maksimal untuk mengeksekusi Program Unggulan dan Program Andalan (PU-PA) yang memiliki daya ungkit tertinggi terhadap penyelesaian permasalahan daerah.

Keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pagu indikatif yang tersaji dalam bab ini merupakan hasil dari sinkronisasi yang matang. Matriks ini tidak hanya memuat turunan dari target teknokratik, tetapi juga telah mengakomodasi usulan partisipatif yang sebelumnya telah melalui tahapan penyaringan dan pengawalan melalui inovasi daerah PREASISI (Pemantauan REalisasi Aspirasi, Sinkronisasi Informasi, dan Sinergi Implementasi). Sebagai dokumen pelaksana, rincian rencana kerja dan pendanaan ini akan menjadi dasar pedoman yang mengikat bagi seluruh Perangkat Daerah, di mana proses pengendalian dan evaluasi (Dalev) pelaksanaannya akan dipantau secara ketat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Secara sistematis, untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terstruktur, muatan dalam Bab V ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kerangka penjabaran utama. Penjabaran tersebut diawali dengan rincian Pendanaan Daerah, yang menguraikan dukungan pendanaan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur dan Program Unggulan, beserta sinkronisasinya terhadap prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun prioritas Nasional, serta rekapitulasi pendanaan Perangkat Daerah. Selanjutnya, bab ini juga menyajikan Rumusan Usulan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang memuat daftar usulan legislatif yang telah diselaraskan dengan prioritas dan kapasitas ruang fiskal daerah. Di samping itu, dimuat pula Rumusan Usulan Hasil Aspirasi Masyarakat sebagai representasi penjaringan partisipatif tingkat bottom-up yang telah divalidasi, meliputi usulan desa, usulan lembaga atau hibah, serta usulan spesifik terkait pemenuhan Rumah Layak Huni. Keseluruhan arah kebijakan dan usulan tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2027, yang berfungsi sebagai matriks utama sekaligus acuan eksekusi kegiatan dan penganggaran pada tahun berkenaan.

5.1 PENDANAAN DAERAH

Pengalokasian anggaran pada seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2027 merupakan wujud manifestasi dari perencanaan berbasis anggaran (*planning programming budgeting system*) yang adaptif dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Sebagai dokumen pelaksanaan tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2025-2029, alokasi penganggaran dalam RKPD Tahun 2027 didesain tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi pembiayaan urusan pemerintahan, tetapi utamanya diarahkan sebagai stimulator utama dalam mengakselerasi pencapaian target makro daerah dan pemenuhan urusan pelayanan dasar. Seluruh program, baik yang melekat pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, maupun fungsi penunjang pemerintahan, diarahkan secara terpadu melalui pendekatan *money follows program* guna memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memiliki daya ungkit nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, struktur pendanaan pembangunan tahun 2027 disusun dengan memperhatikan dinamika fiskal daerah serta tantangan regulasi nasional, termasuk upaya pemenuhan ketentuan batasan belanja pegawai dan penguatan proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik secara bertahap. Untuk itu, proyeksi dan pengalokasian pendanaan dalam bab ini didasarkan pada prinsip optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketepatan pemanfaatan Dana Transfer (baik Dana Transfer Umum maupun Dana Transfer Khusus), serta sinergi pembiayaan

daerah. Ketajaman prioritas alokasi anggaran pada setiap urusan program menjadi kunci utama demi menjamin keberlanjutan program unggulan dan program andalan (PU-PA) Kabupaten Belitung Timur di tengah keterbatasan ruang fiskal yang ada.

5.1.1 DUKUNGAN PENDANAAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Gambaran mengenai dukungan pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Kabupaten Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut. Dukungan pendanaan tersebut meliputi Prioritas Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital sebesar Rp136.957.914.311, Prioritas Pengembangan Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial yang lebih merata dan terintegrasi sebesar Rp108.136.653.546, Prioritas Penguatan Pertanian, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp14.852.297.680, Prioritas Penguatan Konektivitas Antarwilayah dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Permukiman serta Ruang Terbuka Publik sebesar Rp61.898.697.680, serta Prioritas Penguatan Tata Kelola dan Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.754.921.434.

Tabel 5. 1 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
(1) Peningkatan Sistem Tata kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.000.000
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.000.000
			Pembentukan Paskibraka	777.262.800
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.145.217.000
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.360.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.000.000
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	52.799.400
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.000.000
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15.851.211
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	546.490.100
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.716.600
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.586.100
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.906.200
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	253.474.800
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	119.600.000
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60.625.830
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	139.000.000
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	900.000.000
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	271.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik	90.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	21.000.000
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.000.000
			Pembahasan APBD	31.000.000
			Pembahasan APBD Perubahan	21.000.000
			Pembahasan Laporan Semester	10.000.000
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12.000.000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.180.500.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.681.750.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.132.090.000
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	34.000.000
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	20.000.000
			Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah	34.000.000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	587.500.000
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	434.600.000
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.000.000
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	150.000.000
			Penyusunan Program Kerja DPRD	10.000.000
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	220.000.000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	500.000.000
		Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.298.936.800
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20.000.000
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100.000.000
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	116.790.000
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4.465.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5.634.400
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.204.136.700
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.194.500
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.037.387.500

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	61.700.000
			Fasilitasi Bantuan Hukum	57.000.000
			Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum	36.903.100
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	31.500.000
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3.690.000
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	73.280.700
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	35.895.600
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1.200.000
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	53.791.100
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	83.599.800
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	101.880.000
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	82.503.500
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	6.450.000
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	35.127.498
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15.000.000
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	89.000.000
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	27.000.000
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	302.468.100
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	20.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	62.874.484
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	124.123.540

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Pembangunan Daerah		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55.000.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	202.481.768
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	54.244.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	149.118.500
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	119.341.200
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	168.532.872
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	85.405.200
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	15.000.000
	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	20.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	500.000.000
		Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	95.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	15.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	95.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	60.000.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	58.600.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.600.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	178.800.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	182.800.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	38.869.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	38.869.000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	84.600.000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	72.600.000
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	57.500.000
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	250.644.000
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	18.500.000
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	57.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	103.572.000
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12.500.000
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	41.140.000
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	35.000.000
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	65.175.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	52.105.000
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	40.000.000
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	709.250.000
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	85.757.483.535
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	600.000.000
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	8.132.845.000
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	20.000.000
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	70.000.000
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.000.000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	27.500.000
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	32.000.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	175.000.000
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	150.000.000
			Pengamanan Barang Milik Daerah	10.000.000
			Penilaian Barang Milik Daerah	20.000.000
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10.000.000
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	140.000.000
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	44.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20.000.000
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	352.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	66.000.000
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	296.000.000
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	17.000.000
			Penagihan Pajak Daerah	60.751.000
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.000.000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	550.679.000
	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5.000.000
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	50.000.000
			Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian	5.000.000
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	13.500.000
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	23.906.000
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15.130.700
			Pengelolaan Promosi ASN	391.498.500
		Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	8.947.700
			Pengelolaan Assessment Center	175.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	587.920.300
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	25.000.000
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	22.700.000
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	589.756.044
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	316.084.500
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30.000.000
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	215.460.000
			Reviu Laporan Kinerja	106.680.000
			Reviu Laporan Keuangan	152.400.000
			Pengawasan Desa	88.203.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	50.000.000
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah	35.900.000
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	91.640.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	50.000.000
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47.988.000
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53.841.000
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	154.693.300
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000.000
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	72.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.531.349.749
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	64.000.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15.000.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.000.000
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.000.000
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	93.500.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	142.500.000
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.500.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	75.000.000
	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	236.000.000
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	15.000.000
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	15.000.000
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000.000
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	10.000.000
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	10.000.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25.000.000
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	163.000.000
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	37.300.000
	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	20.000.000
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	10.000.000
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	25.000.000
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	12.000.000
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	13.000.000
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30.000.000
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	20.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	50.000.000
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2.000.000
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.350.000.000
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5.000.000
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.000.000
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.500.000
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	226.999.400
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	201.000.000
			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	27.247.680
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	50.000.000
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	5.400.000
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	50.000.000
			Penyusunan Konten	50.000.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	40.000.000
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	390.000.000
			Penyediaan Akses Internet	936.000.000
			Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	150.000.000
			Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	25.000.000
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	700.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	23.000.000
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	35.000.000
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	70.000.000
			Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	88.000.000
			Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	100.000.000
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	100.000.000
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	50.000.000
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	80.000.000
(2) Pengembangan layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial yang lebih merata dan terintegrasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	54.000.000
			Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.000.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	66.712.800
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	15.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.000.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12.000.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3.000.000
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.000.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.000.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5.000.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	600.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	90.000.000
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	10.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	300.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	50.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	124.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	180.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000
			Pengadaan Mebel Sekolah	108.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	35.000.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	502.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.000.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.300.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.500.000
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.000.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.000.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	15.000.000
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	275.000.000
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000
			Pengadaan Mebel PAUD	15.000.000
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	5.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.000.000.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	20.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	30.000.000
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.150.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.000.000
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.000.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.000.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5.000.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	20.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	160.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	25.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	502.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.500.000
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	755.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.500.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	2.000.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	2.500.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.000.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.500.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.500.000
	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.000.000
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.000.000
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5.000.000
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5.000.000
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	15.000.000
	Program Pemenuhan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Pembangunan Puskesmas	10.503.461.894

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.800.000.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	247.473.200
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.194.757.855
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.219.208.719
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	312.813.600
			Pengembangan Rumah Sakit	5.080.070.000
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.785.726.550
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	18.400.000
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	73.225.100
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	478.287.500
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.204.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	534.199.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	324.214.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	427.165.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	310.559.330
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.560.200
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	85.360.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	288.467.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	271.422.900
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	199.846.600
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	89.828.800
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	49.017.500
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	104.288.300

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.366.508.970
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	691.149.100
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	108.323.900
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	220.433.400
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	35.000.000
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.436.340.200
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	69.700.000
			Operasional Pelayanan Puskesmas	1.179.423.000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	250.000.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	429.097.800
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	22.773.800
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	57.996.000
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	59.389.000
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	225.080.000
			Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	78.940.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	42.424.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	15.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	721.027.000
			Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	70.281.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	97.860.000
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	62.312.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	152.536.000
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.102.202.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	926.769.400
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5.000.000
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	6.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	114.427.800
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	77.477.000
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	211.875.000
	Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2.100.000
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000
			Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	102.474.900
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	32.400.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	28.000.000
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	72.046.000
			Penyediaan Sandang	49.488.000
			Penyediaan Alat Bantu	55.080.200
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.000.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	13.650.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	13.650.000
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	725.000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	19.000.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	10.000.000
			Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	25.000.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.000.000
			Pemberian Layanan Rujukan	4.000.000
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	10.000.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.172.737.327
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	240.000.000
	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	25.000.000
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	410.000.000
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10.000.000
	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
			Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	35.000.000
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	70.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.000.000
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	65.000.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	60.500.000
			Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota	36.500.000
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	225.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	429.310.300
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	356.226.576
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	60.000.000
			Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah	25.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	10.000.000
			Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	226.932.400
			Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat	42.700.000
			Pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	419.783.800
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	13.800.000
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	1.375.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga	350.000.000
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota	831.373.700
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	281.622.185
			Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	85.000.000
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	8.000.000
			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	40.600.000
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	220.700.000
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	75.000.000
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	17.500.000
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	106.522.000
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	90.000.000
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	70.250.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	150.000.000
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	160.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	120.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	50.000.000
	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	66.941.600
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	9.152.000
			Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	86.190.000
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	156.487.500
	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	59.808.400
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	137.572.500
	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	15.600.000
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	23.400.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	384.953.940

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	37.440.000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	49.709.000
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6.871.000
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	327.000.000
			Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	392.400.000
(3) Penguatan Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	506.424.200
			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	28.507.600
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	200.000.000
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	35.000.000
			Penetapan Cagar Budaya	75.000.000
	Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	35.000.000
	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	113.770.000
	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	65.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	5.145.500
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	158.770.000
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	40.000.000
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	75.000.000
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	50.000.000
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	100.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25.000.000
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	50.000.000
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100.000.000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	41.665.000
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	145.424.200
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	7.265.000
	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	232.482.700
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	68.071.500
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	10.680.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20.500.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	54.410.000
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	13.119.180
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3.396.400
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.480.000
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	42.124.500
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	22.037.000
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	4.830.000
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	4.186.600
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.499.200
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.819.200
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	4.830.000
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.000.000
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	72.000.000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	30.000.000
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	1.225.500.000
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	100.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	275.497.300
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	320.000.000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.000.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.000.000
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	350.924.000
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	370.000.000
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	250.000.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	326.000.000
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	350.000.000
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	50.000.000
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	-
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	40.000.000
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	75.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	250.000.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	45.000.000
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	60.000.000
	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	75.000.000
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	15.000.000
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	45.000.000
	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM	510.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	30.000.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	180.000.000
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	100.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	13.000.000
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	60.000.000
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	21.500.000
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.142.500.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	46.000.000
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	34.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000
			Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.100.000
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	30.000.000
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	Operasi Kapal Pengawas Perikanan	31.000.000
			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	30.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10.000.000
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	152.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	130.000.000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.000.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	400.545.000
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35.000.000
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.000.000
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	35.000.000
	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Citra Produk Ekspor	10.000.000
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	62.295.500
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	6.202.100

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20.927.600
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	255.107.200
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	15.050.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	20.711.200
(4) Penguatan Konektivitas Antarwilayah dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Permukiman serta Ruang Terbuka Publik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	25.000.000
			Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	40.000.000
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	78.000.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	15.200.000
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	350.000.000
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	100.000.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	36.000.000
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.000.000
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	210.000.000
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	25.000.000
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	614.142.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.509.540.000
	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	36.717.220
			Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	325.000.000
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	450.000.000
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	100.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	400.000.000
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	650.000.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	250.000.000
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000
	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100.000.000
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	21.100.000.000
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	300.000.000
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460
			Pemeliharaan Rutin Jalan	1.500.000.000
			Rekonstruksi Jalan	11.000.000.000
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	202.500.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	10.000.000
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	127.000.000
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	75.000.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	20.000.000
			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	15.000.000
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	100.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	700.000.000
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	150.000.000
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	50.000.000
	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	210.000.000
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	150.000.000
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	30.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	60.000.000
	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	200.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.000.000.000
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	250.000.000
			Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	150.000.000
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	350.000.000
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	7.500.000.000
	Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100.000.000
(5) Penguatan Tata Kelola dan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	120.000.000
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	50.000.000
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	50.000.000
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	30.000.000
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	30.000.000
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	80.000.000
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	765.000.000
	Program Pengelolaan	Pengelolaan Keanekaragaman	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	50.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	200.000.000
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	50.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10.000.000
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	25.000.000
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30.000.000
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	70.000.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	60.000.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100.000.000

PRIORITAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	50.000.000
			Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	1.926.313.400
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.255.684.600
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	25.000.000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	70.000.000
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	19.388.700
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	200.000.000
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	225.000.000
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	723.534.734
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.000.000
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.000.000

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur (diolah)

Selain dukungan anggaran terhadap masing-masing program prioritas pembangunan, disediakan juga dukungan anggaran terhadap program penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5. 2 Dukungan Anggaran terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	534.251.655.689
Total		**534.251.655.689**

5.1.2 DUKUNGAN PENDANAAN TERHADAP PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Program unggulan kepala daerah merupakan wujud konkret dari komitmen pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui program-program ini, kepala daerah berupaya mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor prioritas, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PU.1 Nyaman Layanan Publik

Sasaran Program Unggulan "Nyaman Layanan Publik" diarahkan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan publik melalui digitalisasi. Upaya tersebut didukung melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Arsip, dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan total pagu indikatif sebesar Rp3.346.647.680. Program ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, efektif, dan mudah diakses masyarakat.

PU.2 Internet Desa Nyaman

Sasaran Program Unggulan "Internet Desa Nyaman" diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa. Dukungan program dilakukan melalui Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan total pagu indikatif sebesar Rp3.654.000.000. Program ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas digital desa serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat.

PU.3 Nyaman ASN Berkemajuan

Sasaran Program Unggulan "Nyaman ASN Berkemajuan" diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN. Dukungan program diberikan melalui Program Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Riset dan Inovasi Daerah dengan total pagu indikatif sebesar Rp3.029.443.744. Program ini bertujuan menciptakan ASN yang adaptif, profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

PU.4 Nyaman Bersinergi

Sasaran Program Unggulan “Nyaman Bersinergi” diarahkan untuk meningkatkan partisipasi sektor non-pemerintah dalam pembiayaan, pelaksanaan, maupun inovasi program pembangunan daerah. Dukungan program meliputi Penyelenggaraan Pengawasan, Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta dukungan pemerintahan dan kelembagaan lainnya dengan total pagu indikatif sebesar Rp24.788.827.882. Program ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi pembangunan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

PU.5 Nyaman Desa Berdaya

Sasaran Program Unggulan “Nyaman Desa Berdaya” diarahkan pada terbangunnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif. Dukungan program dilakukan melalui Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan UMKM, serta Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan total pagu indikatif sebesar Rp2.220.000.000. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan memperkuat potensi ekonomi masyarakat desa.

PU.6 RT-Ku Nyaman

Sasaran Program Unggulan “RT-Ku Nyaman” diarahkan untuk mendorong keterlibatan aktif RT dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan mediasi sosial di tingkat lingkungan. Dukungan diberikan melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan total pagu indikatif sebesar Rp1.355.000.000. Program ini diharapkan mampu memperkuat peran RT sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial kemasyarakatan.

PU.7 Nyaman Cerdas

Sasaran Program Unggulan “Nyaman Cerdas” diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Program andalan yang mendukung sasaran ini meliputi bantuan gratis seragam, sepatu, tas, dan alat tulis sekolah serta program 1.000 beasiswa kuliah Sarjana (S1). Dukungan program dilakukan melalui Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan total pagu indikatif sebesar Rp27.457.104.300. Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat secara merata.

PU.8 Nyaman Sehat

Sasaran Program Unggulan “Nyaman Sehat” diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dukungan program dilakukan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, serta Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan total pagu indikatif sebesar Rp67.813.381.088. Program ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

PU.9 Nyaman Sejahtera

Sasaran Program Unggulan "Nyaman Sejahtera" diarahkan untuk menurunkan jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran. Program andalan yang mendukung meliputi bantuan kebutuhan hidup, bantuan sembako bagi nelayan, insentif umroh, dan bantuan tunai bagi majelis taklim serta remaja masjid dengan total pagu indikatif sebesar Rp6.370.111.600. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.

PU.10 Petani dan Nelayan Nyaman

Sasaran Program Unggulan "Petani dan Nelayan Nyaman" diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Dukungan program dilakukan melalui penyediaan bantuan bibit sawit unggul, pupuk, bantuan perahu, perawatan perahu, dan bantuan sembako nelayan musim angin kencang dengan total pagu indikatif sebesar Rp2.496.749.009. Program ini bertujuan memperkuat produktivitas dan pendapatan masyarakat sektor pertanian dan perikanan.

PU.11 Nyaman Kreatif Berkarya

Sasaran Program Unggulan "Nyaman Kreatif Berkarya" diarahkan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor industri kreatif berbasis potensi lokal. Dukungan dilakukan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan total pagu indikatif sebesar Rp175.000.000. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kreativitas dan peluang usaha masyarakat berbasis potensi daerah.

PU.12 UMKM Ku Nyaman Berdaya

Sasaran Program Unggulan "UMKM Ku Nyaman Berdaya" diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM lokal yang aktif dan berkelanjutan. Dukungan dilakukan melalui Program Pengembangan UMKM dengan total pagu indikatif sebesar Rp540.000.000. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas usaha masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM.

PU.13 Nyaman Kerja

Sasaran Program Unggulan "Nyaman Kerja" diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dukungan program dilakukan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal serta Program Pelatihan Kerja dan

Produktivitas Tenaga Kerja dengan total pagu indikatif sebesar Rp519.354.200. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

PU.14 Gerbang Ekonomi

Sasaran Program Unggulan “Gerbang Ekonomi” diarahkan untuk meningkatkan peran Pelabuhan Manggar sebagai pusat distribusi logistik dan mobilitas penumpang di Belitung Timur. Dukungan diberikan melalui Program Pengelolaan Pelayaran dengan total pagu indikatif sebesar Rp561.717.220. Program ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

PU.15 Infrastruktur Nyaman

Sasaran Program Unggulan “Infrastruktur Nyaman” diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan layanan publik di desa. Dukungan program dilakukan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Penyelenggaraan Jalan, Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Pengembangan Sistem Drainase dengan total pagu indikatif sebesar Rp43.399.098.460. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

PU.16 Nyaman Lestari

Sasaran Program Unggulan “Nyaman Lestari” diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah pasca tambang melalui reklamasi dan penghijauan serta mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dukungan program dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan, serta Program Pengelolaan Persampahan dengan total pagu indikatif sebesar Rp4.501.998.000. Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

PU.17 Nyaman Air Bersih

Sasaran Program Unggulan “Nyaman Air Bersih” diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan. Dukungan program dilakukan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan total pagu indikatif sebesar Rp2.150.000.000. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses air bersih yang memadai dan berkelanjutan.

Tabel 5. 3 Dukungan Anggaran Terhadap Program Unggulan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	NO	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
PU. 1	Nyaman Layanan Publik	Meningkatnya kemudahan akses layanan publik melalui digitalisasi				PP. 1	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.299.000.000
						PP. 2	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	383.647.680
						PP. 3	PENDAFTARAN PENDUDUK	266.000.000
						PP. 4	PENCATATAN SIPIL	40.000.000
						PP. 5	PENGELOLAAN ARSIP	100.000.000
						PP. 6	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	258.000.000
							Jumlah	3.346.647.680
PU. 2	Internet Desa Nyaman	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa				PP. 7	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.355.000.000
						PP. 1	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.299.000.000
							Jumlah	**3.654.000.000**
PU. 3	Nyaman ASN Berkemajuan	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN				PP. 8	KEPEGAWAIAN DAERAH	1.315.903.200
						PP. 9	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	928.540.544
						PP. 10	RISET DAN INOVASI DAERAH	785.000.000
							Jumlah	**3.029.443.744**
PU. 4	Nyaman Bersinergi	Meningkatnya partisipasi sektor non-pemerintah dalam pembiayaan, pelaksanaan, atau inovasi				PP. 11	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	770.283.000
						PP. 12	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	306.522.300

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	NO	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
		program pembangunan				PP. 10	RISET DAN INOVASI DAERAH	785.000.000
						PP. 13	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	571.470.082
						PP. 14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	130.000.000
						PP. 15	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.077.173.800
						PP. 16	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.140.376.800
						PP. 17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.569.401.200
						PP. 18	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	438.600.700
							Jumlah	**24.788.827.882**
PU. 5	Nyaman Desa Berdaya	Terbangunnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.				PP. 7	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.355.000.000
						PP. 19	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	540.000.000
						PP. 20	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	325.000.000
							Jumlah	**2.220.000.000**

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	NO	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
PU. 6	RT-Ku Nyaman	Mendorong keterlibatan aktif RT dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta mediasi sosial tingkat lingkungan				PP. 7	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.355.000.000
							Jumlah	**1.355.000.000**
PU. 7	Nyaman Cerdas	Meningkatnya kualitas pendidikan	PA. 1	Gratis Seragam, Sepatu, Tas, dan Alat Tulis untuk Anak Sekolah	Jumlah anak penerima bantuan	PP. 21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	26.419.716.800
			PA. 2	1.000 (Seribu) Beasiswa Kuliah Sarjana (S1)	Jumlah penerima beasiswa S1	PP. 17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.037.387.500
							Jumlah	**27.457.104.300**
PU. 8	Nyaman Sehat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	PA. 3	Pelayanan dan Penggunaan BPJS Secara Gratis Bagi Masyarakat yang Belum Terdaftar	Jumlah kepesertaan/tahun	PP. 22	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	67.813.381.088
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.366.508.970
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.436.340.200
							Jumlah	**67.813.381.088**
PU. 9	Nyaman Sejahtera	Menurunnya jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran	PA. 4	Bantuan Kebutuhan Hidup Senilai 2 Juta Rupiah Per KK Setiap Tahun	Jumlah KK penerima bantuan	PP. 23	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	165.974.900
			PA. 8	Bantuan Sembako bagi Nelayan pada Musim Kencang	Jumlah nelayan penerima bantuan			

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	NO	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
			PA. 5	Insentif Umroh (Gratis) Nyaman Beltim Berkah	Jumlah penerima insentif	PP. 17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.204.136.700
			PA. 6	Bantuan Tunai Majelis Taklim dan Remaja Masjid	Jumlah penerima bantuan			
							Jumlah	**6.370.111.600**
PU. 10	Petani dan Nelayan Nyaman	Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan	PA. 7	Gratis Bantuan Bibit Sawit Unggul dan Pupuk	Jumlah bibit sawit yang disalurkan (batang)	PP. 24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	738.000.009
					Jumlah pupuk yang disalurkan (kg)			247.500.000
			PA. 8	Gratis Bantuan Perahu, Perawatan Perahu, dan Sembako Nelayan Musim Angin Kencang	Jumlah KUB penerima	PP. 25	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.361.249.000
					Jumlah perahu bantuan			15.000.000
					Jumlah perahu yang menerima perawatan			135.000.000
							Jumlah	**2.496.749.009**
PU. 11	Nyaman Kreatif Berkarya	Mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor industri kreatif berbasis potensi lokal				PP. 26	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	175.000.000
							Jumlah	**175.000.000**
PU. 12	UMKM Ku Nyaman Berdaya	Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM lokal yang aktif dan berkelanjutan	PA. 9	Bantuan Modal 2 s/d 50 Juta Rupiah untuk Membuka Usaha dan Pengembangan Usaha (UMKM)	Jumlah UMKM penerima	PP. 27	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	540.000.000
								-
							Jumlah	**540.000.000**

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	NO	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
PU. 13	Nyaman Kerja	Tersedianya lapangan kerja baru	PA. 10	10.000 (Sepuluh Ribu) Lapangan Kerja Tersedia	Jumlah lapangan kerja tersedia	PP. 28	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	194.354.200
						PP. 29	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	325.000.000
							Jumlah	**519.354.200**
PU. 14	Gerbang Ekonomi	Meningkatkan peran Pelabuhan Manggar sebagai pusat distribusi logistik dan mobilitas penumpang di Belitung Timur				PP. 30	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	561.717.220
							Jumlah	**561.717.220**
PU. 15	Infrastruktur Nyaman	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan layanan publik di desa.	PA. 11	Renovasi 1.000 (Seribu) Rumah Warga Tak Layak	Jumlah RTLH direnovasi	PP. 31	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	7.000.000.000
						PP. 32	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	21.100.000.000
						PP. 33	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	13.499.098.460
						PP. 34	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	950.000.000
						PP. 35	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	850.000.000
							Jumlah	**43.399.098.460**
PU. 16	Nyaman Lestari	Meningkatnya kualitas lingkungan di wilayah pasca tambang melalui reklamasi atau penghijauan				PP. 36	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.055.000.000

NO	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	NO	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF
						PP. 37	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	65.000.000
		Terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di wilayah Belitung Timur				PP. 38	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.381.998.000
							Jumlah	**4.501.998.000**
PU. 17	Nyaman Air Bersih	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan				PP. 39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.200.000.000
						PP. 34	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	950.000.000
							Jumlah	**2.150.000.000**

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur (diolah)

5.1.3 DUKUNGAN PENDANAAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Selain dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 juga memberikan porsi dukungan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027 melalui penyelarasan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah.

Dukungan pendanaan pada prioritas pembangunan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya” dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.109.024.515. Selanjutnya, prioritas “Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya” didukung melalui alokasi anggaran sebesar Rp140.409.916.020, sedangkan

prioritas “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan” memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp34.452.378.234.

Gambaran mengenai dukungan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5. 4 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
[1] Meningkatkan Sumber Daya manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	54.000.000
			Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.000.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	66.712.800
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	15.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.000.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12.000.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3.000.000
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.000.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.000.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5.000.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	600.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	90.000.000
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	10.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	300.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	50.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	124.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	180.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000
			Pengadaan Mebel Sekolah	108.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	35.000.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	502.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.000.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.300.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.500.000
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.000.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5.000.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	15.000.000
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	275.000.000
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000
			Pengadaan Mebel PAUD	15.000.000
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	5.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.000.000.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	20.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	30.000.000
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.150.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.000.000
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.000.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.000.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	20.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	160.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	25.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	502.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.500.000
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	755.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.500.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	2.000.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	2.500.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.000.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.500.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.500.000
	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.000.000
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.000.000
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5.000.000
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	15.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	10.503.461.894
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.800.000.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	248.394.100
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.194.766.855
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.219.208.719
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	312.813.600
			Pengembangan Rumah Sakit	5.080.070.000
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.785.726.550
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	18.400.000
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	73.225.100
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	478.287.500
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.204.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	534.199.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	324.214.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	427.165.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	310.559.300
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.560.200
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	85.360.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	288.467.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	271.422.900
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	199.846.600
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	89.828.800
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	49.017.500
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	104.288.300
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.366.508.970
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	691.149.100
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	108.323.900
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	220.433.400
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	35.000.000
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.436.340.200
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	69.700.000
			Operasional Pelayanan Puskesmas	1.179.423.000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	250.000.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	429.097.800

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	22.773.800
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	57.996.000
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	59.389.000
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	225.080.000
			Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	78.940.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	42.424.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	15.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	721.027.000
			Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	70.281.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	97.860.000
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	62.312.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	152.536.000
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.800.720.000
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	926.769.400
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5.000.000
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	6.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	114.427.800
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	77.477.000
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	211.875.000
	Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2.100.000
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000
			Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	102.474.900
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	32.400.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	28.000.000
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	72.046.000
			Penyediaan Sandang	49.488.000
			Penyediaan Alat Bantu	55.080.200
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.000.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	13.650.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	13.650.000
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	725.000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	19.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pemberian Layanan Kedaruratan	10.000.000
			Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	25.000.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.000.000
			Pemberian Layanan Rujukan	4.000.000
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	10.000.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.172.737.327
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	240.000.000
	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	25.000.000
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	410.000.000
	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	65.000.000
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	35.000.000
	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	113.770.000
(2) Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.000.000
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.000.000
			Pembentukan Paskibraka	777.262.800
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.145.217.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.360.000
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.000.000
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	52.799.400
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.000.000
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	546.490.100
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.716.600
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.586.100

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.906.200
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	253.474.800
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	119.600.000
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60.625.830
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	139.000.000
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	900.000.000
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	271.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik	90.000.000
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	21.000.000
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.000.000
			Pembahasan APBD	31.000.000
			Pembahasan APBD Perubahan	21.000.000
			Pembahasan Laporan Semester	10.000.000
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12.000.000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.180.500.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.681.750.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.132.090.000
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	34.000.000
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	20.000.000
			Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah	34.000.000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	587.500.000
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	434.600.000
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.000.000
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	150.000.000
			Penyusunan Program Kerja DPRD	10.000.000
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	220.000.000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	500.000.000
		Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.298.936.800
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20.000.000
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100.000.000
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	116.790.000
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4.465.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5.634.400
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.204.136.700
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.194.500
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.037.387.500
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	61.700.000
			Fasilitasi Bantuan Hukum	57.000.000
			Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum	36.903.100
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	31.500.000
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3.690.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	73.280.700
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	35.895.600
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1.200.000
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	53.791.100
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	83.599.800
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	101.880.000
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	82.503.500
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	6.450.000
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	35.127.498
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15.000.000
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	89.000.000
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	27.000.000
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	302.468.100
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	20.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	62.874.484
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	124.123.540
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	202.481.768
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	54.244.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	149.118.500
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	119.341.200
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	168.532.872
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	85.405.200
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	15.000.000
	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	20.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	500.000.000
		Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	95.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	15.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	95.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	60.000.000
	Program Pengelolaan		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	58.600.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.600.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	178.800.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	182.800.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	38.869.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	38.869.000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	84.600.000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	72.600.000
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	57.500.000
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	250.644.000
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	18.500.000
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	57.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	103.572.000
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12.500.000
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	41.140.000
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	35.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	65.175.000
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	52.105.000
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	40.000.000
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	709.250.000
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	85.757.483.535
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	600.000.000
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	8.132.845.000
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	20.000.000
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	70.000.000
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.000.000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	27.500.000
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	32.000.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	175.000.000
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	150.000.000
			Pengamanan Barang Milik Daerah	10.000.000
			Penilaian Barang Milik Daerah	20.000.000
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	140.000.000
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	44.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20.000.000
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	352.000.000
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	66.000.000
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	296.000.000
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	17.000.000
			Penagihan Pajak Daerah	60.751.000
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.000.000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	500.679.000
	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5.000.000
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	50.000.000
			Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian	5.000.000
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	13.500.000
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	23.906.000
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15.130.700
			Pengelolaan Promosi ASN	391.498.500
		Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	8.947.700
			Pengelolaan Assessment Center	175.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	587.920.300
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	25.000.000
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	22.700.000
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	589.756.044
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	316.084.500
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30.000.000
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	215.460.000
			Reviu Laporan Kinerja	106.680.000
			Reviu Laporan Keuangan	152.400.000
			Pengawasan Desa	88.203.000
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	50.000.000
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah	35.900.000
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	91.640.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	50.000.000
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47.988.000
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53.841.000
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	154.693.300
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000.000
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	72.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.531.349.749
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	64.000.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15.000.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.000.000
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.000.000
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	93.500.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	142.500.000
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.500.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	75.000.000
	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	236.000.000
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	15.000.000
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	15.000.000
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000.000
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	10.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	10.000.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25.000.000
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	163.000.000
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	37.300.000
	Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	50.000.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	390.000.000
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	100.000.000
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	80.000.000
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	100.000.000
	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	210.000.000
	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	200.000.000
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.000.000.000
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	150.000.000
	Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
(3) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	28.507.600
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	75.000.000
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	100.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25.000.000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	41.665.000
	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	232.482.700
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20.500.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	54.410.000
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3.396.400
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.480.000
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.499.200

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.000.000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	30.000.000
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	320.000.000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.000.000.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	326.000.000
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	350.000.000
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	40.000.000
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	75.000.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	45.000.000
	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	45.000.000
	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM	510.000.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	180.000.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	46.000.000
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Operasi Kapal Pengawas Perikanan	31.000.000
			Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10.000.000
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	152.000.000
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.000.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	400.545.000
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35.000.000
	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1	Peningkatan Citra Produk Ekspor	10.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	62.295.500
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20.927.600
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	15.050.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	13.011.200
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	78.000.000
	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	120.000.000
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	50.000.000
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	50.000.000
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	200.000.000
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	50.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10.000.000
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHAYang Terkait Dengan PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	70.000.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	60.000.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.255.684.600
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	450.000.000
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	100.000.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	400.000.000
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	650.000.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000
	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	21.100.000.000
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.500.000.000
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	10.000.000
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	25.000.000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	70.000.000
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	19.388.700
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	200.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	225.000.000
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	723.534.734
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.000.000
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.000.000

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur (diolah)

5.1.4 DUKUNGAN PENDANAAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Selain dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 juga memberikan porsi dukungan terhadap prioritas pembangunan Nasional Tahun 2027.

Dukungan terhadap Kebijakan Asta Cita Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan dukungan anggaran untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) sebesar Rp3.296.664.211. Selanjutnya, dukungan terhadap upaya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dialokasikan sebesar Rp9.620.827.800. Untuk mendukung peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta pembangunan infrastruktur, dialokasikan anggaran sebesar Rp3.646.945.780.

Pada aspek pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, dialokasikan dukungan anggaran sebesar Rp103.250.832.949. Sementara itu, dukungan terhadap hilirisasi dan

industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dialokasikan sebesar Rp62.160.493.680. Untuk mendukung pembangunan dari desa dan dari bawah dalam rangka pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, dialokasikan anggaran sebesar Rp667.042.600. Dukungan terhadap penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba direncanakan sebesar Rp29.822.905.535. Adapun dukungan terhadap penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, budaya, dan toleransi antarumat beragama dialokasikan sebesar Rp7.873.906.934.

Gambaran mengenai dukungan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Nasional disajikan pada Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5. 5 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
[PN 1] Mempekokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.000.000
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.000.000
			Pembentukan Paskibraka	777.262.800
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.145.217.000
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.360.000
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	52.799.400
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.000.000
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15.851.211
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30.000.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	546.490.100

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.716.600
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.586.100
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.906.200
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	253.474.800
[PN 2]Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.480.000
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	42.124.500
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	22.037.000
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	4.830.000
			Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	4.186.600
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.499.200
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.819.200
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	4.830.000
	Program Pengawasan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Keamanan Pangan	Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	72.000.000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	30.000.000
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	1.225.500.000
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	100.000.000
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	275.497.300
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	320.000.000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.000.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.000.000
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	350.924.000
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	370.000.000
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	250.000.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	326.000.000
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	350.000.000
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	100.000.000
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	180.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	13.000.000
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	60.000.000
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	21.500.000
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.142.500.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	46.000.000
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	34.000.000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000
			Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.100.000
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	30.000.000
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Operasi Kapal Pengawas Perikanan	31.000.000
			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	30.000.000
			Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	152.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	130.000.000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000
[PN 3] Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong melanjutkan pengembangan infrastruktur.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	41.665.000
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	145.424.200
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	7.265.000
	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	232.482.700
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	68.071.500
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	10.680.000
			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20.500.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	54.410.000
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	13.119.180
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3.396.400
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	40.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	75.000.000
			Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	250.000.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	45.000.000
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	60.000.000
	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	75.000.000
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	15.000.000
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	45.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM	510.000.000
			Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	30.000.000
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	28.507.600
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	506.424.200
			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	200.000.000
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	75.000.000
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	50.000.000
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	100.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25.000.000
			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	50.000.000
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100.000.000
[PN 4] Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	54.000.000
			Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.000.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	66.712.800
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	15.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12.000.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3.000.000
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.000.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.000.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5.000.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	600.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	90.000.000
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	10.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	300.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	50.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	124.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	180.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000
			Pengadaan Mebel Sekolah	108.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	35.000.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	502.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.300.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.500.000
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.000.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.000.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5.000.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	15.000.000
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	275.000.000
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000
			Pengadaan Mebel PAUD	15.000.000
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	5.000.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.000.000.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	20.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	30.000.000
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.150.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.000.000
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	5.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	5.000.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5.000.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	20.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	160.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	25.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	502.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.500.000
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	755.000.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.500.000
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	2.000.000
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	2.500.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.000.000
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.500.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.000.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.500.000
	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.000.000
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5.000.000
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5.000.000
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	15.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	10.503.461.894
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.800.000.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	248.394.100
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.194.766.855
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.219.208.719
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	312.813.600
			Pengembangan Rumah Sakit	5.080.070.000
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.785.726.550
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	18.400.000
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	73.225.100
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	478.287.500
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.204.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	534.199.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	324.214.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	427.165.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	310.559.300
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.560.200
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	85.360.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	288.467.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	271.422.900
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	199.846.600
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	89.828.800
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	49.017.500
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	104.288.300
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.366.508.970
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	691.149.100
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	108.323.900
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	220.433.400
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	35.000.000
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.436.340.200
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	69.700.000
			Operasional Pelayanan Puskesmas	1.179.423.000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	250.000.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	429.097.800
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	22.773.800
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	57.996.000
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	59.389.000
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	225.080.000
			Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	78.940.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	42.424.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	15.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	721.027.000
			Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	70.281.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	97.860.000
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	62.312.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	152.536.000
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.800.720.000
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	926.769.400
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5.000.000
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	6.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	114.427.800
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	77.477.000
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	211.875.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	225.000.000
			Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	60.500.000
			Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten/kota	36.500.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah	25.000.000
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	356.226.576
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	60.000.000
			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	429.310.300
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	10.000.000
			Pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	419.783.800
			Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	226.932.400
			Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat	42.700.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	1.375.000.000
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	13.800.000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga	350.000.000
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota	831.373.700

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	85.000.000
			Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	281.622.185
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	40.600.000
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	17.500.000
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	75.000.000
			Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota	220.700.000
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	8.000.000
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	160.000.000
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	120.000.000
	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	59.808.400
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	137.572.500
[PN 5]Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	25.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	40.000.000
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	78.000.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	15.200.000
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	350.000.000
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	100.000.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	36.000.000
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.000.000
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	210.000.000
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	25.000.000
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	614.142.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.509.540.000
	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	36.717.220
			Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	325.000.000
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20.927.600
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	255.107.200
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	15.050.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	20.711.200
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	450.000.000
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	100.000.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	400.000.000
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Sistem Air Limbah	Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	650.000.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	250.000.000
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000
	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100.000.000
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	21.100.000.000
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	250.000.000
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460
			Pemeliharaan Rutin Jalan	1.500.000.000
			Rekonstruksi Jalan	11.000.000.000
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	202.500.000
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	10.000.000
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	127.000.000
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	75.000.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	20.000.000
			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	15.000.000
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	100.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	100.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	600.000.000
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	150.000.000
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	50.000.000
	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	210.000.000
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	150.000.000
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	30.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	60.000.000
	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	200.000.000
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.000.000.000
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	250.000.000
			Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	150.000.000
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	350.000.000
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	7.500.000.000
	Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100.000.000
[PN 6] Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.000.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	400.545.000
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35.000.000
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.000.000
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	35.000.000
	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Citra Produk Ekspor	10.000.000
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	62.295.500
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	6.202.100
[PN 7]Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan penyelundupan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	201.000.000
			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	27.247.680
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	50.000.000
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	5.400.000
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	50.000.000
			Penyusunan Konten	50.000.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	40.000.000
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	390.000.000
			Penyediaan Akses Internet	936.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	150.000.000
			Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	25.000.000
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	700.000.000
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	23.000.000
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	35.000.000
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	70.000.000
			Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	88.000.000
			Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	100.000.000
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	100.000.000
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	50.000.000
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	80.000.000
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	900.000.000
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	271.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik	90.000.000
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	21.000.000
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.000.000
			Pembahasan APBD	31.000.000
			Pembahasan APBD Perubahan	21.000.000
			Pembahasan Laporan Semester	10.000.000
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12.000.000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.180.500.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.681.750.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.132.090.000
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	34.000.000
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	20.000.000
			Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah	34.000.000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	587.500.000
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	434.600.000
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.000.000
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	150.000.000
			Penyusunan Program Kerja DPRD	10.000.000
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	220.000.000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	500.000.000
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	116.790.000
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4.465.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5.634.400
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.204.136.700
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.194.500
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.037.387.500
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	61.700.000
			Fasilitasi Bantuan Hukum	57.000.000
			Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum	36.903.100
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	31.500.000
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3.690.000
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	73.280.700
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	35.895.600
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1.200.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	53.791.100
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	83.599.800
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	101.880.000
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	82.503.500
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	6.450.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	35.127.498
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15.000.000
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	89.000.000
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	27.000.000
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	302.468.100
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	20.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	62.874.484
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	124.123.540
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55.000.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	202.481.768
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	54.244.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	149.118.500

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	119.341.200
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	168.532.872
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	85.405.200
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	15.000.000
		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	20.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	500.000.000
	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	95.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	15.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	95.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	60.000.000
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5.000.000
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	50.000.000
			Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian	5.000.000
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	13.500.000
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	23.906.000
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15.130.700
			Pengelolaan Promosi ASN	391.498.500
		Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	8.947.700
			Pengelolaan Assessment Center	175.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	587.920.300
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	25.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	22.700.000
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	589.756.044
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	316.084.500
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30.000.000
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	215.460.000
			Reviu Laporan Kinerja	106.680.000
			Reviu Laporan Keuangan	152.400.000
			Pengawasan Desa	88.203.000
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	50.000.000
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah	35.900.000
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	91.640.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	50.000.000
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47.988.000
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53.841.000
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	154.693.300
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000.000
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	72.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.531.349.749
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	64.000.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15.000.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.000.000
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.000.000
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	93.500.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	142.500.000
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.500.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	75.000.000
[PN 8] Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapaimasyarakat yang adil dan makmur	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	65.000.000
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	5.145.500
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	158.770.000
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	40.000.000
	Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	35.000.000
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	35.000.000
			Penetapan Cagar Budaya	75.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	113.770.000
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	120.000.000
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	50.000.000
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	50.000.000
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	30.000.000
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	30.000.000
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	80.000.000
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	765.000.000
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	50.000.000
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	200.000.000
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	50.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10.000.000
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	25.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30.000.000
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	70.000.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	60.000.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	60.000.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100.000.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	50.000.000
			Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	1.926.313.400
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.255.684.600

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	25.000.000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	70.000.000
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	19.388.700
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	200.000.000
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	225.000.000
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	723.534.734
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.000.000
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.000.000
	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	236.000.000
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	15.000.000
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	15.000.000
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000.000
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	10.000.000
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	10.000.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25.000.000
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	163.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	37.300.000

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur (diolah)

Dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) diwujudkan melalui sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan nasional. Keselarasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Gambaran mengenai dukungan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) disajikan pada Tabel 5.6 berikut:

Tabel 5. 6 Dukungan Anggaran terhadap Program Strategis Nasional Tahun 2027

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
A	**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**				
1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	60.000.000
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	250.000.000
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mandiri menjadi Usaha Kecil	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi Kepada UMKM	510.000.000
				Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	30.000.000
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.172.737.327
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	240.000.000
2	Sekolah Rakyat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
3	Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7.000.000.000
B	**KETAHANAN PANGAN**				
1	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Penanganan kerawanan pangan	Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	59.819.200
C	**KESEHATAN UNTUK SEMUA**				
1	Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.436.340.200
		Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	75.000.000
2	Makan Bergizi Gratis	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	6.450.000
D	**PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN**				
1	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan SD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000
				Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	54.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	90.000.000
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	300.000.000
			Pengelolaan Pendidikan SMP	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	124.000.000

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	180.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	275.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.000.000
			Pengelolaan Pendidikan PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	160.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.000.000
E	**PERTUMBUHAN EKONOMI**				
1	Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	6.450.000
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	130.000.000
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	152.000.000
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	34.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	46.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.142.500.000
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	100.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	180.000.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	400.545.000
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	35.000.000

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.000.000
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20.927.600
		Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	42.124.500
2	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
3	Kemudahan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	68.071.500
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	10.680.000
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	20.500.000
			Pengendalian Pelaksanaan	Pengawasan penanaman modal	54.410.000

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	13.119.180

Sumber: Bapperida Kab. Belitung Timur (diolah)

5.1.5 PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pada sub bab ini disampaikan besaran pendanaan dalam bentuk pagu indikatif pada setiap Perangkat Daerah (PD) dan dukungan pendanaan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2027. Seluruh rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2027 disediakan pendanaan dalam bentuk pagu indikatif yaitu batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing PD untuk merencanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu indikatif tidak lagi menggunakan pendekatan "*money follow function*", tetapi menggunakan pendekatan "*money follow priority programme*". Pagu indikatif masing-masing PD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2027 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.6 berikut:

Tabel 5. 7 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM KONKUREN & UMUM PEMBANGUNAN DAERAH				PAGU PROGRAM PENUNJANG	TOTAL PAGU
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU		
1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	4	8	85	26.474.716.800	158.528.904.643	185.003.621.443
1.02.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan	4	11	52	71.835.903.418	156.000.344.546	227.836.247.964
1.03.2.10.1.04.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	23	82	55.986.098.460	13.755.267.725	69.741.366.185
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	2	3	3	319.225.830	10.200.544.622	10.519.770.452
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	4	12	1.497.923.434	3.244.181.394	4.742.104.828
1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	18	34	3.318.503.427	4.723.001.142	8.041.504.569
2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	10	40	1.315.000.000	6.003.489.188	7.318.489.188
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	9	20	44	5.019.727.800	7.548.673.884	12.568.401.684
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	10	13	40	5.256.998.000	9.423.054.755	14.680.052.755
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	7	10	531.300.000	5.520.579.608	6.051.879.608
2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	10	46	2.828.873.340	5.543.849.678	8.372.723.018
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2	12	44	5.912.599.220	5.739.303.942	11.651.903.162
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4	4	40	3.170.647.680	7.906.857.200	11.077.504.880
2.18.0.00.0.00.13.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	6	37	597.013.980	5.407.916.643	6.004.930.623
2.22.3.26.2.19.03.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	12	22	77	7.719.938.261	9.474.624.497	17.194.562.758
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	9	14	440.000.000	4.742.726.987,00	5.182.726.987
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	4	12	49	4.679.100.000	6.267.583.838	10.946.683.838
3.31.3.30.0.00.14.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	10	44	978.838.600	5.063.227.141	6.042.065.741
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	2	8	19	8.008.001.900	26.336.867.798	34.344.869.698
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	1	6	25	13.140.376.800	22.335.403.200	35.475.780.000

Kode	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM KONKUREN & UMUM PEMBANGUNAN DAERAH				PAGU PROGRAM PENUNJANG	TOTAL PAGU
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU		
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	9	24	2.329.717.162	6.712.465.853	9.042.183.015
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3	7	45	98.777.382.535	11.806.280.000	110.583.662.535
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	6	15	2.244.443.744	6.558.965.796	8.803.409.540
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	2	4	12	1.076.805.300	13.650.231.247	14.727.036.547
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manggar	5	6	8	304.000.000	2.837.570.221	3.141.570.221
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Gantung	5	5	9	280.000.000	2.850.445.951	3.130.445.951
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kelapa Kampit	5	6	7	140.000.000	2.909.638.199	3.049.638.199
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Simpang Pesak	5	7	8	525.000.000	2.400.194.940	2.925.194.940
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar	4	5	5	221.754.799	2.626.505.295	2.848.260.094
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Simpang Renggiang	5	7	11	436.094.950	2.555.182.645	2.991.277.595
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Dendang	5	7	11	365.000.000	2.586.399.172	2.951.399.172
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	18	3.296.664.211	3.061.373.939	6.358.038.150
	TOTAL	**165**	**290**	**970**	**329.097.649.651**	**534.251.655.689**	**863.349.305.340**

5.2 RUMUSAN USULAN HASIL PENELAHAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 sebanyak 870 usulan yang telah disampaikan oleh anggota DPRD melalui aplikasi SIPD, dan 413 usulan (47,47 persen) yang disetujui. Seluruh usulan tersebut telah melalui proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Dilihat dari jumlah usulan per anggotan DPRD, terdapat variasi yang mencerminkan besarnya aspirasi masyarakat pada masing-masing daerah pemilihan dan kebutuhan pembangunan yang berbeda di setiap wilayah. Secara umum Pokok-Pokok Pikiran DPRD masih didominasi oleh usulan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan sektor pertanian dan perikanan, pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Pengakomodiran usulan Pokir dilakukan secara sinergis dengan memperhatikan target indikator kinerja daerah, prioritas pembangunan daerah, kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta kemampuan pendanaan daerah.

Tabel 5. 8 Rumusan Usulan Hasil Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2027

PENGUSUL		DIKEMBALIKAN	DITOLAK	USULAN DISETUJUI	VERIFIKASI TAPD	TOTAL
Agus Firmansyah			5	7		12
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		1			1
	Dinas Lingkungan Hidup		1			1
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga			1		1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			4		4
	Dinas Perhubungan		3	1		4
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			1		1
AKHIRUDDIN, A.Md		1	44	51		96
	Dinas Kesehatan			1		1
	Dinas Lingkungan Hidup		1	1		2

PENGUSUL		DIKEMBALIKAN	DITOLAK	USULAN DISETUJUI	VERIFIKASI TAPD	TOTAL
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga			8		8
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			36		36
	Dinas Pendidikan		15			15
	Dinas Perhubungan		9			9
	Dinas Perikanan		18	1		19
	Dinas Pertanian dan Pangan		1	4		5
	Sekretariat Daerah	1				1
Aprialdi Binsar Marudut Simbolon			5	22	5	32
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga			1		1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			11	5	16
	Dinas Perhubungan		4	3		7
	Dinas Perikanan			2		2
	Dinas Pertanian dan Pangan		1	3		4
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1		1
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1		1
Candra Aryaputra			1	25		26
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			1		1
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			1		1
	Dinas Lingkungan Hidup		1	2		3
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga			2		2
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			7		7
	Dinas Perhubungan			2		2

PENGUSUL		DIKEMBALIKAN	DITOLAK	USULAN DISETUJUI	VERIFIKASI TAPD	TOTAL
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			4		4
	Dinas Pertanian dan Pangan			4		4
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1		1
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1		1
Drs. HUSAINI RASYID, M.Si			1	14		15
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga			2		2
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			9		9
	Dinas Perikanan		1	2		3
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1		1
DWI NANDA PUTRA			26	14	2	42
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		3			3
	Dinas Lingkungan Hidup		1			1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			8	2	10
	Dinas Pendidikan		16	4		20
	Dinas Perhubungan		3			3
	Dinas Pertanian dan Pangan		2	1		3
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1		1
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1			1
Endriansyah			11	21		32
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			1		1

PENGUSUL		DIKEMBALIKAN	DITOLAK	USULAN DISETUJUI	VERIFIKASI TAPD	TOTAL
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			17		17
	Dinas Perhubungan		3			3
	Dinas Perikanan		2	1		3
	Dinas Pertanian dan Pangan		6			6
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			2		2
FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM			4	8		12
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			4		4
	Dinas Perhubungan			2		2
	Dinas Pertanian dan Pangan		4	1		5
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1		1
HAIRIL ANWAR		2	39	4	21	66
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		1			1
	Dinas Kesehatan			1		1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				21	21
	Dinas Pendidikan		6			6
	Dinas Perhubungan		4	1		5
	Dinas Pertanian dan Pangan		28	1		29
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1		1
	Sekretariat Daerah	2				2
HARMINTON			2	6		8
	Dinas Lingkungan Hidup			1		1

PENGUSUL		DIKEMBALIKAN	DITOLAK	USULAN DISETUJUI	VERIFIKASI TAPD	TOTAL
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			2		2
	Dinas Perhubungan		1			1
	Dinas Perikanan		1			1
	Dinas Pertanian dan Pangan			2		2
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1		1
Heru Indratno			22	40		62
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		1			1
	Dinas Lingkungan Hidup		3	5		8
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			24		24
	Dinas Pendidikan		2	1		3
	Dinas Perhubungan		10	2		12
	Dinas Perikanan		2	1		3
	Dinas Pertanian dan Pangan		4			4
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			7		7
ISMANSYAH, S.IP		1	109	50		160
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			2		2
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		21	10		31
	Dinas Perhubungan		4	3		7
	Dinas Perikanan		21	3		24
	Dinas Pertanian dan Pangan		57			57
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			8		8
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		6	24		30
	Sekretariat Daerah	1				1

PENGUSUL		DIKEMBALIKAN	DITOLAK	USULAN DISETUJUI	VERIFIKASI TAPD	TOTAL
Iwan Rahmawan			23	40		63
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		2			2
	Dinas Lingkungan Hidup		3	1		4
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga			2		2
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		3	21		24
	Dinas Perhubungan		9	4		13
	Dinas Perikanan		3			3
	Dinas Pertanian dan Pangan		2	2		4
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			7		7
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1	3		4
JIMMY TJONG		1	3	12		16
	Dinas Lingkungan Hidup		1			1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1	5		6
	Dinas Perhubungan		1			1
	Dinas Perikanan			1		1
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			1		1
	Dinas Pertanian dan Pangan			3		3
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			2		2
	Sekretariat Daerah	1				1
KAMRI		2	17	11		30
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1	6		7
	Dinas Perhubungan		2			2

PENGUSUL		DIKEMBALIKAN	DITOLAK	USULAN DISETUJUI	VERIFIKASI TAPD	TOTAL
	Dinas Perikanan		3	2		5
	Dinas Pertanian dan Pangan		5			5
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2		2
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		6	1		7
	Sekretariat Daerah	2				2
OMAN ANGGARI, SH, MH			1	3	9	13
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1		9	10
	Dinas Perhubungan			3		3
	Oscar Habib		16	8		24
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			4		4
	Dinas Pendidikan		16	1		17
	Dinas Pertanian dan Pangan			3		3
	Ramlan		4	11		15
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		1			1
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga			1		1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2	3		5
	Dinas Perhubungan		1			1
	Dinas Perikanan			3		3
	Dinas Pertanian dan Pangan			2		2
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1		1
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1		1

PENGUSUL		DIKEMBALIKAN	DITOLAK	USULAN DISETUJUI	VERIFIKASI TAPD	TOTAL
RUDIANSYAH		1	15	7	7	30
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		2	2		4
	Dinas Lingkungan Hidup			1		1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1		7	8
	Dinas Pendidikan		1			1
	Dinas Perhubungan		6			6
	Dinas Perikanan		1			1
	Dinas Pertanian dan Pangan		4	1		5
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3		3
	Sekretariat Daerah	1				1
SARDIDI, SE			4	8		12
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			5		5
	Dinas Pendidikan		2			2
	Dinas Perhubungan		2			2
	Dinas Pertanian dan Pangan			1		1
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2		2
SUBANDRI			17	6	11	34
	Dinas Lingkungan Hidup			1		1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			3	11	14
	Dinas Perhubungan		5	2		7
	Dinas Perikanan		1			1
	Dinas Pertanian dan Pangan		11			11
SULADI			1	6		7

PENGUSUL		DIKEMBALIKAN	DITOLAK	USULAN DISETUJUI	VERIFIKASI TAPD	TOTAL
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			1		1
	Dinas Lingkungan Hidup		1	1		2
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga			1		1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			2		2
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1		1
TJONG JUNG MIN		1	5	13		19
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		1			1
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga			1		1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			7		7
	Dinas Pendidikan		1			1
	Dinas Perhubungan		3	1		4
	Dinas Perikanan			2		2
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			1		1
	Dinas Pertanian dan Pangan			1		1
	Sekretariat Daerah	1				1
	Yeri Candra Pratama	2	7	13		22
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		2	1		3
	Dinas Kesehatan		1			1
	Dinas Lingkungan Hidup		2	1		3
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga			1		1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			1		1
	Dinas Perhubungan		2	1		3
	Dinas Perikanan			1		1

PENGUSUL		DIKEMBALIKAN	DITOLAK	USULAN DISETUJUI	VERIFIKASI TAPD	TOTAL
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			1		1
	Dinas Pertanian dan Pangan			3		3
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2		1		3
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			2		2
Zulchaidir		1	7	13	1	22
	Dinas Lingkungan Hidup			1		1
	Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga			1		1
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			5	1	6
	Dinas Pendidikan		3			3
	Dinas Perhubungan		4	1		5
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		2		3
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			3		3
Total		12	389	413	56	870

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/usulan/usulan-pokir/monitor

5.3 RUMUSAN USULAN HASIL ASPIRASI MASYARAKAT

Rumusan usulan hasil aspirasi masyarakat merupakan wujud penerapan pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah. Aspirasi masyarakat dihimpun melalui mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat. Seluruh usulan dilakukan proses verifikasi berdasarkan kewenangan, kesesuaian dengan dokumen perencanaan, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil inventarisasi menunjukkan bahwa terdapat 508 usulan aspirasi masyarakat yang masuk pada SIPD. Sebagian besar usulan terkonsentrasi pada urusan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 367 usulan atau sekitar 72,2% dari total usulan. Selanjutnya, usulan juga ditujukan ke Dinas Pendidikan sebanyak 33 usulan (6,5%). Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebanyak 26 usulan (5,1%). Dinas Pertanian dan Pangan sebanyak 20 usulan (3,9%), serta Sekretariat Daerah sebanyak 17 usulan (3,3%). Sebagian besar usulan berasal dari masyarakat sebanyak 245 usulan (48,23%), diikuti oleh 206 usulan (40,55%) yang telah berstatus disetujui, menunjukkan bahwa sebagian besar aspirasi telah memenuhi persyaratan dan dinilai layak untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, terdapat 31 usulan (6,10%) yang berasal dari lembaga. Tingginya proporsi usulan yang telah disetujui mengindikasikan bahwa sebagian besar usulan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi kriteria perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 5. 9 Rumusan Usulan Hasil Aspirasi Masyarakat Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2027

OPD TUJUAN AKHIR	KECAMATAN	KELURAHAN	Usulan disetujui			Total
			Kelurahan / Desa	Lembaga	Masyarakat	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Damar	Sukamandi		1		1
	Manggar	Lalang		2		2
		Mekar Jaya		1		1
		Padang		9		9
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Damar	Sukamandi		1		1
	Dendang	Balok	1			1
	Gantung	Lilangan	1			1
	Manggar	Mekar Jaya		1		1

OPD TUJUAN AKHIR	KECAMATAN	KELURAHAN	Usulan disetujui			Total
			Kelurahan / Desa	Lembaga	Masyarakat	
Dinas Kesehatan	Damar	Air Kelik	1			1
		Mengkubang	1			1
	Dendang	Nyuruk	1			1
	Manggar	Padang		1		1
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Damar	Mengkubang	1			1
	Dendang	Dendang	1			1
	Gantung	Batu Penyu	1			1
		Lilangan	1			1
	Simpang Pesak	Tanjung Kelumpang	1			1
Dinas Lingkungan Hidup	Damar	Air Kelik	1			1
		Burong Mandi	1			1
		Sukamandi	1			1
	Gantung	Lilangan	1			1
	Kelapa Kampit	Buding	1			1
		Senyubuk	1			1
	Manggar	Bentaian Jaya	1			1
		Kelubi	1			1
		Kurnia Jaya	2			2
Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	Damar	Sukamandi	2			2
	Dendang	Balok	5			5
		Dendang	1			3
	Kelapa Kampit	Buding	1			1
		Mentawak				1
		Pembaharuan				1
	Manggar	Baru				1

OPD TUJUAN AKHIR	KECAMATAN	KELURAHAN	Usulan disetujui			Total
			Kelurahan / Desa	Lembaga	Masyarakat	
		Buku Limau	1			2
		Kelubi	1			2
		Lalang	1			2
		Padang		1		1
	Simpang Pesak	Tanjung Batu Itam	3			3
		Tanjung Kelumpang	1			1
	Simpang Renggiang	Lintang	1			1
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Damar	Air Kelik			2	2
		Burong Mandi			1	1
		Mempaya			11	11
		Mengkubang	1		9	10
		Sukamandi			10	10
	Dendang	Balok	5		9	14
		Dendang	5		10	15
		Jangkang	9			9
		Nyuruk	3		3	6
	Gantung	Batu Penyu	4		14	18
		Gantung	7		12	19
		Jangkar Asam	1		7	8
		Lenggang	4		5	9
		Lilangan	2			2
		Limbongan	3			3
		Selingsing	22		7	29
	Kelapa Kampit	Buding			3	3
		Cendil	2			2

OPD TUJUAN AKHIR	KECAMATAN	KELURAHAN	Usulan disetujui			Total
			Kelurahan / Desa	Lembaga	Masyarakat	
		Mayang			9	9
		Mentawak	1		7	8
		Pembaharuan	2		9	11
		Senyubuk	5		6	11
	Manggar	Baru	4		18	22
		Bentaian Jaya	2		6	8
		Kelubi	2		11	16
		Kurnia Jaya	5		6	11
		Lalang	1		9	10
		Lalang Jaya	1		11	12
		Mekar Jaya	4		9	13
		Padang	5	1	12	19
	Simpang Pesak	Dukong	1		6	7
		Simpang Pesak			2	2
		Tanjung Batu Itam	4		7	11
		Tanjung Kelumpang	5		2	7
	Simpang Renggiang	Aik Madu	3			3
		Lintang	4		10	14
		Renggiang			1	1
		Simpang Tiga			1	1
Dinas Pendidikan	Damar	Air Kelik	1			1
		Mengkubang	2			2
	Dendang	Balok	4			4
		Jangkang	3			3
		Nyuruk	1			1
	Gantung	Batu Penyu	1			1

OPD TUJUAN AKHIR	KECAMATAN	KELURAHAN	Usulan disetujui			Total
			Kelurahan / Desa	Lembaga	Masyarakat	
		Gantung	1			1
		Jangkar Asam	1			1
		Limbongan	2			2
	Kelapa Kampit	Mentawak	1			1
	Manggar	Kelubi				6
		Lalang Jaya				1
		Padang				4
	Simpang Pesak	Simpang Pesak	1			1
		Tanjung Batu Itam	2			2
		Tanjung Kelumpang	1			1
	Simpang Renggiang	Simpang Tiga	1			1
Dinas Perhubungan	Manggar	Kurnia Jaya	1			1
Dinas Perikanan	Simpang Renggiang	Aik Madu	1			1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dendang	Balok	1			1
Dinas Pertanian dan Pangan	Damar	Mempaya	2			2
	Dendang	Balok	4			4
		Jangkang	4			4
	Kelapa Kampit	Cendil	1			1
	Manggar	Kelubi	1			1
		Kurnia Jaya	4			4
	Simpang Pesak	Dukong	1			1
		Tanjung Batu Itam	3			3
	Damar	Air Kelik	1			1

OPD TUJUAN AKHIR	KECAMATAN	KELURAHAN	Usulan disetujui			Total
			Kelurahan / Desa	Lembaga	Masyarakat	
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dendang	Balok	4			4
	Simpang Pesak	Tanjung Kelumpang	1			1
Sekretariat Daerah	Gantung	Lenggang	1	1		2
	Kelapa Kampit	Mentawak		1		1
	Manggar	Baru		2		3
		Kelubi				1
		Kurnia Jaya		3		3
		Lalang		1		1
		Padang		3		3
	Simpang Pesak	Simpang Pesak		1		1
		Tanjung Kelumpang		1		2
Total			206	31	245	508

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/usulan/usulan-aspirasi/monitor

5.4 URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RKPD 2027

Dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD tahun 2027 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Belitung Timur yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pendapatan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 5. 10 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2027

KODE	PERANGKAT DAERAH
1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan
1.02.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan
1.03.2.10.1.04.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.18.0.00.0.00.13.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.22.3.26.2.19.03.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan
3.31.3.30.0.00.14.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat

KODE	PERANGKAT DAERAH
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manggar
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Gantung
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kelapa Kampit
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Simpang Pesak
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Simpang Renggiang
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Dendang
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dipandang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat yang disusun berdasarkan Perangkat Daerah disajikan pada lampiran dalam dokumen ini

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja pemerintahan daerah merupakan hasil dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang dinilai melalui aspek masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, maupun dampak. Penetapan indikator kinerja daerah dimaksudkan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhir periode perencanaan. Indikator tersebut mencerminkan akumulasi capaian outcomes atau impact dari program dan kegiatan pembangunan. Dalam proses perumusan kebijakan, terdapat tahapan yang menjadi dasar pengambilan keputusan, termasuk evaluasi atas kebijakan sebelumnya yang penting untuk perbaikan dan perencanaan kebijakan baru. RKPD sebagai kebijakan tahunan daerah berfungsi berkesinambungan, sehingga hasil evaluasi realisasi tahun lalu menjadi pijakan utama. Capaian indikator RKPD yang telah terpenuhi dapat dijadikan dasar pengembangan program baru, sedangkan target yang belum tercapai menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan berikutnya.

Indikator kinerja tidak hanya berfungsi untuk menilai capaian saat ini, tetapi juga memberikan arah mengenai prestasi yang diharapkan di masa depan. Penetapan indikator dan target dilakukan secara tegas sejak tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan, sehingga akuntabilitas pencapaian dapat terjamin. Target kinerja harus secara langsung merefleksikan sasaran pembangunan daerah dan memenuhi prinsip SMART-CI, yaitu spesifik, terukur, realistis untuk dicapai, relevan, berbatas waktu, serta berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Selain menjadi tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan, indikator kinerja juga berperan sebagai alat untuk menilai efektivitas strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Selain itu, target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2027 ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 serta hasil evaluasi atas pelaksanaan RKPD Tahun 2025, sehingga arah kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan tetap konsisten dengan rencana jangka menengah dan berlandaskan pada capaian maupun pembelajaran dari tahun sebelumnya.

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur dapat diukur melalui indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun, sehingga tercermin pencapaian kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan, maka telah dipilih dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan harus menjadi subjek penerima terbesar maanfat dari pembangunan yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan untuk penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini bertujuan dalam akumulasi pencapaian indikator rogram pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Berkenaan dengan penerapan akuntabilitas di daerah, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan di daerah diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas, dimana salah

satunya adalah asas akuntabilitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, dan berorientasi hasil.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan IKU sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam prosesnya, penentuan target RKPD Tahun 2027 turut menyelaraskan dengan ketentuan regulasi mutakhir, di antaranya penyesuaian Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dengan target sebesar 2,5 pada periode tahun 2026-2029 sesuai mandat PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030

VISI : “BELTIM NYAMAN DAN BERKEMAJUAN”

MISI 1 : "MEWUJUDKAN INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DAN KEPEMIMPINAN KOLABORATIF".

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD	KONDISI AKHIR RPJMD
			2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	
[1.1] Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	82,58	81,99	82,58	83,06	83,54	84,02	84,5	85	83,54	85
[1.1.1] Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	66,37 (B)	68,95 (B)	70,01 (BB)	71,5	73	74	75,01 (BB)	75,5	73	75,5
	Indeks SPBE	Nilai	4,16	4,16	3,5	3	3,25	3,5	3,75	4	2,5	4
	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	79,03	81,56	80	80	70	73	77	81	81,56	81
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,01	4,51	4,05	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3	4,51	4,3
	Maturitas SPIP	Level	3 (3,021)	2 (2,468)	3	3	3	3	3	3	3	3
[1.1.2] Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	83,45	71,49	83,71	83,97	84,23	84,48	84,74	85	84,23	85

MISI 2 :	"MELAHIRKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG SEHAT, CERDAS PRODUKTIF, BERAKHLAK, BERBUDAYA, DAN BAHAGIA".

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD	KONDISI AKHIR RPJMD
			2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	
[2.1] Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,62	73,99	73,98	74,35	74,71	75,1	75,49	75,89	74,71	75,89
[2.1.1] Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,69	11,78	11,79	11,89	11,99	12,09	12,14	12,19	11,99	12,19
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,99	9,03	9,13	9,28	9,42	9,57	9,61	9,71	9,42	9,71
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	84,09	21,3	85	86	87	88	89	90	87	90
[2.1.2] Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,79	74,12	73,04	73,2	73,35	73,51	73,66	73,77	73,35	73,77
	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	17,1	6,11	16,34	15,38	14,42	13,46	12,47	11,51	14,42	11,51
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen	10,32	10,32	10,32	10,12	9,92	9,72	9,52	9,32	9,92	9,32
[2.1.3] Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	Angka Kemiskinan	Angka	6,36	6,69	6,2	6,04	5,87	5,71	5,59	5,55	5,87	5,55
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	59,28	60,74	59,68	60,07	60,47	60,86	61,26	61,26	60,74	61,26
	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,55	87,69	87,83	88,1	88,38	88,65	88,73	88,93	88,38	88,93
	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	67,66	72,57	68,86	70,06	71,26	72,46	73,05	73,66	72,57	73,66
	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	52,67	55,67	54,34	56	57,67	59,33	60	61	57,67	61

MISI 3 :	"MENCIPTAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PARIWISATA, PERIKANAN, KELAUTAN, DAN EKONOMI KREATIF, SERTA MEMPERKUAT KOLABORASI ANTAR PELAKU PEMBANGUNAN".

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD	KONDISI AKHIR RPJMD
			2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	
[3.1] Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-0.03	4,3	3,05	3,08	3,36	3,86	4,36	4,86	4,30 – 4,65	4.86
	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Ribu Rupiah	82.608,71	89.141,78	83.940,00	87.140,00	90.350,00	93.550,00	96.750,00	99.950,00	90.350 – 94.470	99.950,00
	Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI)	Nilai	26,49	127,77	26,49	29,06	31,62	34,19	36,75	39,32	127,78	39,32
	Rasio Gini	Nilai	0,251	0,231	0,225	0,217	0,208	0,201	0,192	0,184	0,210 – 0,230	0,184
[3.1.1] Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rupiah	1.617.560	1.666.810	3.168.130	3.400.430	3.632.720	3.865.020	4.097.310	4.329.610	3.632.720	4.329.610
	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Juta Rupiah	181.320	196.150	191.390	209.100	227.160	237.310	247.308	265.090	227.160	265.090
	PDRB Industri Pengolahan	Juta Rupiah	1.066.580	1.107.420	1.146.850	1.192.500	1.272.770	1.318.420	1.398.690	1.444.340	1.272.770	1.444.340
	Tingkat Inflasi	Persen	1,38	2,69	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
[3.1.2] Meningkatnya pertumbuhan investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	1.068.106	1.073.894,75	450.000	468.000	494.000	520.000	546.000	572.000	1.155.000	572.000
[3.1.3] Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,63	3,05	2,6	2,33	2,26	2,19	1,54	1,47	2,63 – 2,92	1,47

MISI 4 :	"MENINGKATKAN DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN MEMADAI UNTUK PEMERATAAN KESEJAHTERAAN".

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD	KONDISI AKHIR RPJMD
			2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	
[4.1] Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Nilai	NA	69,36	73,925	77,235	80,18	80,7	81,22	81,295	80,18	81,295
[4.1.1] Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Angka	63,1	74,8	75,83	75,83	80,67	80,67	80,67	80,67	80,67	80,67
[4.1.2] Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	73,53	63,92	72,02	78,64	79,69	80,73	81,77	81,92	79,69	81,92

MISI 5 :	"OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BIJAKSANA, BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN BERKELANJUTAN".

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD	KONDISI AKHIR RPJMD
			2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	
[5.1] Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	NA	NA	17,67	18,39	19,11	19,83	20,55	21,27	18,39	21,27
[5.1.1] Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,76	76,27	76,34	76,51	76,68	76,85	77,02	77,19	76,68	77,19
	Indeks Risiko Bencana	Angka	152,06	112,36	152,06	150,39	148,72	147,05	145,38	143,71	112,36	143,71

Sumber : RPJMD Kab. Belitung Timur Tahun 2025-2029

6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Dalam upaya membangun pemerintahan yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai landasan untuk pengukuran keberhasilan pembangunan selama masa RPJMD 2025–2029. IKD difungsikan sebagai alat kontrol strategis untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perangkat daerah berjalan selaras dengan visi dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaan program dapat menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan. IKD sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pembangunan. Melalui pengukuran berbasis IKD, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat mengidentifikasi hambatan, menetapkan langkah perbaikan, dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. IKD juga menjadi dasar dalam menilai kinerja individu maupun kelembagaan di lingkup perangkat daerah.

Indikator yang digunakan mencakup aspek makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang semuanya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. IKD juga menyoroti isu-isu strategis lainnya yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk prevalensi stunting, capaian layanan dasar, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dalam penerapannya, IKD tidak hanya menjadi instrumen teknokratis, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen mengembangkan pendekatan yang sensitif terhadap gender serta memperluas partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan dan evaluasi. Dengan demikian, IKD berkontribusi dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

IKD diintegrasikan dengan sistem digital seperti Satu Data Indonesia dan SIPD untuk meningkatkan kualitas tata kelola data dan memperkuat dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Hal ini memungkinkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaporan capaian pembangunan, sekaligus menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola di masa mendatang. IKD menjadi fondasi penting dalam membentuk arah kebijakan daerah yang adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Belitung Timur sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. 2 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	76,11	62,29	62,56	62,83	63,1	63,37	63,64	76,11
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	10,32	10,32	10,12	9,92	9,72	9,52	9,32	9.92
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	100	81,41	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	76,27	76,34	76,51	76,68	76,85	77,02	77,19	76,68
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,74	25	29,69	34,38	39,06	43,75	43,75	34,38
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	145,58	343,2	392,74	442,28	491,82	541,36	590,9	442,28
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	7,49	10	14,38	18,75	23,13	27,5	27,5	18,75
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	18,39	17,67	18,39	19,11	19,83	20,55	21,27	18,39
9	Indeks Risiko Bencana	Nilai	112,36	152,06	150,39	148,72	147,05	145,38	143,71	112,36
10	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,48	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,5
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,72	1,7	1,73	1,76	1,79	1,81	1,83	1,76
12	Rasio Jenis Kelamin	%	105,73	106	106	106	106	106	106	106
13	Kepadatan Penduduk	Orang/km≤	53,23	54	55	56	57	58	59	56
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,3	3,05	3,08	3,36	3,86	4,36	4,86	4,30-4,65
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,69	6,2	6,04	5,87	5,71	5,59	5,5	5,87
3	PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	89.762	83.940	87.140	90.350	93.550	96.750	99.950	90350-94470
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,05	2,6	2,33	2,26	2,19	1,54	1,47	2,63-2,92
5	Gini Rasio	Nilai	0,231	0,225	0,217	0,208	0,201	0,192	0,184	0,210-0,230
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,99	73,98	74,35	74,71	75,1	75,49	75,89	74,71

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,12	73,04	73,2	73,35	73,51	73,66	73,77	74,12
8	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,31	0,315	0,32	0,325	0,33	0,335	0,34	0,325
9	Prevalensi Stunting	%	6,11	16,34	15,38	14,42	13,46	12,47	11,51	14,42
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,03	9,13	9,28	9,42	9,57	9,61	9,71	9,42
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,78	11,79	11,89	11,99	12,09	12,14	12,19	11,99
12	Skor Kemampuan Literasi SD	%	62,21	64,55	67,05	69,55	72,05	74,55	77,05	69,55
13	Skor Kemampuan Literasi SMP	%	77,01	78,16	79,26	80,36	81,46	83,66	83,66	80,36
14	Skor Kemampuan Numerasi SD	%	52,41	55,23	58,13	61,03	63,93	66,83	69,73	61,03
15	Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	65,76	67,31	68,81	70,31	71,81	73,31	74,81	70,31
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	21,7	85	86	87	88	89	90	87
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	23	80	80	81	82	83	84	81
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	85,41	76,47	76,47	77,15	77,82	78,5	79,18	85,41
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	60,74	59,68	60,07	60,47	60,86	61,26	61,26	60,74
20	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	72,57	68,86	70,06	71,26	72,46	73,05	73,66	72,57
21	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	77,8	69,5	69,5	71,41	73,31	75,22	77,13	77,8
22	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,702	0,46	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	0,45
23	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,69	87,83	88,1	88,38	88,65	88,73	88,93	88,38
24	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,67	54,34	56	57,67	59,33	60	61	57,67
25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Informal	Persen	21,13	1	1,56	2,12	2,68	3,25	3,25	21,13
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Angka Ketergantungan	%	43	42,48	42,49	45,68	44,18	44,14	44,14	45,68
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	20,96	23,75	24,64	25,53	26,42	27,31	27,31	25,53
3	Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,91	2,91	2,91	2,95	2,98	3,02	3,06	2,95

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Rasio Kewirausahaan	%	6,50	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	6,50
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,1	70,64	70,72	70,8	70,88	70,96	71,04	70,8
6	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai	0	72,08	73,36	74,64	75,92	77,2	78,48	74,64
7	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Nilai	127,778	26,49	28	30	32	34	36,75	127,778
8	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	0	23	25.18%	27.36%	29.54%	31.72%	33.9%	27.36%
9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	6,06	6,3	6,6	6,77	6,88	6,88	6,88	6,77
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar Rupiah	3.253,84	3.308,56	3.622,29	3.871,72	3.988,37	4.115,99	4.429,72	3.871,72
11	Ekspor Barang dan Jasa	Miliar Rupiah	3.549,58	547,25	606,12	664,99	723,86	782,73	841,6	3.549,58
12	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	63,92	73,53	72,02	78,64	79,69	80,73	81,77	78,64
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	0	53,5	55,507	57,514	59,521	61,528	61,53	57,514
14	Persentase Desa Mandiri	%	71,59	51,28	64,1	76,92	89,74	100	100	76,92
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,48	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
16	Tingkat Inflasi	%	2,69	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	99,40	97,75	97,89	98,03	98,17	98,31	98,31	99,40
2	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,51	4,05	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3	4,51
3	Indeks Merit Sistem	Nilai	252	257	264,15	271,3	278,45	292,75	292,75	271,3
4	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Capaian Aksi HAM	Angka	87	89,2	90	90,5	91	91,5	92	90,5
6	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	81,91	70	70	70	73	73	73	81,91
7	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	56,08	53,01	53,01	53,01	53,01	53,01	53,01	56,08
8	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,35	3,52	3,7	3,88	4,06	4,24	4,42	3,88

Sumber: RPJMD Kab. Belitung Timur Tahun 2025-2029

6.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam membangun daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dapat diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan tersebut harus memberikan manfaat (*benefit*) yang diperoleh dari indikator hasil (*outcome*) yang akan terasasetelah beberapa waktu kemudian dan indikator kinerja juga dapat memberikan dampak (*impact*) atau adanya perubahan dari hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penggunaan indikator kinerja yang memberikan manfaat dan dampak signifikan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Indikator ini disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren, yang menjadi kewenangan daerah, terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Sementara itu, urusan pilihan meliputi sektor-sektor yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi daerah, seperti pariwisata, pertanian, dan kelautan.

Aspek-aspek kinerja yang diukur melalui IKK mencerminkan kondisi faktual daerah, termasuk keberhasilan dalam pembangunan, optimalisasi pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Belitung Timur sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. 3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
APK PAUD	Persentase	86,47	87	87	87	88	89	90	91	88
APK SD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
APK SMP	Persentase	91,76	95,5	93	93	94	95	95	97	95,5
APS (5-6) PAUD	Persentase	94,81	56,02	96,61	98,41	100	100	100	100	100
APS (7-15) SD/SMP	Persentase	97,09	98,24	97,2	97,31	97,42	97,54	97,65	97,76	98,24
APS (7-18) Kesetaraan Kesetaraan	Persentase	8,69	6,18	9,45	10,21	10,97	11,74	12,5	13,26	10,97
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persentase	56,99	0	56,99	58	59,015	60,025	61,05	61,05	59,015
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persentase	30,6	0	30,6	32,59	34,58	36,57	38,57	38,57	34,58
Persentase sekolah Dikdas yang menerapkan kurikulum Mulok	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan	Persentase	-	89,68	88	92	94	95	96	96	94
Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	Persentase	92,81	99	93	95	96	96	98	98	99
Persentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra daerah	Persentase	-	50	50	50	55	60	65	70	55
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD	Persentase	75,4	100	100	100	100	100	100	100	100
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD	Persentase	76,53	89,78	85,28	85,78	86,28	86,78	87,28	87,78	89,78
Iklim Inklusivitas SD	Angka	58,46	55,32	60,96	63,46	65,96	68,46	70,96	73,46	65,96
Iklim Inklusivitas SMP	Angka	62,68	63,78	65,08	67,48	69,88	72,28	74,68	77,08	69,88

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Iklim Keamanan SD	Angka	74,83	70,69	75,73	76,63	77,53	78,43	79,33	80,23	77,53
Iklim Keamanan SMP	Angka	74,68	74,84	76,18	77,68	79,18	80,68	82,18	83,68	79,18
Iklim Kebinekaan SMP	Angka	74,32	70	75,32	76,32	77,32	78,32	79,32	80,32	77,32
Iklim Kebinekaan SD	Angka	71,63	64,8	72,63	73,63	74,63	75,63	76,63	77,63	74,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	119	240	119	119	119	60	60	60	119
Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	Angka	12,3	10,8	12,3	11,87	11,44	11,01	10,58	10,58	10,8
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persentase	17,1	17,1	16,34	15,38	14,42	13,46	12,47	11,51	14,42
Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	Nilai	0,82	0,82	0,86	0,9	0,94	0,97	1,01	1,01	0,94
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi Paripurna	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persentase	67,9	83,99	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Ibu hamil KEK mendapat Makanan Tambahan	Persentase	67,8	63	70	75	80	85	90	90	80
Persentase Ibu hamil menerima Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	Persentase	65,1	83,88	70	75	80	85	90	90	83,88
Persentase Ibu hamil menerima makanan bergizi seimbang	Persentase	NA	88,65	70	75	80	85	90	90	88,65
Persentase Ibu hamil memeriksakan kehamilannya 6 kali selama masa kehamilan	Persentase	74	83,99	80	82	85	88	90	90	85
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase	78,73	90,45	100	100	100	100	100	100	100
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persentase	77,19	89,31	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase	92,07	85,12	100	100	100	100	100	100	100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	96,24	100	100	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase anak baru lahir yang mendapatkan inisiasi menyusu dini	Persentase	66,22	76,16	68	70	72	74	75	75	76,16
Persentase anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif	Persentase	68,6	75,2	73	76	79	82	85	85	79
Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI);	Persentase	60,9	88,9	73	76	79	82	85	85	88,9
Persentase anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI)	Persentase	58,95	54,91	61	6	67	70	73	73	67
Persentase anak usia 0-23 bulan gizi buruk yang mendapatkan tatalaksana gizi buruk	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persentase	91,92	95,42	93	94	95	96	97	97	95
Persentase anak usia 0-23 bulan gizi kurang yang mendapat asupan gizi	Persentase	65	81,27	68	70	75	80	85	85	81,27
Persentase anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi rutin lengkap	Persentase	73	87,7	75	80	85	95	100	100	85
Persentase anak usia 0-23 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan obat cacing;	Persentase	100	85	100	100	100	100	100	100	100
Persentase anak usia 24-59 bulan gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk	Persentase	65	100	68	70	75	80	85	85	100
Persentase anak usia 24-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembanganya	Persentase	91,92	81,99	93	94	95	96	97	97	95
Persentase anak usia 24-59 bulan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persentase	65	92,86	68	70	75	80	85	85	92,86
Persentase anak usia 24-59 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase temuan kasus pneumonia pada anak usia 24-59 bulan	Persentase	40	46,5	40	40	40	40	40	40	46,5
Persentase anak usia 24-59 bulan yang mendapatkan obat cacing	Persentase	100	73,3	100	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Remaja Putri yang mengonsumsi TTD	Persentase	61,3	90,4	65	67	70	75	80	80	
Persentase Remaja putri yang mendapatkan pemeriksaan anemia	Persentase	95,6	99,8	96	97	98	99	100	100	99,8
Persentase Calon Pengantin yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan pra nikah	Persentase	86,7	82,73	88	89	90	91	92	92	90
Persentase Calon Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	Persentase	74,58	82,73	80	85	90	95	100	100	90
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	63,96	96,56	100	100	100	100	100	100	100
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	80,37	92,51	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	94,93	85,97	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	88,92	97,71	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase	102,99	106,31	100	100	100	100	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase	103,09	134	100	100	100	100	100	100	100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase	81,2	88	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase	65	78,45	78	80	82	84	85	87	82
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) %	Persentase	98,23	99,71	98,6	99	99	100	100	100	99,71
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persentase	22,46	90,95	22,46	27,295	32,13	36,965	41,8	41,8	90,95
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persentase	100	72,88	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Penilaian Capaian Tatanan Kehidupan Sehat Mandiri	Persentase	71	78,45	71	81	81	81	91	91	81

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Cakupan balita wasting yang ditangani	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	71	100	75	80	85	85	90	95	100
Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	Persentase	NA	50	50	50	50	50	50	50	50
Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri (Persen)	Persentase	NA	46,15	40	50	65	75	80	80	65
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	37,93	37,93	37,93	37,93	38	38	39	39	38
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	10,26	10,26	12,26	12,26	14,26	16,26	18,26	18,26	14,26
Persentase irigasi dalam kondisi baik, luas irigasi yang dapat berfungsi dengan baik dan efisiensi penggunaan air irigasi	Persentase	52,9	50,25	52,9	57,9	62,9	67,9	72,9	72,9	62,9
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persentase	NA	42	38	40,57	47	50	55	55	47
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	8	8	8	16	21	26	30	30	21
Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	NA	78	87	87,35	88,27	89,18	90,09	90,09	88,27
Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata dan dipelihara	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	79,5	80	79,7	79,9	80,1	80,3	80,5	80,7	80,1
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase	NA	34	37,5	40,62	44,73	51,53	53,18	53,18	44,73
Persentase kesesuaian tata ruang	Persentase	NA	NA	70	75	80	85	85	85	80

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	Angka	0,55	0,55	0,624	0,698	0,772	0,846	0,92	0,92	0,772
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase	58,24	60,3	59,1	59,96	60,82	61,68	62,54	62,54	60,82
Persentase permukiman yang tertata	Persentase	99,37	99,4	99,61	99,71	99,76	99,81	99,86	99,86	99,76
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Persentase	4,78	2,11	2,06	2,01	1,96	1,91	1,86	1,86	1,96
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	Persentase	99,37	99,36	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	60	71,79	100	100	100	100	100	100	100
Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	50	50	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	NA	0	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang tersedia	Persentase	NA	75	83	100	100	100	100	100	100
Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	Persentase	100	12	12	23	27	27	12	12	27
Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	Persentase	NA	62,44	62,44	72,5	80,5	85,5	92,5	100	80,5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
Persentase Pelaksanaan RAD PUG	Persentase	80	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keluarga yang terlayani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Desa Ramah Anak	Persentase	2,56	100	20,51	38,46	56,41	74,36	94,87	100	100
Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persentase	88,89	93,75	89,47	90	90,23	90,75	91,05	91,05	93,75
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	3,72	4,51	4,28	4,73	9,04	9,5	10,09	10,09	9,04
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persentase	73,33	80,51	76,19	77,27	78,26	79,17	80	80	80,51
Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pekerja	2.877	6.222	2.716	2.736	2.756	2.776	2.796	2.796	6.222
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	59,28	19,44	59,78	59,78	59,78	59,78	59,78	59,78	59,78
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	32,14	21,67	32,4	33	33	34	35	35	33

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Usaha Mikro yang mempunyai izin usaha	Persentase	7,58	0,82	8,26	8,26	9,58	10,22	10,86	10,86	9,58
Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru Usaha Mikro	Persentase	8,2	0,8	8,26	8,92	9,58	10,22	10,86	10,86	9,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	85,3	85,5	85,4	85,9	86,4	86,9	87,4	87,9	86,4
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	NA	0	17,94	15,38	15,38	12,82	10,26	7,69	15,38
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	91,86	90,04	91,86	92	92,5	93	93,5	94	92,5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Air	Nilai	54	76,42	75,26	75,46	75,66	75,86	76,06	76,08	76,42
Indeks Kualitas Udara	Nilai	92,33	83,29	84,71	84,91	85,11	85,31	85,51	86	85,11
Indeks Kualitas Lahan	Nilai	45,95	63,05	62,7	62,77	62,84	62,91	62,98	63	63,05
Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase	32,5	37	32,5	32,5	52,5	62,5	72,5	72,5	52,5
Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Persentase	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Perizinan Berusaha dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan Kabupaten	Persentase	35	90	35	40	45	50	55	60	90
Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase	5	5	5	10	15	20	25	25	15
Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti di Kabupaten	Persentase	0	100	80	80	80	90	90	90	100
Persentase pengelolaan sampah	Persentase	67,85	69	68,85	69,85	69,85	69,85	69,85	69,85	69,85

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	7,36	7,07	30	40	50	60	70	75	50
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	85,33	86,45	85,45	85,5	85,55	85,6	85,65	85,7	86,45
Rasio Pasangan Non Muslim berakta kawin	Nilai	0,821	0,829	0,822	0,823	0,824	0,825	0,826	0,827	0,829
Rasio Pasangan non muslim berakta cerai	Nilai	0,431	0,452	0,432	0,433	0,434	0,435	0,436	0,437	0,452
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi penduduk yang meninggal	Persentase	99,95	100	99,96	99,97	99,98	99,99	99,99	99,99	100
Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi penduduk usia 0-17 tahun	Persentase	99,71	99,77	99,82	99,83	99,84	99,85	99,86	99,87	99,84
Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang menikah	Persentase	82,12	82,90	82,22	82,32	82,42	82,52	82,62	82,72	82,90
Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan penduduk yang bercerai	Persentase	43,12	45,22	43,22	43,32	43,42	43,52	43,62	43,72	45,22
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kerjasama antar desa terfasilitasi	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang diberdayakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penataan desa yang terfasilitasi	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Nilai	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Persentase peserta KB aktif	Persentase	73,9	78,62	75,4	77	78	80	81	83	78
Cakupan Bina Keluarga Aktif	Persentase	80	80	80	80	82	84	86	88	82
Persentase Ibu Nifas menerima pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Persentase	73,9	41,58	75,4	77	78	80	81	81	78

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase kelompok sasaran Pendampingan keluarga 1000 HPK	Persentase	70	70	70	70	73	75	77	77	73
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
Konektivitas Darat	km	471,5	510,3	510,3	510,3	590,3	590,3	590,3	590,3	590,3
Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	15	15,08	15,02	15,6	15,8	15,9	16	16,1	15,8
Konektivitas Laut	unit	2	2	2	2	3	3	3	3	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
Tingkat Kematangan Aspek TIK / Teknologi Digital	Angka	3	3	3	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks SPBE	Nilai	4,16	4,16	3,5	3	3,25	3,5	3,75	4	3,25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,76	2,76	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,76
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Level	Level III	Level II	Level II	Level II	Level II	Level II	Level II	Level II	Level II
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA)	Investor	345	384	365	385	405	425	445	445	405
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persentase	1,85	-61,82	2	2	2	2	2	2	2
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase	NA	97,7	84	85	86	87	88	88	97,7
Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
Persentase wirausaha muda	Persentase	3,1	2,77	2,75	3	3	4	4	4	3
Persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persentase	24,36	24,1	25	26	27	28	30	32	27
Persentase pembinaan cabang keolahragaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase organisasi pramuka aktif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	65	65	65	67	70	72	75	75	70
Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	55	25	35	35	62	62	67	67	62
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	15	25	25	25	65	65	67	67	65
Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persentase	15	25	25	25	70	72	75	75	70
Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persentase	65	60	60	60	65	70	75	75	65
Persentase kunjungan wisatawan ke museum	Persentase	65	70	70	65	65	70	75	75	70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
Persentase Perpustakaan yang dibina	Persentase	35	30,28	36	50	60	65	75	75,5	60
Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	Persentase	20	21	21	25	30	40	50	51	30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persentase	60	100	60,5	62	65	67	70	72	100
Tingkat digitalisasi arsip	Nilai	90	61,09	90,9	91	91,1	91,15	91,2	91,25	91,1
Nilai Pengawasan kearsipan eksternal	Nilai	87	87,46	87	87,05	87,1	87,15	87,2	87,25	87,46
Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	Persentase	75	100	75,05	75,2	76	76,55	77	78	100
Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Persentase	66	67	67	68	69	70	73	75	69
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	NA	76,39	3	3	3	3	4	5	76,39
Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	NA	229,73	3	3	3	3	3	3	229,73
Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	NA	24,09	3	3	5	5	5	5	24,09
Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persentase	NA	20,07	15	15	15	15	15	15	20,07
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase	NA	14,89	3	3	3	3	5	5	14,89
Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	NA	25	10	10	10	20	20	20	25
Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	NA	20	20	20	20	20	20	20	20
Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	NA	30	30	30	30	30	30	30	30
Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	NA	100	20	20	20	20	20	20	20
Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	NA	3,3	5	5	5	5	5	5	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	-44	21,69	15	15	15	15	15	15	15
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	NA	40	40	40	80	80	80	80	80
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	NA	NA	NA	10	20	20	30	30	20
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	NA	NA	NA	NA	10	10	10	10	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	41.242,91	41.861,552	43.966	41.864,00	42.073,00	42.283,00	42.495,00	42.707,00	42.073,00
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.628,18	1.435,028	1.800	2.733,31	2.785,87	2.838,43	2.891	2.943,56	2.785,87
Luasan Kawasan Konservasi	Ha	124.320,70	124.320,70	124.320,70	124.320,70	124.320,70	124.320,70	124.320,70	124.320,70	124.320,70

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/ tahun	68,54	69,76	67	70,61	71,67	72,75	73,84	74,94	71,67
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	0	0	40	45	50	55	60	60	50
Nilai Ekspor Barang	USD	264.700.000	264.700.000	271.012.182,91	289.983.035,71	310.281.848,21	332.001.577,58	355.241.688,01	355.241.688,01	310.281.848,21
Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase	3,449	6,07	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	6,07
Indeks Tertib Ukur	Nilai	66,71	61,47	68	69	70	71	72	72	70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	Persentase	56,68	2,02	5,95	3	3	3	3	3	3
Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	100	1,37	32,5	3	3	3	3	3	3
Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	100	3,8	66,67	3	3	3	3	3	3
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
SEKRETARIAT DAERAH										
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kebijakan pemerintahan dan kerjasama yang difasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kebijakan Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Indeks Tata kelola Pengadaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SEKRETARIAT DPRD										

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase Rancangan Perda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
PERENCANAAN										
Ketepatan waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Persentase	100	66,64	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Program RKPD ke dalam APBD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RPJMD ke dalam RKPD Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RPJMD ke dalam RKPD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RPJMD ke dalam RKPD Pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persentase	100	80	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	54,5	48,5	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	NA	0	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	NA	NA	-	-	10	10	10	10	10
KEUANGAN										
Ketepatan waktu penyusunan APBD	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Realisasi Anggaran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase aset daerah yang telah bersertifikat	Persentase	95	95	95	96	96	96	96	96	96
Persentase aset daerah yang tercatat dalam neraca daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase	12	15	13	14%	15%	15%	15%	15%	15%
KEPEGAWAIAN										
Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi, dan Evaluasi Kinerja ASN yang Sesuai dengan Prosedur dan Sasaran yang Ditentukan	Persentase	99,97	100	100	100	100	100	100	100	100
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persentase	8,33	91,71	10	12	14	16	18	20	91,71
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
INSPEKTORAT DAERAH										
Persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan	Persentase	80	85	85	85	90	90	95	95	90
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Persentase	93,54	93,71	93,6	93,64	93,69	93,74	93,79	93,84	93,71
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (Irban Kesra, Irban Pemerintahan, Irban Ekbang dan Irban Investigasi) (Persen)	Persentase	82,93	88	82,98	83,03	83,08	83,15	83,2	83,25	88
Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Tindak Lanjut Hasil Konsultansi	Persentase	80	82	82	85	90	95	95	95	90

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Peringkat Capaian Atas Target Rencana Aksi Program pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) pada area Pengawasan Tingkat Provinsi	Peringkat	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Persentase Perangkat Daerah ZI yang ditingkatkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase	2	4,2	6	6	6	9	9	9	6
UNSUR KEWILAYAHAN										
KECAMATAN DAMAR										
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,47	84,52	88,5	90	92	94	95	96	92
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN DENDANG										
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	90,37	80	81	82	83	84	85	90,37
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN GANTUNG										
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,51	87,56	88,85	87,5	88	88,05	88,1	88,15	88
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN KELAPA KAMPIT										
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	88	88	88	88.20	88.30	88.50	88.60	88.20
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN MANGGAR										
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91,44	93,65	91,4	91.5	91.6	91.7	91.8	91.9	93,65
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN SIMPANG PESAK										

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	92,39	82	83	84	85	86	87	92,39
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG										
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,05	91,67	84,05	85,38	85,4	85,5	85,55	85,6	91,67
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
PEMERINTAHAN UMUM										
Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	70	85	70	70	75	80	85	90	85
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	70	75	70	70	75	80	85	85	75

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI		TARGET RPJMD						TARGET RKPD 2027
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	70	75	70	70	75	80	85	85	75
Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	70	75	70	70	75	80	85	85	75

Sumber: RPJMD Kab. Belitung Timur Tahun 2025-2029

6.4 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif dengan harapkan akan meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. SPM digunakan sebagai input/ bahan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM ke dalam RPJMD dan rencana Strategis PD. Pemerintah daerah menyusun target tahunan pencapaian SPM ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Rencana pencapaian SPM tersebut perlu disinkronkan dan diintegrasikan dalam RPJMD dan renstra PD. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam RKPD, kebijakan umum anggaran (KUA) renja dan anggaran OPD (RKA-OPD) dengan memperhatikan kemampuan daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik. Penetapan target SPM Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6. 4 Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN		TARGET TAHUNAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
A.	**PENDIDIKAN**									
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	persen	97,23	96,51	100	100	100	100	100	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD / Jumlah seluruh penduduk usia 5-6 tahun
2.	Pendidikan Dasar	persen	96,11	95,70	100	100	100	100	100	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan dasar / Jumlah seluruh penduduk usia 7-15 tahun
3.	Pendidikan kesetaraan	persen	57,09	66,43	100	100	100	100	100	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan / Jumlah seluruh penduduk usia 7-18 tahun yang wajib mengikuti pendidikan kesetaraan
B.	**SOSIAL**									
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	persen	89,23	100	100	100	100	100	100	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapat pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penyandang disabilitas terlantar di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	persen	88,33	100	100	100	100	100	100	Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah anak terlantar di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	persen	89,23	100	100	100	100	100	100	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah lanjut usia terlantar di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN		TARGET TAHUNAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	persen	100	3,3	100	100	100	100	100	Jumlah tuna sosial terlantar yang mendapat pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar terlantar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah tuna sosial terlantar di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	77,03	100	100	100	100	100	100	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah warga negara yang mejadi korban bencana kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
C.	**KESEHATAN**									
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	75,67	87,11	100	100	100	100	100	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	persen	82,98	92,32	100	100	100	100	100	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan / Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	82,39	91,45	100	100	100	100	100	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar / Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	persen	93,65	89,20	100	100	100	100	100	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN		TARGET TAHUNAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	persen	100	97,32	100	100	100	100	100	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar / Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	persen	96,62	97,29	100	100	100	100	100	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	persen	85,11	86,10	100	100	100	100	100	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah kabupaten/kota waktu satu tahun yang sama
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persen	95,95	88,78	100	100	100	100	100	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah semus penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	persen	91,14	96,50	100	100	100	100	100	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN		TARGET TAHUNAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
11.	Pelayanan orang terduga tuberkulosis	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	persen	84,96	90,65	100	100	100	100	100	Jumlah orang berisiko terinvenksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
D.	**TIBUMLINMAS**									
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	persen	93,99	90	100	100	100	100	100	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda kabupaten/kota serta Perkada
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	persen	85	90	100	100	100	100	100	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Jumlah warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan informasi rawan bencana di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN		TARGET TAHUNAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	92,50	100	100	100	100	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (damkar)	persen	94,78	95,90	100	100	100	100	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran / Jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
E.	**PEKERJAAN UMUM**									
1.	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan air minum layak / Jumlah masyarakat yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
2.	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	persen	100	98,01	100	100	100	100	100	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan air limbah domestik / Jumlah masyarakat yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
F.	**PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN**									
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	persen	92,31	100	100	100	100	100	100	Jumlah rumah korban bencana yang telah memperoleh rumah layak huni / jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN		TARGET TAHUNAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	persen	92,31	100	100	100	100	100	100	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni / Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang seharusnya memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Sumber: Aplikasi e-SPM Kemendagri, Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur juga diselaraskan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027.

Dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan, maka diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. SPM digunakan sebagai input/ bahan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM ke dalam RPJMD dan rencana Strategis PD.

Pemerintah daerah menyusun target tahunan pencapaian SPM ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Rencana pencapaian SPM tersebut perlu disinkronkan dan diintegrasikan dalam RPJMD dan enstra PD. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam RKPD, kebijakan umum anggaran (KUA) renja dan anggaran PD (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5 (lima) Unsur Penunjang Pemerintahan. Keberhasilan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) memerlukan dukungan dan perhatian dari seluruh stakeholder yang terkait. Selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga diperlukan peran aktif dari aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan di Kabupaten Belitung Timur. Diharapkan dengan tercapainya seluruh target Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kabupaten Belitung Timur dapat meningkatkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

BAB VII
PENUTUP

7.1 KESIMPULAN STRATEGIS

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 merupakan landasan krusial untuk memastikan percepatan pencapaian visi daerah, yakni mewujudkan masyarakat **Beltim Nyaman dan Berkemajuan**. Dengan mengusung tema "Akselerasi Fondasi Digital dan Penguatan Kesejahteraan Merata Berbasis Potensi Lokal", dokumen ini disusun sebagai jembatan strategis menuju tahun-tahun puncak pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan RKPD 2027 ini difokuskan sebagai instrumen utama dalam mengeksekusi Program Unggulan dan Program Andalan (PU-PA). Integrasi antara pendanaan daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memantapkan peran Kabupaten Belitung Timur sebagai gerbang timur yang tangguh berbasis *geo-ecotourism* dan agromaritim.

7.2 KEPATUHAN FISKAL DAN MASA TRANSISI REFORMASI ANGGARAN (UU HKPD)

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian target pembangunan di tengah dinamika ruang fiskal, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur merumuskan postur APBD 2027 yang adaptif, ekspansif, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Total proyeksi Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp863.349.305.340. Komitmen tata kelola keuangan ini ditunjukkan melalui:

- **Pengendalian Belanja Pegawai pada Masa Transisi:** Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar Rp434.976.382.822. Dengan mengecualikan alokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) sebesar Rp50.000.000.000, maka belanja pegawai riil yang diperhitungkan adalah sebesar **Rp384.976.382.822**, atau memakan proporsi **44,59%** dari total belanja daerah, turun dari alokasi belanja pegawai di tahun 2026 sebesar **53%**. Mengingat penganggaran ini dialokasikan murni berdasarkan pemenuhan kebutuhan riil aparatur, batas maksimal 30% sebagaimana diamanatkan Pasal 146 UU HKPD masih berada dalam masa transisi penyesuaian. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus melakukan rasionalisasi dan efisiensi bertahap tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik, sembari mempedomani arah kebijakan relaksasi pada regulasi pusat terkait belanja pegawai.

- **Optimalisasi Belanja Modal dan Dukungan Proyek Strategis:** Untuk menjamin penyelesaian target infrastruktur daerah dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (ProSN), alokasi Belanja Modal didorong mencapai Rp102.702.207.236. Investasi produktif ini diarahkan secara presisi, di antaranya untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp66.712.907.500 serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp19.657.788.576.
- **Kebijakan Pinjaman Daerah sebagai Tuas Pengungkit Pembangunan:** Guna menutup defisit anggaran dan mengamankan kapasitas likuiditas untuk percepatan penyelesaian proyek strategis daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur merencanakan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp30.000.000.000. Pengelolaan pinjaman ini dilakukan secara terukur dan akuntabel, yang diiringi dengan kewajiban alokasi Belanja Bunga sebesar Rp709.250.000 pada pos Belanja Operasi guna menjaga rasio solvabilitas keuangan daerah.

7.3 KAIDAH PELAKSANAAN DAN KEBERLANJUTAN

Keberhasilan implementasi RKPD Tahun 2027 sangat ditentukan oleh sinergitas dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal program di lapangan. Oleh karena itu, ditekankan beberapa kaidah utama pelaksanaan:

- **Amanat Dokumen:** RKPD 2027 merupakan pedoman mutlak bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta menjadi landasan yuridis dalam perumusan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027.
- **Sinergitas Pendanaan**: Diperlukan koordinasi lintas sektor yang intensif untuk memastikan seluruh sumber pendanaan—baik APBD Kabupaten, Pendapatan Transfer (Pusat dan Antar Daerah), maupun pembiayaan inovatif lainnya—dapat terkolaborasi secara utuh guna membiayai kelancaran PU-PA.
- **Pengawalan Aspirasi dan Evaluasi Terintegrasi:** Untuk memastikan dokumen ini tetap responsif, usulan partisipatif yang telah diakomodasi akan terus dikawal realisasinya melalui pemanfaatan sistem. Sementara itu, proses Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) terhadap seluruh capaian indikator teknokratik akan dipantau secara ketat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), guna menjamin setiap alokasi anggaran memberikan dampak optimal bagi terwujudnya visi pembangunan daerah.

Demikian RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan masyarakat Belitung Timur yang berdaya saing, mandiri, dan sejahtera melalui akselerasi ekonomi digital yang berbasis pada kekayaan potensi lokal.

Bupati Belitung Timur,

ttd

Kamarudin Muten

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ILANNUR FITRI, S.H., LLM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19800714 201001 2 019